BUNGA RAMPAI SEJARAH MALUKU (I)

INA

22;-
1011

GA PENELITIAN SEJARAH MALUKU

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.
Tanggal : 10 Mei 2012
No. Induk : 42758/PN-MUSEUM/'12
BIB - ID :
Beli / Hadiah : Ex. Museum

BUNGA RAMPAI SEJARAH MALUKU (I)

Rp177,300

PENYUSUN :

Paramita R. Abdurrachman

R. Z. Leirissa

C. P. F.Luhulima

PERPUSTAKAAN NASIONAL JAKARTA

LEMBAGA PENELITIAN SEJARAH MALUKU

Jakarta, 1973

405|1974

Dicetak Oleh:
Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional-LIPI
JAKARTA

D A F T A R I S I

Kata Pengantar v

Kata Pengantar pada cetakan ke 2 vii

Bab I. Tiga Pengertian Istilah Maluku dalam Sejarah.
oleh R.Z. Leirissa 1

Bab II. Sekelumit Sejarah Tanah Hitu dan Nusa Laut
serta Struktur Pemerintahannya Sampai
Pertengahan Abad Ketujuhbelas.
oleh Z.J. Manusama 11

Bab III. Peninggalan-Peninggalan Yang Berciri Portugis
di Ambon.
oleh Paramita R. Abdurachman 45

Bab IV. Kebijaksanaan VOC untuk Mendapatkan Monopoli
Perdagangan Cengkeh di Maluku Tengah antara
Tahun-Tahun 1615 dan 1652.
oleh R.Z. Leirissa 84

Bab V. Persentuhan Kebudayaan di Maluku Tengah
1475 - 1675
oleh F.L. Cooley 116

Bab VI. Lampiran-Lampiran

Lampiran I 130

Lampiran II
Kapata Tentang Pendaratan Serombongan Manusia
di Pantai Sirilau 133

Lampiran III
Kapata Tentang Peperangan Antara Latu Leemese
Melawan Para Pendatang 135

Lampiran IV
Karangan Tanasale Tentang Sejarah Pulau Nusa
Laut 137

Lampiran V
Nama-Nama Keluarga yang Terdapat di Negeri-
Negeri Ambon-Lease yang Berasal Dari Nama
Keluarga Portugis 139

Lampiran VI
Kapata "Tombosite" 141

B i b l i o g r a f i 143



KATA PENGANTAR

Gagasan untuk memulai penulisan sejarah daerah Maluku dicetuskan oleh Saudara Paramita Rahaju Abdurrachman pada permulaan tahun 1968. Idea ini telah lama dipertimbangkannya, tapi baru bisa mendapat bentuk yang jelas dalam lingkungan Lembaga Research Kebudayaan Nasional.

Perhatian Sdr. Paramita terhadap wilayah Maluku mula-mula dibangkitkan oleh almarhum Sutan Sjahrir, dimasa pendudukan Jepang. Pada waktu itu Sdr. Paramita bersama-sama dengan beberapa orang temannya sering berdiskusi dengan Bung Sjahrir tentang masalah-masalah yang mereka hadapi. Kekangan spirituil yang dialami acap kali mengarahkan pembicaraan mereka kepada apa yang akan mereka lakukan setelah masa pendudukan Jepang berlalu, yaitu menghirup udara yang segar di luar negeri untuk membebaskan diri dari kekangan spirituil itu. Tapi Bung Sjahrir selalu mengingatkan mereka bahwa sebelum bertolak ke luar negeri mereka harus terlebih dahulu mengenal berbagai daerah di tanah air dari dekat Bung Sjahrir sendiri mengusulkan agar supaya mereka mengunjungi daerah Maluku, terutama daerah Banda, dimana Bung Sjahrir harus berdiam beberapa tahun lamanya, suatu daerah yang sangat mengesankannya. Saran ini senantiasa bercengkerama dalam pikiran Sdr. Paramita. Masa Revolusi yang mengikuti pendudukan Jepang mendekatkannya dengan golongan pemuda-pemuda dari daerah Maluku yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Maluku.
Pergaulan ini memperbesar perhatiannya kepada daerah itu dan menguatkan iktikadnya untuk mendatangi Maluku pada kesempatan pertama. Gerakan penumpasan "Republik Maluku Selatan" akhirnya membawa Sdr. Paramita ke sana dan kedatangan yang pertama ini nya - tanya mempunyai pengaruh yang besar atas hidupnya: sejak masa itu daya tarik wilayah ini atas dirinya menjadi lebih kuat. Kedatangan pertama ini diikuti oleh berbagai kunjungan lainnya. Bukan hanya keindahan alamnya saja yang sangat menarik perhatian - nya, melainkan tatahidup, struktur masyarakat dan sejarahnya, terlebih-lebih pengaruh kebudayaan Portugis atas kehidupan masyarakat Maluku dan perubahan-perubahan dan perpaduan-perpaduan yang terjadi sebagai akibat dari persentuan kedua kebudayaan itu. Hal inilah yang mendapat response dari rekan dan temannya, yang juga berminat terhadap persentuhan kebudayaan dunia Barat dan kebudayaan setempat dan bersama-sama mereka memulai usaha mereka untuk menuangkan hasil-hasil penelitian mereka ke dalam karangan-karangan yang terhimpun dalam buku ini.

Usaha ini bukanlah merupakan suatu kesatuan, lebih berben - tuk suatu kumpulan karangan-karangan tentang Maluku, terutama Maluku Tengah, diantara abad kelima belas dan kedelapanbelas. Masa yang membentang antara permulaan abad kelimabelas sampai pertengahan abad ketujuhbelas adalah suatu masa ketika masyarakat Maluku mengalami berbagai tekanan dan tantangan dari luar secara

intensif dan mengalami perombakan-perombakan yang mendalam atas pola-pola kehidupannya yang ikut menentukan kehidupan masyarakat Maluku dalam abad-abad berikutnya.

Setiap pengarang memusatkan perhatiannya kepada segi-segi sejarah setempat yang sesuai dengan selera dan pendidikannya. Karena itu judul karya ini kami sebut Bunga Rampai Sejarah Maluku.

Para pengarang adalah berturut-turut :

1) Paramita Rahaju Abdurachman, dengan bidang spesialisasi sosiologi dan sejarah Indonesia, khususnya sumber-sumber Portugis yang mengungkapkan akibat-akibat pengaruh kebudayaan Portugis atas kehidupan rakyat setempat;
2) Z.J. Manusama, indolog dan ekonom, yang berusaha melukiskan kehidupan penduduk Tanah Hitu dan Nusa Laut serta perubahan - perubahan dalam struktur pemerintahan di kedua daerah itu yang terjadi sebagai akibat pengaruh Belanda;
3) F.L. Cooley; sosiolog dan antropolog, yang mengutarakan pro - ses persentuhan dan perpaduan kebudayaan-kebudayaan asing dan kebudayaan setempat;
4) R.Z. Leirissa; dengan bidang spesialisasi sejarah Indonesia, khususnya Maluku, yang memperlihatkan perubahan - perubahan yang terjadi dalam lokalisasi penanaman cengkeh di Maluku dibawah pemerintah VOC.

Harapan kami ialah agar supaya usaha yang sederhana ini menjadi titik-tolak penulisan-penulisan karya-karya sejarah Maluku.

C.P.F. Luhulima, Editor.

KATA PENGANTAR PADA CETAKAN KEDUA

Lima tahun telah berlalu sejak diterbitkan Bunga Rampai Sejarah Maluku oleh Lembaga Research Kebudayaan Nasional. Dalam lima tahun ini telah terjadi beberapa hal yang menjadi pendorong bagi kegiatan penelitian sejarah Maluku.

Seminar Sejarah Maluku dalam bulan September 1971 telah membawa sarjana-sarjana Jakarta ke Ambon, dan terdorong oleh minat yang mendalam, sekembalinya, mereka membentuk Lembaga Penelitian Sejarah Maluku.

Sebagai salah satu usaha Lembaga, dan atas permintaan masyarakat ramai, telah diusahakan penerbitan kembali Bunga Rampai ini.

Kami sangat berterimakasih kepada pimpinan Lembaga Research Kebudayaan Nasional yang telah menyerahkan hak penerbitan kepada lembaga kami, hingga dapat dikeluarkan Bunga Rampai dalam bentuk baru ini.

Dalam lima tahun terakhir ini, pengetahuan dan pandangan para penulis telah pula mengalami perobahan, dan karenanya karangan-karangan telah pula dirobah dan disesuaikan dengan hasil penelitian terakhir. Walaupun demikian niscaya masih ada kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat diperbaiki dikemudian hari.

Penerbitan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan Nyonya Sudiarti Luhulima yang telah turut menyempurnakan tata-bahasa karangan-karangan. Begitu pula bantuan moril dan meteriil Saudara J. Muskita telah memungkinkan penerbitan ini.

Semoga perhatian dari kawan-kawan dan masyarakat ramai dapat menghasilkan lebih banyak kegiatan dalam bidang penelitian dan pula pengertian akan fasal-fasal sejarah Maluku.

Jakarta, Desember 1973

Paramita R. Abdurachman
R.Z. Leirissa
C.P.F. Luhulima



BAB I

TIGA PENGERTIAN ISTILAH MALUKU DALAM SEJARAH

oleh R. Z. Leirissa

Istilah "Maluku" yang dipakai sekarang untuk menamakan daerah yang diperintah oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Ambon sebenarnya baru timbul dalam awal abad kesembilanbelas. Pada tahun 1817 pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu badan administrasi untuk mengurus wilayah itu dengan nama "Gouvernement der Molukken" yang dikepalai seorang gubernur yang berkedudukan di Ambon pula.[1] Batas wilayah kekuasaan administratif ini belum jelas pada waktu itu. Baru dalam akhir abad kesembilanbelas daerah perbatasan ini ditegaskan setelah daerah-daerah yang berada di sekitarnya ditegaskan pula. Dengan demikian kita melihat bahwa dalam tahun 1866 daerah Sulawesi Utara dikeluarkan dari badan administratif itu dan dimasukkan dalam badan administratif yang berkedudukan di Makasar. Namun Irian Jaya tetap dipertahankan sampai pertengahan abad ke duapuluh.

Sebenarnya sebelum abad kesembilanbelas jangkauan dari istilah "Maluku" lebih sempit lagi. Apabila kita periksa historiografi dan laporan-laporan ilmiah lainnya mengenai Maluku yang dicatat dalam bibliografi mengenai Maluku yang disusun oleh Ruinen dan Nolthenius[2], maka nampak jelas bahwa sebelum abad kesembilanbelas terdapat sekurang-kurangnya dua pengertian lain dari istilah itu. Yang pertama dan yang tertua ialah pengertian yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku sendiri. Pengertian yang kedua adalah yang diberikan oleh VOC sejak abad ketujuhbelas.

Ketiga pengertian dari istilah "Maluku" itu tidak saja memperlihatkan jangkauan kekuasaan yang terdapat di daerah itu dari masa ke masa tetapi juga memberikan kesan bahwa ada faktor-faktor yang sedikit berbeda di pelbagai tempat di Maluku.

Jangkauan istilah "Maluku" yang pertama berasal dari kerajaan-kerajaan yang terdapat disana sebelum berdirinya Republik Indonesia. Kerajaan-kerajaan itu adalah Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Kerajaan yang disebut terakhir itu sebenarnya telah hilang dalam abad ketujuhbelas karena daerah-daerahnya dibagi-bagi antara kerajaan-kerajaan Ternate dan Tidore dengan bantuan VOC. Keempat kerajaan itu muncul jauh sebelum daerah Maluku didatangi oleh orang-orang dari benua Eropa. Pengetahuan mengenai keempat kerajaan itu dapat kita peroleh dari hikayat-hikayat dan silsilah-silsilah yang dihasilkan dalam kerajaan-kerajaan itu sendiri sebelum abad kesembilanbelas. Contoh-contohnya, umpamanya, adalah Sejarah Ternate yang ditulis oleh Naidah[3], Kronik Kerajaan Bacan yang diterbitkan oleh Dr Coolhaas tetapi tidak jelas siapa penulisnya[4], dan Hikayat Tanah Hitu yang ditulis oleh Imam Rijali[5] dan lain-lain yang disebut dalam Oud en Nieuw Oost-indien-nya Valentijn[6].

Menurut Kronik Kerajaan Bacan[7] sebelum agama Islam dianut oleh penduduk dalam kerajaan-kerajaan di Maluku, dan sebelum adanya kerajaan-kerajaan itu, daerah itu bernama Gapi[8]. Perubahan terjadi dengan datangnya seorang yang bernama Jafarsadek yang menurunkan orang-orang yang kemudian menjadi raja-raja di daerah itu. Empat orang yang diturunkannya itu masing-masing memerintah disuatu "boldan"[9]. Boldan yang pertama dinamakan "Maloko Bacan", yang kedua adalah "Maloko Jailolo", yang ketiga adalah "Maloko Tidore" dan yang keempat adalah "Maloko Ternate". Sebutan lain yang dipakai dalam kronik tersebut, umpamanya, "kerajaan Maloko astana boldan Bacan"[10].

Tidak dipersoalkan disini apakah benar bahwa pada awalnya kerajaan Bacan-lah yang menduduki tempat pertama diantara keempat kerajaan itu seperti yang diperlihatkan oleh Kronik Kerajaan Bacan. Dalam sejarah keempat kerajaan itu nampaknya memang penting sekali kerajaan mana yang menduduki tempat yang utama itu. Sejarah Ternate dari Naidah, yang ditulis jauh sesudah kronik Bacan tersebut ditulis, menunjukkan suatu interaksi antara keempat kerajaan tersebut yang akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Ternate dengan bantuan VOC. Kedudukan utama kerajaan ini sejak abad ketujuhbelas sampai berdirinya Republik Indonesia,seperti yang diperlihatkan dalam historiografi,adalah akibat dari kedudukan yang unggul dari kerajaan itu serta hubungannya yang demikian erat dengan kepentingan-kepentingan VOC maupun Hindia Belanda. Namun ada kemungkinan bahwa sebelum abad keenambelas kedudukan kerajaan Ternate tidaklah sedemikian penting.

Dalam karya-karya tersebut kita dapat melihat bahwa pengertian istilah "Maluku" tidak mengalami perkembangan seperti halnya dengan perkembangan kekuasaan kerajaan-kerajaan itu. Dari historiografi mengenai Maluku kita dapat menyaksikan bahwa kerajaan-kerajaan di Maluku mengadakan ekspansi kekuasaan yang meliputi keseluruh wilayah Indonesia bagian Timur kecuali Sulawesi Selatan. Dalam abad ketujuhbelas kerajaan Ternate menganggap dirinya berkuasa juga atas Sulawesi Utara dan Maluku Selatan. Selain itu kerajaan Tidore juga menganggap dirinya berkuasa atas wilayah Irian Jaya sebelah pantai utara dan baratnya. Namun dalam karya Naidah yang telah disebut diatas daerah-daerah ekspansi itu tidak pernah disebut Maluku. Hal ini tidak saja berlaku bagi daerah Sulawesi Utara dan Irian Jaya yang memang tidak pernah disebut sebagai Maluku dalam sejarah, tetapi juga bagi Maluku Selatan sekarang.

Sampai dimana tepatnya batas-batas daerah Maluku menurut pengertian hikayat-hikayat tersebut tidak dapat kita tentukan dengan pasti pula. Rupanya bagi penulis hikayat-hikayat itu batas-batas geografis yang tegas dari suatu kekuasaan politik tidak penting untuk dilukiskan. Maka terpaksalah kita mencari jalan lain untuk menentukan batas-batas dari pengertian "Maluku" yang tertua ini. Pertama-tama yang dapat memberi kejelasan mengenai hal ini adalah gelar-gelar yang dipakai oleh keempat raja (atau kolano) disana. Valentijn, mungkin berdasarkan legenda-le-

genda yang dapat dikumpulkannya[11], mengatakan bahwa pada mulanya setiap kolano dari keempat kerajaan itu disebut dengan gelar Kolano Maloko. Apabila hal ini benar maka nampaklah bahwa keempat kerajaan tersebut masing-masing mempergunakan istilah Maluku. Hal inipun dikemukakan oleh Kronik Kerajaan Bacan tersebut. Tetapi, menurut Valentijn, ketika kerajaan Ternate menjadi kekuasaan yang dominan di daerah itu maka istilah Maluku hanya dipakai oleh raja atau sultan Ternate saja, dan kerajaan-kerajaan lainnya memakai istilah lain yang sekaligus menunjukkan tempat kedudukan kerajaan-kerajaan ini. Raja dari kerajaan Bacan dinamakan Kolano Madehe, dan karena madehe dapat diartikan sebagai batas maka istilah itu menunjukkan bahwa raja tersebut memerintah di daerah perbatasan Maluku; dalam hal ini perbatasan sebelah selatannya. Raja Tidore disebut Kima Kolano, dan karena kima dapat diartikan sebagai tengah-tengah maka raja tersebut memerintah di daerah pertengahan Maluku. Raja Jailolo disebut sebagai Jikoma Kolano, dan karena jiko dapat diartikan sebagai sudut maka tempat kedudukannya adalah di sebelah sudut daerah Maluku; dalam hal ini di perbatasan sebelah utaranya[12].

Berdasarkan gelar-gelar tersebut maka dapat kita sebut bahwa daerah yang dinamakan Maluku pada mulanya hanyalah apa yang sekarang disebut sebagai Maluku Utara saja, yakni pulau-pulau Ternate, Tidore, Halmahera, Bacan, Makian dan pulau-pulau kecil disekitarnya. Seorang pejabat Portugis yang berada di Ternate pada sekitar pertengahan abad keenambelas mengatakan bahwa daerah yang diperintah oleh kolano di Maluku adalah "... Ternate, Tidore, Motel, Makian, Kayoa, Bacan, Labua, yang dalam masa-masa yang lebih tua disebut Gape, Duku, Motil, Masa, Malisa, Seke, Kasiruta". Ia juga mengatakan bahwa pejabat-pejabat rendahan dalam kerajaan-kerajaan itu (para Sangaji) tahu benar sampai dimana batas-batas kekuasaan mereka[13]. Jadi jelaslah bahwa sekalipun batas-batas geografis itu tidak pernah disebutkan dengan tepat dalam historiografi tradisionil, namun setiap penguasa tahu dengan pasti sampai dimana batas kekuasaannya.

Valentijn juga menyebutkan bahwa Jailolo, yang merupakan batas sebelah utara itu, "... oleh orang-orang Ternate dinamakan "Pintu Gerbang Maluku ..."[14]. Bahwa jalan utama ke Maluku berada di sebelah utara memang agak sulit untuk dibayangkan apabila kita telah terbiasa dengan pandangan sejarah yang berpusat pada kedatangan VOC pada awal abad ketujuhbelas. Namun sebelum masa itu hubungan antara daerah Maluku Utara dengan dunia luar dapat pula dilakukan dari sebelah utara itu. Pejabat Portugis tersebut diatas (Antonio Galvao) menunjukkan dalam karyanya bahwa salah satu jalan dagang yang penting dalam abad keenambelas adalah jalan melalui utara ini, yaitu yang melalui Sulawesi Utara, ke Kalimantan Utara ataupun melalui kerajaan Sulu, ke Malaka; selain itu dari Sulawesi Utara dapat pula membelok ke selat Makasar sampai ke pulau Jawa, atau terus ke selat Bali. Selain itu, menurut Galvao, jalan dagang ini juga dapat terus ke pelabuhan-pelabuhan di Cina. Malah menurut pendapatnya pengaruh dari Cina ini sangat

kuat seperti umpamanya dalam mata uang yang disebut fang. Selain itu perkataan "cina" dapat kita temukan kembali dalam istilah-istilah geografis dari masa ini seperti Batochina do Moro yang berarti pulau Halmahera; selain itu Batochina do Muar yang menunjukkan sebagian dari pulau Seram. Pejabat tersebut juga berpendapat bahwa agama Islam yang datangnya di Maluku Utara ada yang berasal dari Malaka dan dibawa melalui jalan dagang tersebut.[16] Orang-orang Portugis sendiri gemar mempergunakan jalan dagang ini untuk menghindari kerajaan-kerajaan marintim di pulau Jawa. Jalan dagang ini baru hilang peranannya dalam awal abad kedelapanbelas ketika kedudukan Spanyol telah dapat dijamin di Manila serta kedudukan VOC terjamin pula di Maluku dan hilangnya peranan Malaka untuk digantikan selama abad kedelapanbelas itu dengan Batavia.

Jalan dagang lain yang lebih terkenal sekarang adalah yang melalui selatan. Jalan dagang ini memang telah sangat ramai sebelum kedatangan orang-orang Lusitania tersebut dan terutama dipergunakan bagi pedagang-pedagang yang berpusat di pelabuhan-pelabuhan di pulau Jawa maupun di pulau Sumatra[17]. Jalan ini menyebabkan pentingnya kedudukan daerah Maluku Tengah yang pada masa tersebut belum menghasilkan rempah-rempah. Melalui jalan dagang ini daerah Maluku Tengah mendapat pengaruh kebudayaannya dari pusat-pusat agama Islam di pulau Jawa (Gresik, Demak, dan lain-lain). Panembahan Giri, yang oleh pejabat-pejabat VOC dinamakan "Raja Bukit" merupakan pusat yang penting sebelum kedatangan orang-orang Portugis dalam abad keenambelas. Istilah-istilah geografis yang masih terdapat di beberapa pulau di Maluku Tengah juga menunjukkan hal ini, seperti umpamanya Tuban, Maspait dan lain-lain. Malah menurut Imam Rijali dalam Hikayat Tanah Hitu-nya salah satu perkampungan di jazirah Hitu di pulau Ambon berasal dari pulau Jawa. Apabila jalan dagang lainnya yang disebut diatas hilang peranannya dalam abad kedelapanbelas, maka karena kegiatan-kegiatan VOC, jalan dagang melalui selatan ini dipertahankan dalam abad-abad ketujuhbelas dan kedelapanbelas terutama karena pusat kekuasaan VOC berada di Batavia.

Sebelum kita memperhatikan bagaimana VOC memakai istilah Maluku, sebaiknya kita bertanya dahulu kapan sebenarnya istilah Maluku menurut pengertian dari kerajaan-kerajaan di sana mulai dipergunakan. Kronik Kerajaan Bacan tersebut mengatakan bahwa gelar Kolano Maloko mulai muncul beberapa saat sebelum datangnya agama Islam di sana, tetapi tidak dijelaskan dengan tepat dengan mempergunakan angka tahun ataupun cara yang lain. Naidah dalam karyanya telah disebut di atas[18] mengatakan bahwa pengislaman itu terjadi pada tahun 643 Hijrah atau 1250. Namun mengingat ciri utama dari karya-karya semacam ini adalah kelemahannya dalam hal kronologi, maka data terakhir itupun masih diragukan. Galvao, yang rupanya lebih sadar akan faktor waktu, mengatakan bahwa penganut Islam yang pertama adalah raja Ternate yang bernama Tidore Vongi dan hal ini terjadi pada tahun 1460. Tome Pires, pejabat Portugis lainnya yang terkenal karena lukisannya mengenai kota pelabuhan Malaka, mengatakan bahwa hal itu terjadi antara tahun-

tahun 1460 dan 1465.[19] Namun sayangnya data yang disebut terakhir ini tidak bisa membawa kita kepada kesimpulan bahwa penggunaan istilah Maluku seperti yang disebutkan di atas untuk pertama kalinya terjadi pada sekitar tahun-tahun itu. Cara-cara penuturan dalam historiografi tradisionil memang agak berbeda dengan cara-cara yang dipergunakan orang-orang Barat dalam abad keenambelas itu. Data dari sejarah dinasti di Cina menunjukkan bahwa istilah Maluku telah dikenal orang-orang Cina sekurang-kurangnya antara abad-abad ketujuh dan kesembilan (Sejarah Dinasti T'ang), namun karena sedemikian minimnya sulit pula untuk mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah Maluku dalam karya-karya tersebut.[20]

Juga tidak dapat diketahui dengan pasti kapan istilah Maluku menurut pengertian dari hikayat-hikayat tersebut diatas hilang dari pemakaian umum. Orang-orang Portugis dalam abad keenambelas rupanya masih mempergunakannya. Tetapi sejak kedatangan orang-orang Belanda hal ini mulai berobah.

Jangkauan istilah Maluku yang dipakai oleh VOC adalah sesuai dengan perkembangan kekuasaan politik mereka. VOC pada mulanya datang di Asia dengan maksud untuk berdagang. Untuk mengamankan maksud tersebut Staten Generaal atau Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, memberikan hak-hak yang luar biasa kepada badan dagang itu. Hal ini memang merupakan hal yang biasa dalam abad ketujuhbelas dan diakui syah oleh negara-negara lainnya di Eropa. Hak-hak itu berupa izin untuk menjalankan peperangan melawan orang-orang Spanyol dan Portugis serta izin untuk merebut daerah-daerah yang mempunyai hubungan politik dengan orang-orang Iberia tersebut. Selain itu diberikan pula hak-hak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian persekutuan dengan para penguasa di Asia untuk melawan kekuasaan-kekuasaan dari benua Iberia itu. Hal ini semua ditujukan untuk menjamin perdagangan dari badan dagang itu. Perjanjian persekutuan dan perdagangan yang pertama dengan kerajaan Ternate dilakukan pada tahun 1607 [21] dan kemudian pada tahun 1609.[22] Pada waktu itu kepentingan VOC barulah perdagangan rempah-rempah saja dan pengamanannya dari persaingan orang-orang Iberia. Namun kemudian, untuk mengamankan perdagangan pula, VOC mulai campur tangan dalam urusan-urusan dalam kerajaan-kerajaan di Maluku. Perjanjian-perjanjian yang mengatur ketentuan-ketentuan seperti ini umpamanya perjanjian-perjanjian tahun-tahun 1638,[23] 1652,[24] 1667,[25] dan 1683.[26]

Pada tahun 1683 kerajaan Ternate dijadikan leenstaat ("vazal") dari VOC yang berpusat di Batavia. Perkembangan serupa terdapat pula di kerajaan-kerajaan lainnya di Maluku.[27] Untuk kepentingan perdagangan dan campurtangan tersebut sejak semula VOC telah membangun suatu badan administratif yang dinamakan "Gouvernement der Molukken" dan yang berpusat di pulau Ternate. Disini terdapat seorang gubernur dan di tempat-tempat lainnya diangkat seorang Resident sedangkan di tempat-tempat lain pula diangkat seorang posthouder. Pejabat-pejabat ini tidak saja terdapat di kerajaan-kerajaan di Mauluku-Utara tetapi juga ditempatkan di wi-

layah ekspansi kerajaan-kerajaan itu seperti di Manado (seorang Resident), di Gorontalo dan Bolaang-Mongondou (beberapa orang posthouder). Dengan cara menumpang pada legitimitas kerajaan-kerajaan di Maluku VOC berhasil meluaskan kekuasaannya. Secara administratif daerah-daerah ekspansi kerajaan-kerajaan itu oleh VOC dinamakan "Moluccen" pula.

Namun pengertian yang diberikan oleh VOC masih berlainan dengan pengertian yang diberikan oleh Hindia Belanda. Daerah-daerah lain yang sekarang lazim dinamakan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara tidak disebut sebagai Maluku. Di daerah-daerah itu terdapat pusat kekuasaan lain dari VOC. Di kepulauan Ambon-Lease, Seram dan pulau-pulau yang terdapat di sekitarnya terdapat suatu koordinasi yang dipimpin oleh seorang Gubernur VOC yang berkedudukan di Ambon. Sistem ini telah dibangun sejak tahun 1605 ketika VOC berhasil merebut benteng Portugis di Ambon dan disempurnakan sejak tahun 1615. Kemudian di kepulauan Banda, Kei-Aru, Tanimbar serta Teun, Nila Serua terdapat pula suatu koordinasi tersendiri pula yang juga dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di Banda. Badan administrasi yang pertama disebut "Gouvernement van Amboina" dan yang kedua disebut "Gouvernement van Banda".[28]

Dalam dokumen-dokumen VOC kedua daerah yang disebut terakhir itu tidak pernah dinamakan Maluku; istilah yang sering digunakan hanyalah Banda dan Ambon saja.

Tanda-tanda adanya perubahan yang menentukan sebenarnya telah nampak dalam kejadian-kejadian sekitar pertengahan abad ke delapanbelas. Peristiwa-peristiwa itu mulai timbul di daratan Eropa tetapi kemudian meluas ke Asia pula. Pertama-tama adalah peperangan antara kerajaan Inggris dan kerajaan Perancis yang juga menjalar ke India dan Asia Tenggara serta Cina. Kemudian, yang penting pula, adalah Revolusi Perancis yang disusul oleh munculnya Napoleon Bonaparte. Dengan runtuhnya Bonaparte maka kekuatan-kekuatan konservatif di Eropa mulai menyusun kembali peta politik Eropa. Hanyalah karena kepentingan-kepentingan golongan terakhir inilah maka daerah-daerah yang tadinya dikuasai oleh gubernur-gubernur VOC dikembalikan kepada kerajaan Belanda. Move ini terutama didukung oleh Inggris dalam Kongres Wina dengan maksud untuk menarik hati pihak Belanda yang diharapkan akan menjadi tameng terhadap gerakan-gerakan politik kerajaan Perancis yang agresif itu. Maka sejak tahun 1815 secara syah telah ditentukan bahwa pihak Belanda akan meneruskan kekuasaannya di Indonesia.

Namun apabila kita mengalihkan pandangan kita ke Indonesia dalam pertengahan abad kedelapanbelas maka nampak bahwa di sinipun terdapat pelbagai perubahan dalam pandangan-pandangan VOC sendiri. Daerah rempah-rempah di Maluku sudah mundur kedudukannya dalam pandangan dan kepentingan dagang VOC. Hasil-hasil pala dan cengkeh sudah tidak membawa kekayaan yang berlimpah-limpah bagi para pemegang saham badan dagang itu seperti halnya dengan keadaan dimasa sebelumnya. Sejak akhir abad ketujuhbelas, yaitu sejak VOC berhasil mencapai monopoli pala dan cengkeh di Maluku, ternyata neraca perdagangan VOC telah menunjukkan kemunduran-ke-

munduran yang membahayakan. Keruntuhan VOC dalam akhir abad ketujuhbelas dapat dicegah terutama oleh produksi barang-barang perdagangan yang baru. Pertama-tama adalah kopi yang memberikan keuntungan yang besar sejak perluasan penanaman tumbuhan itu di daerah Priangan dalam awal abad kedelapanbelas. Kemudian juga kapas, indigo (nila)dan sutra di pantai utara pulau Jawa. Barang-barang ini semua diperoleh VOC dengan cara monopoli juga sekalipun pelaksanaannya agak berbeda dengan di Maluku berhubung adanya perbedaan-perbedaan politik dan sosial di daerah-daerah yang bersangkutan. Peralihan perhatian dunia Barat ke pulau Jawa ini diteruskan dan diperluas oleh Daendels dan Raffles. Sistem yang mereka bangun pun disesuaikan dengan keadaan di Jawa seperti sentralisasi pemerintahan oleh Daendels dan sistem pajak tanah oleh Raffles.

Ketika pihak Belanda mendapat kesempatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Kongres Wina itu pada tahun 1816 maka dengan sendirinya mereka membangun sistem mereka berdasarkan apa yang telah ada sebelumnya, dan sejak tahun 1830 muncul apa yang disebut cultuurstelsel yang terutama berpusat di pulau Jawa, Maluku dapat dikatakan sudah tidak dipentingkan lagi.

Sistem pemerintahan yang dibangun di Maluku sejak 1817 sebenarnya pertama-tama bertujuan untuk mencegah agar daerah itu tidak jatuh ke tangan kekuasaan Barat lainnya. Ini yang merupakan salah satu sebab utama mengapa ketiga "gouvernement" yang dibangun oleh VOC sejak awal abad ketujuhbelas itu disatukan menjadi "Gouvernement der Molukken" dengan pusatnya di Ambon. Suatu ketentuan yang sebenarnya sudah ketinggalan jaman adalah dipertahankannya sistem monopoli cengkeh dan pala. Secara internasional ketentuan ini dicantumkan dalam Traktat London yang dibuat pada tahun 1824 antara pihak Belanda dan Inggris.[29]

Perubahan-perubahan dalam tata masyarakat sebenarnya tidak banyak terjadi sejak akhir abad kedelapanbelas. Sampai masa itu daerah Maluku telah terputus samasekali dari dunia luar. Hubungan perdagangannya putus, bukan saja dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia tetapi juga antar pulau. Dalam hal supply bahan-bahan kebutuhan sehari-hari kotapelabuhan Makasar menduduki tempat yang penting. Hal ini bukan saja berlaku bagi hubungan-hubungan yang dibina oleh pemerintah tetapi juga dalam perdagangan tradisionil. Dalam hal yang terakhir ini yang utama adalah pedagang-pedagang Mandar dan Bugis yang berhasil membina suatu mata rantai perdagangan di pulau-pulau yang terpencil di Maluku. Peranan orang-orang Cina juga mulai muncul. Semuanya berpusat di Makasar.

Selain itu hubungan kerajaan-kerajaan serta tempat-tempat lainnya di Maluku yang penduduknya beragama Islam juga terputus dengan pusat-pusat agama Islam di pulau Jawa. Pengaruh Maluku Utara atas Maluku Tengah dan Maluku Tenggara juga terputus sama sekali. Satu-satunya hubungan adalah dengan VOC. Dan karena VOC terkenal dengan sifatnya yang konservatif dalam hal ini maka tidaklah mengherankan bahwa tidak terdapat pula perkembangan dalam bidang kemasyarakatan yang didorong oleh badan dagang ini. Yang

mungkin agak menonjol adalah perluasan agama Kristen di berbagai daerah di Maluku. Namun dari penyelidikan-penyelidikan nampak bahwa dalam hal inipun nampak sifat VOC tersebut di atas karena hanyalah daerah-daerah yang pernah mendapat pengaruh Kristen sejak datangnya padri-padri Portugis dan Spanyol dalam abad keenambelas yang mendapat perhatian dari VOC.

Segi lain yang menonjol adalah masyarakat perkebunan yang dibangun VOC di kepulauan Ambon-Lease dan kepulauan Banda. Cengkeh dan pala dikerjakan oleh penduduk di daerah ini dengan pengawasan para pemimpin masyarakat mereka (raja, patih, orangkaya) dan pejabat-pejabat VOC. Di wilayah lainnya di Maluku VOC mengadakan pengawasan dengan patroli-patroli setiap tahun (hongitochten) untuk mempertahankan ketentuan yang telah dicapai dalam pertengahan abad ketujuhbelas bahwa di daerah-daerah ini tidak diperkenankan adanya kebun-kebun pala dan cengkeh. Sistem monopoli VOC ini dipertahankan terus sampai tahun 1863.

Sejak pertengahan abad kesembilanbelas penduduk dibebaskan untuk menjual cengkeh mereka kepada siapa saja yang menginginkannya dan larangan menanam cengkeh dan pala di daerah-daerah lain kecuali Ambon-Lease dan Banda dicabut. Namun sementara itu pemerintah Belanda membutuhkan tenaga-tenaga untuk mengawasi keamanan daerahnya. Salah satu daerah yang merupakan potensi yang penting dalam hal ini adalah kepulauan Ambon dan Lease lagi. Maka bermunculanlah pemuda-pemuda daerah itu di pelbagai daerah lainnya di Indonesia. Dalam masa-masa kemudian banyak pula di antara mereka yang memasuki dinas sipil. Setelah berdirinya sekolah-sekolah, yang dibangun untuk kepentingan administrasi Hindia Belanda itu, maka daerah kepulauan Ambon Lease lagi yang menjadi penting. Sementara itu sejak awal abad keduapuluh pemerintah Belanda berusaha untuk menarik daerah-daerah lainnya di Maluku kedalam wewenangnya. Hal terakhir ini tidak terjadi dengan aman dan tenteram seperti dapat kita saksikan dari peperangan-peperangan yang dilancarkan di pulau Seram umpamanya. Dengan demikian wilayah-wilayah lain yang tadinya tidak pernah mengenal sistem pemerintahan Barat berangsur-angsur masuk pula kedalam suatu proses yang menyeluruh di Indonesia itu.

Sejak abad keduapuluh dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang cukup luas antara orang-orang Maluku yang berdiam di Maluku dengan orang-orang Maluku yang berada di kota-kota besar di Jawa, Sumatra dan Makasar. Penduduk yang terdapat di Maluku mengikuti suatu ritme yang berbeda dengan orang-orang Maluku yang disebut terakhir itu. Perbedaan ini dapat kita saksikan ketika pecah pergolakan dalam tahun 1950 yang berpusat di Ambon tetapi dikendalikan oleh orang-orang yang sebagian besar tidak dibesarkan di Ambon. Maka salah satu segi utama dari keadaan sosial politik di Maluku, terutama di Ambon-Lease, adalah percampuran yang kurang serasi antara unsur-unsur luar dan unsur-unsur intern, atau antara orang-orang yang lama berdiam di luar Maluku dan kemudian kembali ke Maluku untuk menduduki tempat-tempat yang penting,

dengan penduduk setempat. Salah satu segi utama lainnya adalah keterbelakangnya keadaan ekonomi karena masih terikat oleh perkembangan yang bersumber pada VOC tersebut.

Catatan :

1. A.J. Beversluis en Mr. A.H.C. Gieben, Het Gouvernement der Molukken. (Weltevreden, 1919).
2. Overzicht van de Literatuur Betreffende de Molukken (1928, 1935).
3. P.A. van der Crab, "Geschiedenis van Ternate in Ternataansche en Maleische Tekst door den Ternataan Naidah, met vertaaling en aantekeningen door P.A. van der Crab". B.K.I. (1878), 383-493.
4. W.Ph. Coolhaas, "Kroniek van het Rijk Bacan". T.B.G. 63 (1923), 474-512.
5. Pertama kalinya dimuat dalam bentuk singkatannya oleh Fr. Valentijn, Oud en Nieuw Oost-indien. (Dordrecht, 1724) II, A, 1-14.
6. Bahwa masih ada pelbagai hikayat lainnya dari masa-masa ini disebut dalam bibliografi tentang Maluku tersebut dalam catatan nomer 2.
7. Coolhaas, op. cit., 510.
8. Naidah menyebut Gapi sebagai salah satu dari nama-nama yang diberikan untuk daerah Maluku. Nama ini masih tertinggal pada nama sebuah pulau yang kini tidak termasuk dalam wilayah Maluku.
9. Van der Crab, op. cit., 491.
10. Bendera kerajaan Ternate bertuliskan huruf-huruf Arab yang berarti "Al Molok Boldan Ternate". F.S.A. de Clerq, Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate. (Leiden, 1890), 350.
11. Valentijn, op. cit., I, B, 131-132.
12. Antonio Galvao dalam "Sejarah Maluku"-nya yang diterbitkan oleh H.Th.Th. Jacobs, S.J., A Treatise on the Moloccos (c. 1544). Probably the Preliminary Version of Antonio Galvao's Lost Historical das Moluccas. (1971).
13. Ibid., 35
14. Valentijn, op. cit., I, B, 133.
15. Jacobs, op. cit., 334 (catatan)
16. Ibid.
17. A.B. Lapian, "Beberapa Tjatatan Djalan Dagang Maritim ke Maluku Sebelum Abad ke XVI", dlm. Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia, I, 3, (Maret 1965), 67-72.
18. Van der Crab, op. cit., 401
19. Jacobs, op. cit. 85, 334.
20. Lapian, op. cit. 69
21. Corpus Diplomaticum Neerlando Indicum, I, 503.

22. Ibid., 61-65.
23. Ibid., 316-324.
24. Ibid., I, 37-42.
25. Ibid., III, 304-322.
26. Ibid., 356-359.
27. Dimuat dalam Corpus Dilpomaticum Neerlando Indicum.
28. Mr. J.A. van der Chijs, De Vestiging van het Nederlandsch Gezag Over de Banda Eilanden, 1599-1621. (Weltevreden, 1886).
29. Perjanjian 17 Maret 1824, pasal 7 dalam Harry J. Marks, The First Contest For Singapore. V.B.G. (1959), 254.

BAB II

SEKELUMIT SEJARAH TANAH HITU DAN NUSA LAUT SERTA STRUKTUR PEMERINTAHANNYA SAMPAI PERTENGAHAN ABAD KETUJUHBELAS

oleh Z. J. Manusama

I. PENDAHULUAN/BAHAN-BAHAN

Pulau Ambon terdiri dari dua buah jazirah, yaitu Hitu di utara serta Leitimor di selatan dan yang dimaksud di dalam karangan ini dengan Tanah Hitu ialah bagian utara dari jazirah Hitu, yaitu dari negeri Lima sampai dengan Tial, kecuali Waay. Pulau Nusa Laut ialah sebuah pulau, yang letaknya paling timur di kepulauan yang sekarang dikenal sebagai kepulauan Lease.

Hasil karya penulis-penulis setempat/nasional, yang sampai sekarang belum pernah atau jarang dibaca, yang kami pergunakan ialah untuk Tanah Hitu:

1. Kapata Kapahaha;
2. "Hikayat Tanah Hitu", karangan Imam Rijali;
3. "Radja Hitu en de 4 perdana's", sebuah skripsi dari almarhum Abdul Sukur (1926);

untuk Nusa Laut:

1. sebuah kapata tentang kedatangan serombongan manusia di pulau Nusa Laut serta pembagian pulau itu antara dua orang upu latu dan lima orang upu pati, selanjutnya disebut kapata I;
2. kapata tentang peperangan antara pendatang itu melawan upu latu Leemese, yang telah berada di situ (kapata II); dan
3. sebuah karya dari Tanasale, Raja negeri Leinitu di pulau Nusa Laut, mengenai sejarah pulau itu.

Sedikit keterangan mengenai bahan-bahan tersebut diatas adalah: pertama-tama, tentang Nusa Laut. Kedua kapata tentang Nusa Laut yang disusun dalam bahasa daerah (yang di pulau Ambon dan sekitarnya lazim disebut bahasa tanah), telah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan dijelaskan oleh G.W.W.C. Baron van Hoevell[1], yang juga telah memuat karya Tanasale yang disusun dalam bahasa Melayu, sebagai lampiran pada sebuah karya lainnya.[2] Kami pergunakan perkataan "kapata", akan tetapi menurut van Hoevell[3] kedua bahan tersebut di atas harus dinamakan "legu" oleh karena, katanya, "legu" berarti "lagu" dalam bahasa tanah dan berisi semacam epos atau fragmen dari sejarah kuno, sedangkan "kapata" ialah lagu-lagu lainnya yang berupa syair yang umumnya terdiri dari empat atau enam baris.

Di jaman sekarang perkataan "legu" tidak lagi dikenal dan semua lagu dalam bahasa tanah disebut "kapata", yang jika dinyanyikan diiringi oleh pukulan gong dan/atau tifa (gendang). Sangat disesalkan bahwa van Hoevell tidak mencatat irama kedua kapata

tersebut dan kami sendiri tidak menemukannya dalam penyelidikan setempat; malah ternyata kedua "legu" tersebut tidak dikenal lagi sebagai "kapata" sekalipun yang lainnya masih diketahui oleh sebagian penduduk di Nusa Laut.

Pencipta kedua kapata tidak tercatat dan ketiga bahan mengenai Nusa Laut itu tidak menyebut bilamana terjadinya peristiwa yang dilagukan atau diceriterakan itu. Hanya bagian terakhir dari kapata II memberikan suatu petunjuk sebagai berikut:

Salamate lesi ela	Bahagia bertambah
Leamate hiti	(ketika) dengan terbitnya matahari
Latu putia yea	raja putih (orang Eropa) memerintah
Hurano hatiti	(ketika) bulan naik
Lesi latu putia yea,	lebih bertambah lagi kekuasaan latu putih,
Latu puti a-manu	Latu putih menyeberang lautan
Yau manu tula em	Saya menyeberang dengan dia
Latu puti a-lena	Latu putih berjalan menyusur pantai
Yau lena tula em.	Saya berjalan dengan dia.
Ile aela duniai,	Ia memerintah dunia,
Ni kawasa harori alam.	kekuasaannya meliputi seluruh alam.

Dari fragmen ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, kapata ini seluruhnya disusun, atau setidak-tidaknya bagian terakhirnya baru ditambahkan, setelah orang Eropa tiba di sini.

Keterangan tentang bahan-bahan untuk Tanah Hitu:
Kapata Kapahaha[4] adalah sebuah kapata dari negeri Morela, salah satu negeri di Tanah Hitu, yang menceriterakan perang di Kapahaha melawan Belanda. Bahan kapata inipun tidak menyebut angka tahun terjadinya peristiwa itu, akan tetapi tahun itu dapat ditentukan berdasarkan sumber-sumber Belanda, yaitu 1646. Pengarangnya tidak diberitahukan dan tahun penyusunannya pun tidak. Belum kami selidiki apakah iramanya masih dikenal oleh rakyat di Tanah Hitu.
"Radja Hitu en de 4 perdana's" ialah sebuah skripsi dari almarhum Abdul Sukur, yang disusun berdasarkan interviewnya dengan pemuka-pemuka adat di beberapa negeri di Tanah Hitu dalam tahun 1926. Isinya antara lain: asal nama Hitu serta hikayat para perdana dan raja Stania.[5] "Hikayat Kotidjah" ialah hikayat istri dari Tulukabesi, pahlawan Kapahaha.
"Hikayat Tanah Hitu"[6] menurut Rumphius dan Valentijn disusun oleh Imam Rijali yang di dalam hikayat itu disebut Zafarjali dan Zifat al Rijali. Penulisnya mempergunakan aksara Arab, tetapi bahasanya adalah bahasa Melayu. Jika naskah yang kami pergunakan dibandingkan dengan transkripsi H.J. Jansen[7], yang dilengkapi dengan terjemahan dari bahasa Melayu ke dalam bahasa Belanda, maka - meskipun transkripsi Jansen itu belum seluruhnya kami pelajari - dapat dikatakan bahwa, ada perbedaan diantaranya. Umpamanya silsilah ke-

tiga dari keempat perdana Tanah Hitu, yakni Tanahitumesen, Nusatapi, dan Pati Tuban, yang dalam transkripsi Jansen diuraikan dengan panjang lebar, sama sekali tidak terdapat di dalam naskah yang kami pergunakan. Valentijn mengatakan bahwa ia sendiri memiliki sebuah naskah Hikayat Tanah Hitu dan, katanya, naskah itulah yang dipergunakannya untuk menyusun Hikayat Tanah Hitu secara ringkas di dalam bukunya "Oud en Nieuw Oost-indien ect.", jilid kedua.

Di dalam catatan Jansen tertanggal 21 April 1926, yang dilampirkan pada transkripsinya, dikatakan bahwa beberapa orang kepala pemerintahan negeri di Ambon, maksudnya tentu di Tanah Hitu, memiliki fragmen-fragmen dari pada naskah hikayat itu, sedangkan aslinya berada di dalam tangan Raja Seith di Tanah Hitu. Naskah asli ini menurut Jansen ditulis di atas kertas Belanda tua (oud-Hollands papier), berukuran folio dan tulisannya amat rapih. Naskah yang kami pergunakan disusun dengan rapih pula sesuai dengan pemberitaan Valentijn, sehingga timbul pertanyaan: naskah manakah yang asli? Atau, apakah penulis hikayat sendiri telah menulis lebih dari satu naskah dengan isi yang berbeda-beda?

Sebagaimana halnya dengan semua bahan-bahan setempat yang telah diuraikan di atas, Hikayat Tanah Hitu tidak menyebutkan tahun-tahun terjadinya peristiwa-peristiwa, kecuali mengenai saat wafatnya Mihirjiguna atau Arinjiguna di Betawi, yakni dalam bulan Rabiulawal hari ke 12 tahun H(ijrah), yang jatuh pada hari Ahad. Catatan ini tidak sempurna karena tahun Hijrah itu tidak disebut, akan tetapi dari sumber Belanda dapat ditetapkan tahunnya, yaitu 1622. Oleh karenanya maka dalam penjelasan selanjutnya akan kami pergunakan bahan-bahan asal penulis-penulis Belanda untuk menyempurnakannya, antara lain "Oud en Nieuw Oost-indien ect", jilid II karangan Valentijn dan "Ambonsche Landbeschrijving" karangan Rumphius[8], yang pernah diumumkan dan yang aslinya berupa manuskrip sekarang berada di Rijksarchief di Den Haag (Nederland). Mengenai manuskrip Rumphius ini perlu ditambahkan bahwa dalam tahun 1921 oleh Jansen atas petunjuk dari Orangkaya negeri Hitumesen yang bernama Moh. Alif Poluwaipaliti, telah pula ditemukan sebuah manuskrip Rumphius di Hitumesen dan berjudul "Ambonsche Landbeschrijving". Manuskrip yang disebut terakhir ini tidak utuh lagi dan banyak halamannya yang sudah hilang[9].

Naskah Hikayat Tanah Hitu yang kami pergunakan sebenarnya terdiri dari 107 halaman, akan tetapi halaman pertama yang memuat alkisah pertama, yaitu alkisah tentang tibanya Pati Selan Binaur atau Zamanjadi di Tanah Hitu, yang kemudian akan menjadi perdana Totohato, tidak ada pada microfilms kami, mungkin karena telah hilang atau rusak. Dengan demikian yang kami transkripsikan hanyalah 106 halaman. Setiap peristiwa penting dimulai oleh penulisnya dengan perkataan "alkisah", tetapi nomer seperti yang terdapat dalam Oud en Nieuw Oost-indien-nya Valentijn tidak terdapat dalam naskah dan diberikan oleh Valentijn pula. Jarak waktu hikayat ini kurang lebih 200 tahun, oleh karena Jamilu, salah seorang yang kemudian akan menjadi perdana di Tanah Hitu, menurut Valen-

YAYASAN PERPUSTAKAAN NASIONAL JAKARTA

tijn, meninggalkan negeri asalnya di Jailolo dalam tahun 1465 dan tiba di Tanah Hitu pada waktu Zamanjadi dan Perdana Mulai, yang juga akan menjadi perdana, telah berada di sana. Akhir hikayat ini ialah 1646, sebab dalam tahun itu Rijali melarikan diri dari Tanah Hitu ke Makasar karena jatuhnya benteng Hitu yang terakhir ke dalam tangan Belanda, yaitu benteng Kapahaha yang oleh Valentijn dan penulis-penulis Belanda lainnya disingkat menjadi Kapaha. Kesalahan ini diambil oleh penulis-penulis setempat sehingga Taman Pahlawan di Ambon diberi nama Kapaha dan bukan Kapahaha.

Apakah naskah hikayat yang asli juga pernah mempunyai sampul, yang sekarang sudah hilang dan apakah pada sampul itu atau pada halaman pertama dari padanya tertera judul dan nama penulis hikayat itu, tidak dapat kami pastikan. Seperti telah kami katakan di atas, menurut Valentijn dan Rumphius, penulis hikayat ini ialah Imam Rijali. Rumphius yang tiba di Ambon pada tahun 1652, yaitu kira-kira enam tahun setelah perang Kapahaha berakhir, mengatakan bahwa Rijali adalah seorang Imam yang pandai mengarang. Namun apabila kita teliti naskah Hikayat Tanah Hitu, maka timbul beberapa pertanyaan:

1. apakah Rijali seorang pribumi dari Tanah Hitu ataukah ia seorang pendatang, seorang berasal dari daerah lain, umpamanya dari Makasar, Sumatra atau Malaka?
2. apakah pada zaman abad ketujuhbelas itu seorang pribumi dari Tanah Hitu sudah begitu mahir mempergunakan bahasa Melayu dan menyusun suatu naskah dengan cara yang cermat dan sesistematis itu ataukah dapat kami anggap Rijali hanya sebagai sumber tunggal/utama bagi penyusunan hikayat ini, sedangkan penulisnya adalah orang lain?
3. bagaimanakah naskah atau naskah-naskah hikayat yang disusun di Makasar itu tiba di Tanah Hitu atau di Ambon?

Jawaban-jawabannya akan kami berikan dibawah nanti.

II. TANAH HITU

A. Pendahuluan

Sebelum kita meneliti sejarah dan sistem pemerintahan di Tanah Hitu perlu kiranya diberi beberapa catatan:

1. Perkataan Ambon telah digunakan Rijali untuk menamakan seluruh pulau itu dan Rumphius mempertegas penggunaannya, karena katanya, nama itulah yang dipergunakan oleh orang pribumi di zamannya. Tidak benar jika dikatakan bahwa Ambon ialah nama untuk pulaunya dan Amboina untuk kotanya, karena perkataan Amboina berasal dari perkataan Amboine yang dipergunakan oleh orang-orang Portugis untuk pulau itu. Sampai berangkatnya orang-orang Portugis dari Ambon belum ada sebuah kotapun yang diting-

galkan; yang ada hanya "Kota Laha", nama benteng mereka yang diberikan oleh penduduk setempat (kota = benteng, laha = labuhan atau teluk) dan kampung Mardika dan mungkin beberapa buah rumah tinggal orang-orang Portugis di luar benteng mereka.

2. Leitimor oleh Rijali hanya satu kali disebut tetapi dengan ejaan Leitimol, yang sebagaimana telah kami terangkan pada awal karangan ini ialah jazirah selatan dari pulau Ambon. Menurut Rumphius nama itu sebenarnya hanya dipakai untuk sebagian saja dari jazirah itu, yaitu bagian Tenggaranya, tetapi lambat laun menjadi sebutan bagi seluruh jazirah itu. Apakah dahulu bagian baratnya bernama Leihalat?
3. Pulau Seram disebut Seran atau Tanah Besar, sedangkan kata Nusa Ina yang sekarang dipakai untuk nama pulau itu dalam bahasa tanah, tidak pernah dipergunakan baik oleh Rijali maupun oleh Rumphius (nusa = pulau, ina = ibu). Kata Selan, menurut Rumphius, hanya dipergunakan bagi sebagian dari pesisir selatan dari pulau Seram, yaitu dari Elpaputih sampai ke Werinama.
4. Maluku: Rijali mempergunakannya dalam arti wilayah kerajaan di bagian utara dari propinsi Maluku sekarang, artinya tidak termasuk daerah taaluknya; menurut Rumphius yang dimaksud dengan Maluku ialah pulau-pulau Ternate, Tidore, Motir (Motijl), Makian dan Bacan, sedangkan keempat raja di utara, yaitu raja Jailolo, Ternate, Tidore dan Bacan disebut raja-raja Maluku dengan gelar kolano.
5. Dalam Hikayat Tanah Hitu alkisah ke-XI diceriterakan bahwa, raja Hitu pernah mencoba mendarat di suatu pantai yang bernama Honimoa, tetapi tidak berhasil menaklukannya dan baru setelah Perdana Jamilu datang ke sana dengan angkatannya maka Honimoa ditaklukkan. Oleh sementara penulis Belanda dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Honimoa oleh Rijali ialah pulau Saparua, akan tetapi Rumphius menjelaskan bahwa Honimoa adalah pesisir pantai negeri Waay, dan ditambahkannya bahwa tempat pendaratan raja Hitu itu, setelah ia gagal mematahkan perlawanan orang-orang Waay, dinamakan Potalatu, yang berarti "buang senjataku!" Honimoa juga dipakai sebagai nama bagi seluruh pulau Saparua akan tetapi, menurut Rumphius, Honimoa dahulu hanya nama untuk sebagian dari pulau Saparua, yaitu bagian tengahnya, dan bahwa nama seluruh pulau Saparua dalam bahasa tanah sebermula ialah Uliasar atau Liasar, nama mana kemudian dipakai untuk gabungan pulau-pulau Haruku, Molana, Saparua dan Nusa Laut. Mengenai hal ini kurang lebih dua abad kemudian dari Rumphius dicatat oleh van Hoevell[11] bahwa, nama Lease adalah suatu perubahan ejaan dari Uliasar atau Liasar, yang pada jamannyapun masih dikenal oleh penduduk setempat hanya untuk pulau Saparua, hal mana dapat dilihat dari isi sebuah pantun yang berbunyi (menurut van Hoevell):

Saparua, tanah Lease
Orang berkota diatas karang
Cinta dua punya kekasih
Dari dulu sampai sekarang.

6. Makasar ditulis oleh Rijali sebagai Mangkasar (Mengkasar) dan Banda sebagai Bandan, sedangkan sebagai salah sebuah pulau dari gugusan Banda Rijali menyebut Rosengaing. Tentang Rosengaing ini P.A. Leupe mengatakan bahwa menurut sebuah peta Portugis (1601) dan surat Nicolaas de Montalegre kepada Andre Furtado de Mendoça tertanggal 20-6-1602, nama pulau itu ialah Saranguni, tetapi katanya menurut Jurnaal dari Heemskerk (1599) nama pulau itu adalah Rosangyn dan menurut sebuah peta dari Joost Joosten (1602) Rossingayn[12]. Apakah Leupe tidak membuat suatu kesalahan dengan mengutip surat de Montalegre, karena menurut kami yang dimaksud oleh Montalegre dengan Saranguni ialah sebuah pulau di Filipina (lihat Antonio Pigafetta)[13].
7. Ulisiwa dan Ulilima dipergunakan oleh Rijali tanpa sesuatu penjelasan tentang kedua kata itu dan ia antara lain hanya mengatakan, bahwa Tanah Hitu tergolong persekutuan Ulilima. Kedua istilah itu yang dilain bagian dari Maluku Selatan dikenal dengan nama Patasiwa dan Patalima atau Ursiwa dan Urlima, menurut Rumphius, adalah dua pola yang sangat antagonistis dan di zamannya sendiri sudah sangat tua sehingga tidak lagi dapat dicari penjelasannya dan ia hanya menambahkan bahwa kedua persekutuan ini tersebar di dalam wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan dari utara, khususnya wilayah Ternate dan Tidore, tetapi dikatakannya bahwa, di zaman Rumphius sendiri negeri-negeri yang tergabung di dalam persekutuan Ulilima ialah (khusus untuk Seram dan kepulauan Ambon) negeri-negeri yang beragama Islam dan yang disebut Ulisiwa ialah negeri-negeri yang beragama Kristen atau yang belum beragama. Selanjutnya ia mengatakan bahwa Ulisiwa berasal dari Tidore dan Ulilima dari Ternate dan bahwa bagian barat dari jazirah Hoamoal tergolong Ulisiwa oleh karena bagian itu sebermula adalah wilayah kerajaan Tidore dan baru kemudian menjadi wilayah kerajaan Ternate, sedangkan bagian timur jazirah itu adalah Ulilima, karena memang dari dahulu termasuk wilayah kerajaan Ternate. Jazirah Hoamoal, menurut Rumphius dan Valentijn, ditulis Hoamohel dan menurut orang-orang Portugis disebut Veranola, yang berasal dari kata Waranela dan berarti Banda Besar oleh karena di sana terdapat banyak orang asal Waran atau Lontor, salah satu pulau dari gugusan kepulauan Banda.
8. Semua sumber Belanda menulis gelar perdana yang berasal dari pulau Jawa Tanahitumesen, tetapi Rijali sering menyebutnya Tanihitumesen; Tulukabesi ditulisnya Tulukibesi dan nama ayahnya ditulis Samusamu bukan Samsamu.
9. Gimelaha; perkataan ini yang dipergunakan oleh Rijali sebagai gelar bagi para wakil sultan Ternate di kepulauan Ambon dan bukan Kimelaha. Apakah ini suatu kesalahan ejaan oleh Rumphius (Quimelaha) dan penulis-penulis Belanda lainnya ataukah yang dipakai oleh Rijali itu adalah ejaan menurut bahasa Tidore oleh karena F.S.A. de Clerq[14] mengatakan bahwa, sebutan bagi kepala-kepala kampung di Tidore ialah Gimelaha dan di Ternate Kimelaha. Apakah sebabnya Rijali tidak mempergunakan

gelar Salahakan bagi para pejabat ini, yang menurut Rumphius dan Valentijn adalah gelar para wakil sultan Ternate di Ambon dan sekitarnya, tidak dapat kami terangkan.
Apa sebabnya para wakil sultan Ternate itu berada di Ambon? Dalam Alkisah ke-VIII diceriterakan oleh Rijali bahwa, Pati Tuban, salah satu dari keempat perdana Tanah Hitu pada waktu ia berada di pulau Jawa kurang lebih di tahun 1500, telah bertemu dengan sultan Ternate yang bernama Zainul Abidin, yang juga berada di situ untuk mempelajari agama Islam. Kedua pemimpin itu telah "bersetia dan mufakat serta berjanji-janjian dan bersumpah-sumpahan sehingga datang pada hari kiamat". Sultan Zainul Abidin ini telah wafat dalam perjalanan pulang ke Ternate di Bima sebagai akibat luka pada dadanya karena ditikam dengan sebuah lembing oleh seorang hulubalang Bima dan ketika Hairun menjadi sultan Ternate dalam tahun 1535. Maka ia mengutus Kaicili Darwis ke tanah Hitu untuk meneguhkan perjanjian antara kedua pemimpin itu di Jawa, dan Rijali pernah mengatakan bahwa Pati Tuban diangkat oleh sultan Ternate sebagai anggauta ke sepuluh dari dewan kerajaannya (Soasiwa). Apakah perjanjian antara sultan Zainul Abidin dan Tanah Hitu dapat dianggap sebagai suatu perjanjian antara dua partners yang sama tinggi deradjadnya, oleh karena apa alasan para sultan Ternate untuk menempatkan wakil kerajaannya di sana dan untuk apa Tanah Hitu - menurut Rumphius - harus memberi upeti kepada sultan Ternate? Upeti ini kemudian dihapuskan oleh sebab salah seorang sultan Ternate, ketika ia singgah di Ambon dengan kapal Portugis, yang akan membawanya ke Goa sebagai tawanan, dibebaskan oleh orang-orang Hitu dari penahanan orang-orang Portugis. Akan tetapi pihak Tanah Hitu berpendapat bahwa mereka tidak pernah membayar upeti kepada sultan Ternate dan yang diberikan itu ialah sekadar sirih pinang sebagai suatu tanda persahabatan. Para Gimelaha yang disebut Rijali ialah berturut-turut:

a. Rubohongi dengan gelar Bendahara yang tiba di Ambon dalam tahun 1570 sebagai pengganti ayahnya Samurau tetapi Samurau ini tidak disebutkan oleh Rijali, mungkin karena ia berkedudukan di Buru. Pengganti Rubohongi adalah
b. Bassi atau Bassifrangi, yang meninggal dunia dalam tahun 1611 atau 1612; penggantinya adalah
c. Sabadin, anak Jamali, cucu Rubohongi, yang menurut Rijali bergelar Mangkubumi di tanah Ambon; ia wafat dalam tahun 1621 sebelum Coen tiba di Ambon untuk ke Banda. Penggantinya adalah
d. Hidayat, cucu dari Samarau yang bernama Mulecangan dan Hidayat yang digelar oleh Rijali Perdana Gimelaha, meninggal dunia dalam tahun 1624 dan diganti oleh
e. Leliato (1624-28), yang dalam tahun 1628 ditangkap oleh Sri Sultan Hamzah dan diserahkan kepada VOC yang kemudian menawannya di Batavia sampai ia dibunuh dalam tahun 1649.

f. Luhu (1629-43), tetapi resmi hanya sampai 1638, karena dalam tahun itu ia ditarik kembali oleh sultan Ternate. Dalam tahun 1643 ia ditangkap oleh pihak Belanda atas perintah Sri Sultan Hamzah dan dibunuh di Ambon dalam tahun 1644. Pengganti Luhu adalah Majira yang tidak disebut oleh Rijali.

Apakah benar Tanah Hitu membayar upeti kepada sultan Ternate, jika kita melihat gelar yang diberikan oleh Rijali kepada Rubohongi, yaitu gelar Bendahara?

10. Kata yang sering sekali dipergunakan oleh Rijali ialah orangkaya antara lain dalam bentuk sebagai berikut:
orangkaya gimelaha dan orangkaya semuanya;
orangkaya Kapitan Hitu, dan
orangkaya dalam negeri Boano.
Apakah arti kata orangkaya ini tidak dapat dijelaskan, baik oleh Rijali maupun oleh Rumphius atau Valentijn. Melihat penggunaan kata itu sebagaimana diterangkan di atas, kami berpendapat bahwa istilah orangkaya dipakai sebagai gelar bagi semua pejabat pemerintahan di pulau Ambon dan sekitarnya, tetapi dari mana asalnya dan bilamana kata itu mulai dipergunakan tidak dapat kami terangkan. Rumphius mempergunakan gelar "hoofd-orangkaya", "orangkaya" dan "mindere orangkaya" bagi kepala pemerintahan di kepulauan Ambon, Lease dan Seram. Sampai sekarang kata orangkaya masih dipakai, akan tetapi sebagai gelar terendah bagi para kepala pemerintahan negeri di sana sesudah gelar raja dan patih.

11. Terakhir akan kami soroti suatu persekutuan, yang dikisahkan di dalam alkisah ke-XV dari Hikayat Tanah Hitu, yakni suatu persekutuan antara Tanah Hitu dan negeri Nusaniwe (nusa = pulau dan niwe = kelapa). Dikatakan bahwa Tanah Hitu mempunyai empat orang perdana dan empat bangsa, yang akan kami terangkan nanti. Nusaniwe mempunyai empat orang perdananya akan tetapi hanya satu bangsa. Keempat perdana Nusaniwe adalah, menurut Hikayat Tanah Hitu, Pati Lupa, Lisakota, Lopulalang (raja sepuluh ibu pedang) dan Pati Nailai. Rumphius hanya menyebut tiga nama, yakni Latu Lopulalang, Latuhalat (raja di barat) dan Lisakota, yang keempatnya tidak disebut. Apakah Pati Lupa atau Pati Nailai dapat disamakan dengan Latuhalat tidak dapat kami katakan. Maksud daripada persekutuan itu ialah bahwa mereka akan hidup bersaudara atau untuk meminjam kalimat dari Hikayat Tanah Hitu sendiri "apabila kasih negeri Hitu ia keduanya juga, atau kebajikan negeri Nusaniwe, ia keduanya juga". Persekutuan ini menurut hemat kami tidak lain daripada apa yang sekarang dikenal dengan istilah "pela", hanya perkataan itu tidak dipakai oleh Rijali, mungkin agar dapat dimengerti oleh para pembacanya di Makasar atau karena perkataan "pela" itu belum dikenal pada zaman Rijali. Dalam peperangan terakhir melawan Portugis, negeri
Nusaniwe pindah dari tempatnya di Leitimor ke Tanah Hitu dan baru kembali ke tempat asalnya setelah orang-orang Portugis

berangkat dari pulau Ambon. Menurut Rumphius tempat yang mereka diami di Tanah Hitu ialah pantai yang bernama Pasirputi dekat Hutunuku, dimana Belanda mendirikan bentengnya yang pertama di dalam tahun 1599, yang diberi nama "Casteel van Verre", tetapi oleh rakyat di sana disebut Kota Warwijk.

B. Sejarah

Sekarang akan kita teliti sekelumit sejarah Tanah Hitu dengan mengikuti riwayat Rijali sebagai terdapat dalam Hikayat Tanah Hitu dengan di sana-sini ditambah dengan catatan-catatan asal Belanda.

Siapa sebenarnya Rijali? Menurut Valentijn ia adalah seorang Iman di Tanah Hitu dan naskah Hikayat Tanah Hitu yang kami pergunakan tidak pernah menceriterakan asal-usulnya, hanya dalam alkisah ke-XXVI, alkisah yang terakhir, dikatakan bahwa pada waktu Rijali berada di pulau Buru dalam pelariannya dari Tanah Hitu ke Makasar dalam tahun 1646, maka telah datang ke sana untuk menemuinya antara lain Pati Lai yang disebut keluarganya dari Tanah Hitu dan bahwa setelah Rijali mendengar ceritera keluarganya itu tentang keadaan di Tanah Hitu, maka ia mengambil keputusan untuk "membuang diri kita (ke) tanah lain, supaya kita jangan melihat dan mendengar tanah kita lagi". Menurut Rumphius Rijali adalah putra dari Saptu dan Saptu adalah putra dari Abubakar, artinya Saptu adalah saudara dari Kapitan Hitu Tepil dan Perdana Nusatapi Baros serta Latu Lisalaik atau yang juga disebut Orangkaya Bulan yang menggantikan Baros pada tahun 1645; tetapi Hikayat Tanah Hitu transkripsi Jansen, yang memuat beberapa silsilah, antara lain silsilah Jamilu, menyebut selain Sanani dan Tamata-ela (keduaduanya juga disebut oleh Rumphius) sebagai putra-putra dari Saptu, juga dua orang putra lain, yaitu Kaya Tepil dan Ahata. Apakah Rijali dapat disamakan dengan Kaya Tepil atau Ahata? Dan apakah Pati Laik, yang telah menemui Rijali di pulau Buru, sama dengan paman daripada Kaya Tepil dan Ahata, yang bernama Latu Lisalaik (=raja perang) itu?

Tadi telah kita lihat bahwa ia sendiri telah mengatakan bahwa ia akan membuang dirinya ke tanah lain dan tidak akan melihat dan mendengar tanahnya sendiri lagi, sehingga dapat kami menarik kesimpulan bahwa ia adalah seorang pribumi dari Tanah Hitu dan jika kita perhitungkan, bahwa Rumphius tiba di Ambon dan tinggal di jazirah Hitu pada masa orang-orang sebaya dengan Rijali dan mungkin juga beberapa orang daripada generasi sebelumnya, maka dapat kami garisbawahi catatan Rumphius bahwa Rijali adalah anak dari Saptu. Apakah sebabnya catatan Rumphius tidak sama dengan catatan Hikayat Tanah Hitu transkripsi Jansen tentang nama Rijali? Apakah nama sebenarnya adalah Kaya Tepil atau Ahata, sedangkan nama Rijali itu adalah suatu nama samaran atau nama yang ia pergunakan setelan ia menjadi Iman di Tanah Hitu atau setelah ia meninggalkan tanah leluhurnya? Ataukah Hikayat Tanah Hitu yang

telah ditranskripsikan oleh Jansen itu bukan karya Rijali sendiri, akan tetapi disusun di Tanah Hitu berdasarkan karya Rijali itu? Atas pertanyaan-pertanyaan ini semua tidak dapat kami beri jawaban.

Bilamana Rijali dilahirkan atau berapa umurnya ketika ia melarikan dirinya ke Makasar pun tidak kami ketahui, demikianpun tidak ada catatan apakah ia berkeluarga atau siapa anaknya. Rijali untuk pertama kali disebut di dalam Hikayat Tanah Hitu pada waktu mayat Mihirjaguna atau Arinjiguna (atau menurut Rumphius, Ariguna), dibawa pulang dari Betawi ke Ambon (1632). Mihirjiguna ini, setelah ia mendapat izin dari ayahnya Kapitan Hitu yang bernama Tepil, berangkat ke Betawi dalam tahun 1621 atau 1622 untuk memperjuangkan agar orang-orang Banda yang dibawa oleh Coen dari Banda ke Betawi dikembalikan ke Banda lagi atau setidak-tidaknya ke Ambon. Atas permintaannya Coen mengizinkannya untuk ikut dengan sebuah kapal Belanda ke tanah Keling dan jika kita mengikuti hikayat perjalanan Mihirjiguna yang diceriterakan secara panjang-lebar dalam alkisah ke-XXV, maka mau tidak mau kita akan menarik kesimpulan bahwa Rijali pun telah ikut ke tanah Keling itu. Sekembalinya Rijali dari Betawi dengan mayat Mihirjiguna ia serahkan sepucuk surat dari Coen kepada van Speult (Gubernur VOC di Ambon) dan Kapitan Hitu yang isinya adalah bahwa permohonan Mihirjiguna tersebut diterima tetapi agar pembicaraan selanjutnya dilakukan oleh kedua pejabat di Ambon itu. Pemulangan orang-orang Banda itu gagal karena tibanya mayat Mihirjiguna bersamaan waktunya dengan peristiwa yang dikenal dengan nama "Amboneche moord" (1632). Mihirjiguna meninggalkan seorang istri, seorang wanita asal Ternate yang bernama Boy Fakiri dan seorang anak yang bernama Boy Hongi yang kemudian akan menikah dengan Gimelaha Majira, salahakan atau wakil sultan Ternate yang menggantikan Gimelaha Luhu.

Mihirjiguna inilah yang bersama-sama dengan Sibori, anak dari Tubanbesi, disuruh oleh para perdana ke pulau Jawa untuk mencari Belanda guna meminta bantuan mereka melawan Portugis yang dengan bala bantuan dari Goa dibawah laksamana lautnya Adre Furtado de Mendoça, telah mematahkan kekuatan perang Hitu pada awal abad ketujuhbelas. Mereka menjumpai armada Belanda dibawah pimpinan laksamana laut Matelief de Jonge dan Steven van der Haghen di Banten pada tahun 1604 dan bersama-sama kembali ke Ambon dalam tahun 1605. Menurut Valentijn, ikut serta dengan kedua wakil Tanah Hitu ke pulau Jawa ialah seorang utusan dari Raja Nusaniwe yang bernama Lekatompesi.

Tentang peperangan antara Coen dengan Banda alkisah ke-XIV antara lain mengatakan bahwa pada waktu Coen singgah di Ambon dalam pelayarannya ke Banda dalam tahun 1621, maka Kapitan Hitu Tepil telah ikut dengan kapal Belanda ke Banten, sedangkan 30 orang anak para Orangkaya (dari negeri-negeri mana tidak disebut), antara lain anak Tepil, yang bernama Halaeni, menumpang sebuah kapal Inggris ke sana. Tepil telah mencoba mendamaikan kedua belah

pihak tetapi tidak berhasil. Setelah pihak Belanda menang maka Coen mengharuskan orang Banda merebahkan benteng serta menyerahkan semua senjata mereka kepada Belanda. Sebelum berangkat ke Betawi melalui Ambon Coen telah memerintahkan kepada semua orang Banda yang masih cerai-berai karena peperangan itu agar pulang ke negeri mereka masing-masing. Setelah mereka berkumpul maka 800 orang dinaikkan ke kapal untuk dibawa ke Betawi dan 40 orangkaya lainnya dibunuh. Karena ketakutan maka sebagian besar dari penduduk kepulauan Banda lari ke Seram dan Goron dan dari situ sebagian dari mereka pindah ke Makasar. Tentang 40 orang orangkaya yang dibunuh oleh Coen itu Valentijn mengatakan bahwa menurut Hikayat Tanah Hitu mereka tewas dalam peperangan, artinya bukan dibunuh. Setelah membaca alkisah tentang peperangan di Banda, maka kami berpendapat bahwa Rijali sendiri telah ikut dengan rombongan Tepil ke sana.

Untuk kedua kalinya Rijali disebut namanya dalam peristiwa pertemuan para Orangkaya, Panglima dan Pendekar Tanah Hitu untuk menentukan sikap Tanah Hitu terhadap VOC, berhubung dengan penahanan Kapitan Hitu Kakiali yang telah menggantikan ayahnya (Tepil) dalam tahun 1633. Dalam tahun 1634 ia ditangkap oleh Belanda, menurut Rijali karena ia difitnah mencari hubungan dengan Makasar untuk melawan Belanda. Ia diundang naik ke sebuah kapal Belanda untuk berunding, tetapi setelah ia berada di atas kapal itu maka ia ditawan bersama sebelas orang Orangkaya lainnya. Kemudian semua orangkaya, kecuali Orangkaya negeri Wakal yang bernama Tamalesi, dilepaskan dan Kakiali serta Tamalesi dibawa ke Betawi dalam tahun 1535. Oleh karena itu maka sebagian besar dari Tanah Hitu mengangkat senjata melawan Belanda dan usaha pihak Belanda untuk meredakan suasana, antara lain dengan janji bahwa Kakiali akan dilepaskan dari tahanan, tidak berhasil. Dalam perembukan pemimpin-pemimpin Tanah Hitu mengenai janji Belanda, Rijali menentang pendirian beberapa pemimpin untuk menerima janji Belanda itu, artinya untuk meletakkan senjata sambil menunggu kembalinya Kakiali dan Tamalesi, karena ia berpendapat bahwa jika peperangan dihentikan, maka Tanah Hitu akan rusak dan Kapitan Hitu tidak akan dilepaskan. Peperangan baru dihentikan ketika pada tahun 1637 Kakiali dan Tamalesi dilepaskan oleh Gubernur-Jendral van Diemen dan tiba kembali di Hitu. Akan tetapi tidak lama kemudian ia difitnah kembali, yaitu bahwa ia mengadakan hubungan perdagangan cengkeh dengan Makasar, sedangkan pihak Hitu telah berjanji bahwa cengkeh mereka hanya akan dijual kepada VOC dan karena takut bahwa Belanda akan menangkapnya lagi, maka ia mengungsi ke suatu benteng di atas gunung Wawani.

Untuk ketiga kalinya nama Rijali disebut pada waktu kunjungan sultan Hamzah dari Ternate ke Ambon dalam tahun 1638. Sultan Hamzah memanggil Kapitan Hitu untuk memperlihatkan kepadanya surat perjanjian antara Tanah Hitu dengan Belanda, akan tetapi oleh karena Kakiali pada saat itu sedang sakit, maka ia menyuruh panglimanya, Nahudimeten, dan Imam Rijali untuk menghadap Sri Sultan untuk memberitahukan bahwa surat perjanjian itu telah hilang se-

waktu isi rumah Kapitan Hitu dirampas oleh Belanda. Surat perjanjian mana sebenarnya yang diminta oleh sultan Hamzah tidak dijelaskan, karena menurut catatan sejarah asal penulis-penulis Belanda telah ada beberapa perjanjian yang diadakan antara pihak Belanda dan Ternate Tanah Hitu sampai tahun 1638 itu. Perjanjian pertama antara Belanda dan Tanah Hitu adalah yang diadakan dengan van Waerwijck dalam tahun 1599 dan yang kedua antara Kapitan Hitu dengan van der Hagen antara lain ditentukan, bahwa pihak Tanah Hitu berjanji akan memberikan kepada Belanda 400 bahar (400 x 180 kg = 72.000 kg) cengkeh bilamana Belanda berhasil mengusir orang-orang Portugis dari pulau Ambon. Kota (di sana artinya benteng), senjata dan orang hitam akan diserahkan kepada Tanah Hitu, sedangkan orang putih kepada Belanda. Valentijn dan Rumphius samasekali tidak menyebut sarat-sarat penyerahan benteng, senjata dan orang Hitam kepada Tanah Hitu, demikianpun Heeres[15]? Apakah pasal-pasal yang diajukan oleh pihak Tanah Hitu hanya diadakan saja secara lisan oleh Belanda tanpa memasukkannya secara tertulis ke dalam perjanjian itu, oleh karena bahasanya adalah bahasa Belanda sehingga tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh pihak Hitu? Apakah dengan sengaja Valentijn dan Rumphius tidak mengutip perjanjian itu menurut alkisah Rijali? Apakah ini sebabnya, mengapa pihak Belanda tidak pernah mengumumkan naskah Rijali yang asli, sedangkan para sejarawan Belanda banyak menulis tentang sejarah Indonesia secara terperinci? Apakah ini alasannya, mengapa transkripsi Jansen dari Hikayat Tanah Hitu yang sudah selesai dalam tahun 1926 tidak pernah diumumkan dan hanya disimpan saja di Leiden, sedangkan Jansen sebelum Perang Dunia II terkenal sebagai seorang "Ambon kenner" yang sering menulis dan menerbitkan karyanya mengenai Ambon?

Di dalam pembahasan di atas tadi tentang perjanjian antara Tanah Hitu dengan van der Hagen telah disinggung istilah "orang hitam". Siapakah yang dimaksud dengan "orang hitam" ini? Menurut kami orang hitam ini bukan orang pribumi Ambon dan sekitarnya, melainkan orang dari luar kepulauan itu, malahan dari luar kepulauan Indonesia. Menurut Rumphius dan Valentijn, ketika Lopes d'Azavedo dikirimkan ke Ambon memerangi pihak Hitu dalam tahun 1538 maka telah ikut bersamanya antara lain tujuh keluarga orang Mardika, tetapi tidak dijelaskan siapa mereka atau dari mana asalnya. Setelah d'Azevedo menduduki Pikapoli di pesisir utara jazirah Hitu, yaitu tempat dimana orang Portugis telah mendirikan bentengnya yang pertama, maka orang Mardika ditempatkan di sana untuk memperkuat pertahanan Portugis ke pesisir teluk Ambon, dan akhirnya mereka ditempatkan di samping benteng terakhir dari Portugis di jazirah Leitimor, yaitu di tempat yang mulai saat itu sampai seakrang dikenal sebagai Kampong Mardika. Ch.R. Bakhiuzen van den Brink[16] mengatakan bahwa orang Mardika ini mungkin berasal dari luar Indonesia, karena mereka tidak mengerti bahasa Melayu. Menurut kami orang Mardika ini berasal dari India Selatan (Keling) dan oleh karenanya dalam Hikayat Tanah Hitu disebut "orang hitam". Mereka dinamakan orang Mardika oleh karena mungkin

mereka itu sebermula adalah budak-budak Portugis yang kemudian dimerdekakan dan ikut orang Portugis dari India sampai ke Maluku sebagai pembantu tentara Portugis atau membantu rumah tangga mereka. Oleh karena mereka di pulau Ambon dipergunakan oleh Portugis untuk ikut mempertahankan benteng maka mereka dianggap sebagai musuh berwarna hitam disamping musuh yang berkulit putih, yaitu orang Portugis.

Pada zaman VOC orang-orang Mardika ini mendapat kedudukan tertentu dalam masyarakat Ambon, umpamanya mereka ikut dalam armada hongi dengan sebuah perahu tersendiri sebagai petunjuk jalan. Gnatohude, demikian gelar kepala orang-orang Mardika itu, menjadi anggauta tetapi dari Dewan Justisi yang dibentuk oleh VOC di jazirah Leitimor (selain orang Mardika yang menjadi anggauta tetapnya adalah beberapa kepala dari negeri-negeri di jazirah Leitimor). Dewan atau Landraad yang pertama dibentuk Oleh Gubernur Blok dalam tahun 1616 terdapat wakil orang Mardika yang bernama Lucas Carvalho yang kemudian diganti oleh Paulo Gomes. Bagaimanakah nasib orang-orang Mardika itu sekarang? Mereka telah meng-asimilasi-kan diri mereka secara total ke dalam masyarakat di Ambon dan Kampung Mardika sekarang bukan lagi suatu kampung yang khusus didiami oleh orang-orang Mardika. Alangkah baiknya jika diadakan penyelidikan tentang sisa-sisa orang-orang Mardika itu sebelum bekas-bekas mereka hilang samasekali. Perlu dicatat bahwa janganlah mereka disamakan dengan orang borgor (burgers), khususnya yang disebut Inlandsche Burgers. Yang dimaksud dengan Inlandsche Burgers adalah orang pribumi di daerah Ambon dan kepulauan di sekitarnya yang karena suatu jasa kepada VOC telah dibebaskan dari segala kewajiban sebagai penduduk negeri, antara lain dari kewajiban ikut dalam armada hongi yang sering kali membawa maut itu. Sebaliknya mereka yang menjadi orang-orang borgor ini kehilangan segala hak atas tanah dan lain-lain hak di dalam negeri mereka, malahan mereka harus meninggalkan negeri mereka dan mencari tempat tinggal lain, umpamanya di dekat benteng Belanda, dimana mereka wajib ikut dalam semacam wajib militer yang disebut "schutterij" bersama-sama dengan orang-orang borgor turunan Belanda dan orang Mardika. Pasukan orang Mardika dan Inlandsche Burgers di kota Ambon diberi nama "de groene Guezen" karena panji mereka berwarna hijau dan tempat mereka berkumpul adalah di jalan yang sampai Perang Dunia kedua dikenal sebagai "Groeneguezenstraat".

Di atas tadi telah kita lihat bahwa Kakiali sekembalinya dari pembuangannya di Betawi pindah kedudukannya dari pantai ke gunung, yaitu benteng Wawani. Di dalam peperangan antara Belanda melawan Kakiali, tidak semua negeri di Tanah Hitu ikut membantu Kakiali, tetapi Kakiali mendapat bantuan dari Makasar dan penghulu perang tentara Makasar adalah Karaeng Bonto Manampo dan Daeng Bulikan yang datang atas permintaan pihak Tanah Hitu. Menurut Hikayat Tanah Hitu yang pernah ke Makasar untuk minta bantuan itu adalah "orang Hitu, orang Kambelo dan gimelaha", tetapi menurut Rumphius, Rijali juga ikut sebagai utusan Kakiali dan antara lain

dikatakan bahwa Rijali menderita di dalam peperangan ini. Perang Wawani berakhir dalam tahun 1643, yaitu setelah semangat para pahlawan di Wawani patah sebagai akibat tewasnya pemimpin mereka (Kakiali). Akan tetapi sumber Belanda mengatakan bahwa pembunuhnya adalah seorang Spanyol yang bernama Francisco de Troyra, yang telah menyamar masuk ke dalam benteng Wawani dan diam di sana sebagai sahabat karib Kakiali. Setelah itu tentara Hitu dan bantuan dari Makasar itu lari cerai-berai dan sebagian besar lagi ke benteng Kapahaha, antara lain Rijali, oleh sebab negeri-negeri di Tanah Hitu telah dilarang oleh Belanda untuk menerima mereka.

Benteng Kapahaha adalah benteng Tanah Hitu yang terakhir yang jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1646. Di dalam akhir hikayat perang Kapahaha ini Rijali disebut untuk kali yang terakhir, yaitu bahwa ia lari dari Tanah Hitu, mula-mula ke pulau Kelang yang pada waktu itu berada di bawah pimpinan Gimelaha Daga dan Kaicili Mupaluhu (oleh Valentijn disebut Besi Mulut). Mereka ingin meneruskan peperangan tetapi Daga diperintahkan oleh sultan Ternate untuk berdamai. Sebab itu Rijali bersama Gimelaha Besi ke negeri Lisela di pulau Buru. Di sana ia bertemu dengan keluarga Pati Laik sebagaimana telah diterangkan di atas. Dari pulau Buru Rijali menuju ke Makasar melalui pulau Buton. Di sana ia berdiam bersama Pati Ngaloan yang menurut Rumphius telah menyuruh Rijali menulis hikayatnya. Rijali terpaksa melarikan diri karena ia - sebagai salah seorang pemimpin perlawanan terhadap Belanda, seperti diuraikan di atas - pasti akan mengalami nasib teman-teman seperjuangannya, yaitu dibunuh, seperti Tulukibesi yang oleh Rijali disebut Tubanbesi; ataupun dibuang ke pulau Jawa seperti keempat saudara Tulukibesi yaitu Tulesi, Teakan, Alang dan Usen; dua orang anak Tulukibesi yang bernama Juljalan dan Pelekolan, dua orang anak Kakiali yang bernama Wangsa dan Patinggi, serta Perdana Pati Tuban yang bernama Kelisa dan Bermela (sebenarnya Bermaila) dan seorang Imam yang bernama Tuwele.

Dalam perang Kapahaha ini disebut beberapa nama dan gelar yang perlu disoroti dan diterangkan di sini. Pertama-tama perkataan Kapahaha. Menurut Rumphius Kapahaha, yang juga disebut Mata Hausihol (Hausihol adalah nama daripada sebuah negeri dari Uli Selesi) di zaman Portugis telah diperkuat menjadi suatu benteng oleh Samusamu, ayah dari Tulukibesi, si pahlawan Kapahaha. Samusamu adalah putra ketiga dari Tahalele. Perjanjian antara Belanda dan Tanah Hitu tertanggal 1 Juni 1637 ditandatangani oleh pihak Tanah Hitu oleh Kapitan Hitu dan keempat perdana, tetapi juga oleh Telouki atau Telouca (kedua-dua ejaan menurut Heeres) sebagai orangkaya kapahaha, dan menurut Heeres persetujuan para perdana atas usul Kakiali, maka Teluki diangkat sebagai Tubanbesi. Gelar Tubanbesi untuk pertama kali muncul dalam alkisah ke-XII tentang perang pertama antara Hitu dan Portugis dalam tahun 1538, oleh karena dalam peperangan ini termasyur dua panglima, yaitu Lekalahabesi dan Tubanbesi. Siapa sebenarnya Tubanbesi ini oleh Hikayat Tanah Hitu tidak diterangkan, tetapi Rumphius mengatakan bahwa Tubanbesi yang pertama ialah Sepamola, yang adalah perdana Tanahi-

tumesen yang pertama dan Sepamola gugur di dalam perang melawan Portugis itu. Tubanbesi kedua adalah Tahalele, putra Sepamole dan ayah Samusamu. Ia mendapat gelar itu karena keberaniannya yang istimewa sehingga syamsirnya (=pedangnya) juga mendapat suatu gelar, yaitu Lukululi yang berarti patah tulang. Tubanbesi kedua ini menyerahkan dirinya kepada Portugis bersama perdana Pati Tuban yang bernama Patilima atau putranya. Keduanya dibawa oleh Portugis ke Tidore dan di sana mereka dibunuh. Apakah Samusamu anak Tahalele juga mendapat gelar Tubanbesi tidak dapat kami katakan, yang jelas iapun seorang pendekar di Tanah Hitu. Yang pasti adalah bahwa anak Samusamu, yaitu Tulukibesi, seperti telah dikatakan diatas, mendapat gelar Tubanbesi dan dialah yang terakhir memakai gelar itu. Oleh N. Kandau.dalam bukunya "Hikayat Khotijah" dikatakan bahwa istri Tulukibesi adalah putri dari Kapitan Verheyden, pemimpin pasukan Belanda yang menyerbu dan menundukkan benteng Kapahaha pada tanggal 25 Juli 1646. Dikatakan oleh Kandau bahwa kapal yang ditumpangi Verheyden bersama keluarganya, ketika sedang berlayar ke Ambon, telah mengalami kecelakaan di lautan antara pulau Buru dan pulau Seram, sehingga istrinya, seorang wanita keturunan Portugis yang dikawinnya di Hindustan, meninggal dunia. Anaknya yang tunggal, Lorine, terdampar di pulau Boano dan ketika Patiwani, seorang pahlawan Tanah Hitu dalam peperangan Kapahaha, tiba di Boano, maka anak Verheyden itu diberikan kepadanya dan dibesarkannya di Tanah Hitu. Lorine, yang oleh Patiwani diganti namanya menjadi Khotijah, dikawinkan dengan Tulukibesi. Benar tidaknya keterangan ini tidak dapat kami katakan, malahan Kandou menambahkan bahwa anak Khotijah dengan Tulukibesi, yang bernama Pelelooh (mungkin maksudnya Pelekolan) dibawa dan dipelihara oleh Verheyden di Betawi. Di atas tadi telah dikatakan bahwa Pelekolan dibuang ke Betawi bersama-sama dengan saudara-saudaranya dan beberapa pahlawan dari Kapahaha. Khotijah, yang oleh sementara orang di Ambon disebut Khadijah, tewas di Kapaha, ketika ia menangkis pukulan atau tembakan maut terhadap suaminya dari Verheyden dan dengan demikian Tulukibesi sempat melarikan diri. Kemudian ia menyerah dan dibunuh oleh Belanda. Tentang Khotijah ingin kami catat bahwa menurut Kandou dipasang sebuah papan di atas kuburan Khotijah di Kapahaha dengan tulisan Lorine Verheyden.

Apa artinya Tubanbesi? Hanya Rumphius yang sedikit memberi penjelasan, yakni bahwa tuban ialah kata yang lazim digunakan orang di Tanah Hitu, mungkin juga di seluruh kepulauan Ambon dan sekitarnya, untuk pulau Jawa, dan besi artinya pendekar. Dengan demikian menurut kami Tubanbesi artinya pendekar dari Tuban atau pendekar dari Jawa. Memang, jika kita melihat asal-usul para perdana Tanahitumesen ternyata mereka berasal dari Tuban (Jawa). Para Tubanbesi ini adalah pendekar, hulubalang perang di Tanah Hitu dan bukan para Kapitan Hitu.

Diatas tadi juga telah disebut seorang anak Kakiali, yaitu Patinggi yang juga dibuang ke Jawa. Menurut de Haan[17], Patinggi bersama 10 orang lainnya mula-mula dibuang ke Jawa dan kemudian

dibawa ke pulau Mauritius dalam tahun 1646. Tetapi setahun kemudian ia kembali ke pulau Jawa dan masuk tentara VOC. Ia mencapai gelar letnan dan sering disebut "Pattinggi Nusapati van Hitu". Ia meninggal pada tahun 1707 dan tiga putranya beserta keluarga mereka diperbolehkan kembali ke Ambon. Tetapi Valentijn mengatakan bahwa hanya seorang anaknya, yaitu Abdul Rachman, yang kembali ke Hitu.

Nama Patinggi ini untuk pertama kali disebut dalam Hikayat Tanah Hitu alkisah ke-II, yaitu bahwa kepada perdana Nusapati pertama yang bernama Jamilu oleh Ratu Japara, Nyai Bawang (menurut Valentijn Nyai Kabawang) telah diberi nama Patinggi. Rumphius mengatakan bahwa Jamilu sebagai perdana Nusapati pertama, setibanya di Tanah Hitu mendapat nama Tahaleleela dan dari Japara ia mendapat nama Patinggi.

Demikianlah sekelumit sejarah Tanah Hitu yang dijelaskan dengan mengikuti riwayat Rijali sepanjang yang diceriterakan dalam Hikayat Tanah Hitu. Sejarah tidak pernah mencatat bilamana Rijali meninggal. Bilamana dan siapakah yang membawa naskah atau naskah-naskah Hikayat Tanah Hitu dari Makasar ke Ambon? Dapat dikatakan bahwa Rijali sendirilah yang melakukannya ketika - menurut Rumphius - ia pulang kembali dari Makasar ke Hitu dalam zaman perang Majira, yaitu antara 1651 dan 1652. Ia kemudian kembali lagi ke Makasar karena melihat bahwa Majirapun mulai kalah.

Tinggal sekarang suatu pertanyaan saja, yaitu apakah Rijalilah yang menulis Hikayat Tanah Hitu. Sekurang-kurangnya Rijali adalah sumber utama/sumber tunggal bagi penulisan hikayat itu dan oleh karena Valentijn, dan lebih jelas lagi, Rumphius, sendiri mengatakan bahwa Rijali-lah yang menulis hikayat itu, maka kami dapat menerima bahwa Rijali-lah yang menulisnya, terlebih lagi karena belum ada keterangan yang menentang pendapat ini.

C. Pemerintahan

1. Asal pemimpin-pemimpin lembaga pemerintahan

Adapun setelah a. Pati Selan Binaur (atau Zamanjadi, yang berasal dari Tanunu - Seram Barat), dan b. Perdana Mulai (yang berasal dari Tuban - Jawa), c. Perdana Jamilu (dari Jailolo), dan d. Perdana Kipati (atau Kyai Pati yang berasal dari Goron - Seram Laut), tiba di Tanah Hitu, maka masing-masing mereka mendirikan negeri. Hikayat tentang tibanya Pati Selan Binaur tidak terdapat dalam naskah yang kami pergunakan, karena - sebagaimana telah diuraikan di atas - riwayat itu terdapat dalam halaman pertama dari Hikayat Tanah Hitu yang telah rusak atau hilang. Dengan demikian kami hanya dapat mengutip Valentijn yang mengatakan bahwa Pati Selan Binaur ini mulanya bertempat tinggal di atas bukit Paunusa, tetapi kapan ia tiba di sana tidak disebutkan. Apakah benar ia berasal dari Tanunu di Seram Barat atau dari Benaur di Seram Timur dan kemudian baru pergi ke Tanunu untuk selanjutnya ke Tanah Hitu tidak dapat dipastikan pula. Melihat namanya yang kedua, ya-

itu Zamanjadi, kami beranggapan seakan-akan nama ini diberikan kepadanya oleh karena ia sebagai pendatang pertama di Tanah Hitu telah memulai zaman baru di Tanah Hitu (jadi arti nama itu adalah lahir atau terbentuk).

Di dalam alkisah ke-II sama sekali tidak disebut tibanya seorang yang bernama Pati Mulai; yang disebut di sana hanyalah Kyai Tuli, Kyai Dau (d) dan seorang saudara perempuannya yang bernama Nyai Mas, yang berasal dari Tuban. Apakah Kyai Tuli atau Kyai Dau(d) yang menjadi perdana dari bangsa ini ataukah yang disebut oleh Rijali penghulu kelengkapan (pemimpin armada) yang telah mengadakan pembicaraan dengan penduduk Tanah Hitu pada waktu mereka tiba di sana? Kemungkinan besar mereka bukan berasal dari Tuban tetapi dari tempat lain di pulau Jawa, karena sebagaimana telah kami uraikan di atas, yang dimaksudkan dengan Tuban di Hitu adalah pulau Jawa. Nama lain dari pada Perdana Mulai ialah Sepamole, sebagaimana telah disebut pula di atas.

Pendatang ketiga ialah Jamilu, yang sebagaimana telah dikatakan di atas, juga bernama Patinggi dan Tahaleleela. Rijali mengatakan bahwa ada dua bangsa di negeri Jailolo, satu bangsa Jailolo dan satu bangsa Jawa, tetapi keduanya adalah bangsawan, putra raja. Ini dapat diartikan bahwa seorang di antara mereka adalah putra permaisuri raja yang berasal dari Jailolo dan seorang lagi adalah putra dari permaisuri yang berasal dari Jawa, yang terakhir inilah yang bernama Jamilu. Untuk menghindarkan perang saudara sebagai akibat dari persengketaan mengenai siapa yang akan menggantikan raja, maka Jamilu meninggalkan negerinya, berlayar ke jurusan selatan dan akhirnya tiba di jazirah Hitu. Menurut Valentijn, Jamilu meninggalkan Jailolo pada tahun 1465; Rijali sering menamakannya Jamilu Bijaksana karena tindakan-tindakannya yang bijaksana. Seorang saudara Jamilu bernama Kyai Pati menjadi Orangkaya di Lisabata (Seram Utara), tetapi Valentijn menamakannya Pati Rumerai.

Pendatang keempat, Kipati atau Kyai Pati tiba dari Goron dalam tahun 1400, di pantai Nukohali dekat sungai yang bernama Wai Olon. Apakah Kipati atau Kyai Pati adalah nama sebenarnya atau tidak, tidak jelas, karena menurut Rumphius ia diberi gelar Pati setelah ia menikah dengan putri Jamilu, dan Valentijn mengatakan bahwa raja asal dari Goron ini namanya adalah Pati Lain.

2. Susunan pemerintahan

Keempat pedatang itu masing-masing mendirikan negeri, yaitu Zamanjadi mendirikan negeri Sopele, Perdana Mulai mendirikan negeri Waipaliti, Jamilu mendirikan negeri Latim dan Kyai Pati mendirikan negeri Olon. Pada suatu ketika keempat pemimpin itu berembuk dan mengambil keputusan untuk menggabungkan negeri-negeri mereka dan keempat pendtang menjadi perdana-perdananya dengan gelar sebagai berikut:

a. Pati Salaun Binaur atau Zamanjadi digelar Totohatu;
b. Mulai digelar Tanahitumesen, yang menurut Rumphius adalah azas atau dasar Tanah Hitu;

c. Jamilu mendapat gelar Nusapati, yang berarti yang telah mendamaikan nusa (pulau), sebab ia telah mendamaikan Perdana Tanahitumesen dengan Totohatu ketika keduanya berperang;
d. Pati Lian, Kipati atau Kyai Pati, digelar Pati Tuban. Menurut Valentiyn semula gelarnya adalah Pati Tuha atau menurut Hikayat Tanah Hitu transkripsi Jansen, Pati Tua; kemudian baru diganti menjadi Pati Tuban. Dengan demikian gelar itu tidak menunjukkan bahwa ia berasal dari Tuban, seperti halnya dengan perdana Tanahitumesen. Rumphius menambahkan bahwa Perdana Pati Tuban yang pertama ini juga digelar Maulana.

Totohatu, Tanahitumesen, Nusapati, dan Pati Tuban bukanlah nama baru bagi para perdana, tetapi gelar yang diberikan kepada mereka yang bertugas sebagai perdana, tugas-tugas mana dipegang oleh orang-orang yang berasal dari keluarga-keluarga itu pula. Pada masa kemudian datang pula suatu bangsa lain yang terdiri dari tiga kaum dan tiga kampung, yaitu Hunut, Tomu dan Mosapal. Ketiganya ditambahkan kepada keempat negeri para perdana tersebut sehingga jumlahnya menjadi tujuh sehingga dengan demikian negeri itu dinamakan tujuh atau Hitu. Namun menurut Abdul Sukur perkataan hitu berasal dari bahasa Ternate etu yang berarti dapur. Pada suatu ketika Kapitan Hitu (tidak disebut namanya) memindahkan kampungnya Latim serta kampung-kampung Olon, Sopele dan Mosapal ke sebuah tempat yang dinamakan Hila; negeri-negeri lainnya yang tidak dipindahkan dinamakan Hitulama. Dengan demikian kami berpendapat bahwa uraian Abdul Sukur tersebut di atas tidak tepat. Dengan penambahan ketiga kampung tersebut di atas jumlah para perdana tidak ditambahkan. Keempat orang perdana tersebut mengangkat 30 orang galaran yang oleh Abdul Sukur dinamakan galungan dan dari ke-tigapuluh orang galaran itu diangkat tujuh orang penggawa. Tentang kedua lembaga ini Rijali hanya mengatakan bahwa mereka mengerjakan segala pekerjaan yang diberikan oleh para perdana; atau apabila ada sesuatu yang harus dilakukan, maka keempat perdana tersebut harus memberi persetujuan mereka dahulu, dan kemudian kepala dari ketiga negeri tersebut diajak merundingkannya, dan baru sesudah itu diteruskan kepada ketujuh penggawa tersebut dan ketigapuluh galaran.

Apakah para penggawa dan para galaran atau gulungan ini juga merupakan kepala pemerintahan tidak dapat dijelaskan oleh Rijali; tetapi Valentijn mengatakan bahwa Tanah Hitu dibagi dalam tujuh Uli atau persekutuan (gemeenschap), yaitu Uli Helawan (helawan = emas), Saylessi, Sawani, Hatunuku, Ala, Nau Binau dan Solemata; masing-masing mempunyai kepala, yaitu para penggawa. Para penggawa adalah kepala dari lima buah negeri di enam Uli karena tidak termasuk ke dalamnya Uli Helawan. Tetapi Rumphius mengatakan bahwa tiap negeri dikepalai oleh seorang Orangkaya dan setiap uli oleh seorang kepala yang memimpin rapat-rapat uli. Tentang jumlah negeri di Tanah Hitu ia menjelaskan bahwa 30 negeri di sana itu adalah tiga buah di uli Helawan masing-masing Hunut, Tomu dan Mosapal; dua negeri di uli Solemata serta lima negeri dalam lima uli lainnya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa oleh karena uli-uli

di Tanah Hitu pada umumnya terdiri dari lima negeri, maka mereka tergolong persekutuan ulilima seperti halnya dengan Urimesen di Leitimor yang juga terdiri dari lima negeri masing-masing Puta, Kapa, Seri, Sima dan Awaha. Selain itu terdapat pula suatu gabungan dari sembilan negeri atau ulisiwa yang terdiri dari negeri-negeri yang terdapat di sebelah barat Tanah Hitu, yaitu negeri-negeri Uring, Asilulu, Larike, Wakasihu yang sebenarnya adalah gabungan dari tiga negeri,dan Tapi, Alang dan Liliboi. Apa sebenarnya tujuan dari uli terakhir ini tidak dapat kami katakan.

Menurut Abdul Sukur ketujuh penggawa dan tempat kedudukan mereka adalah:

1.	Siatu	di Hitu (Uli Helawan)
2.	Latuhelu	di Lima (Uli Nau Binau)
3.	Helalatu	di Seith (Uli Ala)
4.	Heilessi	di Kaetetu (Uli Hutunuku)
5.	Titawahitu	di Wakal (Uli Sawani)
6.	Maatitauen	di Hila (Solemata?)
7.	Pikassao	di Tomo (Uli Selesi?)

Kita melihat bahwa kedudukan Maatitauen di Hila dan Pikassou di Tomo tidak dapat diterangkan, karena Tomo termasuk Uli Helawan dan Hila sebenarnya terletak dalam wilayah Uli Ala. Selanjutnya Sukur menerangkan bahwa adat keempat perdana ialah:

Totohatu	hijau atau biru (keduanya dalam bahasa tanah disebut mala)
Tanahitumesen	hitam
Nusapati	merah, dan
Pati Tuban	kuning.

Warna yang dipakai oleh para penggawa adalah sama dengan yang dipakai oleh Totohatu, yaitu hijau atau biru, karena, katanya, menurut usul Totohatulah lembaga penggawa itu diadakan. Selanjutnya Sukur mengatakan bahwa orangkaya negeri Mamala adalah kepala dari para penggawa. Apa yang dimaksud dengan "kepala dari para penggawa" itu tidak diterangkan; apakah ia semacam perantara antara para perdana dan para penggawa lainnya? Juga tidak diterangkan tentang warna yang harus dipergunakan oleh para gelaran atau gulungan.

Sesudah Pati Tuban kembali dari Jawa maka muncul suatu lembaga baru dalam pemerintahan Tanah Hitu, yaitu lembaga Raja. Menurut Rijali yang diangkat menjadi raja yang pertama adalah seorang dari keturunan Kyai Tuli, yang sebagaimana telah kami jelaskan di atas, adalah seorang dari dua putra raja Tuban yang telah tiba di Hitu sebelum Jamilu. Raja Tanah Hitu yang pertama diberi gelar Raja Sitania, artinya raja tempat bertanya atau raja yang bertanya. Bahwa lembaga baru ini dibentuk setelah Pati Tuban kembali dari pulau Jawa menyebabkan kami mengambil kseimpulan bahwa kemungkinan besar Pati Tuban yang telah membawa pengaruh dari yang dilihatnya di luar daerahnya sendiri, sehingga harus ada seorang yang bergelar sultan atas raja. Apa sebenarnya tugas raja ini dan apakah ia lebih tinggi kedudukannya dari pada para perdana? Seperti telah dikatakan di atas, arti gelar raja Sitania ada-

lah raja tempat bertanya dan Rijali mengatakan bahwa "amar dan nahi" (titah dan larangan) adalah hak keempat perdana dan Rumphius mengatakan bahwa kepada Latu Sitania rakyat mengajukan persoalan-persoalan mereka, sedangkan yang mengambil keputusan adalah hanya para perdana dan keputusan para perdana itu harus diteruskan kepada rakyat oleh raja. Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan raja adalah semacam lambang kepala pemerintahan dengan tugas yang terbatas, yaitu tempat rakyat mengajukan persoalan-persoalan mereka, dan pemerintahan tetap berada dalam tangan para perdana. Lembaga raja ini sampai tahun 1646 tetap ada dan sesudah berakhirnya peperangan di Tanah Hitu maka pemerintahan para perdana ditiadakan oleh Belanda, demikian pula lembaga Kapitan Hitu. Dan yang mengambil alih tugas pemerintahan untuk Hitulama adalah Raja Hitu. Bagaimana nasib daripada para penggawa dan ketiga gelaran di Uli Helawan tidak kami ketahui. Yang terang ialah bahwa penggawa di lain uli dipertahankan oleh Belanda dan mereka menjalankan tugas mereka sebagai kepala pemerintahan negeri di samping menjadi anggauta dari dewan yang kemudian akan dibentuk juga di jazirah Hitu oleh Belanda.

Sesudah orang-orang Portugis tiba di Hitu maka timbul suatu lembaga baru, yaitu lembaga Kapitan Hitu. Tentang peristiwa kedatangan rombongan Portugis yang pertama ini Rijali menulis bahwa pada waktu Jamilu mendengar bahwa di laut pulau Tiga ada sebuah perahu dengan sekelompok manusia, yang menurut pembawa berita belum pernah dilihatnya, maka ia memerintahkan untuk membawa mereka ke hadapannya. Pulau Tiga adalah pulau-pulau di hadapan negeri Asilulu dan menurut Rumphius negeri Asilulu ini disebut oleh orang Portugis Rucutellum, yang berasal dari Nusatelo atau Pulau Tiga. Orang-orang Portugis yang pertama mendarat di tanah Hitu dipimpin oleh Fransico Serano. Mereka terdampar di kepulauan Nusapinyo (Lusipara) ketika kapal mereka hendak berlayar pulang dari Banda ke Malaka dan dari Lucipara mereka dibawa oleh sebuah perahu perompak ke Tanah Hitu dalam tahun 1515. Menurut Rumphius bukan rombongan Serano ini orang-orang Eropa pertama yang telah mendarat di sana, melainkan rombongan Portugis lain di bawah pimpinan Ludovicus Vartomannus yang tiba di sana dalam tahun 1506. Rijali tidak pernah memberi keterangan ini. Sesudah Seranno, maka mulai mengalirlah orang-orang Portugis dan sesudahnya orang-orang Eropa lainnya.

Dalam penjelasan Rijali tentang pembicaraan pihak Tanah Hitu dengan orang-orang Portugis hanya ditonjolkan seorang perdana, yaitu perdana Jamilu dan bukan keempat perdana sebagai suatu kesatuan, atau suatu dewan. Tetapi Rumphius mengatakan bahwa keempat perdana itu merupakan suatu dewan yang diketuai oleh yang tertua usianya dan bahwa ketika rombongan Portugis tersebut tiba, maka Jamilulah yang menjadi ketua. Sebab itu maka Jamilu oleh orang-orang Portugis diberi nama "Kapitan" sebagai suatu tanda kehormatan dan terimakasih atas pelayanan yang baik dan gelar itu kemudian diperkuat oleh Raja Portugal sehingga Jamilu menerima

gelar lain lagi yaitu "Don". Dengan demikian maka timbullah suatu lembaga baru di dalam cara pemerintahan Tanah Hitu setelah tahun 1515.

Apakah tugas Kapitan Hitu sebenarnya? Dalam sejarah setelah 1515 akan kita lihat bahwa lembaga inilah yang akan memegang peranan penting dalam menghadapi bangsa-bangsa asing sehingga lembaga perdana terdesak dari tempat yang teratas dalam sistem pemerintahan di Tanah Hitu. Peranan Kapitan Hitu umpamanya kita lihat dalam pembicaraan antara Hitu dengan Belanda. Perjanjian antara Tanah Hitu dengan VOC tertanggal 1 Juli 1620 ditandatangani dari pihak Hitu oleh Kapitan Hitu ["Kapitein -capitao- Hitu met de vier hoofden des lands (orangkaya ampat)"], sedangkan dalam perjanjian tertanggal 17 Juni 1633 ditentukan bahwa Kakiali diangkat sebagai "opperhoofd" dan Kapitan Hitu. Jabatan Kapitan Hitupun telah menjadi hak warisan para perdana Nusapati; yang pertama adalah Jamilu, yang juga disebut Tahalele-ela dan Patinggi, kedua putranya Abubakar atau Healatu; ketiga putra Abubakar yang bernama Tepil yang terakhir memangku jabatan ini karena setelah ia meninggal pada tahun 1633 maka ia diganti oleh saudaranya yang bernama Baros sebagai Nusapati, dan sebagai Kapitan Hitu diangkat putranya yang bernama Kakiali. Setelah Kakiali tewas dalam tahun 1643 di Wawani maka dari pihak Belanda dilarang mengangkat seorang Kapitan Hitu baru. Tetapi secara rahasia penduduk Tanah Hitu mengangkat putra Kakiali yang bernama Wangsa. Setelah berakhirnya perang Kapahaha Wangsa dibuang ke pulau Jawa bersama saudaranya yang bernama Patinggi serta pahlawan-pahlawan Hitu lainnya.

Sebelum Kakiali menjadi Kapitan Hitu ia telah memangku jabatan Hukum semasa ayahnya yang bernama Tepil itu. Jabatan Hukum ini menurut Rumphius artinya fiscaal, yaitu sama dengan hakim. Jabatan ini dipangku oleh Kakiali setelah saudaranya Haelani meninggal pada tahun 1630. Haelani yang mati karena diracun wanita mestiso Portugis dalam tahun 1607 dibawa ke negeri Belanda bersama-sama anak Raja Nusaniwe, anak Orangkaya Lakatua dan anak Orangkaya Natahuat kata Rijali. Mereka kembali ke Ambon bersama Gubernur Jenderal Pieter Both dalam tahun 1614. Sejak tiba kembali di Ambon Haelani mendapat suatu julukan, yakni "Kapitan Kaos" karena ia selalu berpakaian sebagai orang Eropa (bersepatu dan kaoskaki). Ia menjadi Hukum dalam tahun 1623 setelah saudaranya Arinjiguna meninggal dunia di Betawi pada tahun 1622. Jabatan Hukum ini untuk pertama kali disebut dalam Hikayat Tanah Hitu bagi Abubakar, ayah dari Tepil. Apakah Jabatan Hukum inipun menjadi hak warisan bagi turunan Jamilu, artinya apakah yang bakal menjadi perdana Nusapati atau yang bakal menjadi Kapitan Hitu, juga harus memangku jabatan ini tidak dijelaskan oleh Rijali maupun oleh penulis-penulis Belanda lainnya.

Di atas telah kita lihat bahwa ketiga putra Tepil, yaitu Arinjiguna, Haelani dan Kakiali meninggal dunia atau tewas dan tiga orang anak Tepil lainnya, yaitu tiga orang wanita, mengalami

nasib yang malang pula oleh karena suami-suami mereka mati dibunuh oleh Belanda, yaitu Gimelaha Luhu, Pati Kambelo dan Seke dari Boano.

Aertus Gijsels[18] mengatakan bahwa jika para pemimpin Tanah Hitu berjalan ke baileo (=balairung, tempat musyawarah), urutannya adalah sebagai berikut: di depan sekali adalah Raja Hitu, diikuti oleh Pati Tuban lalu Nusapati (Kapitan Hitu), Tanahitumesen dan akhirnya Totohatu. Dari urutan ini jelas bahwa yang harus membuka jalan ialah pemangku jabatan yang terakhir dibentuk, sesudah itu para perdana berurutan, dari belakang ke depan menurut saat tiba mereka ke Tanah Hitu.

3. Silsilah Nusatapi

a. Perdana Nusatapi

Sebagai perdana Nusatapi Tepil diganti oleh saudaranya Baros yang dalam tahun 1645 dibunuh oleh Belanda di Ambon karena dicurigai bersekutu dengan para pahlawan Kapahaha. Oleh Belanda adik Baros yang bernama Lisalaik diangkat sebagai Orangkaya di Kampung Latim. (Tokoh ini telah kita sebut dalam pertemuannya dengan Rijali di Buru). Nama julukan Latu Lisalayk adalah "Orangkaya Bulan" karena bagian depan dari kepalanya botak, julukan ini telah menjadi gelar turunan perdana Jamilu selanjutnya, oleh karena dari pihak Belanda mereka tidak lagi diperkenankan mempergunakan gelar Nusatapi. Dengan demikian maka silsilah singkat perdana Nusatapi adalah sebagai berikut:

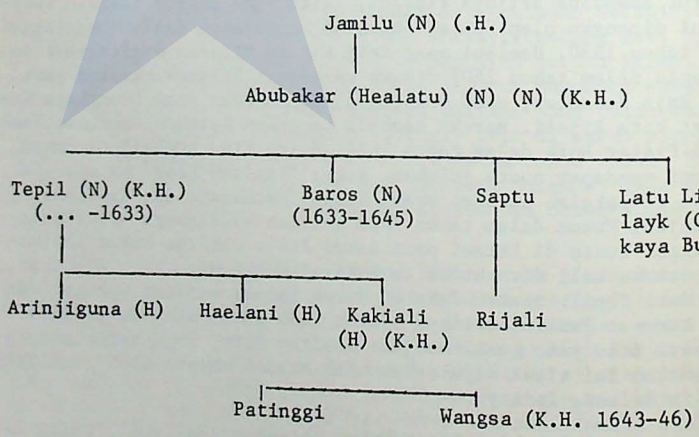

N = Nusatapi; K.H. = Kapitan Hitu; H = Hukum.

b. Silsilah singkat perdana Tanahitumesen (T) dan Tubanbesi (T.B.) sampai dengan tahun 1646 adalah:

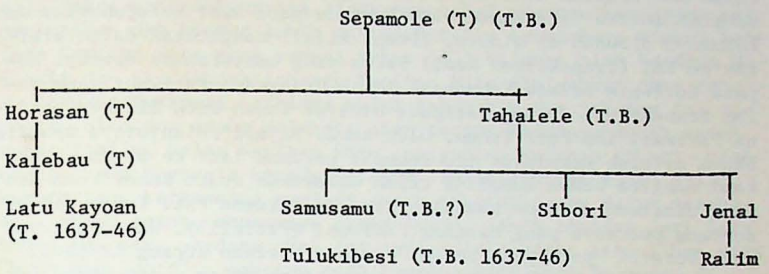

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Tahalele telah menyerahkan diri kepada Portugis pada awal abad ketujuhbelas dan dibunuh di Tidore. Tulukibesi pahlawan Kapahaha ialah Tubanbesi terakhir dan Latu Kayoan, pada waktu Kakiali berada di dalam tawanan Belanda dari 1634-1637 diangkat oleh gubernur jendral van Diemen sebagai Kapitan Hitu dan oleh karena Latu Kayoan bukan dari keturunan yang berhak memangku jabatan itu, maka pengangkatannya oleh Belanda telah menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan di kalangan Tanah Hitu. Dalam tahun 1637 Latu Kayoan, yang juga disebut orangkaya Tua, karena ia berdasarkan usianya menjadi ketua daripada para perdana, dibebaskan dari tugasnya sebagai Kapitan Hitu dan di dalam tahun 1646 ia diganti oleh Ralim yang bergelar Orangkaya Ternate, suatu nama yang diberikan kepadanya karena ia dilahirkan di Ternate. Tidak disebut di mana Ralim menjadi Orangkaya, akan tetapi kemungkinan besar di Waipaliti. Sibori, anak Tahalele, yang bernama Arinjiguna ke Banten untuk mencari Belanda.

C. Silsilah ringkas perdana Pati Tuban (P.T.) sampai 1646.

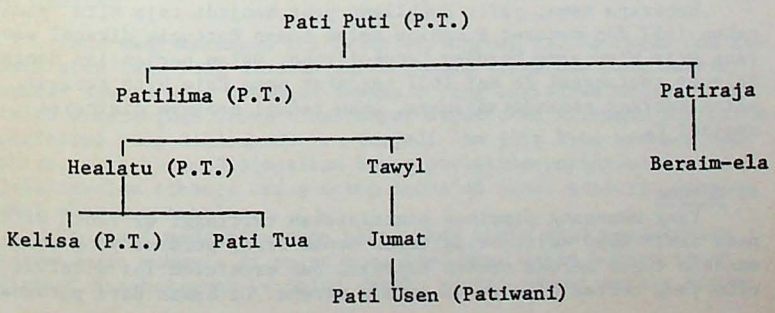

Pati Puti, Pati Tua dan Pati Lian yang pada awal abad keenambelas berangkat ke tanah Jawa untuk menuntut pelajaran dalam agama Islam menurut Rumphius penggantinya ialah putranya Patilima yang telah menyerahkan diri kepada Portugis bersama Tubanbesi Tahalele setelah mereka dikalahkan oleh Furtado pada awal ketujuhbelas dan keduanya dibunuh di Tidore. Tetapi Rijali mengatakan dalam alkisah ke XXI (transkripsi kami) bahwa yang menyerahkan dirinya kepada Portugis selain Tubanbesi ialah Orangkaya Patiwani yang dalam transkripsi Jansen daripada Hikayat Tanah Hitu disebut perdana Patiwail ibn Pati Tuban. Oleh sebab Rijali selanjutnya menulis bahwa setelah kekalahan itu keempat perdana lari ke Seram, maka kami mengira bahwa Rumphius telah melakukan suatu kekeliruan dan yang dimaksud di sini bukanlah seorang perdana Pati Tuban tetapi seorang putranya yang bernama Patiwani (Patiwil?). Nama Patiwani yang berarti "pati yang berani" juga diberikan kurang lebih 35 tahun kemudian kepada Pati Usen yang tewas dalam suatu pertempuran melawan Belanda di laut depan Rumakai (Seram) dalam tahun 1644. Patiwani terakhir ini, menurut Rumphius, kawin dengan adik perdana Nusatapi, Baros. Bermain-ela atau oleh penulis-penulis Belanda disebut Bermela, adalah seorang Imam yang dalam zaman Kakiali bertindak sebagai kepala dari kampong Olon, dan bersama dengan perdana Pati Tuban, yang bernama Kelisa, dibuang ke pulau Jawa dalam tahun 1646. Kelisa diganti oleh adiknya Pati Tua, artinya ia diangkat oleh pihak Belanda sebagai Orangkaya di Kampung Olon.

d. Silsilah para perdana Totohatu tidak diberikan baik oleh Rijali (transkripsi Jansen) maupun oleh Rumphius sehingga berdasarkan bahan lain, umpamanya Corpus Diplomaticum, hanya dapat kami sebut beberapa nama dari para Totohatu, yaitu Solice atau Soulissa yang disebut dalam perjanjian tertanggal 28 Mei 1637 sebagai salah satu penandatangananannya, dan dalam sebuah perjanjian lain tertanggal 26 Mei 1634 di mana Totohatu disingkat dengan P yang menurut Rijali menjadi Totohatu dalam tahun 1637, yaitu yang bernama Mulutan. Akhirnya, yang diangkat menjadi perdana Totohatu secara rahasia dalam tahun 1646, menurut Valentijn, adalah Heatomu.

e. Silsilah para Raja Hitu juga tidak dapat kami berikan selain beberapa nama, yaitu Hongilamu yang menjadi raja Hitu pada tahun 1637 dan menurut Rumphius dalam zaman Portugis dikenal seorang Raja Hitu yang bernama Latuholituho. Dalam perjanjian dengan Belanda tertanggal 28 Mei 1637 tercatat nama Raja Hitu sebagai salah seorang penandatangannya, akan tetapi namanya disingkat menjadi P.

4. Resume

Yang memegang pimpinan pemerintahan tertinggi di Tanah Hitu pada akhir abad kelimabelas ialah empat orang perdana yang melaksanakan tugas mereka secara kolegial dan presidium ini diketuai oleh yang tertua usianya di antara mereka. Di bawah para perdana

ini ialah tujuh orang penggawa sebagai kepala dari tujuh uli, yang diangkat dari antara tigapuluh orang gelaran atau gulungan yang mengepalai tigapuluh buah negeri di dalam ketujuh uli tersebut. Pada awal abad keenambelas muncul suatu lembaga baru, yaitu Raja Hitu, yang sebenarnya tidak mempunyai sesuatu kekuasaan pemerintahan dan kurang lebih duapuluh tahun sesudahnya timbul lembaga Kapitan Hitu yang sampai tahun 1633 dijabat oleh Perdana Nusapati dan sesudahnya jabatan Kapitan Hitu dipisahkan dari jabatan perdana Nusapati, artinya mulai tahun itu dua jabatan ini dipangku oleh dua orang pejabat, akan tetapi keduanya masih keturunan Jamilu. Gelar Kapitan Hitu, yang pada mulanya diberi oleh orang-orang Portugis kepada Perdana Jamilu sebagai suatu gelar kehormatan, berkembang menjadi suatu jabatan, yang dalam menghadapi orang asing, khususnya orang Eropa, lebih penting dari pada kedudukan para perdana. Hal ini antara lain dapat kita lihat pada "het opperhoofd", sebutan pada Kapitan Hitu oleh Belanda. Di samping lembaga Kapitan Hitu masih ada lagi suatu jabatan yang menjadi hak turun-temurun perdana Jamilu, yaitu jabatan Hukum di Tanah Hitu, semacam hakim. Lembaga Kapitan Hitu janganlah kita samakan dengan jabatan kapitan, kapitan perang, yang antara lain dijabat oleh Patiwani dalam perang Kapahaha. Jabatan ini adalah sama dengan pendekar perang, bukan hulubalang perang di Tanah Hitu karena yang menjadi hulubalang ialah yang bergelar Tubanbesi, suatu jabatan yang menjadi hak turun-temurun perdana Tanahitumesen. Setelah berakhir perang Kapahaha, maka Belanda menghapuskan sistem pemerintahan yang telah menjadi adat di Tanah Hitu selama kurang lebih 150 tahun dan pemerintahan di sana disamakan dengan sistem di jazirah Leitimor. Lembaga perdana dan Kapitan Hitu ditiadakan dan lembaga Raja Hitu waktu itu menjadi suatu lembaga pemerintahan, yaitu di negeri Hitulama.

III. NUSA LAUT

A. Sejarah

Pada awal karangan ini telah disinggung isi daripada dua kapata atau lagu yang disusun dalam bahasa tanah dan yang isinya hampir sama dengan karangan Tanasale yang berbahasa Melayu. Juga telah diterangkan bahwa tidak dapat dipastikan bilamana peristiwa-peristiwa yang dikisahkan itu terjadi dan jika kita membaca Rumphius, maka harus disimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadi sebelum tibanya orang-orang Eropa di sana, artinya sebelum awal abad keenambelas.

Kapata I menceriterakan bahwa pada suatu saat mendaratlah serombongan manusia di pulau Nusa Laut yang dalam bahasa tanah disebut Nusahulawano (= pulau emas), pantai tempat mereka menda-

rat adalah Siralau. Menurut Tanasale mereka berasal dari pulau Ambon, Banda, Ternate, Irian, Buru, Manipa dan Hoamoal, tetapi berdasarkan keterangan-keterangan yang kami peroleh dapat dipastikan bahwa mereka berasal dari pulau Seram, khususnya di bagian tengah pesisir selatan pulau itu. Hal ini diperkuat oleh G.W.W.C. Baron van Hoevell yang mengatakan bahwa bahasa tanah yang dipergunakan di sana adalah termasuk golongan dialek Hatuaha yang meliputi pesisir selatan Seram Tengah dan berhadapan dengan kepulauan Lease serta kepulauan Lease sendiri. Apa alasan mereka untuk pindah dari pulau Seram yang luas itu untuk datang ke pulau yang kecil dan terpencil ini tidak diberitahukan, akan tetapi pasti bukan karena alasan ekonomis oleh karena pulau Seram cukup luas dan subur; transmigrasi ini kiranya merupakan akibat daripada perkelahian antar daerah atau antar golongan.

Kapata II mengkisahkan peperangan antara para pendatang melawan penduduk yang telah ada di sana dan bertempat tinggal di hena (= negeri) Lesiela dengan pimpinan seorang upu latu (bapak raja) Leemese yang berasal dari Boano. Malesi atau maresi (= kapitan perang) dari Leemese bernama Maahaa, artinya empat mata (maa = mata, haa = empat). Nama ini diberikan kepadanya karena, menurut keterangan penduduk di Nusa Laut, dalam peperangan ia selalu mempergunakan sebuah perisai yang ditempeli dua buah batu kaca sehingga ia dapat melihat ke belakang tanpa menoleh. Tetapi ternyata Kapitan Maahaa dikalahkan oleh pendatang-pendatang tersebut dalam suatu perkelahian terakhir di pantai Mulaa; Raja Leemese juga kembali lagi ke Boano sedangkan sebagian dari rakyatnya melarikan diri ke Seram Timur dan Goron.

B. Pemerintahan

Setelah pendatang-pendatang baru itu tiba di pantai Siralau mereka mengadakan perundingan tentang pembagian pulau itu dan sebermula pulau itu mereka bagi menjadi dua bagian, yaitu Inahaha (= ibu di bagian di atas) dan Inalulu (ibu di bagian di bawah) dengan pimpinan upu latu Pahanusa beserta teun Peetihu di bagian yang pertama dan upu latu Pikauli dengan teun Laurissa di bagian kedua tersebut. Dua bagian itu menurut kami tidak lain daripada persekutuan yang dikenal dengan nama uli, meskipun perkataan itu tidak digunakan dalam kapata-kapata tersebut. Teun artinya kaum atau bangsa (geslacht) yang diikat oleh pertalian darah yang sama menurut garis kebapaan dan dapat disamakan dengan perkataan lumatau yang dipergunakan di pulau Ambon.

Kedua bagian atau uli itu terbagi lagi, yaitu Inahaha dibagi antara hena Lesinusa di bawah upu latu Lesinusa yang dengan demikian mempunyai dua tugas yaitu sebagai kepala hena dan sebagai kepala uli; kemudian hena Kakerisa di bawah upu pati Manusama (teun Sitania), Henasiwa di bawah upu latu Tanasale (teun Soohahu), sedangkan upu latu pati Soselisa (teun Loakutu) mengepalai hena Hetalepa-pewae dan sekaligus ditugaskan menjaga pantai Siralau.

Inaluhu dibagi antara hena Samasuru di bawah upu latu Pikauli di samping tugasnya sebagai kepala uli; Risapori Henalatu dibawah upu pati Patinala (teun Sopamena) dan hena Tounusa di bawah upu pati Tahapari (teun Peetihu). Dalam pembagian wilayah antara ketujuh hena terdapat suatu keanehan, yaitu bahwa daerah Mulaa, wilayah upu latu Leemese dan tempat di mana ia telah dikalahkan oleh pendatang baru itu, diberikan kepada hena kedua upu latu, walaupun daerah itu terletak di antara hena Kekarisa dan Tounusa, jauh dari hena kedua upu latu itu sendiri.

Dari pembagian tersebut di atas kita lihat bahwa kedudukan upu latu lebih tinggi dari pada kedudukan upu pati, akan tetapi dari bahan-bahan setempat tidak nyata, demikian pun dari bahan-bahan Belanda, apa sebenarnya tugas dari pada upu latu di dalam ulinya, atau kewajiban upu pati terhadap upu pati lau lainnya. Pasti sistim pembagian serupa ini telah mereka bawa dari tempat mereka, hal mana sekaligus membuktikan bahwa mereka bukan lagi kelompok-kelompok manusia yang masih mengembara, tetapi telah mengenal tempat tinggal yang tetap.

Apakah pembagian pulau Nusa Laut menjadi dua bagian itu ada hubungannya dengan sistem yang sudah lama digambarkan oleh sarjana-sarjana Eropa sebagai sistem tweedeeling? Hal pembagian serupa ini kita lihat juga umpamanya di Saparua, yang dibagi menjadi Honimoa dan Hatawano; Haruku yang dibagi menjadi Hatuaha dan Oma; Ambon dibagi menjadi Hitu dan Leitimor. Apakah sistem ini memang suatu sistem khas di wilayah Ambon dan sekitarnya atau dengan perkataan lain, apakah ini suatu filsafat hidup pribumi di sana dahulu? Contoh lain, yang dapat digolongkan sebagai tweedeeling ialah umpamanya pertentangan-pertentangan antara Ulisiwa dan Ulilima (di kepulauan Lease: Patasiwa dan Patalima), laut dan darat, kiri dan kanan, mena dan muria (muka dan belakang), hitam dan putih. Jika benar bahwa tweedeeling ini dapat dikatakan filsafat hidup penduduk pribumi di sana dalam zaman dahulu maka timbul pertanyaan apakah filsafat hidup tweedeeling ini dapat dikatakan filsafat hidup yang sederhana, artinya yang belum berkembang ke suatu filsafat yang kompleks?

Apakah istilah hena yang dalam Kapata I artinya negeri (kampung) dapat disamakan dengan aman ataukah sebuah hena terdiri dari beberapa aman? Pertanyaan ini tidak dapat kami jawab karena kekurangan bahan.

Umumnya dianggap bahwa uli-uli yang termasuk Ulisiwa terdiri dari sembilan negeri dan yang tergolong Ulilima terdiri dari lima negeri, akan tetapi kedua uli di pulau Nusa Laut yang masing-masing terdiri dari empat dan tiga negeri (hena) adalah golongan Ulilima dan menurut Rumphius di Nusa Laut memang hanya terdapat tujuh negeri dari zaman sebelum tibanya Portugis. Apakah memang tiap uli dari Patasiwa harus terdiri dari sembilan negeri dan dari Ulisiwa harus terdiri dari lima negeri ataukah istilah siwa dan lima mempunyai arti sembilan dan lima dalam hubungan lain dalam masyarakat di sana?

Menurut hemat kami tiap hena terdiri dari beberapa uku, ukuol atau soa, dan kata yang terakhir inilah yang sekarang terkenal. Uku adalah suatu kata yang dipergunakan oleh Jansen[19] dan ukuoal kami kutip dari suatu nota tertanggal 5 Agustus 1848 kepada Residen Ambon dari Latumaerissa, raja negeri Paperu[20] suatu negeri di pulau Saparua. Menurut hemat kami uku terdiri dari beberapa teun tanpa adanya pertalian darah antar teun-teun seuku itu, dan teun terdiri dari beberapa rumahtangga yang harus ada pertalian darah di antaranya (menurut garis kebapaan). Kepala dari suatu uku yang sekarang dikenal dengan sebutan kepala soa, dan yang oleh Jansen disebut upu, dipilih oleh dan dari antara kepala teun se-uku. Para kepala uku dan kepala soa ini mengangkat seorang di antara mereka untuk menjadi kepala hena, upu pati, upu latu atau Orangkaya, dan mereka ini dianggap sebagai seorang primus inter paris. Pemilihan kepala hena serupa ini masih kita lihat sampai dalam abad yang lalu karena dalam Staatsblad 1824 no 19a yang ditandatangani oleh Gubernur Jendral Baron van der Capellen di Ambon pada waktu ia berkunjung ke sana, ditetapkan bahwa kepala suatu negeri dipilih oleh para kepala soa bersama tua agama di negeri-negeri yang beragama Kristen atau kasisi di negeri-negeri yang beragama Islam, akan tetapi calon-calon itu harus berasal dari teun raja, dengan diberikan prioritas kepada anak sulung dan anak-anak lain dari pada pejabat yang lalu. Menurut Bleeker[21] cara pemilihan kepala-kepala negeri oleh kepala-kepala soa, yang kemudian ditambah dengan tua agama/kasisi adalah cara pemilihan kepala negeri dari dahulu kala. Menurut hemat kami tua agama dan kasisi oleh Belanda ditetapkan sebagai pengganti dari pada para kepala urusan kepercayaan mereka/hubungan dengan dunia arwah datuk-datuk yang telah meninggal, yang sekarang di Seram masih dikenal dengan nama mauweng. Apakah jabatan upu latu dan upu pati itu menjadi hak warisan teun tertentu dari semula, menurut hemat kami tidak pasti karena apa gunanya ada pemilihan oleh kepala-kepala uku? Akan tetapi lambat laut - bilamana tidak dapat dipastikan - jabatan itu menjadi hak warisan turun-temurun bagi suatu uku, malahan bagi suatu teun tertentu, dan akhirnya menjadi hak warisan bagi anak dari raja sebelumnya. Demikianpun halnya dengan lembaga kepala soa, hanya ia dipilih oleh anggauta dari ukunya. Teun raja dinamakan teun atau mataruma raja dan soanya soa raja. Soa raja ini tidak mempunyai kepala dan hal ini malahan memperkuat pendapat kami bahwa kepala hena itu pada mulanya memang hanya seorang kepala soa. Jansen tidak pernah menggunakan kata teun, akan tetapi kata ruma tau, mungkin suatu kata yang hanya dipergunakan di pulau Ambon, khususnya di jazirah Hitu.

Tadi kami menyebut tujuh nama hena di pulau Nusalaut yang tidak akan dapat ditemukan dalam peta manapun juga karena nama-nama itu adalah nama daripada hena-hena asli yang semuanya terletak jauh di pedalaman di tempat-tempat yang sangat strategis untuk dapat mempertahankan diri terhadap serangan-serangan musuh dan hena-hena itu sekarang disebut negeri lama, yang umumnya masih ada sisa-sisanya berupa reruntuhan tembok-tembok batu. Ketu-

juh negeri itu dipaksa oleh VOC - demikian juga sebagian besar dari pada negeri-negeri di pulau Ambon dan Lease, yang dahulu terletak di pedalaman - untuk turun ke pantai, agar Belanda dapat mengawasi mereka, khususnya perdagangan mereka, yang sudah dianggap menjadi monopoli Belanda serta agar mudah hena-hena itu dapat ditundukkan, bila timbul pemberontakan terhadap Belanda. Anehnya bahwa pemindahan hena-hena ke tempat yang baru di pesisir pantai itu hanya merupakan pemindahan manusianya saja, sedangkan nama hena tidak dibawa turun ke tempat kediaman yang baru sehingga tempat kediaman yang baru itu diberi nama baru dan nama-nama baru inilah yang kita kenal dari peta-peta sekarang, yaitu:

Titawaay untuk Lesinusa
Ameth untuk Samasuru
Abubu untuk Kakerisa
Leinitu untuk Henasiwa
Sila untuk Hatalepa Pawas
Nalahia untuk Risapori Henalatu dan
Akoon untuk Tounussa.

Akan tetapi menurut sumber-sumber Portugis nama Titawaay dan Ameth sudah dikenal oleh mereka dan hal ini berarti bahwa kedua negeri itu telah turun ke pesisir pantai jauh lebih dahulu dari kelima negeri lainnya, mungkin karena kedudukan kedua upu latu sebagai kepala uli. Kelima negeri lainnya mungkin baru turun antara 1615 dan 1635.

Sampai sekarang penduduk asli negeri-negeri ini masih dikenal nama dan tempat negeri lainnya dan dalam upacara-upacara adat, walaupun tidak lagi digunakan bahasa tanah karena sebagian besar dari mereka tidak paham bahasa itu, negeri lama-lah yang dipergunakan dan bukan nama negeri tempat kediaman mereka sekarang, yang telah didiami lebih dari 350 tahun. Menurut Rumphius, negeri Saparua, yang negeri lamanya bernama Rila, sudah dua kali dipindahkan, yaitu pertama kali ke suatu tempat antara Tiouw dan Sirisori ke suatu tempat dekat Paperu, di daerah Hatawano dan dalam tahun 1670 dipindahkan lagi ke tempatnya yang sekarang. Pemindahan ini diadakan dengan membawa pindah nama Saparua, jadi tidak diberi nama baru setiap kali negeri itu dipindahkan. Oleh karenanya maka timbul pertanyaan: apa sebabnya maka nama negeri lama tidak dibawa turun ke pesisir pantai, ke tempat sekarang? Apakah mungkin oleh karena mereka menganggap pemindahan secara paksa oleh Belanda itu hanya bersifat sementara dan bahwa mereka sekali kelak akan kembali ke hena-nya yang asli? Telah diketengahkan bahwa jumlah negeri-negeri lama adalah sama dengan jumlah negeri baru di pesisir pantai dan oleh karenanya tidak dapat dikatakan bahwa ketujuh negeri baru itu adalah gabungan dari pada beberapa negeri lama, sehingga ketika mereka diturunkan itu harus mencari nama baru. Pemindahan hena itu telah mengakibatkan perubahan fundamentil dalam cara berpikir penghuni-penghuninya, sehingga mulai saat itu mereka hidup dalam dua alam, yang satu adalah alam adat, dengan mengarahkan semua aktifitas ke negeri lama, dan yang kedua adalah yang bukan bersifat adat dengan pemusatan aktifitas di da-

lam negeri baru, negeri paksaan Belanda. Dualisme ini masih hidup sampai sekarang.

Kami mengakhiri tinjauan ini dengan suatu catatan yaitu bahwa menurut Rumphius dan Valentijn di Titawaay terdapat suatu lembaga yang diberi nama latumahina (latu = raja, mahina = wanita, jadi raja para wanita). Ia bukanlah seorang wanita tetapi seorang pria, putra dari putri raja, dan tugasnya adalam semacam juru bicara bagi kaum wanita dalam negerinya. Di xaman Rumphius negeri-negeri yang mempunyai seorang latumahina ialah Titawaay dan negeri-negeri Porto dan Paperu di pulau Saparua. Apakah dengan adanya lembaga ini berarti bahwa kaum wanita mempunyai suatu kedudukan tertentu di dalam masyarakat? Ataukah dapat kami menganggapnya sebagai sisa-sisa dari sistem matrilineat?

IV. ANALISA KEDUA SISTEM PEMERINTAHAN

Dalam uraian tentang Tanah Hitu telah kita lihat bahwa untuk tiga lembaga pemerintahan adat di sana dipergunakan kata-kata yang bukan asli dan tidak dikenal di wilayah sekitarnya, yaitu perdana, penggawa dan galaran atau gulungan. Apakah kata-kata ini yang sekarang sudah menjadi lazim di Tanah Hitu memang pernah dipergunakan dalam abad keenambelas sampai pertengahan abad ketujuhbelas dan apakah tidak terdapat perkataan-perkataan lain dalam bahasa Melayu atau bahasa tanah yang dipakai pada masa itu, apalagi jika kita perhatikan bahwa bahasa tanah di pulau Ambon dan sekitarnya sampai sekarang justru masih dipakai dalam percakapan sehari-hari di negeri-negeri yang menganut agama Islam, termasuk Hitu? Menurut hemat kami Rijali mempergunakan ketiga perkataan ini oleh karena Hikayat Tanah Hitu tidak disusun dalam bahasa tanah tetapi dalam bahasa Melayu dan disiapkan di Makasar atas permintaan Pati Ngaloan, dengan demikian tidak dipergunakan istilah-istilah dalam bahasa tanah agar tulisan itu dapat dimengerti oleh pembaca-pembaca yang bukan orang-orang pribumi Ambon. Tiga istilah itu adalah gelar beberapa pejabat pemerintahan Sulawesi Selatan yang di sana disebut padanrang, punggawa dan galarang. Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa perkataan-perkataan itu telah menjadi lazim sekarang di Ambon setelah tahun 1644, dan sebelumnya samasekali tidak dikenal dan yang dikenal hanya Orangkaya, upu pati, upu latu dan raja, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam perjanjian dengan Belanda dipergunakan istilah Orangkaya ampat atau raja ampat untuk keempat perdana. Untuk keempat kepala pemerintahan di Nusaniwe Rijali juga menggunakan perkataan perdana yang sampai sekarang tidak dikenal di Nusaniwe, dan hal inilah yang menguatkan pendapat kami tersebut.

Sistem pemerintahan baik di Tanah Hitu maupun di Nusa Laut bukan asli dalam wilayah hukumnya, karena telah dibawa dari luar wilayah yang bersangkutan. Apakah persamaan dan perbedaan antara

sistem pemerintahan kedua wilayah itu? Untuk menjawab pertanyaan ini akan kami beri sedikit penjelasan, yaitu bahwa menurut Rumphius beberapa negeri di samping Tanah Hitu dan Nusaniwe juga terdapat pemerintahan yang berlainan dengan di Nusalaut:

1. negeri Kambelo yang terletak di jazirah Hoamoal dipimpin oleh Pati atau Kipati Tehelia dan negeri ini dibagi dalam tiga buah kampung yaitu: a). Sabohi Hatela di bawah Halibubesi dan Kipati Tehelia sendiri dan Mayana, b). Sabohi Hatela di bawah Halibubesi dan Lehehatubesi dan c). Saboho Henebele di bawah tiga orang Orangkaya yaitu Tambaga, Makanobal dan Pati Kilin.
2. Kaibobo terdiri dari duabelas kampung yang dipimpin oleh duabelas orang Orangkaya, tetapi keduabelas kampung itu digabung menjadi dua hoofdnegorijn yaitu Leihalat dan Leitimor, keduanya di bawah dua orang hoofdorangkaya. Apa sebabnya istilah hoofdnegorijn dan hoofdorangkaya dalam bahasa Melayu atau bahasa tanah tidak diberitahukan; apakah hoofdorangkaya dapat disamakan dengan upu latu, sebagai kepala daripada suatu gabungan negeri-negeri atau daripada suatu uli?
3. Lesidi terdiri dari enam soa di bawah tiga orang hoofdorangkaya, yaitu Imam Swacki Latucole dan Pati Waran (dalam zaman Rumphius).
4. Rarakit di Seram Timur terdiri dari lima kampung di bawah lima orang Orangkaya. Dalam tahun 1649 kelima Orangkaya itu adalah Ussen, Somo, Sakeda, Lawangan dan Subilang.
5. Hatuputi di pulau Kelang mempunyai empat orang Orangkaya dan
6. Luhu, yang seperti Hitu, mempunyai empat pemimpin, di sini disebut hoofdorangkaya, hanya Luhu telah memiliki sistem ini sejak kurang labih tahun 1400, artinya jauh sebelum sistem "raja ampat" dikenal di Hitu. Kampung-kampung di Luhu itu adalah:
   a. Waran Leitu di bawah Kipati Luhu dan tiga Orangkaya yang namanya diberi oleh Rumphius yaitu Waranbesi, Mahubesi dan Luhu Tican, ketiganya dengan gelar mindere orangkaya, serta adik Kipati yang bernama Luhubesi;
   b. Nuru Makatita di bawah Ngaru Lamu dengan Pati Halat dan Kelitua;
   c. Samaneri di bawah Kotalima dan orang keduanya adalah Lesi Caluwa; apa yang dimaksud dengan orang kedua (tweede persoon) tidak dapat kami terangkan, dan
   d. Timul Pawayl di bawah Loyata dengan "orang-tua"nya yang bernama Laubessi.

   Keempat Orangkaya ini mengepalai tujuhbelas negeri dengan cara pemerintahan yang sama dengan di Tanah Hitu. Bedanya hanya bahwa Kipati Luhu selalu mengetuai para hoofdorangkaya di Luhu, sedangkan di Tanah Hitu yang menjadi ketua adalah yang tertua usianya, artinya selalu berganti-ganti.

Mengenai sistem pemerintahan di Luhu ingin kami tambahkan bahwa sistem inipun telah dimusnahkan oleh Belanda, yaitu dalam tahun 1652 setelah perang Majira dimenangkan oleh Belanda di bawah pimpinan Arnold de Vlaming van Oudshoorn, dan yang menyedihkan ialah bahwa nama de Vlaming ini karena kekejamannya dalam pe-

numpasan peperangan di Ambon dan sekitarnya dalam pertengahan abad ketujuhbelas, justru masih hidup di sana. Di Ambon dipergunakan istilah zaman Vlaming atau "taon Vlaming" dalam arti zaman dahulu, suatu istilah yang menunjukkan suatu tragik dalam pikiran, di dalam kehidupan masyarakat di sana, bukan hanya oleh karena de Vlaming telah mematikan ribuan penduduk, akan tetapi yang lebih menyedihkan ialah karena ia telah membunuh semangat serta mengaburkan ingatan mereka akan "zaman jaya" sebelum de Vlaming.

Di bawah keempat perdana ialah tujuh penggawa, yaitu para kepala uli yang dapat dinamakan dengan dua orang upu latu di Nusa Laut dan para gelaran ialah sebagai kepala negeri-negeri sama dengan kelima upu pati di Nusa Laut.

Sebagai keseluruhan kita melihat bahwa sistem pemerintahan di Tanah Hitu sudah jauh berkembang dan telah terjadi gabungan di dalam beberapa fase dengan tiga kampung, sehingga menjadi negeri Hitu, yang tetap dikepalai oleh keempat perdana dan kemudian wilayah kekuasaan mereka diperluas sehingga mereka menguasai keenam uli lainnya di Tanah Hitu; sistem pemerintahan di Nusa Laut tidak sempat berkembang sampai sebegitu jauh, artinya sampai terjadi gabungan-gabungan yang nyata dan efektif.

Alasan terlambat berkembangnya sistem pemerintahan di Nusa Laut ialah:

1. karena pulau Nusalaut tidak dipengaruhi oleh pendatang-pendatang dari luar daerah seperti pedagang-pedagang yang umumnya mendatangi Luhu serta negeri-negeri lain di Hoamoal pada umumnya dan Tanah Hitu sebelum tibanya orang-orang Portugis dan orang Eropa lainnya karena pulau Nusa Laut pada masa itu belum menanam cengkeh dan tidak terletak di jalan pelayaran pedagang-pedagang itu;
2. dikejar oleh kedatangan orang-orang Eropa, khususnya orang-orang Belanda, yang telah merobah sistem pemerintahan sesuai dengan kepentingan mereka.

Lembaga Raja Hitu yang tidak sama dengan upu latu dan upu pati dan yang hanya merupakan suatu lembaga pengaduan, tidak dikenal di Nusa Laut, tetapi di Nusa Laut, khususnya di Titawaay terdapat lembaga latumahina, juga semacam lembaga pengaduan akan tetapi khusus untuk kaum wanita. Tetapi sejak tahun 1646, yaitu setelah dihapuskan pemerintahan para perdana di Tanah Hitu oleh Belanda, Raja Hitu ditetapkan sebagai Orangkaya negeri Hitulama, sehingga lembaga ini menjadi sama dengan para upu latu dan upu pati di Nusa Laut.

Yang juga tidak dikenal di Nusalaut ialah lembaga Kapitan Hitu, Hukum dan Tubanbesi, tetapi di sana dikenal malesi atau maresi yang sebagai akibat dari pengaruh dari orang-orang Portugis sekarang disebut sebagai kapitan.

Catatan:

1. "Twee zangen in de Ambonsche landstaal (bahasa tanah) vertaald en verklaard door G.W.W.C. Baron van Hoevell", Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, 27 (1882), 68-69. Lih.: Lampiran II, III.
2. "De Geschiedenis van Noesalaoet voor de komst der Portugezen van de hand van Tanasale, Regent van Leinitu" dalam G.G.W.C. Baron van Hoevell, Vocabularium van Vreemde Woorden Voorkomende in Malaische uitdrukkingen en gezegden te Ambon gebruikelijk. Dordrecht, 1876. Lih.: Lampiran IV.
3. G.W.W.C. Baron van Hoevel, "Iets over de Vijf Voornamste Dialecten der Ambonsche Landtaal (bahasa tanah)", B.K.I. I (1877), 1-136.
4. Kapata ini adalah thema sebuah skripsi dari Sdr. A Huliselan, salah seorang mahasiswa IKIP-Ambon (Universitas Pattimura) dalam tahun 1965. Lihat Lampiran I.
5. Bahan ini adalah salah satu bahan dalam berkas almarhum Prof. Schrieke yang tersimpan di Leidsche Universiteitsbibliotheek (Nederland) dan dibawa ke Indonesia oleh Nn. Paramita Abdurrachman berupa microfilms.
6. dan 7. Naskah Hikayat Tanah Hitu dan transkripsi Jansen berada di L.U.B. dan dibawa ke Indonesia oleh Nn. Paramita Abdurrachman dalam bentuk microfilms.
8. Dibawa ke Indonesia berupa fotocopy oleh Dr. Frank L. Cooley. Fotocopy dari sampul karya Rumphius ini memuat beberapa catatan, yaitu di pojok atas bagian kiri "Amboina" dan di bagian kanannya "Ao. 1700" dan sebagai judul tertera "D'Ambonsche Land Beschrijving no. 10". Apakah "No.10" ini menunjukkan bahwa manuskrip ini adalah copy yang kesepuluh?
9. M. Neyens, "Een handschrift van Rumphius "d'Ambonsche Land Beschrijving", T.B.G., LXI (1922), 111-118.
10. H.J. Jansen, "Uli's in de Molukken, 1930", dalam Adadrechtbundles XXXVI: Borneo, Zui-Celebes,Amboina, enz., 1930, Seri R: Ambon, enz. no. 76.
11. G.W.W.C. Baron van Hoevel, Ambon en meer bepaaldelijk de Oelisers Geographisch, Ethnologisch, Politisch en Historisch Geschets. Dordrecht, 1875.
12. P.A. Leupe,"Het Eiland Sarangoeni (Rossingein) der Bandagroep", B.K.I. Seri ke-3, VIII (1873), 81-83.
13. Antonio Pigafetta, Magellen's Voyage Around the World, The Original Text of the Ambrosian M.S., with translation, notes, bibbliography, abd index by J.A. Robertstson. Vol. II, Cleveland 1906.
14. F.S.A. de Clercq, Bijdragen tot te Kennis der Residentie Ternate. 1890. Perlu dicatat bahwa data-data de Clerq dikumpulkan dalam abad kesembilanbelas.

15. J.E. Heeres, Corpus Diplomaticum Neerlando Indicum. Jilid II: 1596-1650, BKI, Seri ke-7, jilid III, 1907.
16. Chr. H. Bakhuyzen van den Brink, "De Inlandsche Burgers in de Molukken", B.K.I., LXX (1915), 595-649.
17. F. de Haan, Priangan: De Preanger Regentschap onder het Nederlandsch Bestuur to 1814. Jilid I, 1910.
18. Aert Gijsels, "Grondig Verhael van Amboyna, ect", dlm. Kronijk van het Historische Genootschap te Utrect, III (1885), 85-105.
19. H.J. Jansen, "Inlandsche Gemeenschapwezen" dalam L.M.N. van Sandick, Memorie van de Gouverneur der Molukken, 1926.
20. Nota ini berada dalam suatu tumpukan surat-surat dan keterangan-keterangan di Museum Jakarta tentang Ambon dan sekitarnya, mungkin dimiliki oleh J.G.F. Riedel, bekas Resident Maluku dalam abad kesembilanbelas.
21. P. Bleeker, Reis door de Minahasa en de Molukssche Archipel, Gedaan in de Maanden September en October 1855 in het Gevolg van den Gouverneur Generaal Mr. A.J. Duymaer van Twist. Batavia 1856. 2 jilid.

BAB III

PENINGGALAN - PENINGGALAN YANG BERCIRI PORTUGIS DI AMBON

oleh Paramita R. Abdurachman

I. PENDAHULUAN

"Zaman Portugis"

"Bapak Tiang[1] Sarimanela, Kepala Soa yang tertua negeri Passo di pulau Ambon, yang menjabat Pejabat Raja[2], menceriterakan bahwa negerinya, Passo, didirikan oleh orang Portugis. Sebenarnya penduduk tinggal di Negeri Lama, lima kilometer dari Passo di pantai Teluk Dalam, di jazirah Hitu, suatu tempat yang terlindung dari angin dan waktu pasang, tempat dimana kapal-kapal dapat berlabuh dan di sekitar negeri itu ada tanah subur untuk berkebun dan terdapatlah hutan-hutan sagu. Waktu Portugis diusir dari jazirah Hitu karena usaha-usaha penginjilan, mereka menyeberang ke gunung-gunung Hitu, sampailah di Teluk Dalam, dekat Tanjung Martafons, di antara negeri-negeri Rumahtiga dan Poka. Menyusur pantai mencari tempat untuk menetap, di mana kapal-kapal dapat berlabuh, tibalah mereka di Negeri Lama yang cocok dengan kehendak mereka. Penduduk disuruh pindah dan berkampung di mana kedua jazirah, Hitu dan Leitimor, bertemu. Di sana sudah ada suatu negeri yang letaknya pada pantai timur di Teluk Baguala dan bernama Baguala pula[3]. Didirikanlah suatu negeri baru, berdampingan dengan Baguala, tetapi di pantai Teluk Dalam, yang diberi nama Tombalina. Akan tetapi karena letaknya pada pertemuan kedua jazirah itu, Portugis kemudian berikan nama baru, ialah Passo[4].

Lama-kelamaan dua negeri ini, Tombalina-Passo dan Baguala, menjadi satu, lazimnya disebut Passo. Akan tetapi masing-masing tetap mempunyai baileu dan batu teun sendiri, dan sampai sekarang demikianlah keadaannya".

Bapak Tiang sendiri tampaknya sebagai hasil percampuran darah sejak berabad-abad dari Alifuru, Melayu dan Kaukasia. Begitu pula beberapa anggauta Badan Saniri. Dan ada yang nama keluarganya Portugis.

Ceritera-ceritera seperti disebut di atas, yang menunjukkan kenangan akan "Zaman Portugis", ketika bangsa-bangsa Eropa mulai datang ke Maluku, masih banyak terdapat di seluruh kepulauan Maluku. Ceritera-ceritera, kapata-kapata (seperti kapata Tombosite dari Taniwel5), nyanyian-nyanyian, masih sering mengenangkan penduduk Maluku pada zaman Portugis itu. Kenangan yang lebih tegas lagi terdapat terutama di pulau Ambon dan Lease, dan dijumpai da-

lam (nama-nama) tempat (seperti "Sawahtelu" di Hitu[6]), nama keluarga[7], kata-kata dalam bahasa Melayu-Ambon[8], kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, dalam musik, tarian dan puing benteng.

Walaupun penduduk Ambon mengenalnya sebagai peninggalan Portugis, tetapi dianggap sebagai barang biasa, sesuatu yang sudah turun-temurun menjadi bagian kehidupannya. Sesuatu yang merupakan warisan dari masa nenek-moyang ketika sejarah Maluku masih diselubungi rahasia. Secara etymologis kata "Portugis" bagi orang Ambon berarti: "kuno, antik, sesuatu yang tidak konkrit". Pengetahuan konkrit tentang sejarah Maluku baru dimulai dengan zaman VOC.

Berbicara dengan Bapak Tiang dan anggauta-anggauta Saniri negeri Passo dan penduduk umum mengenai pandangan mereka akan pembagian sejarah Ambon, terdapatlah pembagian sebagai berikut:

Zaman Nenek Moyang - di mana nenek moyang datang di Ambon untuk bertempat tinggal, berkebun, membentuk keluarga, yang menjadi nenek moyang orang Ambon sekarang.

Zaman Portugis - lanjutan dari Zaman Nenek Moyang, pada waktu mereka pertama kali bertemu dengan bangsa Barat (orang berkulit putih, atau "bermata kucing" = hijau), termasuk masa pertama VOC.

Zaman Vlaming - pada waktu mana VOC meneguhkan kekuasaannya dengan jalan "hongi", monopoli Belanda pada perdagangan rempah-rempah, turunnya pengaruh dan kekuatan kerajaan-kerajaan di Maluku-Ambon, Seram dan pulau-pulau lain di sekitarnya.

Zaman Kompeni - pada waktu mana orang Ambon dikerahkan menjadi "Serdaru" dari "Kompeni" (tentara Hindia Belanda) untuk menaklukkan Aceh, Bali dan Lombok; kemudian sampai kira-kira tahun 1950.

Zaman Republik - pada waktu mana Maluku menjadi bagian integral dari Republik Indonesia, sesudah pengakuan kedaulatan RI dan penyerahan kekuasaan Belanda.

Menelaah pembagian ini ternyata bahwa periodisasi itu tidak selalu ada persamaan dengan periodisasi sejarah. Sesungguhnya, dipandang dari sudut ini, "zaman Portugis" merupakan suatu titik penting dalam sejarah Maluku, dengan perobahan-perobahan yang menentukan sifat masyarakatnya. Pada hakekatnya, zaman itu membawa peralihan dari masyarakat sakral menuju ke suatu masyarakat sekuler, pada waktu mana baru dimulai dengan peralihan sejarah. Pada masa ini pulalah, adat, sebagaimana ditentukan nenek-moyang, mulai dicatat. Dan pendatang baru membawa pula perobahan dalam segi-segi perekonomian, pemerintahan, kerokhanian dan kebudayaan.

Akan tetapi, dalam pandangan umum, zaman Portugis merupakan suatu masa yang masih terkabung kabut. Kesadaran sejarah baru muncul setelah mengalami perobahan-perobahan yang menggemparkan selama zaman Vlaming. Begitulah, tulisan-tulisan sejarah dari tangan orang-orang Indonesia tidak tegas menyebut hubungan dan pengaruh dari masa itu, walaupun orang-orang Portugis berada di Maluku kurang lebih 100 tahun (1512-1605).

Rijali, pengarang "Hikayat Tanah Hitu" di sekitar tahun 1650, empat puluh tahun setelah Portugis meninggalkan Maluku, menyebut kedatangan mereka dan beberapa kejadian penting, tetapi dari hikayat tersebut tidak dapat langsung ditarik peristiwa-peristiwa yang berasal dari hubungan dan pengaruh timbal-balik yang niscaya telah berkembang dalam waktu sekian lama.

"Barang-barang Portugis"[9]

Pelancong-pelancong ke daerah Ambon-Lease sekaligus dapat menyaksikan hal-hal yang bersifat "Eropa" atau "Barat" dalam kebiasaan dan bahasa. Mereka yang tinggal lebih lama dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kemudian akan cepat menangkap hal-hal asing dalam kebiasaan, musik, tari-tarian dan hal-hal lain yang kemudian disebut "barang" Portugis.

"Barang" Portugis ini sering tidak berasal dari bangsa Portugis kalau diselidiki lebih lanjut, melainkan dari pengaruh bangsa lain yang datang kemudian, terutama bangsa Belanda (mulai masa VOC dalam abad ketujuhbelas) dan Inggris (selama pemerintahan Inggris 1812-1815). Namun masih ada suatu lapangan besar kebudayaan dan sejarah yang akan mengungkap kepada seorang peneliti peninggalan-peninggalan berciri Portugis dalam kehidupan Ambon, sebagai bukti yang nyata dari hubungan timbal-balik antara bangsa Maluku dan Portugis selama hampir seabad. Ciri-ciri Portugis ini telah merupakan suatu warisan kebudayaan yang memberikan identitas kepada negeri-negeri tertentu di Ambon[10], yang membedakannya dari negeri-negeri lain di kepulauan itu[11], di mana pengaruh Portugis dan peninggalan-peninggalan tidak ada atau hanya terdapat dalam bentuk yang tidak menyolok.

Bahan-bahan tertulis Portugis

Para sejarawan Indonesia pada umumnya mengenal tulisan-tulisan dari pengarang-pengarang Belanda dari abad keenambelas dan ketujuhbelas, terutama pejabat-pejabat VOC dari tahun-tahun pertama berdirinya factorij-factorij VOC di Ambon[12]. Aert Gijsels[13] telah menghasilkan karya yang penting bagi pengetahuan akan keadaan masyarakat pada tingkat di mana imprint Portugis masih sangat berkesan, pada lain fihak menggambarkan keadaan masyarakat yang dalam banyak hal belum berobah oleh pengaruh persentuhan de-

ngan kebudayaan asing. Begitu pula "Ambonsche Landbeschrijving"[14] dari Rumphius, telah membuka banyak fakta yang penting untuk mengisi berbagai kekosongan dalam sejarah Ambon dan kepulauan sekitarnya, terutama tentang keadaan negeri-negeri dan keluarga-keluarga yang menghuninya dalam abad ke tujuhbelas.

Masyarakat Maluku, dalam hal ini khusus di Ambon dan Lease, pada umumnya mendasarkan pengetahuan akan sejarahnya di "Zaman Portugis" dari karangan "Bapak Valentijn" yang menulis "Oud en Nieuw Oost-indien"[15] dan tidak sadar bahwa dalam banyak hal Valentijn mengambil bahannya langsung dari "Ambonsche Historie"[16] karangan Rumphius.

Tulisan-tulisan dari tangan bangsa lain, terutama dari Portugis dan Spanyol, hanya dikenal di kemudian hari dalam terjemahan dan saduran oleh bangsa lain (lihat Ruinen), terutama Belanda dan Inggris. Akan tetapi, hanya sejumlah kecil dari seluruh himpunan dokumen, manuskrip dan tulisan serta penerbitan dari orang-orang Portugis yang dikenal. Sejumlah terbesar masih merupakan "terra incognita" bagi orang Indonesia dan oleh karena itu kiranya gambaran yang didapat tentang hubungan antara masyarakat pribumi Indonesia dengan orang-orang Portugis semasa Portugis bersemayam, berdagang dan bersengketa di lautan Maluku, tidak lengkap.

Oleh sebab itu, untuk mengungkap tabir sejarah ini, dan menentukan latar belakang dan sebab-musabab adanya sejumlah sisa peninggalan bangsa dan kebudayaan Portugis, perlulah kiranya diadakan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah asli. Dokumen-dokumen ini tersebar di Portugal sendiri, dan di pelbagai negeri di Eropa. Archivo da India di Sevilla, Archivo Nacional di Simancas dan Biblioteca Nacional di Madrid, British Museum (Manuscript Department) dan India Office Records, Commonwealth Relations Office di London dan Instituto Storico dela Compania del Gesu di Roma, adalah pusat-pusat penting dari dokumen-dokumen Portugis, baik yang bersifat keduniawian maupun keagamaan. Di samping itu perpustakaan-perpustakaan di samping museum, arsip-arsip tertentu di negara-negara lain di Eropa dan Amerika juga memiliki koleksi dokumen Portugis dari abad ke enambelas dan ke tujuhbelas.

Koleksi terbesar dari dokumen-dokumen terdapat di Arquivo Nacional da Torre do Tombo di Lisboa, yang menyimpan lebih dari 100.000 dokumen yang terhimpun dalam berbagai golongan. Yang penting di antaranya bagi sejarah Indonesia terdapat dalam Gavetas ("laci-laci"), Corpo Chronológico (dokumen-dokumen yang disimpan secara kronologis), dan berupa Cartas (surat-menyurat), Chancellaria (dokumen-dokumen dari Secretariat Raja) dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen kerajaan Portugal terdapat juga di arsip kota-kota Evora dan Braga, dan dalam perpustakaan universitas Coimbra semasa kota ini masih menjadi pusat kerajaan. Di samping itu juga terdapat manuskrip-manuskrip asli dari pengarang-pengarang Correa, Botelho, Galvão, Fernão Mendes Pinto dan lain-lain[17]. Perpustakaan terbesar untuk menghimpun manuskrip Portugis adalah Bibliotéca da Ajuda (dahulu perpustakaan raja-raja Portugal) dan Bibliotéca Nacional (kedua-dua di Lisboa)[18]. Kemudian terdapat arsip dari

Uskup-uskup Katolik di berbagai tempat, dan dari Santa Casa da Misericordia (rumah-rumah penampungan orang sakit dan jompo dari Gereja Katolik), di mana bisa ditemukan arsip-arsip tentang perorangan, yang pernah bertugas untuk pemerintah Portugis di Asia.

Pejabat-pejabat militer dan sipil dari kerajaan Portugal, baik orang Portugis sendiri atau bangsa lain, missionaris dan awak kapal, telah menulis dengan penuh semangat dan panjang lebar tentang negeri-negeri dan bangsa-bangsa serta keadaan dan adat kebiasaan di sudut-sudut dunia yang baru mereka datangi itu. Adalah kebijaksanaan pemuka-pemuka kerajaan (seperti Pangeran Henry Pelaut, Raja Manuel I), untuk memberikan hadiah kepada mereka yang dapat memberikan laporan lengkap, yang dapat digunakan untuk menentukan garis kebijaksanaan pemerintah terhadap negera-negara dan bangsa-bangsa yang baru ditaklukkannya. Laporan-laporan dari kapitan-kapitan benteng dan loji di wilayah "Asia Portuguesa" kepada kapitan-kapitan di Goa dan Malaka dan kepada raja-muda di Goa, diteruskan kepada "Casa da India" di Lisboa. Semua dokumen-dokumen tersebut serta jawaban-jawabannya dan dokumen-dokumen lain terhimpun selalu dalam "Livro dos Monções" (atau "Documentos Remettidos")[19]. "Buku Musim" itu menggambarkan pasang surut riwayatnya Portugis dalam usahanya untuk menyebarkan dan menegakkan kekuasaannya dalam perdagangan dan agama selama mereka berada di Afrika dan Asia. Selain surat-surat dan laporan-laporan resmi daripada awak kapal dan pejabat-pejabat, terdapat pula surat-surat pribadi kepada para keluarga, dokumen-dokumen mana tetap disimpan oleh keluarga itu. Keluarga bangsawan seperti Albuquerque, Gama, Freytas, Lima, Castro sampai kini menyimpan arsip keluarga mereka, dan jarang di antaranya yang mengumumkan dan menerbitkannya. Patut disebut dua koleksi dokumen yang terhimpun dalam perpustakaan pribadi dari Duque de Cadaval dan Duque de Palmela yang juga memuat manuskrip-manuskrip asli pengarang-pengarang Portugis. Kedua perpustakaan ini sekarang mulai dibuka untuk umum.

Jumlah dokumen yang telah diumumkan dari koleksi resmi Pemerintah masih berjumlah sedikit, dibanding dengan jumlah seluruhnya. Berbagai lembaga penelitian, atas kerjasama dengan Pemerintah Portugal, telah mulai sejak sepuluh tahun yang lalu untuk membuat "microfilms", mentranskripsi dan menerbitkan dokumen-dokumen yang ada di Torre do Tombo, Ajuda, Bibliotéca Nacional, Arquivo Histórico Ultramarinos (kedua-duanya di Lisboa), lembaga sejarah dari universitas di Lisboa dan Coimbra, lembaga sejarah dari Societas Gesu di Roma, telah menghasilkan karya-karya seperti "As Gavetas da Torre do Tombo", "Documentação para a história das missões do Padroado Oriente: Insulíinda". Pekerjaan ini, yang masih terus berjalan, akan memakan waktu 20 tahun lagi menurut dugaan pimpinan lembaga-lembaga tersebut.

Walaupun jumlah transkripsi ini masih kurang, namun telah dapat dibuka tabir tehadap keadaan Maluku dan bagian-bagian lain dari Indonesia dalam abad keenambelas. Dan penelitian-penelitian seksama dari transkripsi-transkripsi ini dapat memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian di Maluku khususnya dan di Indonesia

pada umumnya, pada waktu bangsa Indonesia mengalami hubungan pertama dengan bangsa Eropa. Di samping penerbitan transkripsi-transkripsi ini telah terdapat penulisan sejarah oleh chronicler-chronicler resmi dari pemerintah Portugal, seperti João de Barros dan Diogo de Couto[20], sedangkan pengarang-pengarang seperti Tomé Pires, Diogo Lopes de Castanheda, Duarte Barbosa, dan sejumlah lain[21], telah pula menulis tentang hal-ikhwal bangsanya waktu mereka berpengaruh dan berkuasa di Asia.

Dengan meneliti segala tulisan ini dapatlah kiranya terisi suatu kekosongan akan pengetahuan tentang keadaan masyarakat Maluku di abad ke enambelas, suatu bab dalam sejarah Indonesia yang sedikit dikenal, juga oleh orang-orang Maluku sendiri.

II. PORTUGIS DI MALUKU

Hubungan dengan dunia luar, terutama dengan Portugis

Pengetahuan Portugis tentang daerah rempah-rempah didapat dari ceritera-ceritera dan tulisan-tulisan yang datang ke Lusitania dari perantau-perantau yang membukukan pengalaman mereka. Di Maluku sendiri hubungan dengan orang-orang dari bangsa dan suku lain, sebelum kedatangan Portugis, sudah berjalan berabad-abad lamanya, sebagaimana terbukti dari tulisan-tulisan Arab dan Cina dan dari karangan semasa kerajaan Hindu Kediri dan kemudian Majapahit[22]; pun dari ceritera-ceritera asal negeri-negeri di Ambon-Lease yang sampai kini masih beredar.

Perdagangan antara bangsa-bangsa dan suku-suku lain dengan Maluku disebabkan oleh rempah-rempah yang dihasilkan di Nusantara Timur itu, yaitu cengkeh di daerah kepulauan Ternate dan Tidore, pala di Banda dan kayu cendana di Timor.

> Sebagaimana disebut Tomé Pires dalam "Suma Oriental"[23] "pedagang-pedagang bangsa Melayu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Timor untuk kayu cendana dan Banda untuk pala dan Maluku untuk cengkeh, dan barang perdagangan ini tidak dikenal di lain-lain tempat di dunia kecuali di tempat-tempat yang disebut tadi; dan telah saya tanyakan dan selidiki dengan teliti apakah barang ini terdapat di tempat lain dan semua orang katakan tidak".

Deinum dalam karangannya tentang cengkeh[24] memberi riwayat singkat tentang cengkeh, yang asalnya dirahasiakan berabad-abad lamanya oleh orang-orang Cina. Seorang biarawan Byzantin, Cosmas (atau Cosmas Indicopleustis), yang mengunjungi India sekitar 547 A.D., untuk pertama kali menyinggung bahwa cengkeh itu diimport dari Cina dan Sri Langka. Menurut Gabriel Rebello dalam "Informação das cousas sobre as Moluccas"[25] cengkeh itu berasal dari Ternate, Tidore, Motir dan Makian, Deinum berpendapat bahwa selain empat pulau ini juga Halmahera adalah tempat asalnya cengkeh disebarkan oleh burung dara dan burung musiman.[26]

Ia tidak sependapat dengan Rumphius yang mengatakan bahwa Makian adalah tempat asal yang asli karena letak geografis pulau pulau itu, yang berdekatan sekali. Pigafetta dalam buku catatan hariannya mengatakan[27]:

"cengkeh tidak terdapat di dunia kecuali di pegunungan kelima pulau ini, namun beberapa terdapat di Geilolo dan di suatu pulau kecil antara Tidore dan Motir, bernama Mare, tetapi tidak baik keadaannya. Nama cengkeh ini adalah "ghomode", di Saranghani "bongalauan" dan di Malaka "chianche"[28].

Perdagangan cengkeh dan pala sejak rempah-rempah ini menjadi bahan perdagangan terpusat di pulau Ternate dan Tidore serta Banda. Lalulintas perdagangan kemudian menyebabkan bahwa pulau-pulau itu dari dulu sudah mengenal persentuhan dengan kebudayaan lain, apabila bangsa-bangsa asing datang baik untuk waktu singkat maupun untuk menetap. Dalam lalulintas antara dunia luar dengan Ternate-Tidore, dan Banda, Hitu kemudian menjadi tempat berlabuh untuk mendapat air, selanjutnya tempat ini berkembang menjadi bandar.

Pada waktu orang-orang Portugis tiba di Maluku, kerajaan-kerajaan Ternate dan Tidore sedang terlibat dalam perlombaan untuk merebut kekuasaan politik mutlak di daerah Maluku dan pulau-pulau di laut Banda. Dalam perlombaan ini fihak Ternate akhirnya menang, dengan menggunakan faktor baru, yaitu kedatangan Portugis di perairan Maluku. Berita tentang Portugis di Malaka dan direbutnya kota itu, telah tersebar di kepulauan Nusantara Melayu, dibawa oleh saudagar-saudagar Jawa dan Arab, yang berdagang antara Malaka dan kepulauan di Timur. Begitu pula kedatangan flotilla Portugis di bawah pimpinan Antonio Abreu dan Francisco Serrão di Banda dan Hitu pada awal tahun 1512 segera terdengar di kepulauan di utara. Apalagi setelah Portugis dengan berhasil telah membantu Hitu menghalau serangan dari fihak orang Ceram. Kolano Ternate, Bayan (Na-)sirulah dengan segera mengutus adiknya, Kaicil Darwis ke Hitu untuk mengundang orang-orang Portugis itu datang ke Ternate. Setelah kapal-kapal Portugis di bawah pimpinan Serrão tiba (António Abreu telah kembali ke Malaka), Kolano Ternate juga menyetujui permintaan pendirian bandar dagang dan benteng di pulau Ternate. Dapat diduga bahwa Kolano Ternate memperhitungkan kekuatan Portugis dengan senjata dan kapal modern dan keinginan untuk berdagang sebagai faktor meninggikan kekuatan dan prestise terhadap saingannya, Kolano Tidore.

Padre Sebastian Gonçalves dalam Apostolado de Francisco Xavier[29] menulis dalam tahun 1579 bahwa di antara kerajaan-kerajaan di daerah Timur itu, Ternate-lah yang paling kuat dan disebut Rey de Maluca, yang meliputi seluruh daerah antara Siau, Moro, Sulawesi, Amboino dan banyak daerah (lugares) lain. Kekuatan ini disebabkan karena di pulau itu ada sebuah benteng Portugis yang kecil dengan kekuatan 40 - 50 tenaga tempur, yang menyebabkan Ternate mempunyai keunggulan terhadap kerajaan-kerajaan lain.

Fihak Tidore yang dalam tahun 1512 itu terlambat mengirimkan utusannya, harus menunggu sembilan tahun lagi untuk mengimbangi kekuatan itu, yaitu juga dengan kedatangan fihak luar, yakni Spanyol dalam tahun 1521.

Alfonso de Albuquerque, sesudah menaklukkan Malaka dalam tahun 1511, memberikan perintah kepada António Abreu dan Francisco Serrão untuk mencari jalan ke pulau-pulau rempah-rempah yang oleh pedagang-pedagang Arab disebut "Jazirat-al-Muluk = ("daerah dari banyak tuan"). Instruksi bagi Abreu adalah tegas, ialah agar awak kapal tidak membajak, berusaha keras untuk mencapai hubungan yang baik dengan penduduk itu, dan supaya memperhatikan kebiasaan "pribumi"[30].

Dengan latar belakang inilah kiranya harus ditinjau hubungan-hubungan dagang antara Portugis dengan sultan-sultan di Maluku, dengan regedors dan cabeça di Hitu dan Banda[31]. Baik Ternate, maupun sultan-sultan di pulau-pulau lain minta Portugis untuk mendirikan benteng di daerah mereka, serta minta bantuan untuk meneguhkan kekuasaannya. Sebagai balas jasa fihak Portugis mendapat rempah-rempah. Baru dalam tahun 1518, sesudah kekuasaan Portugis di Goa dan Malaka mulai berakar, maka dikirimlah flotilla di bawah pimpinan Tristão de Menezes untuk mengangkut bahan-bahan rempah dari Maluku. Dalam perjalanan pulang flotilla itu singgah di Hitu dimana telah didirikan sebuah loji sejak tahun 1515. Pada perjalanan itu juga, karena musim timur telah tiba, fihak Portugis mencari pelabuhan yang aman, dan ditemuinya Teluk Dalam ("Cova"). Pada kesempatan ini Portugis membantu lagi Hitu menghalau serangan dari Seram.

Periode pertama ini, dimana Portugis dapat meluaskan hubungan dagang dengan tenang, dikejutkan oleh kedatangan sisa-sisa eskader Spanyol di bawah pimpinan anak buah mendiang Fernão de Magelhães dalam tahun 1521. Francisco Serrão, yang telah menetap di Ternate, telah menulis kepada kawan karibnya, Fernão de Magelhaes, tentang segala kejadian sejak ia meninggalkan Portugal, dan telah pula memberitahukan tentang jalan-jalan untuk mencapai kepulauan rempah-rempah. Magelhães, yang telah menawarkan jasa-jasanya kepada raja Portugal dan tidak mendapat responsi, kemudian telah berhasil mendapat tugas dari raja-raja Spanyol, dan telah menemukan jalan baru lewat Amerika Selatan menyeberangi Lautan Teduh. Waktu tiba di Sebu, di kepulauan yang kemudian dinamakan Philipinas, ia dibunuh oleh penduduk setempat. Sisa eskadernya, dipimpin oleh Elcano dan Antonio Pigafetta, berhasil meloloskan diri dan tiba di Maluku, sesudah 27 bulan mengarungi lautan. Setiba di Maluku mereka mendapatkan Portugis di Ternate, dan karena itu berlayar ke Tidore dimana mereka disambut dengan hangat oleh Kolano Tidore[32].

Walaupun Portugis dari permulaan berusaha untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat dianggap bermusuhan, namun sejak mulanya tujuan kedatangan adalah untuk mendapatkan hak monopoli atas perdagangan rempah-rempah. Sebagaimana dibentangkan oleh A. Meilink-Roelofsz[33] memang bukan maksud Portugis untuk menguasai

seluruh perdagangan antar-pulau, melainkan cukup monopoli rempah-rempah, terutama cengkeh, pala dan bunga pala. Oleh karena itu Tristão de Menezes meminta kepada Kolano Ternate agar Portugis diberikan monopoli itu dan diizinkan untuk mendirikan sebuah benteng guna melindungi perdagangan rempah-rempah. Sultan Ternate yang rupanya merasakan tekanan dari adanya fihak asing di daerahnya merasa segan memenuhi permintaan itu, dan baru dalam tahun 1522 monopoli itu diberikan dan benteng didirikan. Mungkin kehadiran Spanyol di Tidore menjadi dorongan untuk memberikan bantuan kepada Portugis itu.

Sejak bangsa Lusitania mulai mendatangi daerah-daerah di Afrika, Asia dan Amerika Selatan di zaman Pangeran Henrique (Henry Pelaut), maka olehnya telah dihidupkan dan diadakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat menjamin hubungan (dagang) dengan daerah-daerah itu. Kebijaksanaan-kebijaksanaan itu adalah[34]:

- pendirian "feitoria" (bandar-dagang)
- pemberian tanah-tanah (doação) kepada para bangsawan untuk dieksploitasi
- pendirian "companhia da nau" (suatu bentuk asuransi maritim yang menjamin perongkosan flotilla-flotilla yang dikirim ke daerah-daerah baru)
- mengadakan monopoli dagang atas suatu bahan perdagangan tertentu.

Apabila pendirian "companhia da nau" berlaku khusus untuk dalam negeri, ketiga kebijaksanaan lainnya diikuti di mana Portugis tiba dan mengadakan persiapan untuk menguasai daerah baru itu demi tujuan-tujuannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh C.R. Boxer dalam "Four Centuries of Portuguese Expansion", tujuan ekspansi Portugal adalah "orang Kristen dan rempah-rempah" sebagaimana diucapkan oleh awak-awak eskader Vasco da Gama waktu mereka tiba di Calicut dalam tahun 1498. Di mana Raja Portugal juga merupakan pemegang tertinggi dari hak-hak patronaat gereja Katolik, maka tiap petugas kerajaan merupakan sekaligus penyebar Injil.

Dalam sejarah masa Portugis di Maluku Utara, Ambon dan Banda, telah jelas dilihat begaimana usaha penginjilan itu. Usaha ini akhirnya menghasilkan pengkokohan dunia Islam, karena daerah-daerah Islam saling membantu, dan mencari bantuan dari fihak Islam di luar daerah seperti dari Ratu Japara. Pada fihak lain usaha penginjilan menghasilkan penasranian dari daerah-daerah yang tadinya memeluk kepercayaan kuno. Menurut Meilink-Roelofsz usaha-usaha penasranian ini tidak dilakukan karena "humanitarian aspect" dalam agama Kristen, tetapi karena memeluk agama Kristen berarti sefihak dengan Portugis dan pada ekstreemnya, menentang pengaruh Ternate yang sering identik dengan pengaruh Islam, maka motif penginjilan cukup jelas.

Pasang surutnya pengaruh Portugis di Maluku, Ambon dan Banda banyak tergantung dari sikap dan kepandaian capitão-capitão Portugis di Maluku. Faktor lain yang menentukan kekuatan Portugis adalah keadaan dalam negeri, hubungan politik antara Ternate dan

Tidore. Oleh karena itu menjadi jelas bahwa pada masa kekuasaan Ternate belum meluas, tidak ada halangan bagi Portugis untuk mendirikan benteng-benteng dan loji-loji di Maluku, Ambon dan Banda, dan bagi Spanyol di Tidore. Konsentrasi perdagangan Portugis adalah di Ternate dan Banda, sedang Hitu merupakan bandar. Akan tetapi bagi kapal-kapal Portugis, jarak Hitu-Banda kurang menguntungkan, di mana rempah-rempah dari Banda dibawa oleh orang-orang Banda, dan diduga karena itu Portugis dalam tahun 1531 menghadiahkan pulau itu kepada Kaicil Daroes (Darwis), Kimelaha sultan Ternate.[36]

Di masa pertama ini telah pula diadakan penginjilan. Tiap flotilla Portugis membawa padri-awam yang bertugas untuk mengatur soal-soal kerokhanian awak kapal; di mana kapal berlabuh, mereka menyebar agama Kristen kepada penduduk setempat. Usaha penginjilan secara teratur dimulai pada waktu pendirian benteng-benteng dan loji-loji, pada waktu mana padri-padri mulai datang. Fakta pertama mengenai penginjilan di Maluku adalah sekitar tahun 1523; waktu António de Brito datang untuk mendirikan benteng di Ternate, ikut serta beberapa biarawan Fransiscan. Mengenai missi pertama ini tidak ada banyak khabar. Baru dalam tahun 1534 (semasa pemerintahan Tristão de Atayde), diadakan lagi penginjilan secara serius, dipelopori seorang pedagang Portugis, Gonçalves Veloso, yang tinggal di Moro. Kolano dari Mamoya (suatu tempat di Moro), yang masih mengikuti kepercayaan kuno menghadapi serangan-serangan dari tempat-tempat sekitarnya yang sudah memeluk agama Islam. Menurut Visser[37] ia datang minta bantuan dari Veloso, yang menganjurkan agar Kolano itu mencari perlindungan dari Portugal. Dan untuk mendapatkan perlindungan itu ia harus menjadi Kristen, bersama rakyatnya. Hal ini terjadi dan Kolano Mamoya dibaptis di Ternate dengan segala upacara, di mana hadir juga Tristão de Atayde. Sekembalinya ke Moro, "Dom João" (nama baptisannya) disertai dua orang padri, Simon Vaz dan Francisco Alvares. Tristão de Atayde terkenal dalam sejarah Maluku sebagai seorang yang kurang bijaksana. Semasa pemerintahan terjadi beberapa hal yang oleh orang Maluku tidak dapat diterima, dan karena itu raja-raja mengadakan perjanjian rahasia untuk menjatuhkan Portugis dan kawan-kawannya. Salah seorang korban adalah "Dom João", yang dibunuh dalam peperangan yang terjadi, dan missi pertama ini berakhir dalam tahun 1536[38].

Masa pemerintahan de Atayde berakhir dengan penahanan Sultan Ternate, Tabarija (Tabariji), atas tuduhan mengadakan komplot terhadap Portugis. Ia dibuang ke Goa, di mana ia memeluk agama Kristen setelah berkenalan dengan seorang bangsawan Portugis Jordão de Freytas yang menjabat pada pemerintahan raja-muda Portugis di Goa, tetapi telah sering datang ke Maluku. Tabarija mengambil nama baptisan "Dom Manuel". Dalam tahun 1537 ia menghadiahkan pulau Ambon dan Ceram kepada de Freytas yang di kemudian hari menjabat capitão di Maluku. Sementara itu adiknya Tabarija, Hairun[39], diangkat menjadi sultan oleh Portugis.

Tristão de Atayde diganti oleh António Galvão (1536-1540), seorang yang ulung dan bijaksana serta jujur, yang menaruh banyak perhatian terhadap keadaan masyarakat dan sejarah Maluku dan kepulauan lainnya.

Di Ambon, di mana Portugis ingin mendirikan benteng di Hitu, yang oleh orang Hitu kurang disenangi, Portugis, atas anjuran dan nasehat Hitu, mencari tempat berlabuh yang terlindung dari angin timur, di pantai selatan dan sampailah mereka di Hatiwe-Tawiri. Orang Hitu menganjurkan kedua tempat ini karena "termasuk Ulisiwa dan makan babi". Tetapi di sinilah, menurut mereka, orang Portugis akan mendapatkan orang-orang yang dapat membantu mereka memelihara kapal-kapal mereka. Di sanalah orang-orang Portugis menetap dan kawin dengan gadis-gadis pribumi. Akan tetapi orang Hitu, yang menganggap Hatiwe-Tawiri tetap sebagai termasuk daerah kekuasaan mereka, juga datang menetap di sekitar dua tempat itu, dan terjadi lagi bentrokan-bentrokan. Oleh sebab itu, pemuka Hatiwe (yang kemudian disebut Orangkaya Hatiwe) dalam tahun 1536, bersama kakak putrinya dan pengikut-pengikutnya pergi ke Malaka dan terus ke Goa untuk minta bantuan Portugis terhadap gangguan dari Hitu itu. Di sana mereka masuk agama Kristen dengan mengambil nama "Dom João" dan "Dona Isabel".

Bantuan yang diminta itu baru dapat dikirim oleh Galvão dalam tahun 1537 dan suatu armada dari 25 cora-cora dengan pasukan-pasukan yang terdiri dari 400 orang Ternate dan Tidore dan 40 orang Portugis dipimpin Diego Lopez de Azevedo tiba di Ambon. Pihak Hitu yang telah mendatangkan bantuan dari Japara, Makasar dan Banda, terkalahkan, dan Portugis dengan armadanya menyusur seluruh pantai Ambon untuk mengadakan hubungan persahabatan dengan tempat-tempat di sana. Pada kesempatan itu diadakan juga penginjilan oleh padri-padri yang ikut serta ke Nusaniwe dan Amantelu[40].

Kemenangan ini tidak bertahan lama. Oposisi di Hitu terhadap penginjilan terus berjalan dan dalam tahun 1538 itu juga Portugis diusir dari loji mereka di pantai utara. Mereka menyeberangi pegunungan jazirah Hitu diantar oleh kepala negeri Hukunalo sampai di pantai selatan di mana mereka mengadakan perkampungan pada ujung mulut Teluk Dalam, yang sekarang dinamakan Poka[41]. Kemudian mereka berpindah dekat tanjung yang diberi nama Cabo Martim Afonso[42]. Perkampungan ini letaknya dekat negeri Rumah-tiga, tidak jauh dari Hatiwe-Tawiri.

Masa pemerintahan Antonio Galvão merupakan masa yang tenang dalam sejarah Maluku. Ia terkenal sebagai seorang ahli pemerintahan yang jujur dan memperhatikan nasib dari bawahannya. Umpamanya untuk memudahkan hidup daripada mereka yang ingin menetap di Maluku ia membawa alat-alat rumah tangga yang lazim dipakai di Portugal.

Galvão dapat kepercayaan dari raja-raja di Maluku sehingga persekutuan dari raja-raja tersebut untuk melawan usaha penginjilan dapat dibubarkan. Penginjilan dalam masa itu meluas ke Moro dan Jailolo di mana Kolano Sabia keponakan dari raja Jailolo me-

meluk agama Kristen. Pada suatu ketika anak-anak dari raja-raja di sana dikirim ke Ternate untuk mengikuti pelajaran pada Seminari Ternate yang telah dibentuk oleh Galvão. Curriculum meliputi pelajaran agama, menulis dan berhitung dan dalam waktu singkat pemuka-pemuka lain di Maluku mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah itu pula.

Walaupun terdapat suasana tenang, para pemuka Islam di Ternate tetap memusuhi perluasan agama Kristen. Diantaranya diadakan suatu peraturan yang melarang seorang Islam memeluk agama lain; apabila hal ini terjadi juga maka orang yang bersangkutan akan diasingkan dan harta bendanya menjadi milik umum. Bila seseorang yang sudah kembali ke Islam kemudian menjadi Kristen lagi, ia dikenakan hukuman mati. Persaingan antara kedua agama itu tetap berlangsung tetapi Hairun, Sultan Ternate pada waktu itu, adalah kawan baik dari Galvão dan menjunjung pejabat Portugis itu. Pada waktu Galvão harus mengakhiri masa jabatannya, para Sultan dan Rakyat Maluku mengirim surat permintaan pada raja Portugal supaya Galvão menjadi Kapitan Mor di Maluku seumur hidup. Nama julukan yang diberikan padanya adalah "O Pai" (Bapak).

Sesudah Galvão dipanggil kembali, tidak ada lagi seorang wakil pemerintah Portugal yang demikian bijaksana dan ulung dalam memerintah kepulauan itu, dan mewakili kepentingan negaranya. Sesudah masa itu hubungan antara sultan-sultan di Maluku serta pemuka-pemuka di Ambon-Lease dengan fihak Portugis tidak lagi sebaik semasa Galvão. Diketahui bahwa Galvão telah menggunakan segala harta bendanya untuk kepentingan kemajuan daerah yang dikuasainya, tetapi sekembalinya di Portugal ia tidak dihiraukan dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit dalam keadaan yang menyedihkan[43].

Sejarah hubungan politik antara Portugis dengan pemuka-pemuka di Maluku, Ambon-Lease dan kepulauan lainnya antara tahun 1540 sampai 1605 merupakan suatu rangkaian pertikaian antara para pendatang dan penduduk pribumi untuk mempertarungkan kekuasaan atas kepulauan itu, diseling dengan kejadian-kejadian yang akhirnya menentukan siapa yang menjadi pemenang. Dalam masa itu penginjilan telah menunjukkan kegiatan-kegiatan yang meningkat sesudah Fransiscus Xavier tiba di Maluku dan telah mengatur pengiriman-pengiriman padri-padri ke daerah-daerah itu. Akan tetapi di mana usaha penyebaran agama Kristen berdampingan dengan usaha perluasan kekuasaan politik dan perdagangan, dapat diduga bahwa dari fihak kerajaan-kerajaan di Maluku dan kepala-kepala tempat di Hitu, yang juga menjadi pendekar dari agama Islam, mengadakan reaksi atas kegiatan itu. Dan walaupun pada suatu ketika keempat kerajaan terbagi atas golongan yang membela agama Islam dan golongan yang menganut agama baru, akhirnya terdapat suatu kristalisasi keadaan yang menentukan dan yang masih berlaku dalam abad keduapuluh.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu, pada tahun 1537, Sultan Tabariji dari Ternate dibuang ke Goa. Di sana ia bertemu dengan seorang bangsawan Portugis, Jordão de Freytas, yang telah seringkali datang di Maluku. Menurut Tiele[44] de Freytas menasehat-

kan Tabariji supaya menjadi Kristen untuk mendapat dukungan atas usahanya membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam suatu komplotan. Nasehat ini dituruti dan Tabariji menjadi Kristen dengan mengambil nama "Dom Manuel" bersama dengan ibunya yang mengambil nama "Dona Isabela", yang diberikan kepada mereka oleh Raja Muda Nuno da Cunha dan Jordão de Freytas. Ia kemudian menghadiahkan pulau Ambon, yang dianggap miliknya, kepada de Freytas. Raja Portugal, Dom João, demikian terharu oleh kejadian itu sehingga ia memerintahkan kepada Martim Alfonso de Souza, gubernur di Goa, untuk mengembalikan Tabariji pada kedudukannya. Pemberian Tabariji kepada de Freytas diteguhkannya dengan Decreet Raja dan de Freytas diangkat menjadi capitão di Maluku (1543).

Keputusan Raja Portugal untuk mengembalikan Tabariji sebagai sultan menimbulkan suatu kesulitan, yang diselesaikan oleh de Freytas dan pejabat-pejabat pemerintahan di Maluku dengan keputusan untuk menawan Sultan Hairun dan mengirimkannya ke Malaka untuk diadili. Sultan Hairun yang diangkat oleh Portugis itu ternyata telah membuktikan keunggulannya sebagai kepala pemerintahan dan telah diakui umum di Ternate sebagai raja. De Freytas terpaksa akhirnya menangkapnya juga beserta Jogugu Samarau untuk dibawa ke Malaka. Ternyata setibanya Hairun di Malaka (1545), Tabariji telah meninggal dunia sehari sebelumnya, dan dalam testamennya ia, sebagai raja Kristen, telah menunjuk raja Portugal sebagai ahli warisnya. Pemerintahan Portugal di Malaka bermaksud mengirimkan Hairun kembali, tetapi ia menolak dan minta agar dikirimkan ke Goa guna bertemu dengan Raja Muda untuk mendapat keputusan resmi dalam persoalan ini. Akhirnya ia dikembalikan ke Ternate dan dipulangkan pada kedudukannya sebagai raja.

Pada waktu Jordão de Freytas tiba di Ternate, suatu eskader Spanyol di bawah pimpinan laksamana Ruy de Villalobos, yang telah diutus oleh Raja Muda di Mexico untuk mencari jalan ke pulau-pulau rempah-rempah itu, telah tiba di Tidore. De Freytas dapat meyakinkan Villalobos bahwa daerah itu termasuk daerah kekuasaan Raja Portugal sehingga akhirnya awak kapal eskader itu dipulangkan ke Spanyol. Villalobos sendiri yang masih menunggu kesempatan untuk berangkat, telah dibawa ke Ambon di mana ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia (di Nusaniwe?).

Walaupun de Freytas telah mendapat pulau Ambon sebagai milik, tetapi ia tidak sempat melunaskan pemberian itu, dan akhirnya mengutus keponakannya Vasco untuk mengclaimnya dan mendirikan benteng dekat Hatiwi-Tawiri. Vasco pergi bersama kawan-kawannya, di antaranya seorang yang bernama Fausto Rodrigues, yang keluar dari dinas militer Portugis untuk menetap di Ambon[45]. Tindakan ini menyebabkan kemarahan fihak Hitu yang meminta bantuan dari Ratu Japara untuk menyerang perkampungan baru itu. De Freytas yang menjadi gusar, mengeluh tentang hal ini kepada sultan Hairun yang menjawab bahwa Jordão adalah "senhor" dari pulau itu dan karenanya, ia (Hairun) tidak dapat berbuat apa-apa, juga tidak sebagai vazal Raja Portugal.

De Freytas dipanggil kembali ke Goa sebelum masa jabatannya berakhir. Sementara itu tibalah Francisco Xavier di Amboina dalam tahun 1546. Pada waktu itu sudah ada tujuh tempat di sekitar Teluk Dalam yang menjadi Kristen, letaknya jauh ke pedalaman karena takut akan serangan dari pihak Islam. Xavier sendiri tidak menyebut nama-nama tempat-tempat itu, tetapi kiranya tempat-tempat itu adalah: Hatiwe, Tawiri, Nusaniwe, Kilang, Soya, Halong dan Ema. Tindakan pertama adalah membaptis penganut agama Kristen di sana, sebab mereka belum dibaptis. Kemudian ia mengelilingi pulau itu untuk mengadakan penginjilan dan memberikan pelajaran catechismus. Pelajaran-pelajaran ini diadakan dalam bahasa Melayu yang telah dipelajarinya di Malaka. Sesudah kunjungan di pulau Ambon ia meneruskan ke Ceram dan Nusa Laut. Walaupun dalam surat-surat Xavier sendiri tidak disebut kunjungan ini, menurut Wessels, tidak dapat dibantah berhubung suatu penyelidikan resmi yang diadakan atas dasar keterangan Fausto Rodrigues dalam tahun 1608 di Manila, yang telah mengikuti perjalanan Xavier itu. Sekembalinya di Ambon telah tiba kapal-kapal Portugis dari Ternate yang membawa sisa dari awak eskader Villalobos dengan laksamananya sendiri bersama sembilan orang padri. Dalam tahun 1546 Xavier pergi ke Ternate dan kemudian ke Moro untuk mengadakan pembaptisan dan penginjilan. Dalam tahun 1547 ia kembali ke Ambon dan kemudian berangkat ke Malaka.

Pengganti de Freytas, Bernaldim de Souza, memelihara ketenangan dalam daerah ini kecuali dalam tahun 1549 ketika ia merasa perlu untuk memerangi Jailolo karena rajanya terus-menerus menyerang orang-orang Kristen di sana. Bersama dengan Hairun ia mengadakan suatu ekspedisi yang oleh Hairun dipergunakan untuk meluaskan kekuasaannya atas Jailolo dan Tidore.

Sementara itu, de Freytas yang telah dipanggil karena dituduh melakukan pelbagai pelanggaran, telah membuktikan ketidakbenaran tuduhan itu dan kemudian ditempatkan kembali di Maluku. Ia membawa pula surat dari Raja Muda Goa yang menyatakan bahwa kekuasaan Hairun tidak akan diganggu-gugat. Hairun menerima kabar itu dengan baik dan sejak itu ia membantu fihak Portugis, baik dalam hal perdagangan maupun dalam hal penginjilan. Walaupun ia sendiri tidak menjadi Kristen (menurut para padri karena ia tidak mau menceraikan keseratus istrinya dan sekian banyak selirnya), ia tidak menghalangi usaha penginjilan, malahan berjanji bahwa salah seorang putranya akan menjadi Kristen. Juga di antara saudara-saudara putrinya ada yang menjadi Kristen.

Tahun-tahun kemudian merupakan masa tenang, tetapi dalam tahun 1555 Duarte de Eça, capitão baru yang terkenal dalam sejarah sebagai orang yang loba, mengambil suatu tindakan yang memburukkan sekali nama Portugis dan mengakibatkan suatu pemberontakan oleh Ternate dan Tidore. Dari zaman nenek-moyang hasil cengkeh dari pulau Makian telah menjadi milik bersama raja-raja Ternate dan Tidore, dan hasil itu adalah khusus untuk membelanjai keperluan kedua raja itu.

Kapitan baru ini ternyata tidak mau mengakui hak itu, dan memerintah agar hasil cengkeh menjadi bahan perdagangan Portugis (dan ia sendiri). Hal ini ditolak oleh Hairun yang kemudian ditawan bersama ibunya dan saudaranya lalu dipenjarakan tanpa mendapat perlakuan yang baik. Dalam persoalan ini Portugis dibantu oleh Jailolo dan Bacan (yang telah menjadi Kristen). Sangaji Jailolo diberi gelar "Sultan" oleh Portugis. Perlakuan terhadap Hairun demikian kejinya sehingga orang-orang Portugis sendiri - mereka yang menetap, berdagang, missionaris dan padri-padri - bersatu dan mengambil tindakan yang berlawanan. Akhirnya mereka berhasil menawan de Eça dan dikirim ke Goa sebagai tahanan. Hairun dibebaskan; ia tidak mengambil tindakan balasan. Akan tetapi capitão yang baru, Manuel de Vasconcellos, membawa berita dari Raja Muda bahwa berdasarkan testamen Tabarija, raja Portugal harus diakui sebagai penguasa atas Maluku dan Hairun memerintah sebagai vazal Portugal. Hairun tetap tinggal diam dan menuruti perintah itu karena dalam usaha menyerang Jailolo dan Tidore ia tetap dibantu Portugis.

Pada waktu Xavier tiba kembali di Malaka, ia mengatur supaya ada 3 padri yang pergi ke Ambon untuk memelihara keadaan agama di negeri-negeri yang telah memeluk agama Kristen dan untuk mengadakan penginjilan. Sesudah tahun itu pengiriman padri-padri diadakan secara teratur dan pada tahun 1555 telah terdapat 30 tempat Kristen di Ambon dan 13 di pulau-pulau Oma, Saparua dan Nusalaut, sedangkan di pulau-pulau Buru dan Seram juga telah ada orang-orang yang beragama Kristen. Akan tetapi menurut padri-padri itu sendiri[46] "walaupun penduduk menjadi Kristen, adat-istiadat dari agama kuno masih tetap menguasai kehidupan mereka, dan apabila memang akan diharapkan kehidupan sebagai orang Kristen, perlu dikirim satu padri untuk satu tempat. Keadaan geografis dari pulau-pulau ini merupakan penghambat untuk mengadakan penginjilan secara intensif, dan karena itu masih terdapat keadaan di mana diadakan pemotongan kepala manusia pada kesempatan pesta adat".

Keadaan yang menggambarkan kelemahan masyarakat Kristen ini diperburuk lagi karena kedatangan Kaicil Liliato dengan armada Ternate untuk menyerang kaum Kristen di Ambon dan Buru, sebagai tindakan pembalasan terhadap peristiwa penahanan Hairun. Perlawanan hebat terjadi di Oma, Kilang dan Hatiwe. Di Nusaniwe, rajanya memihak pada Ternate. Di pulau Buru Leliato memaksa perkawinan antara laki Islam dan wanita Kristen dan sebaliknya, dan keluarga-keluarga campuran ini disebar di semua kepulauan Ambon dan Lease. Dalam tahun-tahun kemudian keadaan di pulau Ambon demikian hangat sehingga dianggap perlu untuk menetapkan seorang capitan khusus bagi daerah itu. Antonio Paez yang menjadi capitao yang pertama itu, tiba pada tahun 1562 dengan membawa dua orang padri. Sementara itu Hairun telah mengutus putranya, Baab Ullah, untuk menaklukkan Ambon. Dengan 4000 tenaga tempur ia menyerang Nusaniwi (yang sementara itu sudah menjadi Kristen lagi). Sewaktu terjadi pertempuran, flotilla Paez tiba, dan tersiar kabar juga bahwa raja Bacan, yang menjadi Kristen itu, telah mengirimkan bantu-

an kepada Portugis. Karena kejadian itu Paez mulai dengan mendirikan benteng di Hitu, dekat perkampungan Vasco de Freytas, sedangkan kedua padri itu memusatkan perhatian mereka kepada penginjilan di Lease (Saparua), Oma, Nusalaut dan Lisabata.

Kedudukan sultan Hairun telah menjadi demikian kuat sehingga ia merasa terancam oleh maksud Paez dengan mendirikan benteng di Ambon itu. Ia memprotes pada Henrique de Sá, capitão di Maluku. Karena perdagangan cengkeh dapat terancam apabila Hairun merasa tersinggung maka de Sá melarang Paez untuk mendirikan benteng itu. Karena tenaga tempur tidak ada pada Paez (hanya 30 orang serdadu) maka ia mencari jalan lain. Negeri-negeri Kristen diorganisirnya dalam suatu persekutuan dan diadakan militia dan angkatan laut yang teratur.

Kejadian ini hanyalah permulaan dari peperangan yang kemudian berkobar dimana kedua belah fihak menderita korban, dan terutama tempat-tempat Kristen menjadi sasaran. Ditambah keseganan fihak Portugis untuk memperhatikan kaum Kristen karena lebih mementingkan perdagangan rempah-rempah.

Baru dalam tahun 1565 sesudah raja Portugal mengirim suatu surat yang memarahi Raja Muda di Goa, de Noronha, diambil tindakan-tindakan. Suatu eskader dengan 1000 orang tentara dipimpin Conçalo Pereira Marramaque berangkat ke Ambon. Di antara pembantu-pembantu Pereira terdapat Gabriel Rebello yang sebelumnya telah lama berdiam di Maluku dan kembali sebagai fetor[47]. Di Ambon, tentara dari Jawa sebesar 600 perajurit dibantu 2000 orang Hitu telah mendirikan tempat-tempat pertahanan di sekitar Teluk Dalam. Pereira telah dapat menghalau serangan-serangan mereka, dan kemudian ia minta kepada Hairun supaya membantunya mendirikan benteng. Hairun menyanggupi pembangunan benteng di Hitu atas ongkosnya sendiri kalau Portugis bersedia mengakui hak-haknya atas Veranula, Lesidi dan Kambelo. Hal ini ditolak oleh Pereira, yang akhirnya mendirikan benteng (masih di Hitu) juga dengan bantuan kaum Kristen dan kaum kafir.

Sementara Pereira berada di Ambon, capitão Ternate, Diego Lopez de Mesquita, mempersoalkan lagi hasil cengkeh pulau Makian dan memberikan sultan Hairun barang-barang perdagangan sebagai gantinya. Peristiwa ini hanyalah salah satu alasan untuk mencari persoalan dengan Hairun. Akan tetapi perselisihan yang muncul itu dapat diselesaikan berkat bantuan seorang perantara; kemudian Mesquita bersumpah atas Kitab Injil dan Hairun bersumpah atas Kor'an, bahwa tidak ada lagi perselisihan antara mereka. Akan tetapi, esok harinya (28 Pebruari 1570) Mesquita menyuruh membunuh Hairun dengan membujuk keponakannya António Pimentel.

Pembunuhan atas diri Hairun menyebabkan semua raja di Maluku bersatu dan bersumpah akan membantu Baab Ullah - putra sulung Hairun yang telah diangkat sebagai raja - untuk mengusir Portugis dari kepulauan Maluku. Benteng Portugis di Ternate tidak dibantu lagi dengan bahan makanan sehingga pada tahun 1575 Portugis terpaksa meninggalkan benteng itu dan mencari persahabatan dengan Tidore. Sultan Tidore mengizinkan mereka mendirikan benteng di

daerahnya dengan maksud melindugi dirinya dari serangan-serangan Ternate, dan untuk memajukan perdagangan cengkehnya.

Baab Ullah memperluas serangan-serangannya dan menaklukkan Bacan yang sampai saat itu membantu fihak Portugis dan mengembalikan gelar "Sultan" kepada sangajinya (sejak kira-kira tahun 1560 sultan Bacan diganti gelarnya menjadi Sangaji).

Peristiwa pembunuhan Hairun mempengaruhi juga keadaan di Ambon. Pereira berusaha membantu capitão Portugis di Ternate tetapi tidak berhasil. Ia sendiri jatuh sakit dan meninggal dunia dalam tahun 1571 dalam keadaan yang melarat sehingga tidak ada ongkos untuk membayar penguburannya. Benteng di Ambon telah terbakar, mungkin oleh orang-orang Hitu, dan oleh karena itu diputuskan oleh Sancho de Vasconcellos, yang kemudian menjadi capitão di Ambon, untuk memindahkannya ke jazirah Leitimor dekat Nusaniwe di pertuanan Urtetu; kemudian benteng itu dipindahkan lagi ke timur. Pembangunan benteng baru ini dicegah oleh kepala-kepala negeri-negeri Kristen yang sampai saat itu membantu Portugis, mungkin mereka mengkhawatirkan pengurangan kekuasaan mereka sendiri. Terjadilah peristiwa penahanan raja Nusaniwe, Ruy de Sousa, dan pembakaran Puta oleh Portugis. De Sousa yang berhasil melarikan diri dari tawanan berhasil pula menyatukan Nusaniwe dan tempat-tempat di sekelilingnya untuk melawan Portugis. Walaupun kemudian de Vasconcellos dapat mengembalikan ketenangan di Ambon, namun suasana aman belum pulih. Ternyata dari permintaan padri-padri dalam tahun 1581 agar diperbolehkan mendirikan dua buah gereja di luar benteng karena penduduk tidak berani mengunjungi gereja yang berada di dalam benteng.

Walaupun fihak Portugis masih berkuasa di Ambon dan Tidore dan usaha penginjilan dan perdagangan rempah-rempah terus berlangsung, namun sejak tahun-tahun itu bintang mereka cepat menurun. Juga disebabkan karena politik dalam negeri, dimana dalam tahun-tahun 1578 Raja Sebastião tewas dalam pertempuran di Alcasar-Quebir. Karena tidak terdapat ahli waris langsung terjadilah persoalan penggantian. Penyelesaiannya ialah penyatuan kerajaan Portugal dengan Spanyol. Pihak Spanyol yang sedang menghadapi pemberontakan dari propinsi-propinsinya di Holland, kemudian menutupi pelabuhan-pelabuhan Lisboa dan Oporto untuk mencegah perdagangan dengan Inggris dan Holland. Akibat dari tindakan ini adalah perdagangan Portugal sangat menurun dan akhirnya lumpuh. Sejak akhir abad keenambelas kejayaan masa lampau Portugal tidak terkejar lagi.

Sementara itu bangsa-bangsa lain - di antaranya Belanda dan Inggris - telah mengikuti jejak Portugis dan mencari jalan ke pulau-pulau rempah-rempah. Francis Drake tiba di Maluku dalam tahun 1579. Sebenarnya tujuannya adalah Tidore, tetapi setelah diberitahukan oleh Sangaji Motir (yang disebut oleh Drake "Deputy" atau "Viceroy" dari sultan Ternate), bahwa Portugis sudah menetap di sana maka ia menuju ke Ternate, di mana ia disambut baik tetapi tidak diadakan perdagangan. Kedatangan Drake ini menggelisahkan Portugis karena takut akan persaingan dalam perdagangan cengkeh.

Hal ini baru terjadi dalam tahun 1598 dengan kedatangan Belanda.

Baab Ullah yang telah berhasil meluaskan daerah dan kekuasaan Ternate meninggal dunia dalam tahun 1583 dan diganti oleh putranya yang bernama Said yang meneruskan politik ekspansi dan pengejaran terhadap kaum Kristen.

Keadaan missi selama ini tidak maju dan tidak mundur. Padri-padri datang dan pergi dan setiap padri mengeluh tentang keadaan di Maluku dan Ambon. Mengeluh karena pada suatu pihak Ternate makin berkuasa dan makin menekan masyarakat Kristen. Dalam usaha itu Ternate dibantu oleh Hitu dan Japara. Pada fihak lain Portugis lebih mementingkan perdagangannya dan membiarkan kaum Kristen. Tertekan oleh serangan-serangan dari pihak Islam, jumlah orang Kristen berkurang; banyak di antara mereka keluar dari gereja karena takut.

Karena keadaan ini, telah diminta dari pengawas missi-missi Jesuit di India, padre Valignano, supaya mengunjungi Maluku dan Ambon, tetapi karena kesibukan pekerjaannya ia mengirim wakilnya, padre Marta yang tiba dalam tahun 1587. Sebelum Marta (orang Italia) menjadi anggauta dari Societas Jesu, ia pernah menjadi perwira di Italia. Pengalaman inilah mungkin menyebabkan ia kemudian dapat melihat keadaan politik-militer di Maluku. Ini sebabnya para sejarawan memberi nama julukan baginya, "padri-politicus".

Setiba di Ambon ia segera menghubungi semua tempat dan laporannya[48] memuat keterangan-keterangan yang sangat penting tentang keadaan sosial-politik di Maluku dan Ambon. Tercatat dalam laporan itu bahwa di Ambon (dan kepulauan Lease) ada 70 tempat tetapi hanya 34 yang dikuasai Portugis. Jumlah orang yang tadinya beragama Kristen, tetapi telah menjadi Islam adalah 47.000, dan mereka yang menyebut diri Kristen berjumlah 25.000 orang. Untuk mereka ini hanya terdapat seorang padri saja.

Dalam laporan lain ia menggambarkan keadaan kepulauan Timur itu, di mana "sudah 20 tahun terus-menerus ada perang, dan fihak musuh makin berkuasa, keadaan Portugis makin memburuk dan menurun. Kedua capitao, di Tidore dan di Ambon, hanya memikirkan bagaimana mereka dengan secapat mungkin dapat mengumpulkan harta dan melupakan kepentingan kerajaan dan penghormatan kepada Tuhan.

Laporan dari tahun 1590 adalah penting untuk pengetahuan keadaan politik di Maluku, karena menggambarkan kekuasaan Ternate yang meliputi 72 buah pulau yang membayar upeti dan yang terbentang antara Mindanao sampai Bima-Korreh dan Nova Guinea. Tenaga tempur yang harus diberikan oleh masing-masig daerah kalau ada peperangan adalah:

Ternate (16 tempat)	3.000
Motir	200
Makian	1.500
Kajoa	300
Gacea (Gasse, disebelah timur Obi?)	300
Kepulauan Sula	4.000

Pulau Buru dan sekitarnya	4.000
Veranula dan Ceram	30.000
Boano dan Manipa	3.000
Pulau-pulau Na, Noloa dan Guinea 50 mil di sebelah timur Ternate	tidak tentu
Hiri	400
Mayu dan Tafuri	400
Dooi	500
Rau dan Morotai	1.000
Batochina (Halmahera)	10.000
Di "Matheo" (Celebes):	
Totola (Toli-toli) dan Buol	6.000
Kaudipan	7.000
Gorontalo dan Limboto	10.000
Tomini	12.000
Manado	2.000
Dondo	700
Labagus (?)	1.000
Pulo dan Jaqua (?)	10.000
Gape (Keling), Tambuku, Buton	tidak tentu
Sangir	3.000

Laskar ini yang terdiri dari 130.300 tenaga tempur tetap ditambah dengan tenaga cadangan dan budak. Walaupun, menurut Tiele, jumlah ini tidak dapat dipastikan namun memberikan gambaran dari pengaruh dan kekuasaan kerajaan Ternate pada dasawarsa terakhir abad keenambelas.

Selama sepuluh tahun di Maluku dan Ambon padre Marta telah memberikan keterangan-keterangan yang sangat penting. Tetapi ternyata dari laporan-laporan yang ditulisnya dalam nada mineur itu bahwa kekuasaan Portugis sudah berakhir. Ia meninggal dunia dalam tahun 1598, disebut orang "orang tua yang budiman dan suci", dalam umur 55 tahun, terserang penyakit semacam pes yang telah timbul karena peperangan terus-menerus dan kekurangan makan.

Dalam suasana ini tibalah kapal-kapal pertama dari Belanda. Dalam tahun 1598 suatu kompeni dagang Belanda telah menyiapkan suatu eskader di bawah pimpinan Jacob van Neck, Wijbrand van Warwijck dan Jacob van Heemskerck untuk menemukan jalan ke pulau-pulau rempah-rempah. Van Heemskerck tiba di Hitu dan diterima baik oleh Kapitan Hitu yang sudah tua sekali (ia telah mengalami empat sultan Ternate) dan dua saudara dari sultan Ternate. Karena tidak mendapat muatan maka ia berlayar terus ke Banda. Van Warwijck tiba di Ternate dan bertemu dengan sultan Said, yang menerimanya dengan baik juga. Said menggunakan kesempatan adanya kapal-kapal asing di pelabuhannya untuk mengadakan serangan-serangan terhadap pulau-pulau tetangganya, dan meluaskan lagi daerah kekuasaannya. Van Warwijck menempatkan enam orang di Ternate untuk mengatur perdagangan rempah-rempah.

Dalam tahun 1599 tibalah Steven van der Haghen di pelabuhan Hitu. Ia diminta oleh Hitu untuk membantu menyerang benteng Portugis di Leitimor; hal itu disetujuinya. Tetapi sesudah beberapa waktu memblokirnya ia terpaksa mundur. Ia berhasil mendapat persetujuan dari pihak Hitu untuk mendirikan benteng di Kaitetu dekat Hila yang dinamainya Kasteel van Verre (Benteng Jauh).

Dalam tahun 1600 tibalah Jacob van Neck di Hitu dan menemui orang-orang Belanda yang tinggal di benteng tersebut. Sementara itu fihak Ambon (kaum Kristen di Leitimor) dan Portugis telah mencoba menyerang Asibulu, tetapi karena Hitu dibantu Belanda, percobaan ini gagal. Van Neck kemudian berhasil mengadakan kontrak dengan fihak Hitu yang membebaskan Belanda dari pembayaran pajak dan uang pelabuhan (uang jangkar).

Kegelisahan Portugis waktu mendengar tentang kedatangan kapal-kapal Belanda di Maluku menyebabkan pemerintahan di Goa menyiapkan suatu armada yang besar yang sekaligus dapat menaklukkan pulau-pulau rempah-rempah dan menjadikannya bagian dari kerajaan Portugal. Ayres de Saldanha, yang menjabat Raja Muda dalam tahun 1600, mendapat instruksi-instruksi yang tegas bahwa usaha-usaha Belanda untuk mengadakan perdagangan dengan Jawa dan Maluku harus dicegah dan dilumpuhkan. Untuk pertama kali dalam sejarah hubungan Portugis-Maluku, pemerintah Portugal menyiapkan armada sebesar itu yang terdiri dari 27 buah kapal dengan 2000 awaknya dan 1300 perajurit di bawah pimpinan salah seorang perwira yang "terbaik" dalam tentara Portugal, André Furtado de Mendoza. Sejak permulaannya armada ini menemui kesulitan karena taufan, kekurangan bahan makanan dan lain sebagainya. Tetapi setelah sepuluh bulan berlayar sampailah mereka di Leitimor, dan segera menaklukkan bagian-bagian dari pantai utara Jazirah Hitu. Juga Hoamoal ditaklukkan, sasaran utama adalah Luhu, sebagai pusat dari Gimelaha Ternate. Tetapi Furtado mengerti bahwa kalau Ternate sendiri tidak ditaklukkan percuma semua usaha Portugis itu.

Sementara itu Sultan Said telah menguatkan pertahanannya dan telah mengirim utusan-utusannya ke Jawa dan Mindanau untuk mendapatkan bantuan. Furtado yang sudah kehilangan banyak prajurit dalam pertempuran dan sudah kekurangan makanan dan amunisi, tidak mampu mengadakan serangan dan karena itu minta bantuan dari Gubernur Spanyol di Manila. Juan Suarez Gallinato diutus oleh Manila dengan lima buah kapal untuk membantu Furtado, tetapi karena kekurangan pasukan dan senjata, serangan bersama itu tidak berhasil juga. Dan Furtado terpaksa kembali ke Malaka.

Kedatangan Furtado telah membawa harapan kepada missi dan kaum Kristen, dan selama waktu itu usaha penginjilan hidup lagi dan 3000 jiwa yang telah menjadi Islam kembali ke gereja. Akan tetapi kegagalan usaha untuk menaklukkan Ternate membawa lagi susah pedih dan benar apa yang diucapkan padre Luiz Fernandez, bahwa "sejak Kairun dibunuh secara keji, setelah sumpah yang diberikan capitão benteng dilanggar, sejak itulah semua bencana di Maluku sudah menimpa, dan kiranya hukuman Tuhan atas kejahatan itu belum dijalankan".

Hari-hari terakhir bagi Portugis di Nusantara Maluku dan Ambon telah tiba. Dalam tahun 1602 "Vereenigde Oost Indische Compagnie" didirikan yang menghimpun pelayaran-pelayaran liar orang-orang Belanda. Pada akhir tahun 1603 suatu eskader di bawah pimpinan Steven van der Haghen berlayar dengan instruksi yang tegas untuk merugikan dan melumpuhkan kapal-kapal Portugis. Waktu ia tiba di Banten, sudah menunggu utusan-utusan dari Hitu, dan segera mereka berangkat ke Ambon. Dalam perjalanan itu mereka menahan sebuah kapal dan ternyata penumpangnya adalah Manuel de Mello yang sedang dalam perjalanan ke Tidore sebagai capitão baru.

Pada tanggal 23 Februari eskader van der Haghen tiba di Hitu. Pada tanggal 25 Februari 1605 capitão benteng, Gaspar de Mello (keponakan Manuel) menyerahkan benteng Portugis tanpa perlawanan dan berakhirlah riwayat Portugis di Maluku.

Peristiwa jatuhnya pemerintahan Portugis menimbulkan kegelisahan antara penduduk Kristen. Karena takut akan serangan dari fihak Islam, beberapa ratus di antara mereka lari ke gunung. Dalam "Cort Verhael van 't geene bij den Admirael Steuven van der Haghen tot Ambonen met de Portugesen ende Jesuyten gehandelt is" dapat kita ketahui kejadian-kejadian sekitar masa itu.

Sehari setelah penyerahan benteng, dua padri, di antaranya Lorenzo Masonio, menemui van der Haghen untuk membicarakan nasib kaum Kristen. Selain membicarakan soal-soal harta dan milik, mereka minta kebebasan dalam menjalankan ibadah. Dalam hari-hari kemudian datanglah Diego Barbudo, seorang Portugis yang sudah lama menetap di situ, bersama dengan kepala-kepala tempat terpenting, di antaranya dua raja, dari Kilang dan dari Soya. Tempat-tempat yang disebut adalah Atuy (Hatiwe),Tauiry (Tawiri), Cuilan (Kilang), Soua (Soya), Nacu (Naku), Atala (Hatalai), Puta, Sery (Seri), Amaurse (Amahusu), Ema, Ocorila (Hukurila), Aousa (Ahuseng), Anthomori (Hutumuri), Routon (Rutong), Ale (Halong), Baguelo (Baguala), Soul (Suli), Vay (Waai), Emantuello (Amantelo), Oucanar (Hukunalo), Capa (Kapa). Barbudo, atas nama semua kapala tempat itu berjanji akan setia dan takluk kepada "Staten van Holland" dan minta perlindungan ("seguros"). Karena takut akan gangguan-gangguan dari pihak Islam, padre Masonio telah meminta kepada van der Haghen agar diadakan perdamaian antara kedua fihak, Keristen dan Islam.

Beberapa hari kemudian capitão benteng bersama orang-orang laki-laki (Portugis), istri dan anak-anak mereka, meninggalkan Ambon; jumlah mereka ada beberapa ratus. Sebagian berangkat ke Solor, kebanyakan ke Malaka. Kurang lebih 32 keluarga Portugis tinggal di Ambon. Agar tidak akan timbul keruwetan di antara mereka, van der Haghen menetapkan Diego Barbudo sebagai kepala dari penduduk Kristen, dibantu oleh beberapa orang. Kedua padri tersebut tinggal pula.

Selama Steven van der Haghen berada di Ambon, masyarakat Kristen ini dapat menunaikan ibadah mereka dengan bebas. Tetapi setelah ia berangkat mereka mulai diganggu oleh awak-awak kapal Belanda. Gereja-gereja dirusak dan kampung-kampung diobrak-abrik

dan dibakar. De Houtman yang mewakili van der Haghen tidak mampu menampung kejadian-kejadian itu dan menghukum awak kapal. Malahan ia memanggil pimpinan dari masyarakat Portugis dan kedua missionaris serta menuduh mereka sebagai pemimpin tindakan-tindakan anti Belanda, tuduhan mana tidak mengandung kebenaran. Akhirnya masyarakat Portugis ini, lebih dari 150 jiwa, disuruhnya berangkat dengan persediaan air, makanan dan alat-alat kapal yang serba kurang. Tidak ada pengemudi atau nahkoda di kapal itu, tetapi akhirnya mereka sampai juga di pulau Sebu.

Sementara itu Belanda telah menaklukkan juga benteng di Tidore, dan penghuninya, Portugis dan padri, berangkat ke Manila. Akan tetapi pada awal tahun 1606, Don Pedro d'Acuna, Gubernur di Manila, berhasil menjatuhkan Ternate; sultan Said ditawan dan dibawa ke Manila. Benteng Tidore direbut kembali olehnya dan sampai tahun 1663 daerah itu adalah di bawah kekuasaan Spanyol. Rencana d'Acuna untuk merebut Ambon tidak dapat dilaksanakan karena ia meninggal dunia dalam tahun itu juga, dan akhirnya fihak Spanyol melepaskan cita-cita mereka untuk merebut Ambon kembali.

III. PENINGGALAN-PENINGGALAN YANG BERCIRI PORTUGIS

Dalam usaha mendapatkan rempah-rempah, bangsa Lusitania telah memusatkan perhatian mereka pertama-tama kepada kepulauan Maluku dan Banda yang merupakan pusat penghasilan cengkeh dan pala. Baru kemudian, justru karena usaha monopoli, penyelundupan cengkeh dari Ternate sebagai produsen cengkeh menurun, maka cengkeh dari Seram dan Ambon menjadi lebih berarti. Dalam usaha untuk menguasai suatu daerah di mana orang Portugis dapat tinggal dengan aman dan dapat berdagang, dan juga, dapat diduga, sebagai faktor keseimbangan terhadap kekuasaan Ternate, pusat perdagangan Portugis menjadi pulau Ambon. Akhirnya perhatian dicurahkan pula ke kepulauan Ceram, Buru, Lease dan pulau-pulau yang terdapat di sekitarnya.

Sudah barang tentu seharusnya peninggalan-peninggalan Portugis telah berkumpul di pulau-pulau tersebut, kalau diperhatikan jalannya riwayat Portugis di seluruh kepulauan itu, terutama di Ternate, Ambon-Lease dan bagian-bagian dari Tidore dan Seram, di mana pada suatu waktu telah terdapat benteng-benteng, bandar-dagang dan pemusatan masyarakat Portugis[49].

Peninggalan-peninggalan di pulau Ambon merupakan satu kasus tersendiri, yang jelas dalam hubungan timbal-balik antara orang Portugis dan orang pribumi. Politik raja-raja Portugal, sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Henry Pelaut, ialah pembentukan feitoria (Bandar-dagang), mengadakan hadiah-hadiah tanah (doação), companhia dan monopoli, memerlukan tenaga kerja dari fihak Portugis dan kerjasama dengan orang pribumi untuk mengkokohkan politik

tersebut. Raja Muda Affonso d'Albuquerque, semasa pemerintahannya (1509-1515) menganjurkan secara tegas, agar mereka yang turut dalam perdagangan rempah-rempah sebaiknya kawin dengan gadis pribumi, agar dengan demikian kepentingan Portugal dapat dijamin oleh orang-orang yang hatinya tetap, dan tidak ingin cepat-cepat kembali ke tanah air, melainkan menanam akar di negeri baru, dan kemudian menanam akar bagi kepentingan Portugal.

Kebijaksanaan untuk menetap dan berkampung itu adalah jalan terbaik untuk menjaga kepentingan Portugal yang telah mengarungi semua lautan untuk "penginjilan dan rempah-rempah". Karena itu peninggalan-peninggalan yang berciri Portugis kiranya dapat ditemukan dalam hal-hal mengenai agama dan dalam berbagai faset kehidupan masyarakat yang telah mengalami persentuhan antara budaya asli dan budaya asing Portugis. Nampaknya dalam bidang pemerintahan, perdagangan, keamanan, agama, kebudayaan dan kesenian.

> "The Portuguese arms and pillars placed in Africa and Asia, and in countless isles beyond the bounds of three continents, are material things, and time may destroy them. But time will not destroy the religion, custom and language which the Portuguese have implanted in those lands[50].

Demikian Henry Russel Wallace, naturalist, selama di Ambon dalam tahun 1859 menulis dalam bukunya "The Malay Archipelago"[51] gambaran yang berikut mengenai Ambon dan masyarakatnya:

> "The native Amboynese who reside in the city are a strange halfcivilized, half-savage, lazy people, who seems to be a mixture of at least three races, Portuguese, Malay and Papuan, or Ceramese, with an occasional cross of Chinese or Dutch. The Portuguese element decidedly predominates in the old Christian population, as indicated by features, habits and the retention of many Portuguese words in the Malay, which is now their language. They have a peculiar style of dress which they wear among themselves, a close fitting white shirt with black trousers and a black frock or upper-shirt ...
> Though now Protestants, they preserve at feast and weddings the processions and music of the Catholic Church, curiously mixed up with the gongs and dances of the aboriginese of the country. Their language has still much more Portuguese than Dutch in it, although they have been in close communication with the latter nation for more than two hundred and fifty years; even many names of birds, trees, being plainly Portuguese. This people seem to have had a marvellous power of colonization, and a capacity for impressing their national characteristics in every country they conquered, or in which they effected a merely temporary settlement".

Untuk mengetahui ciri-ciri Portugis yang masih terdapat dalam peninggalan-peninggalan di Ambon-Lease, kiranya harus diketahui keadaan masyarakat Portugis-Mestiço yang terdapat dekat bandar-bandar dagang dan benteng[52].

Suatu masyarakat Portugis Mestiço hanya dapat terbentuk atas perkawinan antara pribumi dan pendatang. Perkawinan campuran ini bukanlah barang baru lagi bagi bangsa Lusitania, kalau diingat bahwa percampuran darah telah dialaminya beberapa abad akibat penjajahan berbagai bangsa. Oleh karena itu sikap mereka terhadap kawin campuran lebih liberal dibanding dengan pendapat bangsa-bangsa lain di Eropa[53]. Kebijaksanaan pemerintahan Raja Portugal terhadap warna di Estado da India tidak selalu jelas dan sama, tetapi pada umumnya Raja-raja Portugal berpendapat bahwa agamalah dan bukan warna hendaknya menjadi ukuran bagi kewarganegaraan Portugis penuh, dan semua pemeluk agama Kristen yang berbangsa Asia harus diperlakukan sama dengan orang Portugis[54]. Dalam tahun 1562 dan 1572 telah diadakan perundang-undangan untuk meneguhkan kebijaksanaan ini, walaupun tidak pernah dilaksanakan penuh. Perkawinan campuran dengan gadis pribumi juga disebabkan karena sedikit sekali wanita Portugis yang ikut serta menetap di daerah-daerah luar tanah air mereka. Wanita-wanita yang dikirim ke Estado da India biasanya termasuk golongan "orfãos do rey" (anak piatu yang dipelihara dalam rumah-rumah piatu kerajaan) dan kebanyakan hanya sampai di Goa, di mana ada cukup calon suami di antara bujang-bujang pada dinas pemerintahan.

Padre Alexander Valignano, yang terkenal sebagai reorganisator missi-missi Jesuit di Asia (dalam arti kata yang sempit), membagi penduduk India Portuguesa sebagai berikut: Pertama, mereka yang lahir di Eropa tergolong "Reinil"; kedua, orang Portugis yang lahir di India dari orangtua Portugis asli; ketiga, "castiços", mereka yang lahir dari ayah Eropa dan ibu Indo; keempat, "mestiço", atau "half-breeds"; terakhir penduduk pribumi (dalam hal ini dimaksud orang India asli) dan bangsa-bangsa lain yang sama sekali tidak mempunyai darah Eropa.[55]

Yang pertama diketahui dalam sejarah Maluku yang telah memenuhi anjuran dari Affonso de Albuquerque adalah Francisco Serrão sendiri, yang telah kawin dengan gadis Jawa yang dibawanya dalam perjalanan pertama ke Maluku. Serrão kemudian menetap di Ternate dan menjadi laksamana perang sultan Ternate. Ia meninggal dunia di sana (1521) dengan meninggalkan seorang putra dan seorang putri[56]. Contoh lain adalah perkawinan antara Dona Isabela, putri Sultan Ternate (se-ibu dengan Kaicil Darwis) dengan Balthasar Veloso, seorang bangsawan yang selama 30 tahun berdiam di Ternate. Dalam "A Capitania de Amboina"[57] digambarkan tentang masyarakat mestiço di Saparua, Ternate, Moro, di tempat-tempat mana suatu waktu terdapat 125 anak yatim, akibat suatu peristiwa pembunuhan orang-orang Portugis oleh orang-orang Ternate. Disebut bahwa ibu-ibu mereka adalah wanita-wanita pribumi.

Tidak dapat diharapkan bahwa perhubungan antara wanita pribumi dan laki-laki Portugis selalu merupakan perkawinan yang sah. Terutama pada golongan rendahan dari pejabat-pejabat Portugis hubungan ini merupakan "concubinage", walaupun pemerintah Portugal dan missi menganjurkan perkawinan sah. Dan seringkali, tindakan-

tindakan pertama dari padri-padri yang berkunjung dari suatu daerah ke lain daerah adalah meresmikan hubungan ini dengan sakramen. Keluarga campuran ini pada umumnya berdiam dekat benteng atau bandar dagang Portugis, dan mengadakan perkampungan khusus. Orang Portugis dalam jabatan pemerintahan, setibanya di India, diperbolehkan keluar dari pekerjaannya dan boleh menetap sebagai penduduk sipil atau pedagang. Mereka digolongkan "casados" (Orang yang telah kawin) dengan mendapat beberapa hak istimewa. Yang lain tinggal "soldados" (serdadu) dan harus mengikuti dinas militer sampai mereka kawin, meninggal dunia, lari dari tentara atau luka dan cacat.

Sisa-sisa dari hubungan erat antara pendatang dan pribumi, dan penerimaan hal-hal baru dalam berbagai segi kehidupan, dapat dilihat dalam kata-kata pinjaman Portugis yang sampai kini masih digunakan dalam logat Melayu-Ambon.[58]

Pada waktu Portugis tiba di Malaka mereka belajar kenal dengan lingua franca daerah semenanjung Malaka, Sumatra dan pulau-pulau lain, yaitu bahasa Melayu. Sudah barang tentu bahasa itu dipelajari untuk hubungan sehari-hari dengan rakyat setempat. Pada waktu mereka sampai di Maluku dan Ambon lingua franca inipun ditemui. Bahasa tanah (asli) yang digunakan di daerah-daerah itu terlampau berbeda untuk dapat digunakan sebagai bahasa perantara dan dapat dikira bahwa pemasukan ide baru, baik dalam agama, niaga dan kehidupan sehari-hari, disalurkan lewat bahasa Melayu. Oleh karena itu lingua franca inilah yang menerima "shock" dari kontak pertama dengan dunia Barat, dan lewat jalan lingua franca inipun pengaruh Barat dapat menembus.[59]

Pigafetta dalam buku catatannya[60] telah membuat suatu daftar kata Melayu-Italia, dan walaupun ejaan dari kata-kata Indonesia menggambarkan pengaruh suatu dialek lokal, namun dapat disimpulkan taraf hubungan antara pendatang dan pribumi. Hubungan ini terutama terdapat dalam perdagangan dan politik, penyebaran agama dan kehidupan sehari-hari.

Apabila kita menilai hubungan politik dan niaga terdapatlah dokumen-dokumen pertama, ialah surat-menyurat antara raja-raja di Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo dalam bahasa Melayu yang oleh kapitan di Malaka kemudian diterjemahkan untuk diteruskan kepada Raja Portugis[61]. Tetapi kemudian pertukaran surat-menyurat itu diadakan dalam bahasa Portugis. Dapat diduga karena Portugis telah dianggap berada dalam kedudukan yang berkuasa, pun karena orang-orang Portugis berusaha untuk mengajar bahasa mereka (umpamanya terdapat dalam curriculum seminari dari Antonio Galvão), dan karena sistem fonetik bahasa Portugis tidak sulit bagi telinga orang-orang pribumi. Bahasa Portugis sekitar tahun 1540 dan selanjutnya sudah umum digunakan di kota-kota Malaka dan Goa, dan juga di Maluku menjadi bahasa pengantar bagi golongan atasan, sipil dan militer dan kaum pedagang. Para sultan di Maluku dan raja-raja di Hitu dan Ambon yang melawat ke Malaka dan Goa, atau dalam berhubungan dengan benteng Portugis di Ternate, menggunakan bahasa Portugis. Dan dalam dokumen-dokumen Portugis Sultan Hairun disebut sebagai seorang yang ahli bahasa dan sastra Portugis.

Pengaruh yang langsung dirasakan oleh masyarakat pulau Ambon terwujud dalam struktur masyarakat, dan dengan jabatan-jabatan baru yang timbul sesudah Portugis tiba di kepulauan itu.

Struktur masyarakat Portugis dalam abad kelimabelas telah mengalami perobahan, setelah melalui masa feodal dalam Zaman Tengah. Alam baru, yang dibawa humanisme, telah melahirkan suatu golongan baru, orang-orang cendekiawan (letrados), yang kebanyakan terdiri dari hakim dan yang lulus dari perguruan; prelados (golongan agama) dan nobreza (bangsawan). Golongan baru inilah yang memegang peranan dalam kehidupan sekuler, dan lambat laun, untuk membalas jasa-jasa mereka golongan ini diberi kedudukan dalam golongan aristokrasi menengah, sedikitnya sebagai cavaleiro.[62] Begitu pula, dengan penemuan daerah-daerah baru di dunia, sistem ekonomi berobah, dan golongan entrepreneur lebih berarti kedudukannya dalam masyarakat sehingga merekapun mendapat hak-hak istimewa (privilege) sebagai aristokrasi. Perkembangan sedemikian rupa sehingga akhirnya kebanyakan bangsawan merupakan pedagang.

Maluku dalam abad kelimabelas dan keenambelas mengalami perubahan yang parallel akibat adanya perdagangan ramai dan modern dengan berbagai bangsa, tetapi sistem bandar dagang, yang merupakan suatu unit administratif, dengan lindungan militer, dalam suatu lingkaran yang tertutup dan terjaga adalah suatu hal baru. Feitoria ini mempunyai susunan administrasi yang tertentu, yang terdiri atas seorang capitão (pemimpin administratif dan laksamana perang), feitor dan alcaide-mor (gubernur benteng), almoxarife (kepala gudang), escrivão (secretaris), dan ouvidor (hakim). Jabatan rendahan dapat terdiri atas meirinho (pembantu urusan pengadilan), condestabre (kepala keamanan) dan porteiro (penjaga pinto daerah feitoria), dan dapat ditambah dan dikurangi menurut kebutuhan. Jabatan-jabatan pimpinan selalu ditentukan oleh raja Portugal di Lisboa atau oleh raja-raja muda di Goa. Sedangkan jabatan-jabatan rendahan sering dapat diisi dengan tenaga setempat, baik orang mestiço maupun pribumi asli. Begitu juga dengan tenaga-tenaga yang termasuk daftar gaji benteng; niscaya di antaranya ada orang mestiço dan pribumi yang masuk tentara Portugis, dan dengan memberikan pelayanan yang baik, dapat naik dalam jabatan dan pangkat.

Walaupun organisasi feitoria dan benteng merupakan hal Portugis yang khas, lambat laun nama-nama jabatan dan pangkat digunakan oleh penduduk untuk kedudukan yang serupa dalam sistem pemerintahan pribumi.

Demikian pula dengan gelar-gelar kebangsawanan yang digunakan pemuka-pemuka pribumi. Gelar "Dom" telah diberikan dalam tahun 1512 oleh Francisco Serrão kepada Jamilu, salah seorang dari Ampat Perdana Hitu, yang bertindak sebagai jurubicara pada pertemuan pertama dengan fihak Portugis. Ia juga diberi pangkat "capitão", mungkin karena Serrao mengira bahwa ia merupakan kepala pemerintahan dan panglima perang Hitu. Sampai pada waktu ini belum ditemukan suatu dokumen yang memberikan Serrão wewenang untuk memberikan gelar "Dom" pada pemuka pribumi di kepulauan rempah-

rempah. Pemberian gelar ini adalah prerogatif Raja Portugal dan adalah hak pemakaian dari keturunan langsung seorang raja. Mungkin Serrão dan kapitan-kapitan Portugis selanjutnya diberi wewenang mengangkat orang-orang yang berjasa menjadi "capitão" atau "cavaleiro", dan dapat mepekerjakan seorang meirinho atau porteiro. Jelas bahwa sampai abad keduapuluh, gelar-gelar dan pangkat-pangkat ini masih terdapat di pulau-pulau di mana Portugis pernah memiliki bandar dan benteng.

Suatu golongan yang kedudukannya menjadi lebih kuat, sebagai akibat dari perdagangan adalah "orangkaya". Walaupun Portugis berusaha mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah, saudagar-saudagar lain dari pelbagai bangsa masih tetap datang berdagang. Di mana kebun-kebun rempah-rempah sudah meluas ke berbagai daerah, dan tidak terbatas pada tanah milik raja, dapat diduga naiknya kedudukan dari anggauta-anggauta negeri yang mempunyai tanah dan dapat memperdagangkan hasil kebunnya dengan untung. Golongan orangkaya ini yang diduga, mulai muncul pada waktu saudagar-saudagar dari Jambi, Malaka dan Jawa tiba di perairan Maluku, makin kuat kedudukannya, berkat hasil perdagangan. Berita pertama tentang golongan ini terdapat di Banda, ialah pedagang-pedagang yang membeli tanah, dan tidak termasuk hierarkhi susunan adat. Lambat laun mereka mulai memegang peran juga sebagai pemuka rakyat, walaupun tetap membayar upeti pada raja. Tulisan-tulisan Portugis tidak menyebut kedudukan atau gelaran "orangkaya", tetapi disebut bahwa di daerah Hitu di samping raja ada "senhores", ialah orang yang mempunyai tanah luas dan memerintahnya. Dibanding dengan dokumen-dokumen VOC dari awal abad ke tujuhbelas, ternyata bahwa telah ada beberapa negeri, yang termasuk petuanan seorang raja, telah diperintah oleh seorang orangkaya. Apabila bahan-bahan tersebut dibanding-bandingkan maka terdapatlah situasi di sebagian daerah Ambon-Lease sebagai berikut:

Nama Tempat	Portugis	Heeres/Valentijn	Heeres
Hitu: 30 negeri	capitão Hitu, senhores e regedores (cabeças)	kapitang + orangkaya	kapitang
Nusaniwe	regedor (pangkat hukum)	raja	x
Kilang	el rey	raja	koning
Soya	pate[63]	raja	koning
Hutumuri	pate	hoofd	hoofd
Ema	x	hoofd	hoofd
Halong	pate	hoofd	hoofd
Puta	pate	hoofd	hoofd
Hatiwe	cabeça	hoofd	hoofd
Tawiri	cabeça	hoofd	x
Wai	x	hoofd	x
Alang)		hoofd	x
Liliboi)	termasuk Hitu	hoofd	x
Larike)		orangkaya	x

		orangkaya	x
Uring)		orangkaya	x
Asilulu)		hoofd	x
Baguala	x		

(x = tidak disebut)

Penginjilan yang dilakukan padri-padri yang langsung hidup di tengah masyarakat pribumi sampai di daerah-daerah yang jarang didatangi pejabat pemerintahan Portugis, niscaya telah pula meninggalkan kesan walaupun agama Kristen-Katolik dalam masa kekuasaan VOC secara sistematis diganti dengan penginjilan agama Protestan. Namun pengarang-pengarang seperti Wallace selalu heran karena menurut mereka rituil agama Katolik masih bersisa dalam tata-cara agama Protestan. Van Hoëvell dalam tahun 1875 menulis[64] bahwa walaupun orang-orang Ambon "telah berabad-abad lamanya memeluk agama Protestan dan membenci segala sesuatu yang bersifat Katolik, mereka masih mempertahankan banyak pengertian Katolik. Dan mengapa? Karena agama yang upacaranya lebih berkesan telah lebih mempengaruhi mereka". Sedangkan Visser[65] berpendapat bahwa sisa-sisa dari agama Katolik dalam tata-cara gereja Protestan disebabkan karena di dalam agama Katolik itu orang-orang Indonesia melihat jiwanya sendiri, "met haar heimwee naar God, haar ontvankelijkheid voor zinnenaandoenden eeredienst en plechtigheden, haar gehechtheid aan het overgeleverde".

Pada waktu Francıscus Xavier berada di Malaka, menjelang keberangkatannya ke Maluku dalam tahun 1546, ia telah merasakan keperluan akan terjemahan ajaran-ajaran agama Katolik ke bahasa Malayu, agar dapat lebih diresapkan oleh bangsa pribumi. Oleh karena itu ia telah menterjemahkan Credo (Aku Percaya), Pater noster (Bapak Kami), Ave Maria (Terpuji Nama Maria), Perintah Tuhan, Peradilan, dan beberapa khotbah. Sangat disayangkan bahwa terjemahan-terjemahan ini telah lenyap, tidak berbekas. Sebaliknya, di dalam situasi di Maluku sekitar tahun 1546 itu, pada waktu mana pengaruh Portugis sedang memuncak, dan Portugis berada ddalam situasi yang lebih kuat, bahasa Portugislah yang lebih banyak digunakan oleh golongan-golongan pribumi yang berhubungan dengan Portugis, daripada bahasa Melayu. Xavier menceriterakan bahwa pada waktu ia mengadakan penginjilan di Ternate (1547), pemuda-pemudi pada sore hari, kalau mereka sedang berjalan-jalan di tepi pantai tidak lagi menyanyikan lagu-lagu daerah, melainkan bagian-bagian dari ajaran Kitab Injil dalam bahasa Portugis.

Sebagaimana telah disebut, kedatangan VOC dengan tindakan-tindakan terhadap agama Katolik telah membawa perobahan. Oleh karena itu, apabila diselidiki kata-kata yang masih dipergunakan sampai kini, ternyatalah bahwa persentasi kata-kata agama adalah kecil, dan terbatas pada istilah-istilah yang umum seperti "altar", "paskah", "natal", "gereja","padri" dan dalam bentuk pakaian untuk ke gereja dengan "bandolir" - "kain pikol" atau "bandoleira".

Hubungan dengan orang Portugis yang meninggalkan kesan yang terkuat adalah dalam kehidupan sehari-hari, terutama cara beru-

mahtangga, dengan aspek-aspeknya seperti berkebun, cara pengawetan makanan, mencari nafkah. Dalam logat Melayu-Ambon abad keduapuluh masih jelas kelihatan barang-barang baru mana yang telah dibawa Portugis dalam abad ke enambelas. Masyarakat Ambon-Lease mengenal fam-fam[66] dan keluarga-keluarga dengan nama Portugis, yang terutama terdapat di negeri-negeri Kristen, tidak di negeri-negeri Islam, baik di Hitu maupun di Lease atau Seram. Nama-nama ini diperoleh sewaktu kepala keluarga menjadi Kristen, dan oleh bapak seraninya (padrinho) diberi nama Portugis, sering juga dengan gelaran, apabila seorang bangsawan menjadi Kristen. Umpamanya "Dom Manuel" (Raja Ternate), "Dom Pedro" (Orangkaya Hutumuri), "Dom Duarte da Silva" (Patih Soya). Jelaslah sebagaimana dikatakan Raymond Kennedy bahwa pemegang-pemegang nama keluarga-keluarga itu bukanlah turunan dari borgor[67], karena keluarga-keluarga itu memiliki tanah pusaka menurut adat, dan mempunyai kedudukan (jabatan) dalam susunan adat pula. Contoh ini jelas sekali di negeri Hatalai, di mana dalam tahun 1605 orangkaya-nya bernama Antoni Lopies, dan sampai kini fam raja bernama Lopies (Lopez), sedangkan dari duabelas fam yang mempunyai dati, sepuluh di antaranya mempunyai nama Portugis. Dapat juga dimengerti bahwa keluarga yang sebelumnya Islam, kemudian menjadi Kristen dan akhirnya kembali lagi menjadi Islam, melepaskan nama Portugis dan mengambil nama asal kembali.

Dalam hubungan ini perlu disebut golongan "orang Mardika", yang untuk pertama kali terdapat dalam menuskrip António Bocarro, "A Capitania de Amboino". Mereka ini adalah pendatang yang ikut dengan Portugis, berasal dari Goa, Malaka, Ternate dan Tidore. Mungkin bahwa pada mulanya mereka merupakan budak dari orang Portugis yang kemudian menjadi Kristen dan karena itu dimerdekakan. Dalam proses pengkristenan golongan ini, mereka mendapat nama Kristen dari bekas tuannya dan modal untuk memulai hidup baru. Orang Mardika ini terdapat dalam tulisan Portugis sebagai pengemudi dan awak-awak kora-kora atau sebagai serdadu. Mereka umumnya menetap di perkampungannya sendiri, di luar batas lingkungan suatu negeri. Di Ambon terdapat kampong Halong Mardika pada perbatasan dari petuanan Soya dan Halong.

Dari uraian di atas dapat diduga bahwa masyarakat campuran ini, baik mestiço atau Mardika, berbahasa suatu logat Portugis yang kata-katanya kini masih terdapat dalam bahasa Melayu-Ambon. Pun bahasa ini terbatas perbendaharaan kata-katanya pada kata-kata fungsionil, menggambarkan di bidang manakah pengaruh Portugis telah menyelam. Jarang terdapat istilah-istilah yang mencerminkan pengertian-pengertian abstrak. Kata-kata Portugis terdapat untuk menggambarkan hubungan keluarga, seperti mai, pai, kunyado ("mae", "pai", cunhado"), untuk barang-barang baru dalam rumahtangga seperti kadera, meja (cadeira", "mesa"); alat makan seperti garpu, kuyer, toala ("garfo","colher", "toalha"). Probahan dalam cara hidup seperti pekarangan yang tadinya kosong mulai ditanami bunga, dan dinamakan kintal ("quintal"). Cara pengawetan makanan, bahan kanan dan makanan seperti assar, farinya, trigu, asam-pedis

("asar","farinha", "trigo", "caldeirada"). Dan dalam pelbagai faset dari cara hidup suatu masyarakat yang oleh Xavier masih digambarkan "barbaros comum carne humana" (barbar, yang makan daging manusia) sampai pada suatu tingkat hidup yang dalam pandangan mata sendiri dikatakan "Portugis" atau "Barat". Tercermin dalam cara perang dan organisasi pemerintahan. Kata-kata seperti balu-warti, gardu, bedil, kapseti, peluru, algojo, trunku, peitor, kapitan, marinyo berasal dari kata-kata Portugis "baluarte", "guarda", "fusil", "capaceto", "pelouro", "algoso", "tronco", "feitor", "capitão", "meirinho".

Begitu pula pengaruh atas pakaian, musik, dan kesenian lainnya. Perobahan dalam pakaian ternyata dari kata-kata sepatu, cinela, kalsang ("sapato", "chinela", "calção") tetapi juga tampak dalam pakaian upacara sebagaimana lazim dipakai oleh istri raja atau guru-pendeta ("nyora") di Leitimor, dan dalam pakaian kawin untuk seorang putri dari golongan borgor.

Masyarakat Kristen di kepulauan Ambon-Lease, di samping mengenal musik, lagu dan tarian asli, sampai kini menari tari-tarian Barat seperti polonaise, wals, quadrille dan polka. Walaupun kebanyakan dari tarian ini kiranya masuk Indonesia dalam abad kesembilanbelas dan keduapuluh, namun golongan tarian ini tetap disebut "Portugis". Salah satu tarian khas Portugis ialah fandango dari daerah Ribatejo, yang menggambarkan gerak-gerik seekor banteng, mungkin tercermin dalam harian "orlopai" di Ambon (dari kata Belanda "horlepijp"), yang mirip dengan "Scottish jig". Suatu tarian yang telah tersebar di antara pelaut-pelaut di Eropa Barat, dengan ciri khas masing-masing daerah ini kemudian masuk pula ke Maluku. Maka sulit untuk menentukan tarian mana langsung berasal dari Portugal. Demikian pula dengan lagu-lagu yang susunannya Portugis tetapi toh merupakan lagu daerah. Sementara itu "pusat" dari kesenian Portugis dewasa ini adalah negeri Hatalai tersebut di atas (jazirah Leitimor di pulau Ambon) di mana masih terdapat tradisi pembuatan alat-alat musik bentuk Eropa seperti mandolin, banyo, guitar, biola dan "keroncong" (suatu bentuk rebana) dan di mana sepuluh di antara duabelas pemegang dati memiliki nama keluarga Portugis.

Perobahan-perobahan yang menyolok dan memberikan suatu gaya kepada cara hidup asli dapat diduga ditiru oleh negeri-negeri tetangga, sehingga pada suatu waktu menjadi biasa, dan menarik perhatian Valentijn yang menggambarkannya dalam "Ambonsche Zaaken"-nya[68].

Di jazirah Hitu di mana masih digunakan bahasa tanah di masing-masing negeri, terdapatlah keadaan di mana digunakan pemakaian istilah asing (Melayu-Ambon campuran kata-kata Portugis) untuk barang-barang yang tidak asli. Demikian pula keadaannya dengan tarian dan nyanyian yang masih merupakan tradisi kuno, walaupun terdapat juga keadaan di mana suatu tarian Barat (Portugis) seperti polonaise atau wals ditarikan khusus untuk menghormat pela negeri Kristen pada pertemuan kedua pela bersangkutan.

Nyatalah bahwa masyarakat tradisionil Maluku dan Ambon dalam hubungan selama kurang lebih seratus tahun dengan bangsa Lusitania telah menerima dan mengambil alih banyak hal-hal yang baru, dan menjadikannya bagian dari kebudayaan mereka sendiri. Selama seratus tahun kedua belah fihak saling berperang, dan saling merebut kekuasaan, akan tetapi di samping ini tumbuh juga hubungan antar manusia yang menyebabkan sampai dalam abad ke duapuluh ini kepulauan Ambon-Lease masih memiliki ciri-ciri khas Portugis dalam kebudayaannya. Hubungan ini dapat digambarkan dalam pantun mengenai percintaan seorang kapitang kapal Portugis terhadap seorang gadis Lease yang bernama Margarita (disingkat Ita). Demikianlah bunyi pantun ini:

"Ita, Ita, Ita cerlele	(Oh, Ita, Ita, Ita
Tujuh tambah tujuh	dua musim sudah saya menunggu
Ita cerlele	Oh, Ita
Sepuluh ampa di perahu	satu tahun saya telah menunggu
Ita cerlele	membujuk Ita sampai mau (kawin)
Bujuk Nona sampai mau	Oh, Ita.
Ita cerlele"	

IV. P E N U T U P

Pada tempatnya untuk kini menilai sampai di manakah kehidupan masyarakat Ambon terpengaruh oleh Portugis, sesudah seratus tahun mengalami hubungan dengan suatu bangsa yang membawa kebudayaan yang berlainan.

Untuk mengukur perubahan-perubahan yang telah dibawa bangsa Lusitania, perlu kiranya diselidiki keadaan di Portugal di abad keenambelas itu. Para sejarawan Portugis seperti Jaime Cortesão, Hernani Cidade dan lain-lain[69] menggambarkan abad keenambelas sebagai suatu masa di mana kekuatan dan kekuasaan Portugal, baik di dalam maupun di luar negeri, menurun. Pada suatu pihak bangsa Lusitania terdorong oleh hasrat untuk mengarungi laut dan melanjutkan kejayaan masa "penemuan" benua-benua yang telah dimulai seratus tahun sebelumnya oleh Pangeran Henry Pelaut. Perlombaan dengan Spanyol untuk menguasai dunia, menguasai perdagangan dan penyebaran agama Kristen, adalah dorongan untuk merebut dan menanam kekuasaannya di mana mereka tiba. Tetapi keadaan yang ruwet dalam negeri, di mana sesudah Henry Pelaut dan Dom João III tidak lagi ada seorang raja yang kuat, tidak menimbulkan suasana di mana semua cita-cita ini dapat berkembang dengan tenang. Disebabkan pula bahwa perjalanan dari Lisboa, melingkari Afrika, ke Goa, Malaka dan Maluku mengambil waktu banyak. Lagi pula flotilla-flotilla tergantung dari musim sehingga seringkali perdagangan ini tidak dapat diadakan secara efisien dan teratur dan walaupun membawa keuntungan besar, juga menimbulkan spekulasi di antara pejabat-pejabat pemerintahan sendiri di Asia Portugis. Spekulasi ini meng-

akibatkan tindakan sewenang-wenang terhadap penduduk pribumi, demi monopoli perdagangan rempah-rempah. Alhasil masyarakat setempat bersatu dan melawan orang Portugis yang dibantu oleh kawan-kawannya.

Di dalam negeri, masyarakat Portugis yang masih hidup dalam alam feodal Zaman Tengah Eropa, pula mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat dari angin baru yang dibawa dari Eropa Utara. Ternyatalah dari tindakan-tindakan pejabat-pejabat Portugis yang tidak mengikuti suatu garis pemikiran dan kebijaksanaan tertentu. Tindakan-tindakan dari orang-orang seperti Tristão de Atayde, Duarte de Eça dan Diego Lopez de Mesquita masih bersifat feodal, sebaliknya penelitian dan perhatian akan bahasa, adat-istiadat bangsa-bangsa dan suku-suku di benua-benua yang baru "ditemukan" itu, penyesuaian diri pada keadaan setempat, sebagaimana terbukti dari tindakan dan tulisan dari orang-orang seperti Antonio Galvão dan Gabriel Rebello; pendirian seminari-seminari dan rumah sakit adalah bukti dari pengaruh filsafat humanisme yang telah menembus kedalam masyarakat Portugal. Oleh karena itu tindakan-tindakan Portugis di daerah-daerah yang telah mereka kuasai, tidak tetap, dan berbeda menurut waktu, tempat dan keadaan.

Walaupun demikian dapat diambil garis tindakan yang tertuju pada pembentukan benteng-benteng untuk mengamankan perdagangan dan melancarkan serangan-serangan militer terhadap pihak-pihak Islam. Hal-hal lain, seperti penanaman kebudayaan mereka, tidak dilakukan dengan sengaja, dan orang Portugis tidak mengganggu cara hidup, adat-kebiasaan dari bangsa-bangsa yang mereka temukan dalam usaha penyebaran kekuasaan itu.

Dengan mengikhtisarkan kejadian-kejadian di perairan Maluku (lihat bab ke II), ternyata perobahan dalam keadaan politik sekitar kerajaan-kerajaan di Maluku Utara mencapai taraf kesultanan, dan dalam pertarungan kekuatan, Ternate-lah yang muncul sebagai pemenang dan mencapai puncak kejayaannya antara tahun-tahun 1570-1610. Demikian kuat kedudukan Ternate, sehingga dalam ambisinya ia membandingkan dirinya dengan kerajaan-kerajaan di luar daerahnya seperti Demak dan Johor, telah mengikuti hierarkhi pemerintahan yang dapat membulatkan image dari suatu kerajaan. Maka António Bocarro menulis dalam "A Capitania de Amboino" bab 49 paragraaf 1 sebagai berikut[70]:

> "Raja Ternate menjadi demikian angkuh, setelah fihak Portugis telah menyerahkan benteng mereka kepadanya, (seperti telah dikemukakan terlebih dahulu), hingga ia menyebut dirinya kemudian Sultan Baab, yang berarti Kaisar dan Tuan atas semua rakyat di Maluku; dan setelah ia menyebut diri Kaisar datanglah utusan-utusan dari raja-raja Jawa dan dari Melayu, terutama dari raja Johor; dan ia telah membawahi tiga raja, ialah raja Loloda, raja Bacan dan raja Jailolo, yang (dahulu) merupakan raja yang paling berkuasa yang ada di bagian Maluku. Hanya belum dapat memiliki mahkota Tidore, yang ia berusaha

mendapatkannya, agar akhirnya ia akan menjadi seperti satu-satunya tuan yang paling berkuasa". (terjemahan bebas).

Di pulau Ambon telah terdapat Hitu, suatu "uli", perkelompokan dari beberapa kesatuan genealogis-territorial, dan sedang dalam fase perkembangan menuju kerajaan dalam embryo, pada waktu Portugis tiba. Dari kedudukan semula sebagai tempat transito, kemudian menjadi tempat bandar. Pula merupakan pusat dari kehidupan Islam dan kekuatan penting sampai pertengahan abad ke tujuhbelas. Dari keadaan persahabatan, menjadi saingan dalam perdagangan dan bermusuhan dengan Portugis. Maka mereka diminta pindah dari negeri Hitu ke pantai selatan jazirah yang masih merupakan daerah wewenang Hitu. Di sana Portugis juga mengalami bentrokan dengan fihak Islam, walaupun telah dapat bantuan dari beberapa negeri yang telah menjadi Kristen.

Setelah benteng sementara dibakar akhirnya Portugis pindah ke jazirah Leitimor, dan setelah beberapa kali pindah, akhirnya menetap di sebidang tanah yang diberikan oleh negeri Soya. Di sana didirikan benteng tetap dari batu dan kapur yang selesai pada akhir bulan Juni 1576. Benteng inilah yang kemudian menjadi pusat kehidupan Portugis. Selain menjadi pusat perdagangan, juga menjadi pusat usaha penginjilan, dan kehidupan masyarakat Kristen. Di sekitarnya tumbuh perkampungan orang-orang Kristen, baik "casados", maupun "mestiço" dan orang Mardika. Terdapat juga perwakilan dari negeri-negeri di Ambon, Lease dan pulau-pulau di sekitarnya yang ada hubungan dagang dan agama dengan benteng itu. Umpamanya dari negeri-negeri Nusaniwe dan Kilang, dari Hitu dan Luhu (Seram Barat). Kampung-kampung ini berkembang dan meluas dan akhirnya bersatu menjadi suatu kota kecil dengan nama "Ambon". Kota inilah yang dalam abad-abad kemudian menjadi pusat kewibawaan pemerintahan kolonial Belanda. Kota ini pula merupakan pusat penghidupan dan penyebaran kebudayaan "mestiço" yang meluas ke negeri-negeri Leitimor. Dan kiranya, makin meluas pengaruh pemerintahan kolonial, makin meluas pulalah kebudayaan campuran ini, yang dari "mestiço" Portugis menjadi "mestiço" Portugis-Belanda, sebagai identifikasi masyarakat pribumi dengan pemerintah baru.

Di pegunungan Leitimor ikatan-ikatan genealogis menjadi kekuatan genealogis-territorial, yang dikenal sebagai negeri. Dengan meningkatnya hubungan dagang dan agama antara fihak Portugis dengan negeri-negeri, niscaya termasuk pula pengaruh atas berbagai segi pemerintahan. Ternyata dari sebutan bagi pemuka negeri-negeri. Dalam dokumen Portugis terdapat panggilan "cabeça" (kepala genealogis), maupun "regedor" (kepala magistraat, yang menunjukkan suatu pemisahan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif) dan berarti perubahan dalam adat, yang terpengaruh oleh angin asing, dan berkembanglah suatu susunan pemerintahan yang sekuler.

Sebagaimana diutarakan terlebih dahulu, tampil juga golongan ketiga yang terdiri dari pedagang-pedagang atau orangkaya yang lambat laun menjadi bagian dari susunan pemerintahan baru.

Baik kerajaan-kerajaan maupun negeri-negeri di perairan timur Indonesia dianggap oleh Portugis sebagai kesatuan politik yang merdeka dan setaraf dengan negara di Eropa. Demikianlah perjanjian-perjanjian dan surat-menyurat yang terjadi antara pemuka-pemuka Maluku dengan raja dan pejabat-pejabat Portugal merupakan dokumen resmi diplomatik[71].

Penginjilan membawa hal-hal baru pula bagi masyarakat yang masih mengikuti agama asli. Hal-hal baru ini dianggap bagian dari agama Kristen dan karenanya bagian dari kehidupan masyarakat Kristen. Terdapatlah permulaan dari kelonggaran dalam kehidupan adat, pengurangan penggunaan bahasa tanah. Pengganti tradisi dan bahasa ditirunya dari masyarakat Kristen-mestiço yang tinggal disekitar benteng.

Hitu yang tidak terpengaruh oleh hubungan dengan masyarakat Kristen-mestiço itu, tetap memegang teguh adat-kebiasaan dan bahasa tanah dan sampai kini merupakan sumber dari tata-cara hidup alam kuno.

Perlu kiranya disinggung sejenak bagaimana perobahan ini terjadi. Pertama, disebabkan mentalitas pendatang yang membawa arus baru ke dalam masyarakat yang sudah mengikuti suatu irama hidup tertentu. Bangsa Portugis adalah bangsa yang berwatak agresif, suka merantau (outward-going) dan berbakat berdagang. Terdorong pula oleh fanatisme agama, akibat perjuangan melawan Islam berabad-abad, dan oleh suatu nasionalisme yang berkobar, setelah membebaskan diri daripada pemerintahan "mouro"[72] dan Spanyol, maka di mana mereka datang, di sana mereka berusaha pula untuk menanamkan agama Katolik, kebudayaan dan cara kehidupannya. Seorang Portugis adalah Kristen, seorang Kristen adalah Portugis. Maka di mana mereka menetap terbentuklah perkampungan-perkampungan yang - karena tidak ada wanita Portugis - bersifat perkampungan "mestiço", dan akhirnya sifat ke-mestiço-an dari kebudayaan dan bahasa Portugislah yang mempengaruhi daerah-daerah di Asia yang menjadi Kristen.

Bagi orang Portugis sendiri penemuan benua-benua baru, berarti membuka mata bagi kebudayaan dan kekayaan yang terbenam di pelosok-pelosok dunia. Keduniawianlah yang akhirnya dikejar. Lisboa menjadi entrepôt Eropa untuk kekayaan dari dunia Timur, tidak hanya yang berupa rempah-rempah dan bahan dagang lainnya, tetapi juga berbentuk benda-benda kebudayaan, binatang-binatang, tekstil, porselen, dan lain sebagainya. Lisboa dibangun baru, dan timbullah arsitektur baru untuk gereja-gereja, gedung-gedung pemerintahan, rumah-rumah, alat-alat rumahtangga. Gaya Manueline[73] mempengaruhi semua gaya arsitektur. Kekayaan yang telah dihimpun menjadi dorongan untuk lebih intensif berdagang lagi, dan agresifitas Portugis tergambar dalam berbagai bentuk: umpamanya pendirian "Banco Espirito Santo dan Commercial" (Bank Roh Kudus dan Perdagangan).

Arus dan gelombang dari "barang-barang baru" ini diterima oleh masyarakat di Timur Indonesia dengan segala kekhasan dari sifat suku bangsa yang terujud dalam sifat "nrimo", ialah menerima,

mengolah, menyesuaikan atau menolak hal-hal baru kedalam kebudayaan sendiri sehingga menyelami dalam segi-segi kehidupan lahir dan batin. Kwalitas ini telah menyebabkan pengintegrasian faset-faset budaya asing berabad-abad, memperkaya kebudayaan asli, membuang mana yang tidak disukai. Akhirnya, orang-orang di Maluku tidak sadar apa sebabnya ada "barang Portugis" dalam kebudayaan mereka, dan digolongkan sama dengan tradisi-tradisi yang mereka terima di zaman dahulukala, pada waktu nenek moyang baru menentukan adat-kebiasaan masyarakatnya.

Akhirulkalam, memang benar apa yang dikatakan João de Barros [74], bahwa walaupun senjata-senjata dan tanda-tanda peringatan Portugis dapat hancur dari masa ke masa, tetapi agama, kebiasaan dan bahasa yang telah ditanam Portugis di benua Afrika dan Asia tidak dapat hilang. Akan tetapi perlu dinilai bahwa peninggalan-peninggalan itu bersifat "exótica", lebih "picturesque" dari pada berarti, lebih quaint daripada penting, lebih nostalgic daripada vital, dan tidak menimbulkan problema-problema politik. Malah dari darah Portugis tidak ada banyak sisanya lagi, mungkin beberapa tetes saja. Walaupun demikian, seratus tahun Portugis di perairan Maluku itu tetap meninggalkan bekas yang ikut menentukan jalannya sejarah Maluku dan keadaan masyarakat di kemudian hari.

Catatan

1. "Tiang" adalah singkatan dari nama kecil "Christian"
2. Dalam tahun 1965
3. Baguala dalam bahasa asli berarti "menghubung" (kata "paukala")
4. "Passo"berarti pintu gerbang, jalan Cf.Jan Huygen van Linschoten, "Itinérario" (ch.28) tentang kota Goa.
5. Lihat Lampiran VI
6. Ibid.
7. Lihat Lampiran V
8. Paramita R. Abdurachman, Some Portuguese Loanwords in the Vocabulary of Speakers of Ambonese Malay in Christian Villages of Central Moluccas. Lembaga Research Kebudayaan Nasional-LIPI, (Jakarta 1972).
9. "Barang" dalam logat "Melayu-Ambon" berarti "hal"
10. Lihat terutama negeri-negeri Kristen di jazirah Leitimor dan Hitu; begitu pula negeri-negeri Kristen di Lease.
11. Lihat terutama negeri-negeri Islam di jazirah Leitimor dan Hitu; begitu pula negeri-negeri Islam di Lease.
12. W. Ruinen, Overzicht van de Literatuur betreffende de Molukken (1550-1921). (Amsterdam 1928); Jilid kedua (1923-1933) oleh Tutein Nolthenius, 1935.
13. Aert Gijsels, "Grondig Verhael van Amboina, 1621", dlm. Kroniek van het Historisch Genootschap to Utrecht. XXII (1871) Aert Gijsels mengarangnya pada waktu ia menjabat "Opperkoopman over de Comptoiren van Amboina ende de dependentien van dien".
14. G.E. Rumphius, Ambonsche Kandbeschrijving (1670) dalam Koninklijk Rijksarchief di Negeri Belanda di s'Gravenhage. Sampai kini dokumen ini belum ditranskripsikan ataupun diterbitkan secara resmi.
15. François Valentijn, Oud en Nieuw Oost-indien, II; Beschrijving van Amboina. Ambonsche Zaaken, III, 1 (Dordrecht, 1724-1726).
16. G.E. Rumphius, "Ambonsche Historie" dalam B.K.I. (1910).
17. G. Schurhammer, S.J., Die zeitgenössischen Quellen zur Geschichte Portugiesisch-Asiens und seiner Nachbarländer (1548-1552) zur Zeit des Hl. Franz. Xaver. (Leipzig 1932).
18. Ibid. Juga, E.C. Ryder, Materials for West African History in Portuguese Archives. (University of London, 1966).
19. G.P. Rouffaer, Encyclopaedie-artikelen. T.L.V., 86 (1930).
20. João de Barros e Diogo de Couto, Da Asia, 24 jilid, edisi baru. (Lisboa, 1777-1788).
21. Lihat C.R. Boxer "Some aspects of Portuguese historical writings" dalam Introduction to Indonesian Historiography, Sudjatmoko, ed., (Cornell University Press, 1965). Juga I.A. Macgregor, Some aspects of Portuguese Historical Writing of the Sixteenth and Seventeenth Centuries on South East Asia. (London, 1961).

22. "Pararaton" dan Nagarakertagama": Prof. Dr. H. Kern, Het Oud-Javaansch Lofdicht Nagarakertagama van Prapanca. (s'Gravenhage 1919).
23. A. Cortesão (ed.), The Suma Oriental of Tomé Pires.(London, 1944).
24. Hk. Deinum-De Wit "De Kruidnagel", dlm Dr. C.J.J. van Hall dan C. van de Koppel, De Landbouw in de Indische Archipel, jilid II B, 684 dst. (s'Gravenhage, 1949).
25. A.B. de Sá, Documentação ... Insulíndia. Jilid III no. 23, BNL Fundo Ceral no. 923, Texto I Parte 2, cap. 3.
26. Lihat catatan nomer 24.
27. J.A. Robertson, Magelhan's Voyage around the world by Antonio Pigafetta. (Cleveland, 1906).
28. "ghomode" = gumudi? "Saranghani" pulau terselatan Mindanao, USAF Operational Navigation Chart, 1862, One-L-12. "Chianche=cengkeh.
29. Insulíndia, Op.cit. IV: Descrição Sumária das Molucas e de Banda. BPE: Codice CXVI.
30. D.G.E. Hall, A History of South East Asia, Ch. II, 198. (London, 1964)
31. Lihat G.J. Schurhammer, dimana disebutkan bahwa de Albuquerque meneruskan surat-surat dari Sultan Ternate. Kedua surat ini tertanggal awal tahun 1514 yang ditulis pada kertas kuning sebagaimana biasanya digunakan oleh Sultan-sultan Melayu (aslinya telah hilang), menggambarkan bahwa pada waktu itu ada empat raja yang memerintah empat kerajaan. Sultan Ternate "Bayem Ciroz (Bayan Sirullah) yang menandatangani surat-surat itu mengutus putranya sebagai wakilnya ke Malaka, dan juga menggambarkan barang-barang dagangannya yang dibawa serta. Ia berpendapat bahwa satu raja untuk empat daerah (pulau) itu cukup dan karena itu minta bantuan raja Portugal untuk mendapat senjata.
32. Lihat catatan nomer 27.
33. M.A.P. Meilink-Roelofz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630. (The Hague, 1962).
34. Amaro D. Guerreiro, Panorama Económico dos descobrimentos Henriquino. (Lisboa 1961).
35. B.J.J. Visser M.S.C., Onder Portugeesche-Spaansche Vlag. De Katholieke Missie van Indonesie, 1511-1605. (Amsterdam, 1925).
36. Insulíndia, Op.cit. IV, No. 7, dokumen ANTT Chancelaria de D. João 3, L. 9.
37. Lihat catatan nomer 35.
38. Ibid.
39. Saudara dari ibu lain. Tabarija adalah putra dari Ratu.
40. Amantelu adalah soa dari Soya, Lihat R. Kennedy, "Fieldnotes on Indonesia: Ambon and Seram, 1949-1950. Harold C. Conklin, ed. Mungkin sekali peristiwa inilah yang dimaksud Rumphius (diulang oleh Valentijn) yang menyebut pembabtisan raja Soya

"tiga tahun sesudah Portugis tiba di pulau Ambon". Yang dimaksud adalah tiga tahun sesudah Portugis berkampung di Hatiwe-Tawiri.

41. Dari perkataan Portugis "boca" = mulut?
42. Dalam logat Melayu-Ambon menjadi "Tanjung Martafons"
43. P.A. Tiele, "De Europeers in den Maleischen Archipel", B.K.I., (1877-1887) Bag. II, Bab 6.
44. Ibid.
45. Untuk masa 1540-1605 telah dipergunakan karya Tiele tersebut dalam catatan 43 dan C. Wessels, S.J., De Geschiedenis der R.K. Missie in Amboina, van af haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I. Compagnie, 1546-1605. (Nijmegen-Utrecht, 1926).
46. Saduran dari laporan Pe. de Castro, tertanggal 13 mei 1555 sebagaimana tertera dalam Wessels, op.cit.
47. Dari tangannya telah terbit karangan penting; lihat catatan nomer 25.
48. Insulindia V, No. 21, British Museum Marsden Collection No.12, 876, Informações das Molucas, pelo Padre António Marta, S.J., 1588.
49. Baca: "Portuguese-Mestiço"
50. C.R. Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion, 1415-1825. A Succinct Survey. (Johannesburg, 1965), Terjemahan ucapan João de Barros.
51. Henry Russell Wallace, The Malay Archipelago; (University of Chicago Press, 1966), Bab VIII, 2, 106.
52. August Toussaint, History of the Indian Ocean. (University of Chicago Press, 1966), Bab VIII, 2, 106.
53. Lihat catatan nomer 40.
54. C.R. Boxer, Race Relations in the Portuguese Colonial Empire, 1415-1825. (Oxford, 1963).
55. Ibid.
56. J.A. Robertson, Antonio Pigafetta, Magellan's Voyage around the world. (Cleveland, 1906).
57. Insulíndia, IV, António Bocarro, A Capitania de Amboino, 1565-1579, BNL, Fundo Ceral, No. 474.
58. Lihat catatan nomer 8.
59. G.W. Drewes, "The effect of Western influence on the language of the East Indian Archipelago" dlm. B. Schrieke (ed), The Archipelago, K.B.B. (1931).
60. C.C.F.M. Ie Roux, "De Elcano's tocht door den Timor archipel met Magelhaes schip" Victoria", Feestbundel B.K.I. (1919)
61. Schurhammer, op.cit.
62. Semacam golongan "ksatria".
63. Tentang urutan kedudukan dalam hierarchi kebangsawanan terdapat perbedaan: Raymond Kennedy, op.cit., menerangkan bahwa urutan itu adalah: raja, orangkaya, patih. Pengarang sendiri oleh baka dan saniri negeri Kilang dalam tahun 1959 dan 1965 diberitahukan bahwa urutan itu adalah: raja, patih, orangkaya.

Untuk Kilang terdapat situasi sebagai berikut:
Kilang - Kepala Upulatu
Naku - Patih
Hatalai - Orangkaya)
Ema - Orangkaya) merupakan satu mata aman (family group-
Hukurila - Orangkaya) ing).

64. G.W.W.J. van Hoevell, "Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliassers" (Dordrecht, 1875).
65. Lihat catatan nomer 35.
66. Lihat catatan nomer 63. fam = famili.
67. Ibid. "Borgor" (Burger), "class of people in Ambon of mixed origin, organized in the local militia, considered of somewhat higher social standing than the rest of the local population but do not own dati property. (Catatan pengarang: mungkin dalam tahun 1950 tetapi sekarang tidak lagi !)
68. Lihat catatan nomer 15.
69. Jaime Cortesão, Aperçu Historique (Lisboa, 1962); Hernani Cidade, História de Portugal. (Lisboa, 1921).
70. Lihat catatan nomer 57.
71. J.F.J. Biker, Collecção de tratados e concertos de pazes que o Estado da India Portuguesa fez com os Reis e Senhores com que teve relações nas partes da Asia e Africa Oriental - desde o principio da conquista até ao fim do seculo XVIII. 14 jilid. (Lisboa, Imprensa Nacional, 1881)
Juga As Gavetas da Torre do Tombo, jilid I-VIII. Centro dos Estudos Historicos Ultramarinos.
72. "Mouro" = dalam bahasa Belanda "Moor" istilah orang Eropa untuk penduduk yang beragama Islam.
73. Gaya dalam arsitektur yang tumbuh dan berkembang dalam pemerintahan raja Portugal Dom Manuel I (1495-1521) yang menerima banyak unsur kebudayaan dan kesenian Asia dan dikawinkan dengan gaya-gaya arsitektur Eropa.
74. Lihat catatan nomer 50.

BAB IV

KEBIJAKSANAAN VOC UNTUK MENDAPATKAN MONOPOLI PERDAGANGAN CENGKEH DI MALUKU TENGAH ANTARA TAHUN - TAHUN 1615 DAN 1652

oleh R. Z. Leirissa

Perdagangan cengkeh oleh VOC dalam abad ke tujuhbelas dan kedelapanbelas di Maluku dilakukan secara monopoli. Ini berarti bahwa badan dagang Belanda itu harus berusaha untuk mendapatkan hak tunggal untuk membeli cengkeh dari penduduk di Maluku serta hak tunggal untuk mengangkutnya ke Eropa untuk dijual disana. Untuk mempertahankan cara perdagangan ini VOC telah mengambil tindakan-tindakan antara tahun-tahun 1615 sampai 1652 yang sangat penting bagi sejarah Maluku. Tindakan-tindakan yang terpusat di Maluku Tengah inilah yang akan ditinjau dalam karangan ini.

Hak tunggal untuk membeli dan mengangkut cengkeh untuk pertama kalinya diperoleh VOC dari kerajaan Hitu yang terletak di jazirah Hitu di pulau Ambon. Hal ini di cantumkan dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat pada tahun 1605.[1] Perjanjian ini dibuat ditengah suasana peperangan antara kerajaan Hitu dan orang-orang Portugis yang beberapa puluh tahun sebelumnya telah berbenteng di jazirah Leitimor di pulau Ambon juga. Untuk mengalahkan benteng Portugis itu pihak Hitu mengadakan persekutuan dengan VOC dan bersama armada yang dipimpin oleh Admiral Steven van der Haghen benteng itu direbut pada tahun 1605.

Antara orang-orang Belanda dan Portugis sebenarnya tidak terdapat permusuhan. Permusuhan ini baru ada setelah terjadi suatu perubahan politik di jazirah Iberia. Pada tahun 1580 kerajaan Portugis di satukan dengan kerajaan Spanyol dibawah raja Philip II dari Spanyol. Pada waktu itu Spanyol, yang menguasai sebagian besar dari Eropa Barat, sedang diperangi oleh orang-orang Belanda dengan demikian secara tidak langsung Portugis bermusuhan dengan VOC. Penggabungan perusahaan-perusahaan niaga Belanda pada tahun 1602 - yang diberi nama Vereenigde Oost-indische Compagnie, sedikit banyaknya dipengaruhi[2] oleh keadaan politik ini selain faktor-faktor komersiil belaka.

Untuk kepentingan perdagangannya di Asia pedagang-pedagang VOC mau tidak mau harus pula menghadapi orang-orang Portugis yang telah se abad sebelumnya berdagang disana. Orang-orang Portugis-pun telah mencoba cara perdagang monopoli ini. Usaha mereka tidak banyak berhasil dan dapat dikatakan bahwa menjeleng akhir abad ke enambelas - yakni ketika pedagang-pedagang Belanda mulai datang di Asia - kemampuan mereka telah sangat berkurang. Yang dikhawatirkan VOC adalah kedudukan mereka di Manila dan Malaka. Malaka memang dapat direbut oleh VOC dalam tahun 1641 tetapi Manila, yang mempunyai hubungan dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya dipantai selatan Cina, sepanjang abad ke tujuhbelas merupakan ancaman bagi perdagangan VOC.

Dalam perjanjian 1605 tersebut hak monopoli VOC dirumuskan sebagai berikut: penjualan cengkeh oleh penduduk kerajaan Hitu hanya boleh dilakukan kepada VOC saja yang akan menempatkan agen-agennya di sana. Pedagang-pedagang lainnya dilarang campurtangan dalam perdagangan ini dan ditentukan bahwa penduduk tidak diperkenankan menjualnya kepada mereka. Yang dimaksud dengan pedagang-pedagang lain itu adalah mereka yang berasal dari Jawa, Sumatera, Semenanjung, Cina, Gujarat dan lain-lain. Mereka telah lama berusaha di Maluku dan berdagang bersama-sama dengan orang-orang Portugis. Malah sebelum kedatangan orang-orang Portugis mereka telah mengunjungi kepulauan rempah-rempah ini. Perdagangan mereka biasanya merupakan perdagangan barter: bahan-bahan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan penduduk di Maluku mereka angkut dari pelabuhan-pelabuhan lainnya di luar Maluku untuk ditukarkan dengan cengkeh di Hitu ataupun dipelabuhan-pelabuhan di kerajaan-kerajaan di Maluku Utara. Dapatlah dikatakan bahwa sebenarnya nilai ekonomi dari cengkeh dan pala baru timbul setelah adanya pedagang-pedagang ini.

Perjanjian tersebut tidak saja membatasi perdagangan pedagang pedagang tersebut diatas. Orang-orang Portugis juga dikenakan larangan itu, demikian pula orang-orang Barat lainnya seperti orang-orang Inggris. Malah kemudian ternyata perjanjian-perjanjian ini ditafsirkan sebagai berlaku pula bagi orang-orang Barat lainnya yang datang dalam masa-masa berikutnya.

Persoalan lain yang dibicarakan pula dalam tahun 1605 antara Steven van der Haghen dan pihak Hitu adalah daerah yang tadinya dikuasai oleh Portugis. Menurut pandangan VOC daerah yang telah direbut dari tangan Portugis merupakan daerah kekuasaan Belanda. Hak ini adalah syah karena badan dagang itu telah diberikan suatu ketentuan tertulis (Octrooy) oleh Staten Generaal (Dewan Perwakilan Belanda) pada tahun 1602 ketika VOC dibentuk. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk merebut daerah-daerah dari tangan musuh Belanda (jadi terutama Portugis) dan untuk memaklumkan perang dan membuat perjanjian-perjanjian politik dan perjanjian - perjanjian perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di Asia. Dengan sendirinya badan dagang itu diizinkan pula untuk memelihara suatu badan ketentaraan untuk melindungi kepentingan-kepentingan dagangnya. Hal ini selain sesuai dengan keadaan negeri Belanda yang sedang berperang - peperangan mana baru berakhir pada tahun 1648 juga merupakan kelaziman di Eropa pada waktu itu.

Berdasarkan hak-hak tersebut, serta kemenangan atas Portugis itu, maka VOC meng-claim daerah-daerah tertentu di Maluku Tengah yang dianggapnya berada dalam kekuasaan Portugis sebelumnya. Untuk mengurus daerah-daerah itu dibentuklah suatu badan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang gubernur dan berkedudukan di Ambon (bekas benteng Portugis). Badan ini diberi nama "Gouvernement van Amboina". Dari kejadian-kejadian dalam tahun-tahun 1620-an maka nampaklah bahwa selain benteng tersebut, VOC sejak tahun 1605 menganggap dirinya berkuasa juga atas keseluruhan jazirah Leitimor

(di pulau Ambon), serta kepulauan Lease (pulau-pulau Haruku, Saparua dan Nusa Laut) serta beberapa pulau dan tempat di sekitar pulau Seram. Kerajaan Hitu tidak termasuk kekuasaan ini; jazirah Hitu baru dikuasai oleh VOC dalam tahun 1646 setelah melalui suatu peperangan yang lama.

Dalam pembicaraan di tahun 1605 itu hadir pula Gimelaha Basi Frangi yang memerintah sebagai wakil sultan Ternate di daerah-daerah yang dikuasai Ternate yang terletak di Maluku Tengah.[3] Seperti halnya dengan kerajaan Hitu daerah ini juga tidak dimasukkan dalam pemerintahan gubernur VOC tersebut karena tidak termasuk apa yang oleh VOC dianggap sebagai daerah yang tadinya dikuasai Portugis. Namun seperti akan nampak nanti, batas-batas wilayah kerajaan-kerajaan di Maluku tidak dapat ditentukan dengan tegas sehingga menimbulkan pertentangan antara kerajaan Ternate dengan VOC yang di wakili oleh Gimelaha dan gubernur VOC di Ambon. Daerah yang dipimpin oleh Gimelaha tersebut akhirnya akan direbut pula oleh VOC dalam tahun 1652, juga setelah mengalami peperangan yang lama.

Gimelaha Basi Frangi yang bertemu dengan van der Haghen pada tahun 1605 itu berkedudukan di Gamsungi, suatu tempat yang khusus didirikan dikota pelabuhan Luhu di pantai timur jazirah Hoamoal (Seram Barat). Dalam dokumen-dokumen VOC[4] Gimelaha diterjemahkan sebagai "standhouder der coning van Ternate". Disebut pula bahwa pejabat-pejabat ini selalu dipilih dari satu keluarga saja, yaitu keluarga Tomagola yang merupakan salah satu dari keluarga bangsawan di keraton Ternate. Basi Frangi merupakan Gimelaha yang kedua atau ketiga yang memerintah sampai tahun 1611 atau 1612.

Sejak awal abad ketujuhbelas pemerintahan kerajaan Ternate di Maluku Tengah telah menjadi suatu kenyataan penting sehingga tidak mengherankan mengapa Steven van der Haghen menganggap perlu mengadakan pembicaraan dengan wakil kerajaan itu di Ambon. Dari dokumen-dokumen VOC yang dipakai untuk menyusun karangan ini tidak dapat diketahui dengan jelas bagaimana tepatnya struktur pemerintahan itu. Beberapa data yang dapat dikumpulkan dari dokumen-dokumen itu dapat memberikan sekadar sketsa mengenai hal ini. Umpamanya perjanjian 1609 - yang akan disinggung lagi dibawah nanti menyebutkan bahwa yang menandatanganinya selain Gimelaha juga para Sangaji. Para Sangaji ini berkedudukan di kota pelabuhan yang penting seperti Luhu, Lesidi dan Kambelo di jazirah Hoamoal dan di pulau-pulau Buru, Manipa dan Boano. Karena dalam dokumen-dokumen VOC abad ke tujuhbelas tidak disebut adanya pejabat ini di kerajaan Hitu maupun di negeri-negeri di Leitimor dan kepulauan Lease, maka kita dapat menyimpulkan bahwa daerah yang mereka pimpin itu termasuk dalam sistem pemerintahan tersendiri. Dalam dokumen-dokumen itu nampak bahwa para Sangaji sangat erat berhubungan dengan Gimelaha, sehingga dapatlah dikatakan bahwa mereka merupakan bagian dari sistem pemerintahan Ternate di Maluku Te-

ngah. Di kerajaan Ternate di Maluku Utara terdapat pula pejabat-pejabat dengan sebutan ini dan nampaknya mereka menduduki tempat yang dapat disamakan dengan Bupati di Jawa dalam masa ini.

Selain para Sangaji, di Maluku Tengah terdapat pula pejabat pejabat yang dalam dokumen-dokumen VOC tersebut, dinamakan Kipati; mereka memerintah negeri-negeri atau desa-desa (dalam dokumen-dokumen VOC disebut negorij). Berdasarkan sumber-sumber VOC tersebut nampaklah bahwa dalam abad ke tujuhbelas istilah-istilah ini tidak terdapat di jazirah Hitu dan Leitimor di pulau Ambon ataupun di kepulauan Lease (di sini sering dipergunakan istilah Pati saja). Dengan demikian dapatlah kita simpulkan juga bahwa para Kipati ini adalah bagian dari sistem pemerintahan kerajaan Ternate di Maluku Tengah pula. Yang kurang jelas dari dokumen-dokumen itu adalah bagaimana hubungan antara para Kipati dengan para Sangaji. Kecuali dalam hal perdagangan kita tidak dapat membuat suatu garis yang tegas yang dapat memperlihatkan apakah para Kipati menduduki tempat yang tertinggi ataukah para Sangaji. Selain itu sering pula dipergunakan istilah Orangkaya[5]. Istilah ini dalam abad ke tujuhbelas dipakai untuk penguasa-penguasa di kerajaan Hitu dan di negeri-negeri tertentu di jazirah Leitimor dan Lease. Kita tidak dapat menyamakan penggunaan istilah ini pada masa-masa kemudian dengan penggunaannya dalam abad ke tujuhbelas dan ke delapanbelas.

Suatu ciri lain yang penting dari daerah yang diperintah oleh para Gimelaha adalah meluasnya agama Islam. Masjid-masjid dan surau-surau merupakan ciri budaya yang terdapat hampir disetiap negeri, terutama negeri-negeri di pantai. Pejabat-pejabat agama memainkan peranan penting, malah kemudian nampak bahwa ada Gimelaha yang semulanya adalah pejabat agama juga.

Daerah yang diperintah oleh Gimelaha ini sangat penting bagi VOC., karena selain di Maluku Utara dan Hitu, disinipun terdapat kebun-kebun cengkeh. Bagaimana cengkeh diusahakan penduduk tidak dapat kita ketahui dari dokumen-dokumen dari abad ke tujuhbelas ini. Rupanya penduduk mengetahui dengan pasti siapa yang "memiliki" yang mana, selain itu rupanya tidak terdapat suatu sistem pemeliharaan tertentu yang diwajibkan oleh para penguasa daerah itu. Setiap tahun penduduk memetiknya untuk dibawa ke kota-kota pelabuhan yang terdekat - rupanya antara beberapa Kipati dan seorang Sangaji terdapat suatu ikatan hierarkhis dalam hal penjualan cengkeh ini. Sebagian dari cengkeh yang terkumpul itu merupakan upeti bagi sultan Ternate, sebagian lagi diperuntukkan Gimelaha; bagian-bagian ini telah ditentukan dengan pasti dan ada seorang pejabat kerajaan yang setiap kali khusus dikirim dari keraton Ternate untuk mengawasi pengumpulan nya. Sebagian terbesar dari hasil itu dijual kepada VOC sesuai dengan perjanjian-perjanjian tertulis yang telah dibuat. Namun dari dokumen-dokumen VOC nampak bahwa penduduk toh ada yang menjualnya kepada pedagang-pedagang lain yang tidak diperkenankan dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Terutama kota pelabuhan

Kambelo dalam bagian pertama dari abad ke tujuhbelas merupakan pusat "perdagangan gelap" ini. Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari perdagangan cengkeh ini tidak dapat kita tentukan berdasarkan dokumen-dokumen VOC yang dipakai disini. Yang menarik adalah bahwa, berdasarkan dokumen-dokumen ini, nampak adanya orangkaya tertentu yang memiliki kebun-kebun cengkeh sendiri yang terletak didaerah pantai dan yang dikerjakan oleh tenaga budak. Sayang sekali bahwa data mengenai hal ini tidak lengkap sehingga kita tidak bisa menghubungkannya dengan sistem monopoli yang dibangun oleh VOC maupun dengan kekuasaan kerajaan Ternate.

Perjanjian monopoli cengkeh antara VOC dengan kerajaan Ternate baru dibuat pada tahun 1607.[6] Perjanjian inipun lahir dalam keadaan peperangan antara kerajaan Ternate dan pihak Spanyol. Karena adanya hubungan antara kerajaan Ternate dengan pedagang-pedagang Belanda, maka pada tahun 1606 Manila mengirimkan suatu armada bantuan yang kuat untuk menyerbu kerajaan itu. Sultan Said, yang memerintah ketika itu, berhasil mereka tawan dan diangkut ke Manila bersama beberapa pejabat kerajaan dan anak Saudaranya. Keadaan dapat dipulihkan kembali oleh Kaicili Ali, yang pada waktu itu menjabat Kapitan Laut (laksamana), salah satu dari tiga fungsi yang terpenting sesudah sultan. Ia dapat mengadakan kontak dengan armada VOC; hasil perundingan mereka dicantumkan dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani Soasiwa (Dewan Kerajaan) pada tahun 1607. Menurut perjanjian itu antara kerajaan Ternate dan VOC terdapat hubungan persekutuan defensif. Armada-armada VOC berkewajiban untuk melindungi kerajaan ini dari ancaman armada-armada Spanyol. Untuk kepentingan ini kerajaan Ternate mengizinkan VOC mendirikan benteng-benteng dimana saja dianggap perlu. Benteng yang pertama sudah tentu dibuat di pulau Ternate pula. Dengan sendirinya dicantumkan juga ketentuan monopoli; hanya VOC yang berhak membeli dan mengangkut cengkeh dari kerajaan Ternate; harga pembeliannya akan ditentukan kemudian.

Permusuhan antara orang-orang Belanda dan Spanyol di Eropa sebenarnya telah berakhir pada tahun 1648 ketika antara kedua belah pihak dibuat suatu perjanjian penghentian permusuhan. Namun di Indonesia pertentangan ini berjalan terus. Pertama-tama hal ini disebabkan Spanyol mempunyai benteng pula di pulau Ternate. Selain itu mereka mempunyai hubungan persekutuan dengan kerajaan Tidore yang merupakan saingan dari kerajaan Ternate. Dengan demikian sampai tahun 1663 terdapat peperangan-peperangan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore dengan bantuan sekutu-sekutu mereka masing-masing. Peperangan itu merupakan suatu alat diplomasi yang penting bagi VOC untuk menguasai politik kerajaan Ternate. Tiba-tiba dalam tahun 1663 orang-orang Spanyol meninggalkan benteng-benteng mereka dan kembali ke Manila. Kemudian dalam tahun 1667 VOC berhasil pula membuat perjanjian persekutuan dan monopoli dengan kerajaan Tidore. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pertengahan abad ketujuhbelas ini se-

benarnya tidak bersangkutan lagi dengan kepentingan-kepentingan politik di Eropa.

Namun dalam awal abad ketujuhbelas kepentingan-kepentingan politik tersebut sangat jelas menentukan perkembangan di Indonesia. Kepentingan-kepentingan inilah yang menyebabkan dalam tahun 1609, ketika akan dibuat persetujuan perletakan senjata antara Belanda dan Spanyol, Staten Generaal dengan tergesa-gesa memerintahkan suatu armada yang kuat dipimpin oleh Verhoeven dan Wittered untuk mendatangi kepulauan rempah-rempah. Instruksi bagi armada ini jelas "... mencari pulau-pulau yang menghasilkan cengkeh dan pala dan menjadikannya daerah kekuasaan VOC dengan cara diplomasi maupun kekerasan ... dan juga menempatkan benteng-benteng kecil disana beserta pengawalannya".[7] Armada ini mula-mula menuju ke kepulauan Banda, dimana terjadi suatu insiden sehingga panglima armada tersebut gugur. Wakilnya, Wittered, menuju ke Hoamoal dan dalam perundingan dengan Gimelaha Basi Frangi dan para Sangaji berhasil membuat perjanjian tahun 1609. Dalam perjanjian ini selain ditegaskan bahwa perjanjian yang dibuat dengan Ternate pada tahun 1607 berlaku pula disini juga dicantumkan hal hal lain yang khusus menyangkut daerah ini. Yang aneh ialah bahwa ada suatu perbedaan yang sangat penting antara kedua perjanjian itu. Apabila dalam perjanjian tahun 1607 VOC diberi kebebasan untuk mendirikan benteng dimana saja diperlukan, termasuk di Hoamoal, dalam perjanjian tahun 1609 ini jelas disebut bahwa hal itu tidak dibenarkan.[8]

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat pada awal abad ke tujuhbelas ini mengabaikan suatu faktor yang sangat penting di Maluku Tengah. Yang dimaksud adalah peranan para pedagang Asia di daerah itu. Seperti telah disebutkan diatas para pedagang Asia ini mempunyai peranan yang lebih luas daripada sekedar pengangkut rempah-rempah keluar kepulauan Maluku. Mereka merupakan perantara bagi penduduk di Maluku untuk mendapatkan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari seperti beras dan pakaian yang dihasilkan di daerah-daerah lainnya di Asia. Selain itu adalah suatu hal yang tidak dapat disangkal lagi bahwa perdagangan juga merupakan suatu saluran komunikasi yang penting dan lebih luas dari pada hanya menyalur kebutuhan-kebutuhan materiil; hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan di dunia untuk pertama kalinya mengikuti jalan saluran ini. Kekurangan-kekurangan dalam perjanjian-perjanjian ini mungkin sekali disebabkan situasi peperangan yang merupakan faktor yang penting dalam pembuatannya. Kesulitannya adalah karena perjanjian-perjanjian ini merupakan pola dasar bagi perjanjian-perjanjian dimasa kemudian dimana suasana sudah berobah dan tidak lagi terdapat permusuhan bersenjata antara kekuasaan-kekuasaan di Eropa. Bertolak dari dasar-dasar ini maka VOC membangun sistem perdagangannya dan pemerintahannya selama abad ketujuhbelas dan kedelapanbelas. Pandangan beberapa sejarawan bahwa sebenarnya VOC tidak mempunyai sejarah nampak sekali dalam hal ini.

Sebenarnya sebelum VOC dibentuk dalam tahun 1602 telah ada pikiran-pikiran lain yang berasal dari pemimpin-pemimpin armada dari pelbagai kongsi dagang Belanda lainnya. Ketika kongsi-kongsi ini bergabung menjadi VOC maka dengan gigih pendirian dari pelbagai kongsi dagang tersebut dipertahankan oleh pejabat-pejabatnya yang telah menjadi pejabat-pejabat VOC. Tokoh utama dalam hal ini adalah Admiral Steven van der Haghen yang sejak tahun 1600 telah berada di Maluku untuk memimpin suatu armada dagang milik kongsi di Amsterdam. Pada waktu itu ia telah mengadakan hubungan dengan Hitu dan bersedia memberi bantuan untuk memerangi orang-orang Portugis yang sedang berbenteng di jazirah Leitimor. Malah suatu benteng kecil telah dibuatnya dekat Hila (Kaitetu). Setelah VOC dibentuk van der Haghen pula yang memimpin armada niaganya yang pertama. Dialah yang merebut benteng Portugis tersebut dan dia pulalah yang ditempatkan diperairan Maluku sebagai "koordinator" perdagangan VOC sebelum diangkatnya seorang Gubernur Jendral VOC pada tahun 1609. Ia tahu benar sampai dimana kekuatan Portugis di Maluku Tengah dan ia mengetahui pula peranan dari pedagang-pedagang Asia tersebut. Seperti akan disebut dibawah nanti pokok pandangannya adalah bahwa VOC tidak berhak menghalau pedagang-pedagang itu dari Maluku. Selain itu ia juga sangat bersimpati kepada rakyat Maluku.[9]

Sejak tahun 1609 telah diangkat seorang Gubernur Jendral untuk mengawasi seluruh perdagangan VOC di Asia. Para Gubernur Jendral yang pertama semuanya mengikuti nasehat-nasehat dari van der Haghen yang juga menjadi salah satu dari anggauta Raad van Indie. Perintah yang diterima para Gubernur Jendral ini dari para Direktur VOC di Nederland adalah bahwa semua pedagang-pedagang Asia tidak diperbolehkan memasuki daerah yang telah direbut oleh VOC dan yang menghasilkan rempah-rempah itu. Namun perintah perintah ini tidak pernah dapat dijalankan dengan tegas. Pertama-tama para Gubernur Jendral tersebut tidak mempunyai kekuatan militer yang cukup besar untuk memaksakan hal ini. Kedua adalah karena mereka mulai menginsafi bahwa yang lebih penting adalah situasi perdagangan di Asia pada keseluruhannya yang tidak atau belum dipahami oleh para Direktur tersebut. Yang berhasil membuat suatu rencana yang menampakkan keseluruhan perdagangan Asia ini dalam konteks monopoli VOC adalah Jan Pieterszoon Coen yang baru pada tahun 1619 menjadi Gubernur Jendral.

Agaknya sebelum Coen menjadi Direktur Jendral VOC dan berkedudukan di Banten ia telah mempunyai gambaran yang terang mengenai perdagangan di Asia itu. Dialah tokoh yang gigih mempertahankan pendapat bahwa para pedagang Asia tidak boleh diperkenankan memasuki daerah-daerah yang menghasilkan cengkeh dan pala. Mungkin sekali pendapatnya ini telah timbul dalam tahun 1613 ketika East India Company (milik orang-orang Inggris) menempatkan seorang agen di Makasar, pelabuhan perantara yang penting ke kepulauan rempah-rempah. Dalam perjalanan inspeksinya ke Maluku Tengah pada tahun itu ia memerlukan datang berbicara dengan Gi-

melaha Sabadin (1612-20) yang telah menggantikan Basi Frangi itu. Ia memperingati Gimelaha dan para Sangaji akan perjanjian yang telah mereka buat pada tahun 1609 dan yang telah diratifikasi oleh sultan Ternate pula. Tekanan yang terutama diberikannya pada larangan berdagang dengan orang-orang Inggris yang sedang berada diperairan Maluku dengan suatu armada yang dipimpin oleh John Jourdain.[10]

Sementara itu di Maluku Tengah sendiri tindakan-tindakan yang sejalan dengan pandangan Coen telah diambil oleh Blocq Martensz yang menjabat Gubernur VOC di Ambon antara tahun-tahun 1615 dan 1618. Ia rupanya juga insaf bahwa persoalan utama bukanlah pedagang-pedagang Eropa tetapi pedagang-pedagang Asia. Bertentangan dengan van der Haghen ia menginginkan agar ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh para Direktur VOC di Nederland yang khusus ditujukan kepada pedagang-pedagang Eropa juga dikenakan pada pedagang-pedagang Asia.

Sejak tahun 1615 juga Blocq Martensz telah berusaha untuk menjalankan hal-hal itu. Pada tahun itu juga ia bertolak dengan suatu kapal VOC dengan diiringi oleh kora-kora penduduk dari Leitimor dan Lease (suatu hongi) ke Hoamoal. Ada dua persoalan yang ditanganinya di sana. Persoalan pertama adalah harga cengkeh yang sejak masa van der Haghen belum juga ditentukan dengan pasti.Dalam suatu pertemuan dengan Gimelaha dan para Sangaji di kota pelabuhan Luhu terjadi tawar-menawar mengenai harga tersebut. Blocq Martensz menginginkan agar mereka mau menerima harga limapuluh realen (mata uang Spanyol) setiap baharnya, harga yang memang berlaku di kerajaan Ternate. Para Sangaji mengajukan keberatan dengan mengatakan bahwa sejak perundingan-perundingan dengan van der Haghen VOC biasanya membayar tujuhpuluh sampai sembilanpuluh realen setiap baharnya. Akhirnya disepakati enampuluh realen setiap bahar, harga yang juga berlaku bagi kerajaan Hitu.

Persoalan yang kedua menyangkut pedagang-pedagang asing. Mula pertama adalah pedagang-pedagang Inggris. Untuk itu Blocq Martensz bertolak ke Kambelo yang merupakan pusat perdagangan non-VOC. Dalam perundingan dengan para pejabat negeri itu ternyata keinginan Blocq Martensz sama sekali tidak diterima, yaitu agar semua pedagang Inggris yang sedang menetap di Kambelo diusir keluar. Karena itu maka Gubernur VOC tersebut mengambil tindakan kekerasan dengan menghujani kota pelabuhan itu dengan meriam-meriam dari kapal-kapalnya. Penduduk melarikan diri kepegunungan dan kebanyakan menolak untuk kembali ke pantai. Setelah itu pejabat VOC tersebut mendirikan suatu benteng di sana. Beberapa waktu kemudian suatu benteng lain didirikan di Hitu dengan alasan bahwa penduduk di sana pernah membunuh beberapa orang pejabat VOC. Dalam laporannya pada para Direktur VOC di Nederland ia mengatakan bahwa benteng-benteng itu sangat diperlukan untuk mengawasi agar penduduk selalu menjual cengkeh mereka kepada VOC saja. Tidak disinggungnya bahwa pendirian benteng-benteng tersebut, terutama di Kambelo, merupakan pelang-

garan dari perjanjian-perjanjian yang pernah di buat oleh VOC dan Gimelaha. Selanjutnya ia juga mengadakan ekspedisi ke teluk Elpaputih di pantai selatan Seram Tengah; penduduk dipaksakannya membuat suatu perjanjian bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan "perdagangan gelap" tersebut.[12]

Tindakan Blocq Martensz di Kambelo itu mengakibatkan kekacauan. Para Sangaji mulai bertindak sendiri-sendiri dan tidak lagi mengikuti Gimelaha. Perdagangan "gelap" juga mulai merajalela. Pada saat itu Steven van der Haghen bertindak. Ia bertolak dengan suatu armada VOC dari keraton Ternate ke Maluku Tengah. Dibawanya pelbagai hadiah dan sepucuk surat dari Sultan Ternate kepada para Sangaji dan Gimelaha di Maluku Tengah. Tindakan-tindakannya di Hoamoal diceriterakannya dengan panjang lebar dalam laporannya kepada para Direktur di Nederland. Ia tiba di Hoamoal pada tanggal 5 Desember 1616 dan berlabuh di kotapelabuhan Luhu. Surat-surat dan hadiah-hadiah tersebut dijemput dengan upacara kebesaran pada tanggal 11 Desember. Iringan-iringan penjemput itu menuju ke pasar negeri Luhu dimana telah berkumpul Gimelaha, para Sangaji dan Orangkaya lainnya kira-kira 500 sampai 600 orang. Dihadapan para orangkaya ini surat Sultan kepada Gimelaha dan para Sangaji dibacakan dan isinya menekankan bahwa Gimelaha Sabadin adalah wakil sultan yang syah di Maluku Tengah dan harus ditaati oleh para Orangkaya. Diantara hadiah-hadiah yang diberikan kepada Gimelaha Sabadin terdapat sebuah bendera kerajaan Ternate.[12]

Dalam laporan yang sama van der Haghen juga mengemukakan pendapatnya mengenai para pedagang Asia. Ia setuju sekali dengan keinginan para Direktur VOC agar para pedagang Eropa dicegah dari daerah Maluku. Tetapi "... bahwa secara kekerasan semua orang Cina, Jawa, Melayu dan orang-orang Asia lainnya, harus diusir memang dapat saja dilakukan tetapi dengan dalih apa?" Nampak betapa van der Haghen ingin tetap berpegang pada perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Nampak pula dari suratnya itu betapa ia menghormati sistem pemerintahan kerajaan Ternate. Selain itu ia juga mengatakan bahwa pengusiran pedagang-pedagang Asia itu dapat pula membangkitkan amarah penduduk di Maluku sehingga VOC akan mendapat kesulitan saja. Ia mengemukakan bahwa apabila VOC harus mengusir pedagang-pedagang Asia itu, maka VOC juga harus menyanggupi mengganti peranan mereka sebagai pedagang perantara untuk daerah Maluku. Ia juga menentang tindakan Blocq Martensz dengan mendirikan benteng-benteng tersebut. Dikemukakannya bahwa apabila sistem benteng yang hendak dipakai untuk mencegah "perdagangan gelap", maka untuk daerah Maluku Tengah saja diperlukan duapuluhlima buah benteng. Cara yang lebih baik adalah dengan mengirimkan sebuah kapal perang yang dapat mengadakan kontrole di perairan itu sehingga kapal-kapal pedagang asing dapat dicegah.

Persoalan pedagang-pedagang Asia dikemukakan van der Haghen dalam suratnya kepada para Direktur VOC tertanggal 20 agustus 1618, yaitu ketika ia telah diangkat menjadi Gubernur VOC di Am-

bon. Ia menyatakan keheranannya kepada para Direktur tersebut me
ngapa mereka setiap tahun memerintahkannya untuk menghalau peda-
gang-pedagang asing tersebut dari Maluku Tengah. Dikemukakannya
lagi bahwa bagaimanapun VOC tidak akan sanggup menggantikan peran-
an mereka sebagai pedagang perantara di Maluku. Barangkali dalam
hal bahan pakaian VOC masih dapat melakukan peranan itu - dan a-
gar hal itu dilakukan dengan menguntungkan pula dianjurkannya a-
gar VOC merebut pantai Koromandel yang menghasilkan bahan pakai-
an itu serta mengawasi perairan sekitar "Singapura". Tetapi da-
lam hal perdagangan beras jelas VOC akan mengalami kerugian. Per-
tama-tama kapal-kapal VOC tidak dibuat untuk tugas ini sehingga
beras yang biasanya mereka angkut telah terkena air laut dan ku-
rang disenangi penduduk. Selain itu dengan mengambil oper perda-
gangan beras maka VOC akan mematikan sumber pencaharian pedagang
pedagang Indonesia yang telah lama melakukan perdagangan itu.

Namun suara-suara van der Haghen tidak membawa perubahan di
Maluku. Ketika ia diangkat menjadi Gubernur VOC di Ambon tiba pu-
la di sana Wakil Gubernur Jendral van Speult yang ternyata sepen-
dapat dengan Coen maupun dengan Blocq Martensz. Dengan armada
yang dibawanya dari Banten van Speult mengadakan serangkaian eks-
pedisi untuk menghalangi perdagangan orang-orang Asia itu.

Selain itu van Speult juga mengalihkan perhatian VOC ke ke-
pulauan Lease. Pada awal abad ke tujuhbelas keadaan kekuasaan di
kepulauan ini masih bercabang dua sekalipun VOC menganggap bahwa
ketiga buah pulau yang utama di sana, yakni Haruku, Saparua dan
Nusa Laut, termasuk daerah mereka karena telah direbut dari ta -
ngan Portugis. Rupanya dalam masa-masa sebelumnya kepulauan ini
lebih dekat berhubungan dengan pantai selatan pulau Seram dari-
pada dengan Ambon. Dari sini juga terdapat suatu jaringan pela-
yaran-perdagangan tradisionil dengan kepulauan Banda dan pulau-
pulau lainnya di Maluku Tenggara. Malah antara Seram-Laut terda-
pat pula hubungan dengan pantai barat pulau Irian Jaya. Dalam
dokumen-dokumen VOC dari awal abad ke tujuhbelas ternyata bahwa
bagian utara pulau-pulau itu terpengaruh oleh agama Islam yang
mungkin menyebar dari Hoamoal. "Pertuanan-pertuanan" Islam disi-
ni yang sangat penting dalam bagian pertama dari abad ke tujuh-
belas adalah Hatuaha di pulau Haruku, Iha dan Mahu di pulau Sa-
parua, dan suatu tempat di Nusa Laut. Di daerah-daerah sebelah
selatannya padri-padri Katolik berhasil menanamkan agama Katolik
dalam bagian kedua dari abad ke enambelas, dan kemudian VOC ber-
angsur-angsur menggantikannya dengan aliran Protestan. Ketika
timbul pertentangan antara VOC dan Gimelaha maka, nampaklah bah-
wa daerah sebelah utara itu memihak pada Gimelaha dan disebelah
selatan memihak pada Gubernur VOC di Ambon, sekalipun sering de-
ngan paksaan juga. Dengan kemenangan VOC atas Gimelaha dalam per-
tengahan abad ke tujuhbelas maka seluruh daerah ini lebih erat
berhubungan dengan Ambon dari pada dengan daerah-daerah lainnya.
Belum ada penelitian yang mengungkapkan apakah jaringan-jaringan
tradisionil seperti disebut diatas itu juga terputus karena do-
minasi Gubernur VOC di Ambon itu.

Sebenarnya tidaklah mengherankan mengapa sejak kira-kira tahun-tahun 1618 VOC mulai menaruh perhatian kepada kepulauan Lease. Ketika VOC tiba di Ambon pada tahun 1605 rupanya kepulauan ini belum berarti baginya dilihat dari sudut perdagangan rempah-rempah. Ketika J.P. Coen berkunjung ke Maluku Tengah pada tahun 1613 ia melaporkan kepada para Direktur VOC di Nederland bahwa "Benteng Amboina menguasai beberapa negeri yang terletak disekitarnya dan beberapa pulau yang terletak disebelah timurnya [yang dimaksud adalah kepulauan Lease]. Pulau-pulau ini samasekali tidak menghasilkan cengkeh dan disekitar benteng hanya sedikit sekali."[15] Tetapi pada tahun 1617 van der Haghen melaporkan bahwa sejak sepuluh tahun yang lalu cengkeh mulai ditanam di beberapa tempat di kepulauan itu yang pada tahun itu mulai berubah. Ia khawatir jangan-jangan penduduk di situ akan menjualnya ke Seram pada pedagang-pedagang Asia dan karena itu ia minta izin untuk menempatkan pos-pos penjagaan di sana.[16] Setahun kemudian van der Haghen melaporkan bahwa dua buah pos telah ditempatkan masing-masing di Hatuaha dan di Iha Mahu, hanya di Nusalaut yang belum.[17] Dari beberapa berita ini nampaklah kenyataan bahwa sebenarnya yang pertama kali menanam cengkeh di Lease adalah penduduk yang beragama Islam yang dengan sendirinya lebih senang menjualnya kepada pedagang-pedagang Asia yang mendatangi daerah kekuasaan Gimelaha. Dari kenyataan ini tidaklah sulit bagi kita untuk menarik kesimpulan bahwa daerah tersebut diatas akhirnya juga akan terseret kedalam pertentangan mengenai perdagangan di Maluku Tengah yang berlangsung antara Gimelaha dan para Sangaji melawan Gubernur VOC di Ambon.

Dengan munculnya van Speult pada tahun 1618 VOC mengadakan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap kepulauan Lease, atau tepatnya tempat-tempat di kepulauan Lease yang beragama Islam. Tindakan-tindakannya, seperti nampak dalam surat-menyuratnya, mendapat sokongan penuh dari Coen yang sementara itu juga telah diangkat sebagai Gubernur Jendral. Malah agar van Speult mendapat keluasaan yang lebih besar untuk menjalankan tindakan-tindakannya, Coen mangangkatnya menjadi Gubernur di Ambon menggantikan van der Haghen yang tidak sampai satu tahun memegang jabatan itu. Untuk itu Coen mengabaikan perintah para Direktur VOC di Nederland agar Frederik de Houtman-lah yang diangkat sebagai pengganti van der Haghen. Betapa pentingnya tindakan ini dapat kita sadari pula dari kenyataan bahwa Frederik de Houtman adalah Gubernur VOC yang pertama di Ambon (sejak 1605) dan yang diangkat oleh van der Haghen sendiri sebelum ada seorang Gubernur Jendral di sana. Maka jelaslah bahwa keadaan telah sangat berubah dari sepuluh tahun pertama dari abad ke tujuhbelas. Admiral van der Haghen yang rupanya merasa kecewa juga minta diberhentikan dan kembali ke Nederland pada tahun 1619.

Selama memangku jabatan gubernur VOC di Ambon (1620-1625) van Speult melandaskan segala tindakan ekspansinya atas ketentuan-ketentuan legalistis: perjanjian-perjanjian itu diinterpreta-

sikannya berdasarkan tradisi-tradisi hukum yang sedang berlaku di Eropa. Hal ini berbeda dengan pihak Ternate yang dengan sendirinya mempunyai latar belakang yang lain pula. Sebenarnya sebelum ia menjabat gubernur itu telah ada laporan-laporannya yang menunjukkan bahwa ia akan mengambil jalan itu. Dalam ekspedisinya ke Seram Selatan pada tahun 1619 ia bertemu dahulu dengan Gimelaha Sabadin di Hoamoal untuk membicarakan status daerah yang akan dikunjunginya itu. Rupanya pada waktu itu Gimelaha Sabadinpun berada dalam keadaan siap untuk berperang karena van Speult menemukan suatu hongi yang besar yang terdiri dari 30 kora-kora dan 50 buah perahu yang lebih kecil. Dalam pembicaraannya dengan Gimelaha ia mengemukakan pendapatnya bahwa pantai Selatan Seram antara Kaibobo dan Toluti termasuk wilayah kekuasaannya karena daerah itu telah termasuk dalam kekuasaan Portugis yang ditumbangkan VOC pada tahun 1605. Ia selanjutnya menuduh Gimelaha Sabadin dan Khatib Hidayat sebagai pihak yang bersalah karena telah mencoba menempatkan pemuka-pemuka agama Islam di daerah itu. Agar tuduhan-tuduhannya itu jelas dan terperinci ditulisnya diatas kertas untuk dipelajari Gimelaha Sabadin, bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Sabadin menjawab bahwa sepanjang pengetahuannya daerah itu termasuk kekuasaan Ternate. Hal mana dijawab oleh van Speult lagi bahwa sekalipun gubernur-gubernur VOC sebelum dia mengabaikan daerah itu janganlah dikira bahwa VOC telah melepaskan haknya atas daerah itu. Atas ancaman ini maka Gimelaha Sabadin mengajukan agar persoalan itu jangan diperbesar dan agar diputuskan saja dalam suatu perundingan khusus antara Gubernur Jendral dan Sultan Ternate. Tetapi van Speult meneruskan perjalanannya juga.

Sesampainya di Lease van Speult menemukan keadaan yang genting pula. Penduduk yang beragama Islam di daerah itu ternyata telah bersatu dengan Gimelaha Sabadin untuk menentang usaha-usaha van Speult. Demikian pula para pejabat negeri-negeri di Seram Selatan. Malah ada berita bahwa kerajaan Banten bersedia membantu mereka dalam usaha ini.[19]

Faktor agama makin jelas menonjol sejak masa van Speult ini; namun faktor ini mempunyai corak tertentu yang berhubungan dengan keadaan pada waktu itu.[18] Dari pihak Gimelaha dan para Sangaji faktor agama ini tidak pernah dilihat sebagai suatu faktor yang berdiri sendiri, seperti halnya dengan penglihatan kebanyakan dari pejabat-pejabat VOC terhadap agama mereka sendiri. Corak pikiran ini menonjol sekali dalam dokumen-dokumen yang berupa laporan-laporan dari para pejabat VOC. Secara konkrit nya persoalan ini dapat kita lihat dalam apa yang dalam dokumen-dokumen VOC dinamakan Limytscheidinge, atau batas wilayah kekuasaan. Bagi orang-orang Ternate batas kekuasaan mereka tidak ditentukan secara topografis dengan ketentuan-ketentuan legislatis berdasarkan tradisi hukum di Eropa ketika itu. Mereka rupanya tidak dapat menerima bahwa ada daerah-daerah yang penduduknya memeluk agama Islam harus dikuasai oleh VOC, sekalipun dalam per-

janjian-perjanjian tertulis yang pernah dibuat kenyataan itu dapat disimpulkan.

Apabila kita tinjau perjanjian-perjanjian tertulis yang pernah dibuat antara VOC dan pihak Ternate, maka jelaslah bahwa kriteria untuk menentukan batas-batas kekuasaan ini berlainan samasekali. Dalam perjanjian tahun 1609 yang dibuat oleh Vice Admiral Wittered tersebut jelas diakui bahwa kerajaan Ternate adalah sekutu VOC, jadi gubernur VOC tidak berwewenang dalam daerah yang diperintah oleh Gimelaha itu kecuali dalam soal monopoli cengkeh. Tetapi dalam perjanjian ini tidak dijelaskan dengan terperinci daerah-daerah mana yang termasuk kekuasaan Gimelaha itu. Hanya terdapat ketentuan bahwa apabila penduduk dari satu daerah melarikan diri ke daerah lain maka para penguasa berkewajiban untuk mengembalikan mereka ke daerah asal mereka. Rupanya ketentuan yang berdasarkan hukum perang di Eropa, yakni bahwa daerah-daerah yang tadinya dikuasai oleh Portugis kini secara syah dikuasai oleh VOC dijadikan landasan utamanya dalam hal batas wilayah ini. Dan seperti kita ketahui di atas, ketentuan inilah yang sama sekali tidak dapat diakui oleh pihak Gimelaha seperti yang dinyatakan oleh Gimelaha Sabadin kepada van Speult. Memang dalam tahun itu (1609) Gubernur de Houtman pernah mengadakan perjanjian-perjanjian tertulis dengan beberapa negeri di daerah yang dipersengketakan itu, yakni pertama-tama dengan Hatuaha dan kedua dengan Seram Selatan,[20] dimana jelas ditulis bahwa penguasa daerah-daerah itu mengakui kekuasaan VOC atas wilayah mereka berdasarkan kenyataan bahwa sebelumnya Portugis telah berkuasa di situ. Namun bahwa pihak Ternate mempunyai pandangan lain dalam hal terakhir ini pula nampak dari salah satu surat sultan Ternate kepada penduduk Hatuaha yang pada pokoknya menclaim kekuasaan Ternate atas daerah itu dan memperingatkan penduduknya bahwa mereka beragama Islam. Demikian pula agaknya tujuan dari sultan Ternate untuk memperingatkan Kapitan Hitu bahwa ia masih merupakan salah satu dari anggauta dewan kerajaannya, dan dengan demikian menyatakan kekuasaan Ternate atas Hitu.[21] Karena titik tolak dari kedua belah pihak telah sangat berlainan maka penyelesaian persoalan Limytscheidinge tidak dapat diselesaikan berdasarkan perundingan-perundingan tetapi harus diselesaikan dalam peperangan-peperangan pula.

Pada mulanya persoalan ini hendak diselesaikan dengan jalan diplomasi pula oleh Gubernur Jendral Coen dalam tahun 1621. Sekembalinya dari ekspedisi ke kepulauan Banda Coen memanggil semua penguasa di kepulauan Ambon dan Lease untuk bertemu dengannya dibenteng VOC Ambon. Disana masing-masing penguasa itu menyatakan secara terbuka bahwa mereka mengakui VOC sebagai kekuasaan tertinggi diwilayah mereka. Yang tidak hadir dalam pertemuan itu selain para Sangaji dan Kipati juga para penguasa dari pantai selatan pulau Seram yang sedang dipersengketakan itu.[22] Sebenarnya Gimelaha Hidayat (1620-24) mempunyai niat untuk bertemu dengan penguasa VOC itu, tetapi mungkin setelah ia mendengar tindakan-tin-

dakan Coen terhadap orang-orang Banda, maka niatnya itu dibatalkannya.[23] Namun sebelum Coen meninggalkan Ambon ke Batavia ia telah mengirimkan sebuah nota kepada Gimelaha Hidayat untuk menanyakan status daerah di Seram Selatan itu. Gimelaha tetap pada pendirian yang telah diberikan oleh Gimelaha Sabadin sebelumnya, yaitu bahwa daerah itu termasuk kekuasaan kerajaan Ternate.[24]

Van Speult rupanya tidak sependapat dengan Gimelaha Hidayat karena segera setelah Coen meninggalkan Ambon ia mengumpulkan sebuah hongi yang besar untuk mengadakan ekspedisi ke Seram Selatan. Penduduk negeri-negeri di sana melarikan diri ke pegunungan untuk menghindari bahaya maut dan satu per satu negeri-negeri mereka dibakar. Yang menjadi inceran utama dari van Speult adalah perahu-perahu dari pedagang Asia yang banyak terdapat di sana. Akhirnya ia mendirikan suatu benteng di negeri Swako yang katanya untuk mengawasi para pedagang itu.[25]

Mungkin karena kedahsyatan hongi dari van Speult tersebut maka daerah-daerah lainnya yang tidak hadir dalam pertemuan dengan Coen itu mulai merubah pendirian mereka. Yang pertama adalah para Sangaji dari pulau Manipa. Kepada van Speult mereka kirim utusan yang menyampaikan keinginan mereka untuk membuat suatu perjanjian tertulis dengan VOC yang menyatakan bahwa daerah mereka juga termasuk wewenang Gubernur VOC di Ambon. Sebelum meluluskan keinginan mereka itu van Speult bertolak ke Hoamoal untuk merundingkannya dengan Gimelaha di sana. Van Speult mengemukakan pada Hidayat bahwa permintaan para Sangaji itu ada alasannya karena menurut penglihatannya pulau Manipa tidak termasuk dalam kekuasaan kerajaan Ternate. Pulau ini hanya mempunyai hubungan persekutuan dengan Lesidi dan Kambelo yang terletak di jazirah Hoamoal dan yang memang termasuk dalam kekuasaan kerajaan Ternate. Dengan demikian permintaan para Sangaji tersebut dapat diterimanya. Sanggahan Hidayat tidak disebut oleh laporan yang dibuat oleh van Speult; demikian pun laporan-laporan lainnya dari pejabat-pejabat VOC yang dipakai untuk membuat karangan ini tidak dapat memberi ketentuan apakah alasan van Speult itu benar. Betapapun juga perjanjian yang dimaksud itu terbuat juga pada tahun 1622.[26] Bahwa hubungan antara pulau Manipa dengan kekuasaan Ternate memang agak renggang memang jelas dari kejadian-kejadian selanjutnya. Malah ketika Sultan Hamzah berkunjung ke Maluku Tengah dalam tahun 1638 ia menganggap perlu mengadakan pergantian atau reorganisasi kekuasaan disana.[27]

Daerah kedua yang mendekati van Speult adalah para Sangaji dari pulau Buru. Seperti halnya dengan di pulau Manipa, di sinipun terdapat dua orang Sangaji, yang satu berkedudukan di Tuban dan yang kedua di selatannya.[28] Kedua pejabat itu mengirimkan utusan-utusan mereka kepada van Speult untuk merundingkan keinginan mereka. Malah disebut pula bahwa pulau Kelang juga termasuk kekuasaan mereka dan sebab itu harus dimasukkan pula dalam perjanjian yang akan dibuat. Sebelum menyetujui permintaan itu van Speult mengadakan hubungan dengan Hidayat lagi. Tetapi karena Gi-

melaha ini telah sakitan - ia menjadi Gimelaha pada usia yang cukup lanjut - maka dikirim adiknya yang bernama Jou Nai, dan Saudaranya yang bernama Leliato. Bagaimana pandangan pihak Ternate juga tidak jelas dalam laporan yang dibuat oleh van Speult namun maksud itu dilaksanakan juga. Malah pada masa ini Gubernur Jendral de Carpentier dapat melaporkan kepada para Direktur VOC di Nederland bahwa VOC telah menguasai pulau Buru, pulau Ambalau pulau Manipa, pulau Haruku, pulau Nusa Laut dan Seram Selatan.[29]

Tantangan yang besar terhadap perluasan kekuasaan VOC datangnya dari Gimelaha Leliato (1624-19) yang menggantikan Hidayat. Ia menganggap bahwa perjanjian-perjanjian yang telah dibuat semasa van Speult itu tidak syah dan melancarkan serangan-serangan ke daerah-daerah yang telah membuat perjanjian-perjanjian itu dan kenegeri-negeri yang beragama Kristen yang dikuasai VOC. Ajakan van Speult untuk mengadakan perundingan ditolaknya untuk sementara waktu dengan alasan bahwa ia hendak ke keraton karena dipanggil oleh sultan Ternate.[30]

Sekembalinya dari Ternate Gimelaha Leliato mengajak VOC mengadakan perundingan mengenai keadaan di Maluku Tengah. Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti mengapa ia mengambil tindakan ini dan apa yang diharapkannya dari perundingan-perundingan itu. Yang jelas adalah bahwa persoalan ini telah dirundingkannya dahulu dengan sultan Ternate karena dalam perundingan itu turut pula seorang utusan istimewa dari keraton serta seorang pejabat kerajaan lainnya yang disebut Ngofamanira. Dalam perundingan yang diadakan dalam tahun 1626 itu VOC diwakili oleh Gubernur van Gorcum yang menggantikan van Speult.

Perundingan ini ternyata mengalami jalan buntu. Mula-mula van Gorcum menuntut agar tawanan-tawanan perang dilepaskan dahulu sebelum diadakan perundingan mengenai persoalan yang pokok. Dalam perundingan dia mengusulkan agar Leliato mengusir dahulu semua pedagang Asia yang bermukim di kota-kota pelabuhan di Hoamoal, hal mana dengan sendirinya ditolak oleh Leliato. Karena persoalan pokok, yaitu Limytscheidinge tidak bisa diselesaikan juga maka Leliato mengusulkan agar sultan Ternate dan Gubernur Jendral VOC mengadakan pertemuan untuk membicarakannya.[31]

Untuk kepentingan sejarah ada suatu persoalan yang penting yang muncul akibat perundingan ini. Menurut Valentijn[32] pada suatu kesempatan Leliato pernah mengajukan sepucuk nota kepada pihak VOC yang berisi nama-nama dari daerah yang dianggapnya termasuk kekuasaan Ternate. Daerah-daerah itu adalah :

1. Sebagian dari jazirah Hitu, dari Tial sampai ke Wakasihu;
2. "Pertuanan" Hatuaha di pulau Haruku;
3. "Pertuanan" Iha dan Mahu di pulau Saparua;
4. Pantai selatan pulau Seram, serta jazirah Hoamoal, dan pulau-pulau Buru, Manipa, Kelang, Boano dan Ambalau.

Sementara itu pada tahun 1627 terjadi suatu perubahan di keraton Ternate yang akhirnya akan berakibat jauh di Maluku Tengah. Sultan Modafar meninggal pada tahun itu dan Soasiwa atau dewan ke-

rajaan memilih Kaicili Hamzah sebagai penggantinya (1627-46). Tindakan Soasiwa ini sebenarnya merubah keadaan politik pada masa itu. Selama Sultan Modafar memerintah hubungan keraton Ternate de ngan VOC sangat baik. Hubungan persekutuan antara kedua kekuasaan itu juga dibina sejak Modafar naik tahta pada tahun 1607. Namun yang memerintah sebenarnya adalah pejabat-pejabat lainnya, bukan Modafar. Yang terutama adalah Kaicili Ali yang berhasil membangun hubungan persekutuan dengan VOC sejak tahun 1607. Menurut pandangan para Gubernur VOC di Ternate pribadi sultan Modafar sangat lemah dan mereka lebih menyukai Kaicili Ali. Ketika Soasiwa sedang mengadakan perundingan untuk memilih pengganti Modafar VOC juga telah mengusulkan agar Kaicili Ali-lah yang dipilih.

Kenyataannya adalah bahwa Soasiwa memilih Kaicili Hamzah. Seperti halnya dengan Sultan Said dan Sultan Modafar serta para Gimelaha di Maluku Tengah, Kaicili Hamzah berasal dari keluarga Tomagola pula. Keluarga inilah sebenarnya yang berhasil menjadikannya sultan Ternate. Namun terdapat banyak pihak yang kurang menyetujuinya. Antara lain pihak VOC. Ini disebabkan karena ia lama sekali berdiam di Manila, mungkin sejak tahun 1606 ketika pamannya, Sultan Said, diangkut oleh armada Spanyol ke sana. Ia baru kembali di Ternate beberapa saat sebelum Modafar meninggal sehingga VOC menyangka bahwa ia datang dengan maksud untuk mengusir mereka dari kerajaan Ternate dengan bantuan Spanyol. Dalam surat pejabat VOC di Ternate ketika itu ia malah disebut sebagai telah "dispanyolisir" (gespanyoliseert)[33]. Pejabat-pejabat VOC kemudian selalu menyangka bahwa setiap saat akan muncul suatu armada Spanyol lagi untuk membantu orang-orang Ternate mengadakan pemberontakan. Nama Hamzah baru direhabiliter dikalangan VOC setelah ia bertemu dengan Gubernur Jendral van Diemen di Ambon pada tahun 1638.

Yang menimbulkan perubahan sejak naiknya Hamzah ke tahta kerajaan Ternate ialah, berbeda dengan Modafar, ia mempunyai pribadi yang sangat kuat. Dia sendirilah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari dan samasekali tidak bergantung kepada Jogugu atau Kapitan Lautnya, dan dengan gigihnya ia mempertahankan agar keinginannya dipatuhi. Sifat inilah yang membawa perobahan di kalangan keraton, dan sifat ini pula yang menimbulkan perubahan dalam kedudukan Ternate di Maluku Tengah, karena ketika desakan-desakan ini (terutama dari Soasiwa) tidak diatasinya sendiri maka ia mulai mencari bantuan kepada VOC; VOC juga mempergunakan kesempatan itu untuk memaksakan konsesi-konsesi daripadanya mengenai Maluku Tengah. Dalam keadaan seperti itu lahirlah perjanjian 1638 yang akan dibentangkan nanti.

Sebenarnya sejak semula Sultan Hamzah telah menunjukkan keinginannya untuk bekerja sama dengan VOC. Persoalan limytscheidinge di Maluku Tengah telah dibicarakannya dengan pihak VOC di Ternate pada tahun 1628 juga. Dalam laporannya ke Batavia pejabat VOC tersebut tidak membicarakan dengan panjang lebar apa yang mereka rundingkan pada waktu itu. Namun hasilnya adalah bahwa Lak-

samana Kaicili Ali diperintahkan untuk ke Maluku Tengah untuk menyelesaikan persoalan itu.[34] Menurut Tiele[35] tindakan Hamzah ini sebenarnya bertujuan untuk mengusir tokoh yang sangat pro-VOC itu dari keraton sehingga ia dapat bertindak dengan leluasa di sana. Apabila kita membaca surat-surat pejabat-pejabat VOC kepada Gubernur Jendral VOC di Batavia yang ditulis sekitar tahun-tahun itu memang nampak adanya kecurigaan terhadap Hamzah seperti yang telah disebut diatas. Dan berdasarkan kecurigaan itu saja kita memang mudah mengambil kesimpulan seperti yang diambil oleh Tiele itu. Namun bagaimanapun juga persoalannya adalah lebih rumit lagi. Selain tugas ke Maluku Tengah Kaicili Hamzah memberikan tugas-tugas lain lagi yaitu merebut kembali daerah-daerah kerajaan Ternate yang telah diduduki oleh kerajaan Makasar, seperti umpamanya pulau Buton. Apabila kita tinjau surat-menyurat pejabat-pejabat VOC sekitar tahun 1628 itu maka nampak bahwa ancaman perluasan kekuasaan kerajaan Makasar bagi kerajaan Ternate tidak mereka rasakan sehingga tidak nampak dalam tulisan-tulisan tersebut. Namun betapa seriusnya pihak keraton menganggap persoalan ini akan kita lihat nanti dalam peristiwa-peristiwa yang berkisar sekitar tahun 1638 ketika persoalan Maluku Tengah itu mulai dibahas oleh Hamzah sehingga pandangannya mengenai hal ini tercatat oleh pejabat-pejabat VOC tersebut. Namun dugaan Tiele tersebut tidak bisa kita kesampingkan begitu saja karena sudah tentu ada persaingan antara orang yang dipercayai oleh VOC itu dengan orang yang telah lama berdiam di Manila, pusat dari unsur unsur yang menentang VOC di Maluku.

Laksamana Kaicili Ali tiba di Maluku Tengah pada tahun 1628 pula. Segera diadakannya perundingan dengan Gubernur VOC di sana seperti yang telah direncanakan dengan Gubernur VOC di Ternate bersama dengan Sultan Hamzah. Hasil perundingan itu di cantumkan pula dalam suatu perjanjian tertulis.[36] Perjanjian 1628 ini bagi VOC merupakan suatu langkah yang besar dalam sejarah monopolinya di Maluku, terutama apabila kita bandingkan dengan perjanjian yang sebelumnya (1609). Dalam perjanjian itu ditentukan bahwa pedagang-pedagang non-VOC (Asia dan Eropa) tidak saja dilarang membeli dan mengangkut cengkeh, tetapi mereka tidak diperkenankan samasekali memasuki perairan Maluku Tengah kecuali dengan izin yang dapat diperoleh dari VOC di Ambon. Tempat-tempat yang dapat mereka kunjungi dengan surat izin itu ditentukan pula. Yang aneh adalah bahwa limytscheidinge itu tidak di selesaikan tetapi ditentukan bahwa Gubernur Jendral dan Sultan Ternate akan mengadakan pertemuan khusus untuk membicarakannya.

Apabila kita periksa satu persatu laporan-laporan pejabat-pejabat VOC itu maka sebenarnya tidaklah mengherankan mengapa mereka menekankan penyelesaian persoalan Maluku Tengah itu dengan membatasi kesempatan bergerak dari pedagang-pedagang non-VOC. Seperti telah kita lihat di atas maka sebenarnya hal itu telah di inginkan sejak pertama kali VOC tiba di sana, namun rupanya pada waktu itu mereka belum mempunyai pandangan yang konkrit mengenai

pedagang-pedagang itu. Dalam dokumen-dokumen tersebut diatas dapat kita melihat betapa pengertian itu berangsur-angsur timbul. Pertama-tama van Speult yang gigih memerangi mereka telah mengunjungi Makasar dalam perjalanan ke Batavia setelah selesai menjabat Gubernur di Ambon. Dalam suratnya kepada Gubernur Jendral ia melukiskan pertemuannya dengan Sultan Makasar. Sultan tersebut mengatakan bahwa yang menjalankan perdagangan ke Maluku Tengah itu bukan rakyatnya sendiri tetapi orang-orang Melayu yang berdiam di sana dan yang tidak terikat pada peraturan-peraturan kerajaan. Mereka biasa berdagang kemana saja mereka inginkan dan sultan Makasar tidak berwewenang untuk menghalangi mereka.[37] Kemudian keadaan kotapelabuhan Makasar menjadi lebih jelas bagi VOC ketika seorang Gujarat yang tiba di Ambon menceritakan keadaan di sana kepada Gubernur VOC di Ambon.[38] Dikatakannya bahwa orang-orang Makasar yang mendatangi kota-kota pelabuhan di Maluku Tengah itu mendapat modal dari pedagang-pedagang Inggris, Portugis dan Denmark yang menetap di sana. Dengan modal yang dititipkan itu para nakhoda tersebut berani membayar cengkeh sebesar 180 realen setiap baharnya, hampir dua kali harga yang dibayar VOC. Selain itu apabila perahu-perahu Makasar itu gagal karena angin topan atau dicegat armada-armada VOC maka kerugian yang diderita itu menjadi tanggungan pihak yang memberikan modal. Tambahan pula cengkeh yang mereka bawa itu ditebus oleh pihak-pihak itu dengan harga yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian tidaklah mengherankan mengapa mereka makin hari makin giat mendatangi kepulauan Maluku Tengah. Dan tidak mengherankan pula apabila pada waktu perundingan dengan Kaicili Ali itu mereka dilarang memasuki daerah Gimelaha di Maluku Tengah tanpa izin dari VOC di Ambon.

Selain itu ada suatu sebab lain mengapa Makasar mulai mendapat perhatian yang khusus sejak tahun 1628. Yang dimaksud ialah ekspansi teritorial kerajaan itu ke Maluku Tengah. Dari laporan-laporan pejabat-pejabat VOC nampak pula bahwa pengertian mereka mengenai hal ini lambat sekali berkembangnya, malah kebanyakan tidak dapat membuat perbedaan yang jelas antara ekspansi perdagangan yang bersumber pada pedagang-pedagang Eropa tersebut dan ekspansi politik yang bersumber pada keraton Makasar. Usaha-usaha besar-besaran untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Makasar seperti umpamanya ekstirpasi yang dilakukan oleh armada VOC di Hoamoal dan Seram Selatan pada tahun 1625,[39] terutama dilakukan dengan maksud mencegah "perdagangan gelap" tersebut.[40] Betapa kurangnya pengetahuan para pejabat VOC mengenai keadaan interen dari kerajaan-kerajaan tersebut nampak dari desakan mereka kepada Kaicili Ali untuk menggantikan Gimelaha Leliatu sebagai penguasa di Maluku Tengah. Yang diangkat oleh Kaicili Ali adalah Gimelaha Luhu (1629-43)dan surat pengangkatannya dari sultan Ternate tiba pada tahun itu juga.[41] Nanti akan nampak bahwa Gimelaha Luhu justru akan menyokong usaha-usaha ekspansi teritorial kerajaan Makasar sedangkan Gimelaha Leli-

atu menolaknya. Tetapi untuk sementara rupanya Sultan Hamzahpun tidak mengerti akan hal itu.[42]

Dari laporan-laporan para pejabat VOC itu dapat pula kita ketahui bahwa sejak semula Makasar tidak hanya mempunyai perhatian pada persoalan perdagangan saja. Ketika Gubernur Jendral Coen menghancurkan kepulauan Banda pada tahun 1621 sebagian besar dari penduduknya melarikan diri ke Seram Selatan dan kepulauan Lease. Keadaan mereka rupanya sampai pula diketahui oleh Sultan Makasar sehingga ia mengirimkan sebanyak 22 jung ke Iha untuk menjemput mereka ke Makasar. Sebanyak kira-kira 1000 orang Banda dapat diangkut oleh jung-jung itu pada tahun 1624.[43] Kemudian ketika van Speult mengunjungi Sultan Makasar pada tahun 1625 nampak dari pembicaraan mereka bahwa sultan tersebut tidak memperhatikan perdagangan saja yang dikatakannya terletak dalam tangan orang-orang Malayu. Kemudian dokumen-dokumen VOC menunjukkan bahwa kerajaan Makasar berangsur-angsur mengadakan ekspansi kewilayah kerajaan Ternate dengan menduduki pulau Buton, beberapa bagian dari kepulauan Sula dan daerah-daerah Ternate lainnya yang terletak di pulau Sulawesi. Daerah-daerah ini tidak menghasilkan rempah-rempah sehingga dapat kita simpulkan bahwa motif ekspansi mereka tentu lain samasekali dari ekspansi perdagangan seperti yang diceriterakan oleh pedagang Gujarat tersebut di atas.[44]

Untuk sementara VOC menjalankan cara ekstirpasi untuk mencegah "perdagangan gelap" itu. Yang dimaksud dengan cara ini adalah penebangan pohon-pohon cengkeh dengan kekerasan, atau tanpa izin penguasa-penguasa yang bersangkutan. Tujuannya adalah agar tidak terdapat persediaan cengkeh yang lebih untuk diperdagangkan kepada pedagang-pedagang dari Makasar itu. Cara ini terutama dijalankan sejak Gijsels menjabat sebagai Gubernur VOC di Ambon (1631-34). Mungkin sekali sejak itu cara ini telah merupakan hal yang disetujui oleh pimpinan VOC di Batavia karena ketika Gijsels bertolak dari Batavia ke Ambon ia dilengkapi dengan suatu armada yang kuat dengan jumlah tentara yang cukup.Segera setelah mereka mendekati Maluku Tengah diadakan persiapan untuk ekstripasi di Hoamoal dan pulau-pulau disekitarnya yang termasuk dalam pengaruh Gimelaha. Dalam salah satu ekspedisi di pulau Manipa mereka menemukan tempat penimbunan beras dari para pedagang Makasar, hal mana menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya persiapan-persiapan yang dibuat oleh pedagang-pedagang itu untuk mendapatkan cengkeh.[45] Dalam bulan-bulan berikutnya Gijsels mengulangi lagi tindakan - tindakan itu sekalipun tidak disertai oleh suatu armada yang kuat seperti semula. Sejak tahun 1631 sistem ekstirpasi itu telah merupakan alat yang ampuh yang selalu dijalankan para Gubernur VOC di Ambon.

Suatu hal lain yang rupanya dimulai dengan sungguh-sungguh sejak tahun 1631 ialah penggempuran kepulauan Seram Laut. Daerah ini merupakan matarantai yang penting dalam hubungan kepulauan Maluku Tengah dengan kepulauan sekitar Irian. Selain itu

dari kepulauan ini terdapat pula hubungan yang ramai dengan kepulauan Maluku Tenggara. Tetapi yang menarik perhatian VOC pada saat ini yalah karena kepulauan ini mulai dipakai oleh pedagang-pedagang dari Makasar setelah keadaan disebelah barat (sekitar Hoamoal) mulai diawasi secara ketat sekali oleh VOC.[46] Kemudian Gijsels menulis ke Batavia untuk dikirimkan suatu armada yang besar untuk menggempur pemukiman-pemukiman di kepulauan itu. Dalam tahun 1633 keinginan itu terkabulkan karena kebetulan datang sebuah armada yang dipergunakan untuk menghancurkan Keffeng yang dianggap menjadi pusat perdagangan itu.[47] Betapa ramainya perdagangan disini dapat kita lihat apabila kita memeriksa laporan yang diberikan oleh Gijsels mengenai ekspedisi itu. Jumlah jung-jung yang tidak sempat melarikan diri sebelum armada Gijsels tiba di Keffeng adalah 18 buah, diantaranya dua buah dari orang-orang Malayu, enam buah dari orang-orang yang berasal dari Makasar, Banten dan Japara serta Gresik. Setelah ekspedisi ini Gijsels mendekati Gimelaha Luhu untuk memperbincangkan keadaan di sana. Sekalipun daerah yang digempur itu tidak termasuk dalam wilayah kekuasaan Gimelaha Luhu, namun nampak bahwa pejabat kerajaan Ternate itu samasekali tidak senang dengan tindakan-tindakan tersebut. Dalam laporannya mengenai pertemuan ini Gijsels malah minta agar dikirimkan armada lain lagi dengan maksud yang sama.[48]

Namun dari laporan-laporannya nampak bahwa Gijsels tidak mengerti bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Makasar itu sebenarnya ada dua macam. Ia belum mengerti bahwa disamping kegiatan perdagangan yang sebenarnya bersumber pada pedagang-pedagang Eropa yang berkedudukan di Makasar, terdapat pula kegiatan-kegiatan ekspansi teritorial kerajaan Makasar yang bersumber di keraton Makasar. Dalam laporannya pada tahun 1632[49] umpamanya, ia hanya berceritera mengenai peranan Seram Laut sebagai pusat perdagangan nusantara. Kesana tidak saja datang nakhoda-nakhoda Makasar tetapi juga pedagang-pedagang yang berasal dari Johor, Pahang, kepulauan Lingga, dan Gresik, Bukit, Jaratan dan Sedayu. Dari Seram Laut mereka mendatangi Hoamoal dan pulau-pulau disekitarnya dengan menumpang perahu-perahu kecil atau menunggu penduduk daerah itu datang kepada mereka dengan membawa cengkeh dalam perahu-perahu pula. Mereka sangat disenangi oleh Gimelaha Luhu dan para Sangaji-nya. Rupanya ekspedisi-ekspedisi yang telah dilancarkan itu tidak berhasil melumpuhkan "perdagangan gelap" itu karena hanya kebun-kebun yang terletak dipinggir pantai saja yang dapat dikunjungi tentara VOC, sedang dipedalaman masih banyak dihasilkan cengkeh. Perhatian yang sedemikian banyak dicurahkan kepada kepulauan Seram Laut itu menutupi satu kenyataan lain, yaitu ekspansi teritorial kerajaan Ternate yang sebenarnya dimulai dari arah barat dan mengikuti jalan perniagaan yang tradisionil.

Sementara itu diantara pejabat kerajaan Ternate di Maluku Tengah mulai timbul keretakkan pula. Gimelaha Luhu yang tadinya

diangkat untuk menggantikan Gimelaha Leliato yang tidak mau melaksanakan perjanjian tahun 1628 itu - perjanjian yang membatasi perdagangan yang berpusat di Makasar - kini mulai mengambil langkah-langkah yang akhirnya menjadikannya penyokong politik ekspansi teritorial Makasar. Langkah-langkah itu bermula dari politik ekstirpasi VOC tersebut; penduduk rupanya mulai menyatakan ketidak senangan mereka dengan keadaan. Salah satu tanda yang jelas dari beralihnya perhatian Gimelaha Luhu ialah hubungan perkawinannya dengan anak Kapitan Hitu dan adik Kakiali yang kemudian akan menjabat Kapitan Hitu. Dalam upacara perkawinan, yang juga dihadiri oleh salah seorang utusan dari Gubernur VOC di Ambon, nampak adanya suatu perasaan solidaritas antara penduduk dari negeri-negeri yang beragama Islam dalam perlawanan terhadap VOC. Dalam laporannya pejabat tersebut memperingatkan atasannya akan terjadinya suatu hal dikalangan penduduk tersebut.[50] Selain itu Leliatu, yang tadinya meninggalkan Hoamoal dan menetap di pulau Buru bersama pamannya, kini kembali nampak mendampingi Gimelaha Luhu. Dan dalam tahun 1633 Gimelaha Luhu mulai membangun perbentengannya di Loki dan Lesiela di Hoamoal. Dapat dikatakan bahwa sejak tahun 1633 terdapat suatu suasana permusuhan antara Gimelaha dengan VOC, permusuhan mana sering meletus menjadi peperangan. Gimelaha Luhu bertahan diperbentengannya tersebut sampai tahun 1637.

VOC sendiri pada mulanya mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan perantaraan Sultan Hamzah. Mungkin disebabkan oleh ekstirpasi-ekstirpasi yang dilancarkan oleh Gijsels itu maka soasiwa di Ternate mulai menunjukkan kesangsian mereka akan pimpinan Hamzah. Yang terutama diantara mereka ini adalah Jugugu dan Kapitan Laut sendiri dan Sangaji Toluko serta Sangaji Lumatau dan beberapa orang anggauta keluarga Tomagola.[51] Apabila kita membaca laporan-laporan dari Ternate maka nampak bahwa perasaan tidak puas ini sebenarnya telah mulai pada tahun 1631. Untuk menyelesaikan persengketaan di Maluku Tengah Hamzah pada mulanya mengirimkan seorang utusan istimewa untuk menanyakan kepada Gimelaha Luhu dan Leliato apa sebenarnya yang menimbulkan pertentangan baru itu. Persoalan ini dibicarakannya juga dengan Gubernur Ternate dan ia mengeluh tentang tindakan-tindakan VOC di daerahnya di Maluku Tengah. Yang dipersoalkannya adalah tindakan kekerasan terhadap para pedagang asing.[52] Hal ini agak aneh karena kita mengetahui bahwa perjanjian 1628, yang telah diratifisir oleh sultan dan Soasiwa, justru membatasi kegiatan pedagang-pedagang tersebut. Kemungkinan besar adalah bahwa VOC menyalah gunakan kekuasaan yang diberikan dalam perjanjian itu, yakni dengan tidak memberikan izin yang diperlukan untuk memasuki perairan Gimelaha.

Namun dalam tahun 1633 Hamzah mulai mengubah pikirannya. Dikirimkannya seorang utusan istimewa (Sadaha) dengan tugas untuk memecat Gimelaha Luhu dan memulangkannya bersama Leliato ke Ternate. Selain itu Sadaha tersebut juga harus membantu

VOC, mengusir pedagang-pedagang asing tersebut. Namun ternyata sesampainya di Maluku Tengah Sadaha ini juga mengubah pikirannya dan melakukan hal-hal yang sebaliknya. Dalam perundingan dengan Gubernur VOC di Ambon ia menuntut agar persoalan limytscheidinge dibicarakan dahulu, bukan rencana pengusiran pedagang-pedagang asing tersebut. Dan pendapatnya mengenai batas kekuasaan Gimelaha adalah seperti yang dikemukakan oleh Leliato dalam notanya yang disampaikan kepada VOC pada tahun 1626. Selain itu ia tidak memecat Gimelaha Luhu.

Sebab-sebab dari tindakan Sadaha ini tidak disebutkan dalam laporan Gubernur Gijsels.[53] Tetapi sebab-sebab itu mungkin dapat kita lihat dari surat Sultan Hamzah kepada Gubernur Jendral Brouwer di Batavia pada tahun 1634.[54] Dalam surat itu antara lain Hamzah mengatakan bahwa kekacauan yang timbul pada tahun 1633 di Maluku Tengah disebabkan karena tindakan-tindakan dari VOC. Selanjutnya tidak diberi penjelasan. Tindakan-tindakan apa yang dimaksud oleh Hamzah itu dapat kita lihat apabila kita baca laporan-laporan pejabat-pejabat VOC di Ambon dan Ternate. Telah disebut diatas bahwa pada saat ini Gijsels sedang mengadakan ekstirpasi-ekstirpasi; hal ini menimbulkan ketegangan sehingga pihak keraton dan VOC di Ternate memutuskan untuk mengirimkan Sadaha. Namun ternyata Sadaha bertindak bertentangan dengan rencana semula. Kekacauan yang menyebabkan Sadaha bertindak sedemikian itulah agaknya yang dimaksud oleh Hamzah dalam suratnya itu. Dan hal-hal yang menyebabkan Sadaha mengubah rencana tersebut adalah tindakan-tindakan VOC pula, dalam hal ini pimpinan armada VOC, van den Heuvel. Ia sebenarnyalah yang menganjurkan Hamzah untuk mengirimkan Sadaha, dan dalam perundingan-perundingan di Ternate ia juga hadir sehingga ia tahu benar apa yang harus dilakukan oleh Sadaha itu. Namun setelah ia tiba dengan armadanya di Ambon, ia menyetujui permintaan Gijsels untuk menggempur Keffeng. Seperti yang telah disebutkan diatas Keffeng sebenarnya tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Ternate, dan ini mungkin alasan mengapa pihak VOC bertindak demikian sekalipun ada seorang utusan istimewa dari keraton yang sedang mengusahakan penyelesaian pertikaian di Maluku Tengah. Namun, seperti yang telah disebut diatas, Gimelaha Luhu ternyata menyatakan kemarahannya terhadap Gijsels.[55] Demikian pula rupanya Sadaha, sekalipun pendiriannya tidak dapat kita ketahui dari dokumen-dokumen tersebut.[56] Seperti telah disebutkan diatas sejak tahun 1633 di Maluku Tengah mulai timbul perubahan dalam politik karena Gimelaha Luhu mulai mendekati kerajaan Makasar yang memang mempunyai niat untuk mengadakan ekspansi teritorial di sana.

Sebenarnya tindakan-tindakan Hamzah dengan menyetujui pengiriman Sadaha tersebut tidak semata-mata untuk membantu VOC menenangkan daerah yang menghasilkan cengkeh di Maluku Tengah. Ia mempunyai motif-motif tersendiri yang bersumber pada kekuasaannya; ia hendak menahan ekspansi kerajaan Makasar itu. Inilah sebabnya mengapa ia menyetujui untuk memecat Gimelaha Luhu dan memerintahkan Sadaha untuk membawanya kembali kekeraton bersama Leliato.[57]

Namun di Maluku Tengah telah terjadi perbedaan pendapat pula mengenai persoalan hubungan dengan kerajaan Makasar itu. Hal ini baru dapat kita sadari dari sebuah surat yang dikirimkan oleh Leliato kepada Hamzah pada tahun 1636, namun kemungkinan besar jauh sebelum itu telah terjadi hal-hal yang menyebabkan pertikaian itu. Dalam surat itu Leliato mengatakan bahwa ia telah mendirikan sebuah perbentengan baru "untuk melindungi agama kami".[58] Dan disebutkannya pula pihak-pihak mana di Maluku Tengah yang menyetujuinya dalam hal ini. Dukungan diperolehnya dari negeri-negeri pantai di sebelah timur jazirah Hoamoal dan negeri-negeri dipantai selatan Seram Barat sampai dengan Kaibobo. Selain itu negeri-negeri di pulau Ambon yang memihak padanya adalah negeri-negeri Kristen Larike, Wakasihu, Alang, Liliboi dan Hatu. Di kepulauan Lease terutama negeri-negeri yang terletak di sebelah utara dan yang penduduknya beragama Islam; demikian pula negeri-negeri yang terdapat di Seram Selatan yang berhadapan dengan negeri-negeri di Lease itu. Selain itu Tulukabesi, salah seorang pejabat kerajaan Hitu (yang kemudian akan memimpin perang Kapahaha) juga memihak padanya. Yang menentangnya adalah negeri-negeri di pantai barat jazirah Hoamoal dan pulau-pulau yang terbentang disekitarnya. Demikianpun Hitu yang dipimpin oleh Kapitan Hitu Kakiali juga tidak sependapat dengan dia. Mereka yang terakhir ini semua rupanya memihak pada Gimelaha Luhu yang sewaktu perbentengan tersebut dibangun sedang berada di keraton Ternate.

Perbedaan antara Gimelaha Luhu dan Leliato ini tidak terang disebut oleh pejabat-pejabat VOC yang rupanya tidak mengerti benar akan hal itu. Namun dapat kita lihat bahwa persoalan yang menyebabkan pertentangan ini ada hubungannya dengan bantuan-bantuan dari kerajaan Makasar. Bantuan ini sebenarnya diminta oleh kerajaan Hitu yang sejak awal abad ke tujuhbelas memang menyatakan dirinya tidak terikat pada kerajaan Ternate. Namun kita telah melihat bahwa Gimelaha Luhu kemudian mengadakan hubungan yang erat dengan Hitu, ia malah mengawini adik dari Kapitan Hitu Kakiali pada tahun 1633. Berkat hubungan ini maka tibalah bantuan tentara Makasar ke Hoamoal. Mereka mendirikan benteng di negeri Kambelo yang sejak semula memang telah merupakan pusat perdagangan non-VOC dan yang pernah digempur VOC dalam tahun 1615. Jumlah tentara ini adalah 2000 orang Makasar ditambah dengan 20 orang Portugis.[59] Jelas disebutkan tentara Makasar bukan pedagang-pedagang dari Makasar. Gimelaha Luhupun pindah ke Kambelo setelah perbentengannya di Loki dan Lesiela dihancurkan VOC pada tahun 1637. Mungkin karena hubungan Gimelaha Luhu dengan Makasar ini yang menyebabkan Hamzah memanggil Gimelaha itu kekeraton Ternate sehingga memberi kelonggaran bagi Leliato untuk menyusun partainya seperti yang disebutnya dalam surat tersebut. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa Leliato memihak pada Hamzah.

Sebelum ekspansi kerajaan Makasar ke Maluku Tengah ini menjadi kenyataan VOC telah mengambil tindakan-tindakan yang secara tidak langsung menghentikan seluruh gerakan itu. Pada tahun 1636

pula van Diemen diangkat menjadi Gubernur Jendral di Batavia. Ia terkenal sebagai seorang yang mempunyai kepribadian yang sangat kuat, seorang ulung dalam strategi perang, dan seorang yang secara konsekwen menjalankan policy yang telah digariskan oleh Coen. Terutama keinginan pimpinan VOC agar monopoli VOC di Maluku ditegakkan dengan cara apapun disokongnya. Tindakan pertama yang dilakukannya dalam hubungan dengan Maluku Tengah adalah mengunjungi daerah itu sendiri, suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh para Gubernur Jendral kecuali Coen. Pertama-tama yang dihadapinya di Maluku Tengah adalah penghancuran perbentengan Gimelaha Luhu di Hoamoal yang didirikan sejak tahun 1634 serta benteng-benteng lain yang diduduki tentara Makasar. Tetapi benteng di Kambelo tidak dihancurkannya.

Dalam laporannya kepada para Direktur VOC di Nederland mengenai kunjungan dalam tahun 1637 itu dikatakannya bahwa ekspedisi-ekspedisi yang dilakukannya di Maluku Tengah itu mendapat sokongan dari Hamzah. Selain itu Hamzah telah berkali-kali menyurat padanya agar diadakan perundingan mengenai limytscheidinge di Ambon atau dimana saja.[61] Syarat yang diajukan oleh Hamzah adalah keadaan seperti masa van der Haghen tiba di Ambon (1605). Van Diemen rupanya telah pula memberikan janji bagi Hamzah untuk mengadakan perundingan di Ambon pada bulan Januari tahun 1638.

Dalam bulan Januari 1638 van Diemen bertolak untuk kedua kalinya ke Ambon. Sesampai di Hoamoal ia mendapat berita ekspres dari Gubernur VOC di Ternate bahwa Hamzah dan rombongannya tertunda sebentar karena adanya sebuah eskader Spanyol diperairan Ternate. Baru dalam bulan April kedua tokoh itu berjumpa untuk pertama kalinya. Sebelum mengadakan perundingan-perundingan van Diemen menuntut kepada Hamzah untuk memerintahkan pejabat-pejabatnya mengusir semua orang asing yang berada di kota-kota pelabuhan di Hoamoal. Hamzah ragu-ragu; sebabnya tidak disebut dalam dokumen yang dipergunakan ini, tetapi kemungkinan besar ia menyadari bahwa yang termasuk orang-orang asing itu bukan saja pedagang-pedagang tetapi juga tentara Makasar yang berada di Kambelo. Karena itu maka van Diemen memerintahkan anak-buahnya untuk melakukan hal itu; sejumlah besar jung-jung pedagang-pedagang asing dapat mereka bakar. Selanjutnya van Diemen menuntut dari Hamzah agar Gimelaha Luhu dan Leliato, yang dianggapnya sebagai biangkeladi kerusuhan, ditangkap dan diserahkan kepadanya. Kedua orang itu memang berhasil di tangkap tetapi hanya Leliato yang diserahkan kepada van Diemen. (Ternyata kemudian ia dibawa ke Batavia untuk dihukum gantung di sana).[62]

Perundingan yang telah diidam-idamkan sejak Gimelaha Sabadin itu akhirnya berlangsung juga bertempat di Hila (Hitu). Hasil perundingan ini dicantumkan dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 1638.[63] Menurut mukadimahnya perjanjian ini hanyalah merupakan pengesahan dari semua perjanjian yang telah dibuat antara VOC dan pihak Ternate mengenai Maluku Tengah. Dengan demikian maka ternyata keinginan Hamzah agar sta -

tus di Maluku Tengah dikembalikan seperti masa van der Haghen ternyata tidak diterima VOC. Dalam pasal-pasalnya soal limytscheidinge ini dipertegas lagi. Ditentukan bahwa semua daerah yang secara syah telah mengakui kekuasaan VOC dengan membuat perjanjian-perjanjian tertulis harus tetap diperlakukan seperti yang disebut dalam perjanjian-perjanjian itu. Termasuk dalam hal ini adalah daerah-daerah yang membuat perjanjian pada masa van Speult, yakni pulau Buru, pulau Manipa, pulau Kelang dan pulau Boano, serta kota-kota pelabuhan Lesidi dan Lisabata di Hoamoal dan negeri-negeri di Seram Selatan serta Seram Laut. Dengan demikian Gubernur VOC di Ambon secara syah berkuasa atas jazirah Leitimor di pulau Ambon beserta kepulauan Lease dan daerah-daerah yang ditentukan dalam perjanjian itu. Dan dengan demikian pula hanyalah sebagian besar dari jazirah Hoamoal dan jazirah Hitu yang masih berada di luar kekuasaan VOC.

Dari pasal-pasal lain dari perjanjian tersebut nampak bahwa ada suatu tujuan lain lagi, yakni pengurangan kekuasaan Ternate di daerah Hoamoal tersebut. Ditetapkan bahwa Gubernur VOC di Ambon juga diberi wewenang untuk mengurus pelbagai hal di wilayah yang diperintah Gimelaha itu, sekalipun hal itu harus dilakukan dengan sepengetahuan Gimelaha. Selanjutnya ditentukan bahwa semua orang Ternate yang berada di daerah itu harus kembali ke Ternate, kecuali keluarga dari Gimelaha. Ini berarti bahwa penyokong-penyokong Gimelaha Luhu yang terdekat dipisahkan dari padanya.

Sekalipun Soasiwa memberikan persetujuannya kepada perjanjian ini, namun pada mulanya timbul tantangan-tantangan yang cukup berbahaya. Jauh sebelum Hamzah kembali ke keraton, Gubernur VOC di Ternate telah mendekati pejabat-pejabat tinggi keraton untuk menanyakan pendapat mereka mengenai perjanjian itu. Dilaporkannya bahwa Jogugu dan Hukom, dua pejabat tertinggi di keraton, mengatakan bahwa sebenarnya mereka telah menduga bahwa Hamzah akan terpaksa melakukan hal-hal itu. Yang tegas menyatakan ketidak setujuannya adalah seorang Hukom lain yang bernama Limuri.[64]

Perlawanan di Maluku Tengah lebih nyata lagi. Sebelum Hamzah meninggalkan daerah itu hal ini telah terjadi. Pangkal peristiwanya tidak dapat kita ketahui dari dokumen-dokumen VOC ini, tetapi tokoh utama dari perlawanan itu adalah Gimelaha Luhu. Pada waktu ini ia telah dipecat sebagai "wakil sultan" di Hoamoal dan untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari Hamzah mengangkat empat orang "Hamba Raja". Yang pertama bernama Sopi dan ditempatkan di kotapelabuhan Luhu, yang kedua bernama Longga di kotapelabuhan Lesidi, yang ketiga bernama Mardesa ditempatkan di pulau Manipa, serta yang keempat bernama Birahi dan ditempatkan di pulau Ambalau. Karena kecuali kotapelabuhan Luhu, tempat-tempat lain itu sebenarnya telah diserahkan VOC dalam perjanjian 1638 itu maka timbul pertanyaan apa sebenarnya tugas pejabat-pejabat ini. Kemungkinan besar mereka hanya bertugas untuk mengumpulkan upeti dari sultan.

Setelah Hamzah bertolak ke Ternate Gimelaha Luhu kembali lagi ke perbentengan di Kambelo yang belum dapat dihancurkan oleh van Diemen itu. Dari sana ia mengadakan perlawanan terhadap VOC dengan bantuan Makasar sampai tahun 1643. Perlawanan ini sejalan dengan pemberontakan kerajaan Hitu yang dipimpin oleh Kapitan Hitu Kakiali. Bantuan-bantuan dari Makasar juga diperoleh via kerajaan Hitu. Malah tercatat pada suatu ketika terdapat 12.000 orang tentara Makasar di Maluku Tengah.[64] Dalam hal ini Imam Rijali, yang kemudian terkenal dengan Hikayat Tanah Hitu-nya, memegang peranan yang penting sebagai perutusan ke keraton Makasar. Dari pihak VOC diadakan pula peningkatan militer terutama dibawah pimpinan Gubernur nya. Setelah melakukan beberapa kali penyerbuan ke pusat pertahanan Kakiali di perbentengan Wawani dan mencapai kegagalan terus, maka akhirnya dipakai siasat pengkhianatan. Pada tahun 1643 Kakiali terbunuh oleh seorang yang disangka adalah kawannya sendiri dan yang ternyata adalah orang sewaan dari VOC. Sebelum itu dalam tahun 1642 Gimelaha Luhu telah pula mengubah siasatnya dengan mencoba menawarkan perdamaian kepada VOC. Namun nasibnya ternyata berada dalam tangan Sultan Hamzah.

Ketika perlawanan Wawani-Kambelo sedang berkecambuk dengan hebatnya Gimelaha Luhu sendiri pernah memimpin suatu perutusan ke Makasar untuk mendapatkan bantuan tentara. Ini sebenarnya suatu tindakan yang sangat keliru karena ternyata diantara pengikut-pengikutnya sendiri terdapat banyak orang yang menentang tindakan semacam ini. Sewaktu Gimelaha itu sedang berada di Makasar mereka memilih beberapa orang yang dapat mewakili mereka untuk menghadap sultan Ternate untuk merundingkan hal ini. Apa yang mereka rundingkan pada tahun 1641 itu tidak dapat kita ketahui namun ekor dari kunjungan ini dapat kita ketahui karena Hamzah membicarakannya juga dengan wakil VOC di Ternate yang tentunya menulis ke Batavia untuk mendapatkan instruksi. Dalam perundingan itu terdapat pula admiral Caen yang menjadi pemimpin armada VOC yang pada waktu itu sengaja dikirimkan ke Ternate untuk menyelesaikan persoalan diatas. Dari laporan Caen ini kita mengetahui[66] bahwa terdapat suatu rencana untuk menggeser Gimelaha Luhu. Untuk itu dikirimkan seorang perutusan lagi ke Maluku Tengah karena Hamzah khawatir daerah-daerahnya akan diduduki oleh Makasar dan ia menyalahkan pejabat-pejabat VOC di Ambon akan terjadinya kemungkinan itu.

Caen dan armadanya bertolak ke Maluku Tengah dengan salah satu tugas yaitu menangkap Gimelaha Luhu dan mengembalikannya ke keraton Ternate. Namun rupanya Gimelaha ini lebih cerdik lagi. Ia telah mendekati Gubernur VOC di Ambon dan menyatakan bahwa peperangan telah selesai. Hamzah rupanya kemudian dapat menerima penyelesaian seperti ini seperti yang nampak dalam suratnya kepada Gubernur VOC di Ambon itu. Namun, entah apa sebabnya, tiba-tiba Gimelaha Luhu mengadakan serbuan-serbuan lagi. Kini Hamzah mengirimkan surat lain yang bersifat rahasia. Di dalamnya ia memberi izin kepada VOC untuk membunuh Gimelaha Luhu beserta keluarganya apabila ia menyerah atau tertangkap. Alasan yang diberikannya a-

dalah karena Gimelaha itu telah menyerahkan daerah-daerahnya kepada kerajaan Makasar. Kepada para Sangaji di Hoamoal ia mengirimkan sepucuk surat pada tahun itu juga (1642) untuk memperingatkan mereka agar tidak mengikuti jejak Gimelaha Luhu.[67]

Sebenarnya tindakan-tindakan Hamzah tersebut tidak diambil seorang diri saja tetapi dengan anjuran-anjuran dan desakan-desakan dari pihak VOC. Dalam laporan-laporan pejabat-pejabat VOC mengenai peristiwa ini kita tidak dapat menentukan sampai dimana Soasiwa berpengaruh atas Hamzah. Namun bisa diduga bahwa badan ini kurang sependapat dengan sultan mereka. Namun perlawanan yang terbuka dari badan ini atas sultan baru diadakan pada masa penggantiannya Hamzah yang mewarisi keadaan yang dibina di masa Hamzah.

Langkah-langkah selanjutnya dari Hamzah juga di buat dengan perantaraan pihak VOC. Pejabat VOC di Ternate itulah yang merupakan tokoh yang menginginkan digesernya Gimelaha Luhu dan ia pula yang mengajukan calon penggantinya, yaitu Majira. Majira adalah seorang yang masih keturunan Tomagola tetapi dibesarkan di Hoamoal; ia kurang kuat dibandingkan dengan Gimelaha-gimelaha lainnya sebab itu VOC menyukainya; selain itu ia telah terbiasa dengan keadaan yang telah berubah di Hoamoal dimana Ternate tidak lagi merupakan faktor yang terkuat di Maluku Tengah. Ketika Caen dengan armadanya kembali ke Ternate lagi maka rencana pengangkatan Majira dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur di Batavia.[68] Majira segera dinobatkan di masjid dan di keraton disaksikan oleh pejabat-pejabat keraton dan para Sangaji dari Ternate maupun dari Hoamoal. Pada tahun 1643 ia bertolak ke Hoamoal dengan menumpangi kapal perang dari Caen.

Masa pemerintahan Majira (1643-52) sebenarnya sudah tidak berarti lagi. Hal ini disebabkan karena pertama-tama kekuasaannya sudah tidak penuh karena berdasarkan perjanjian 1638 gubernur VOC juga berhak campurtangan dalam daerah kekuasaannya; kemudian berdasarkan perjanjian itu pula ditentukan bahwa daerah kekuasaannya itu hanya terbatas pada sebagian besar dari jazirah Hoamoal saja. Ketiga, sebelum bertolak ke Maluku Tengah Sultan Hamzah telah memberikan surat kuasa kepada admiral Caen untuk melakukan apa saja yang dianggapnya perlu untuk dilakukan di daerah kekuasaan Ternate di Maluku Tengah.[69] Tugasnya yang pertama adalah menangkap semua orang Ternate dan memulangkan mereka ke Ternate sesuai dengan bunyi perjanjian 1638. Kepada Gubernur VOC di Ambon Hamzah juga menulis agar ia bekerja sama dengan Majira.[70] Dan sementara itu Gubernur tersebut telah menjatuhkan vonis yang diberikan Hamzah kepada Gimelaha Luhu dan keluarganya pada tahun 1643. Dan akhirnya sebelum Caen bertolak lagi dari Maluku Tengah Hamzah juga telah mengirimkan surat kuasa yang sama kepada Gubernur VOC di Ambon itu.[71]

Dengan kekuasaan yang sedemikian luasnya itu Gubernur Demmer mulai bertindak untuk mengatasi seluruh perlawanan di Maluku Tengah, yaitu perlawanan yang berpusat di Hitu dan Hoamoal.[72] Pérta-

ma-tama yang dihadapinya adalah Tulukabesi yang meneruskan perlawanan dari Kakiali dengan berbenteng di Kapahaha (Hitu). Perlawanan ini baru dapat dipatahkan dalam tahun 1646. Hancurnya perbentengan Kapahaha ini sangat besar artinya bagi Maluku Tengah, terutama dalam perdagangannya. Sejak tahun 1646 itu tidak lagi nampak pedagang-pedagang dari Makasar . Dalam laporannya kepada para Direktur VOC di Nederland Gubernur Jendral van der Lijn menulis setiap tahun sampai 1650 bahwa tidak ada pedagang-pedagang yang memasuki perairan Maluku Tengah.[73] Terkepungnya Hoamoal dan penyerbuan-penyerbuan ke Seram Laut dan hancurnya beberapa negeri di sana dalam tahun 1645 merupakan faktor utama dari keadaan ini. Selain itu ekspansi politik Makasar yang berhubungan dengan Gimelaha Majira dan Kapitan Hitu Kakiali itu telah berakhir pula sekitar tahun 1642. Orang-orang Makasar meninggalkan daerah itu karena pembayaran dalam bentuk cengkeh untuk jasa-jasa mereka itu tidak pernah dipenuhi seluruhnya.

Selanjutnya masih perlu kita tinjau perjanjian yang dibuat pada tahun 1652.[74] Sebenarnya perkembangan sampai tahun 1646 itu telah merupakan titik yang menentukan bagi perkembangan selanjutnya di Maluku Tengah. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perjanjian 1652 ini merupakan akibat yang logis dari dibuatnya perjanjian tahun 1638. Dengan dibuatnya perjanjian 1638 itu sebenarnya secara de fakto VOC telah berkuasa diseluruh wilayah kerajaan Ternate di Maluku Tengah. Selain itu kehancuran Tulukabesi juga berarti hapusnya kerajaan Hitu dan dimasukkannya daerah itu dalam "Gouvernement van Amboina".

Perjanjian 1652 itu dibuat oleh Sultan Mandar Syah yang menggantikan Sultan Hamzah (1646-75). Faktor politik yang mendorong dibuatnya perjanjian ini adalah pemberontakan Soasiwa pada tahun 1650. Sejak masa Hamzah sultan telah bertentangan dengan dewan kerajaan ini dan sultan telah terbiasa untuk mendapatkan sokongan VOC dalam keadaan terdesak. Kinipun Mandar Syah melarikan diri ke benteng VOC di Ternate. Dengan demikian ia bergantung sepenuhnya kepada VOC. Persoalan ini dilaporkan oleh pejabat VOC di sana ke Batavia, dan Batavia memerintahkan Gubernur Ambon, de Vlaming, untuk menuju ke Ternate untuk menyelesaikan persoalan itu.

Namun sepeninggal de Vlaming di Hoamoal meletus pula suatu pemberontakan pada tahun 1651 dibawah pimpinan Gimelaha Majira. Seluruh benteng VOC di Maluku Tengah dihancurkan kecuali di kepulauan Ambon-Lease. De Vlaming lalu ditingkatkan kedudukannya sebagai panglima perang untuk seluruh daerah kerajaan Ternate itu.

Tindakan Vlaming yang pertama ialah membawa Sultan Mandar Syah ke Batavia. Perundingan dengan Gubernur Jendral di sana melahirkan perjanjian 1652 itu, yang dapat kita namakan "Perjanjian Batavia"[75] Menurut perjanjian ini Ternate tidak lagi akan mengangkat seorang Gimelaha baru untuk Hoamoal sehingga praktis daerah inipun dimasukkan dalam "Gouvernement van Amboina" dan berakhirlah kekuasaan Ternate di daerah itu. Pokok penting yang kedua adalah izin yang diberikan oleh Sultan Mandar Syah kepada VOC un-

tuk menebas semua kebun cengkeh yang berada di kerajaannya, termasuk di Hoamoal dan pulau-pulau sekitarnya. Sebagai imbalannya VOC akan memberikan ganti kerugian berupa uang tahunan bagi Sultan dan pejabat-pejabat lainnya, dan penduduk yang kebun-kebunnya ditebas juga akan diberikan ganti kerugian. Untuk melakukan penebasan kebun-kebun cengkeh itu setiap tahunnya VOC mengadakan Hong itochten. Perjanjian penebasan kebun-kebun cengkeh atau ekstirpasi ini dibuat pula dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Maluku; dalam tahun 1653 perjanjian yang serupa berhasil dibuat oleh VOC dengan kerajaan Bacan.[76] Kemudian setelah Spanyol meninggalkan kerajaan Tidore pada tahun 1663, dibuat pula suatu perjanjian yang serupa dengan kerajaan itu pada tahun 1667.[77]
Dengan demikian setiap tahun VOC mengadakan patroli keseluruh kepulauan Maluku yang menghasilkan cengkeh untuk ditebas pohon-pohon cengkeh yang berada disana. Dan dengan demikian pula peranan kerajaan-kerajaan di Maluku mulai mundur. Sekalipun dalam kenyataannya VOC tidak pernah memperoleh monopoli yang sepenuhnya - karena terutama dalam abad ke delapanbelas masih banyak terjadi penyelundupan-penyelundupan - namun sistem ekstirpasi ini dipertahankan sampai tahun 1828.[78] Dalam tahun ini penduduk di kerajaan-kerajaan tersebut diperkenankan menanam cengkeh lagi sekalipun pemerintah Hindia Belanda tetapi memegang hak monopoli dalam penjualan dan pengangkutannya.

Dengan dibuatnya perjanjian Batavia itu maka dengan resmi kerajaan Ternate telah memberi izin bagi VOC untuk mengusahakan cengkeh di kepulauan Ambon-Lease saja, kepulauan yang sebenarnya tidak menghasilkan cengkeh (kecuali kerajaan Hitu) sebelum kedatangan VOC. Untuk sementara di sinipun diadakan ekstirpasi-eks - tirpasi untuk mencegah adanya kebun-kebun cengkeh yang lain yang terdapat dipulau-pulau sekitarnya. Dengan demikian pada tahun 1655 Gubernur Jendral Maetsuycker dapat melaporkan kepada para Direktur VOC di Nederland bahwa "Dipelbagai tempat di Amboina, seperti Ambalau, daerah Lesidi dan Kambelo, Kelang dan Lisabata, Tanunu dan lain-lain, banyak pohon cengkeh telah ditebang tahun ini, dengan maksud agar tidak akan ada lagi pohon-pohon cengkeh di sana kecuali di Hitu, Leitimor [keduanya di pulau Ambon], Oma [nama lain untuk pulau Haruku], Honimoa [nama lain untuk pulau Saparua] dan Nusa Laut, ... yang dengan pertolongan Tuhan dapat kita lindungi".[80] Sistem tanam cengkeh ini diperkembangkan terus sejak pertengahan abad ke tujuhbelas dan baru dihapuskan dalam tahun 1863.[81] Sistem monopoli yang berlangsung sejak tahun 1605 itu (selama 258 tahun) membawa bekas yang sangat dalam dalam sejarah daerah itu.

Catatan:

1. François Valentijn, Oud en Nieuw Oost-indien, Jilid II (Dortrecht, 1724), B, 30. Selanjutnya disingkat sebagai Valentijn.
2. C.P.F. Luhulima, Motif-motif Ekspansi Nederland Dalam Abad ke Enambelas. LRKN-LIPI (Jakarta, 1971).
3. Valentijn, II, B, 30.
4. Sumber-sumber sejarah yang dipakai untuk membuat karangan ini adalah surat-surat pejabat-pejabat VOC di Ambon, Ternate dan Batavia yang telah diterbitkan oleh P.A. Tiele dan Mr. J.E. Heeres, Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel (selanjutnya disingkat Bouwstoffen) yang diterbitkan dalam tahun-tahun 1886-1895. Selain itu terdapat pula penerbitan-penerbitan laporan tahunan para Gubernur Jendral VOC di Batavia ke Nederland yang dikerjakan oleh Dr. W. Ph. Goolhaas, Generale Missiven van Gouverneur General en Raden aan Heren XVII der Verenigde Cost-indische Compagnie. (selanjutnya disingkat sebagai Generale Missiven). Juga hasil pembacaan Memorie van Overgave dan Rapporten dalam Arsip Nasional R.I. yang dilakukan penulis dalam tahun-tahun 1972 dan 1973 sangat membantu memberikan gambaran umum mengenai keadaan di Maluku dalam masa VOC.
5. Dalam masyarakat yang lebih sederhana yang terdapat di pulau-pulau itu di pakai suatu istilah lain untuk menunjukkan lapisan pimpinan ini, yaitu Tama-ela yang dapat diterjemahkan dengan Orang-besar.
6. Perjanjian-perjanjian antara kerajaan-kerajaan di Asia dengan VOC diterbitkan oleh Mr. J.E. Heeres dan Dr. F.W. Stapel, Corpus Diplomaticum Neerlando Indicum (1907-1955), (selanjutnya disingkat sebagai Corpus). Lihat Corpus I, 50-53.
7. Mr. J.A. van der Chijs, De Vestiging van het Nederlansch Gezag over de Banda Eilanden, 1597-1621, (Weltevreden, 1886), 37.
8. Valentijn, II, B, 32.
9. Dr. M.A.P. Meilink-Roelofs, Asian Trade and European Influence. The Indonesian Archipelago Between 1500 and about 1630. (The Hague, 1962), 199-216.
10. 1-1-1614, Boustoffen, I, 42-45
11. Memorie Blocq Martensz (4-1-1617) terdapat dalam Bouwstoffen I, 188-201.
12. 26-5-1617, Bouwstoffen, I, 206-217.
13. Bouwstoffen, I, 231-234
14. 1-1-1614, Bouwstoffen, I, 42-65
15. 14-8-1617, Bouwstoffen, I, 217-221.
16. 6-5-1618, Bouwstoffen, I, 222-228. Valentijn (II,B,51) mengatakan bahwa dalam tahun 1620-an hanya Hatuaha saja yang menghasilkan cengkeh, dikepulauan Lease.
17. Hanya dengan memeriksa dokumen-dokumen van der Haghen seluruhnya kita bisa mendapat pengetahuan mengenai keadaan kekuasaan pada awal abad ke tujuhbelas itu.

18. 31-8-1619, Bouwstoffen, I, 248-255.
19. 4-5-1620 dan 14-8-1620, Bouwstoffen I, 255-271.
20. Valentijn, II, 34-36
21. Generale Missiven, I, 220.
22. Diceriterakan dengan panjang lebar dalam Valentijn, II, B, 46-51.
23. Van der Chijs, Op. Cit.
24. Nota-nota ini dimuat dalam Bouwstoffen I, 301-303.
25. 15-6-1622, Bouwstoffen I, 311-328.
26. Perjanjian ini hanya terdapat dalam Valentijn II, B, 52-53.
27. G. Rumphius, "Ambonsche Historie", B.K.I. (1910), 166.
28. Valentijn, II, B, 85.
29. Generale Missiven I, 139.
30. 16-9-1624, Bouwstoffen II, 22-34. Mengenai keadaan dikeraton pada waktu ini lihat laporan Gouverneur VOC di Ternate (25-3-1625), Bouwstoffen, II, 38-44.
31. 26-7-1627, Bouwstoffen II, 106-111.
32. Valentijn II, B, 67-71.
33. 16-8-1628, Bouwstoffen II, 140-142.
34. 23-8-1628, Bouwstoffen II, 140-142.
35. Bouwstoffen II, xli.
36. Corpus, I, 217-224.
37. Memorie dari van Speult dalam Bouwstoffen II, 83-87.
38. 6-8-1627, Bouwstoffen II, 173-175.
39. Journal ekspedisi ini dalam Bouwstoffen I, 48-75.
40. 8-9-1625, Bouwstoffen, II, 80-83.
41. Rumphius, Op.cit. I, 62.
42. 24-8-1625, Bouwstoffen II, 162.
43. 16-9-1624, Bouwstoffen II, 22-34.
44. Tentang penyerangan Makasar Bouwstoffen II, 138-140.
45. 5-7-1631, Bouwstoffen II, 173-184.
46. 23-7-1631, Bouwstoffen II, 185-189.
47. 25-5-1633, Bouwstoffen II, 234-245.
48. 12-6-1633, Bouwstoffen II, 246-249.
49. Lihat catatan nomer 46.
50. 16-9-1632, Bouwstoffen II, 203-209.
51. 7-4-1631, Bouwstoffen II, 180-192.
52. 12-3-1632 dan 3-8-1632, Bouwstoffen II, 211-214.
53. Menurut Tiele perubahan ini mungkin disebabkan karena selain perintah-perintah yang diketahui VOC Sultan Hamzah ada memberikan perintah-perintah rahasia kepada Sahada yang dijalankannya segera setelah ia tiba di Maluku Tengah. Lihat Bouwstoffen,II, 335 catatan.
54. Surat ini diterima tanggal 11-6-1634, Bouwstoffen II, 249-252.
55. Lihat catatan nomer 48.
56. Generale Missiven I, 406-407.
57. 4-1-1636, Bouwstoffen II, 280-286.
58. Oktober 1637, Bouwstoffen II, 315.
59. 15-8-1634, Bouwstoffen II, 252-260.

60. Meilink-Roelofsz, Op.cit., 169.
61. 9-12-1637, Bouwstoffen II, 320-333.
62. 22-12-1638, Bouwstoffen II, 337-363.
63. Jalannya perundingan ini dikisahkan oleh Valentijn II, B, 118-122. Menurut pemeriksaan Tiele sebagian besar benar kecuali mengenai negeri-negeri yang diclaim oleh Gimelaha yakni Uring, Asilulu, Larike, Wakasihu, Alang, Liliboi dan Hatu. Dalam suratnya kepada Sultan Hamzah dalam tahun 1636 Leliato menyebut daerah-daerah ini, yang adalah daerah Kristen, yang memihak padanya dalam pertentangannya dengan Gimelaha Luhu. Lihat Catatan nomer 58.
64. 28-4-1639, Bouwstoffen II, 336-369.
65. Angka ini menurut laporan yang dibuat oleh van Diemen kepada para Direktur di Nederland tertanggal 12-12-1642, Bouwstoffen II, 39-50
66. 28-1-1643, Bouwstoffen II, 366-369.
67. Transkripsi dan terjemahan surat-surat ini terdapat dalam Bouwstoffen III, 155-158.
68. 27-7-1643, Bouwstoffen III, 158-160.
69. Valentijn II, B, 141.
70. 25-2-1644, Bouwstoffen III, 204-206.
71. Bouwstoffen III, 209-210.
72. Memorie Gerard Demmer diterbitkan oleh Mr. J.E. Heeres, "Ambon in 1647", B.K.I. 47 (1897).
73. 7-4-1645, Bouwstoffen III, 250-265.
74. Mengenai perjanjian Batavia ini tidak dapat kita perbincangkan secara mendetail karena Bouwstoffen maupun Generale Missiven tidak memuatnya.
75. Corpus II, 37-42.
76. Corpus II, 67-70.
77. Corpus III, 348-353.
78. Arsip Nasional R.I., Laporan Politik Tahun 1837 (Staatkundige Overzicht van Nederlandsch Indie, 1837). Penerbitan Sumber-sumber sejarah Arsip Nasional Republik Indonesia, Nomer 4 (Jakarta 1971), 46, 160-161.
79. Generale Missiven, III, 4-5.
80. Salah satu interpretasi dari sejarah daerah ini adalah yang dibuat oleh antropolog J. Keuning, "Ambonezen, Portugezen en Nederlanders", Indonesie IX (1956). Telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dalam rangka Proyek Terjemahan LIPI dengan judul Sejarah Ambon Sampai Akhir Abad ke Tujuhbelas (Jakarta, 1972).
81. A.J. Beversluis en Mr. A.H.C. Gieben, Het Gouvernement der Malukken (Weltevreden, 1929). Data yang mendetail tentang perkembangan dalam bagian pertama abad ke sembilanbelas dapat dilihat dalam Arsip Nasional R.I., Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda tahun 1839-1848. Penerbitan Sumber-sumber sejarah nomer 5 (Jakarta, 1973). 328-354.

BAB V

PERSENTUHAN KEBUDAYAAN DI MALUKU TENGAH 1475 - 1675

oleh F. L. Cooley

PENDAHULUAN

Tugas yang diberikan oleh Team Penulisan Sejarah Maluku kepada penulis ialah berusaha menggambarkan pertemuan pelbagai unsur kebudayaan di Maluku Tengah, serta pengaruh-pengaruh dari pertemuan tersebut atas pola-pola kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di sana pada masa 1475 sampai 1675.

Walaupun pelaksanaan tugas tersebut banyak sekali ditolong oleh hasil karya rekan-rekan yang tertera di atas, namun penulis harus mencatat di sini bahwa sumber-sumber yang ada - yang telah di gali, diolah dan diuraikan sebaik-baiknya dalam karangan-karangan diatas, masih belum cukup memberikan fakta-fakta serta bahan keterangan yang lain yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pembahasan sosiologis-antropologis yang memuaskan secara ilmiah. Dengan perkataan lain, masih tinggal banyak lacunae, yaitu bidang-bidang yang kosong atau yang bahannya sangat sedikit.

Sebetulnya konsep pertama dari kekurangan ini telah disusun sebelum rekan-rekan sempat menyelesaikan karya-karyanya masing-masing. Dasar pekerjaan ini adalah penyelidikan yang telah saya lakukan, terutama di lapangan (field research) beberapa kali di Maluku antara tahun 1957 dan 1964. Boleh dikatakan bahwa sedikit sekali yang saya ketahui tentang literatur dalam bahasa Portugis dan bahasa Belanda tentang sejarah Maluku itu. Tentu saja tulisan-tulisan yang di susun pada abad-abad ke enambelas sampai ke delapanbelas itu tidak mungkin mencerminkan suatu pendekatan antropologis-sosiologis (ke dua ilmu sosial ini baru muncul kemudian), melainkan timbul dari dan mencerminkan kepentingan-kepentingan yang lain sekali yang ada pada penulis-penulisnya itu. Itulah sebabnya seorang antropolog-sosial melihat banyak lacunea, bidang-bidang yang samasekali atau sebagian besar gelap dipandang dari sudut fakta-fakta yang agak lengkap mengenai situasi serta keadaan yang berlaku pada waktu itu di Maluku.

Namun demikian kita harus bekerja dengan bahan-bahan yang ada dan berjalan sejauh mungkin atas dasar pekerjaan ilmiah yang telah dilakukan sampai sekarang. Dan penulis ingin mencatat pula bahwa dengan karangan-karangan yang dimuat diatas kita sekalian telah bertambah kaya akan bahan serta pengetahuan tentang sejarah sosial-kulturil di daerah Maluku pada abad ke enambelas dan ke tujuhbelas. Dasar-dasar dari pengupasan di bawah ini ialah penelitian di lapangan yang di singgung tadi, bersama dengan karangan-karangan di atas.

Pendekatan sedapat mungkin di lakukan secara sosiologis-antropologis, dengan memusatkan perhatian kepada gejala-gejala kemasyarakatan dan kebudayaan dalam arti yang seluas-luasnya dan se pokok-pokoknya.

Apakah hubungan dari penyelidikan semacam ini dengan pembangunan? Dan apakah manfaatnya bagi pembangunan?

Tak akan disangkal darinya, bahwa salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan dengan tepat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ialah kejiwaan rakyat dari daerah yang hendak dibangun itu. Istilah kejiwaan (mentalitas) itu biasanya meliputi sikap-sikap, cara berpikir, jawaban-jawaban mental dan emosionil yang automatik, keadaan psychis, kepribadian suku atau bangsa itu; pendek kata semua unsur yang bersifat rohaniah, yang bersama-sama membentuk cara berpikir serta pemikiran, sikap serta jiwa hidup, pokoknya "ethos" daripada golongan manusia itu. Jadi apakah kejiwaan manusia Maluku?

Kejiwaan bangsa Indonesia yang berdiam di Maluku itu, sama seperti di lain-lain daerah, telah bertumbuh dan berkembang dalam keadaan sosial-kulturil yang terdapat di situ. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa manusia di Maluku Tengah telah mengalami hal-hal atau kejadian-kejadian yang khas, yang berbeda dari apa yang di alami manusia Indonesia di lain-lain daerah seperti di Jawa dan Sumatra misalnya. Perangsang-perangsang (stimuli) yang telah datang berbeda pula dalam hal-hal tertentu, dan jawaban yang diberikan oleh manusia Maluku terhadap perangsang-perangsang tersebut berbeda juga oleh karena corak-corak khas daripada situasi kemasyarakatan dan kebudayaan di Maluku. Proses pembentukan kejiwaan dari suatu golongan manusia berlangsung lama sekali dan berdasarkan keadaan sosial-kulturil yang berlaku jauh sebelumnya. Itulah sebabnya, kalau kita hendak memahami keadaan kejiwaan manusia Maluku sekarang ini, maka perlu kita melakukan pengupasan tentang keadaan sosial-kulturil yang menjadi latarbelakang manusia Maluku sekarang. Dengan perkataan lain, kita harus menyelidiki arti daripada kejadian-kejadian yang dialami manusia Maluku pada waktu daerah mereka mulai merasakan bermacam-macam tekanan dan pengaruh dari dunia luar, yaitu pada permulaan masa penjajahan.

Dalam bagian-bagian dibawah ini akan dibicarakan berturut-turut:
1. keadaan masyarakat Maluku sebelum kedatangan pengaruh-pengaruh dari luar, khususnya dari Barat; 2. kejadian-kejadian yang terpenting antara tahun-tahun 1475-1675; 3. perobahan-perobahan kemasyarakatan dan kebudayaan yang telah terjadi sebagai akibat dari persentuhan kebudayaan itu; dan 4. penutup.

KEADAAN MASYARAKAT MALUKU SEMULA

Kita mulai dengan usaha menggambarkan keadaan kemasyarakatan-kebudayaan yang berlaku di Maluku Tengah sebelum datangnya penga - ruh-pengaruh dari luar daerah pada bagian kedua dari abad ke lima-belas itu. Kalau hal ini dapat di lakukan, maka kita dapat melihat dengan lebih jelas dan mengukur secara lebih tepat perobahan-perobahan yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh-pengaruh dari luar itu. Akan tetapi sebenarnya usaha ini serba sulit dan penuh dengan tanda tanya disebabkan kurangnya bahan tertulis yang memberi data yang dibutuhkan. Tulisan-tulisan tertua dari orang-orang yang mengenal daerah ini[1] secara dalam, yang telah dibahas dalam karangan-karangan yang mendahului ini, ternyata tidak banyak menolong secara langsung dalam usaha ini oleh karena menceriterakan keadaan dan kejadian sesudah mulai datangnya pengaruh-pengaruh dari luar itu.

Apakah sudah ada manusia yang telah menduduki pulau-pulau itu sebelum perpindahan orang-orang dari lain tempat? Tidak ada sumber bahan yang menjadi dasar buat suatu jawaban yang pasti terhadap pertanyaan itu. Kalau diambil sebagai suatu "case study" pulau Nusa Laut (lihat bagian ke tiga dari karangan Z.J. Manusama diatas), maka ternyata bahwa kelompok-kelompok manusia yang datang mendirikan negeri-negeri yang ada di situ sekarang mendapatkan manusia lain yang telah datang dan menetap lebih dahulu. Dalam peperangan yang menyusul mereka yang datang dahulu dikalahkan dan yang masih hidup lari kembali ke Seram, tempat asalnya. Sebelum mereka datang di Nusa Laut, dikatakan pulau tersebut "tinggal kosong tiada ba - rang manusia di situ". Gambaran ini mencerminkan dua hal yang menyangkut persoalan yang sedang dibahas.

Pertama, orang Maluku Tengah, berdasarkan gambaran tradisionil yang bersumber pada ceritera-ceritera orang-orang tua, dongeng-dongeng, legenda-legenda dan lain-lain, berkeyakinan bahwa sebelum nenekmoyang mereka datang dari Seram, Maluku Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Tenggara Irian Jaya (melalui Seram Timur), maka kepulauan Ambon-Lease kosong samasekali. Dan kedua, nenekmoyang mereka tidak datang dari satu tempat saja (walaupun sebagian besar berasal dari Seram), atau pada suatu waktu tertentu, melainkan dari pelbagai daerah - yang cukup tercermin dalam unsur unsur kebudayaan seperti bahasa, adat, musik, dan lain-lain yang terdapat di Maluku Tengah dan melalui suatu proses yang makan wak tu agak panjang.

Tidak dapat dipastikan secara mendetail bagaimana dan oleh sebab apa telah terjadi perpindahan yang agak besar-besaran dari penduduk yang tadinya tinggal di Seram Barat dan Selatan ke pu - lau-pulau Ambon dan Lease. Tetapi dalam masa sebelum 1475 perpindahan tersebut telah terjadi, mungkin oleh karena tekanan-tekanan tertentu dari Maluku Utara dan/atau dari Irian Jaya; mungkin juga oleh karena pertikaian antara golongan Patasiwa Putih dan Patasiwa hitam di Seram Selatan. Namun sesudah perpindahan-perpindahan itu,maka dengan susah payah oleh nenek moyang manusia Maluku

Tengah sekarang telah dibentuk masyarakat-masyarakat kecil yang baru di pegunungan-pegunungan pulau-pulau Ambon, Saparua, Haruku dan Nusa Laut, seperti digambarkan dalam bagian terakhir dari karangan Z.J. Manusama di atas ini.

Masyarakat-masyarakat kecil ini yang sangat sederhana terdiri dari beberapa keluarga saja yang menduduki suatu tempat tertentu. Kelompok kecil ini dikepalai oleh seorang upu atau latu. Dia diakui kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi oleh karena kekuatan yang unggul, baik dalam perang maupun dalam "dunia perang" (charisma). Dia dibantu dalam urusan pertahanan dan keamanan oleh seorang yang disebut malessi (panglima pasukan) dan dalam urusan keagamaan (keamanan rohani) oleh seorang yang disebut mauweng (imam-dukun) yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan "dunia yang tak kelihatan itu". Dasar kehidupan kebudayaan berdasarkan adat dan kepercayaan, yang dibawa serta dari tempat asalnya. Oleh karena kebanyakan penduduk asli ini datang dari Seram, maka pola-pola kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang sangat mirip dengan apa yang terdapat di Seram Barat dan Selatan. Itulah sebabnya mengapa sampai sekarang pulau Seram disebut oleh orang Ambon-Lease "Nusa Ina (artinya pulau ibu) dan dianggap sumber pokok daripada baik manusia Maluku maupun pola-pola dasar dari masyarakat dan kebudayaannya.

Lama kelamaan oleh karena perkembangan dari dalam (kedatangan dari makin banyak orang serta peperangan antara kelompok-kelompok pendatang baru dan penduduk yang sudah ada) suatu proses pertumbuhan dan perobahan terjadi dimana masyarakat-masyarakat kecil itu bertambah besar atau bergabung satu dengan yang lain sehingga terbentuklah satuan-satuan yang lebih besar yang disebut aman. Salah seorang diantara para upu muncul sebagai yang terkuat dan terpandai; dan dialah yang menjadi latu (yang berkuasa). Upu-upu lain diberi atau memperoleh jabatan sebagai soa. Soa adalah bagian dari masyarakat negeri (hena) yang lebih besar itu, yang terdiri dari beberapa rumahtau (mata rumah)- yaitu golongan perkerabatan (darah) yang mengikuti garis keturunan kebapaan. Masing-masing soa di wakili dalam berbagai bidang fungsionil oleh malessi, mauweng dan pejabat-pejabat lain. Inilah susunan kemasyarakatan pokok yang terdapat sampai sekarang di Maluku Tengah.

Kemudian mungkin disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar (dari Maluku Utara khususnya) dan mungkin dari pulau Jawa dan Irian Jaya juga) telah berkembang pula masyarakat-masyarakat yang lebih majemuk lagi, yang di pulau Ambon disebut uli (artinya, suatu kelompok aman menjadi satuan pemerintahan dan kemasyarakatan) yang dalam urusan-urusan umum dipimpin oleh seorang upulatu (yang kemudian disebut raja) dan dalam urusan-urusan perang dipimpin oleh seorang kapitan (gelaran mana mencerminkan pengaruh dari Jawa dan Portugis), di bantu oleh pemimpin dari masing-masing aman yang secara umum disebut orangkaya. Di kepulauan Lease ulisiwa dan ulilima lazim disebut patasiwa dan pata lima (pata berarti bagian).

Kehidupan ekonomis sangat sederhana juga, berdasarkan hasil laut dan hutan- bercocok tanam sedikit secara berpindah-pindah, mencari daun-daunan dan buah-buahan dari pohon-pohon di hutan, khususnya kelapa, dan mencari ikan dan lain-lain hasil laut. Belum ada pertukaran barang (perdagangan) secara teratur atau tetap, apalagi belum dikenal ekonomi uang. Masyarakat-masyarakat kecil itu hidup sendiri-sendiri secara berdiri sendiri. Tetapi rupanya sering sekali terjadi persengketaan atau peperangan diantara mereka, disebabkan antara lain oleh alasan-alasan adat (perkawinan) dan ekonomis (tanah).

Kepercayaan asli mereka dapat digolongkan animisme, yang sesudah agama Islam dan Kristen masuk kemudian, lazimnya di Maluku disebut "Hindu". Mereka percaya akan banyak roh-roh, diantaranya roh nenekmoyang, roh-roh setempat, dan lain-lain kekuatan gaib. Upacara upacara dengan korban persembahan dilakukan untuk memperoleh berkat dan menjauhkan marabahaya. Seperti disinggung di atas, mauweng - semacam imam dan dukun - adalah petugas keagamaan yang membantu perorangan maupun kelompok melakukan upacara-upacara dan kewajiban-kewajiban lain dibidang kepercayaan, termasuk urusan-urusan kesehatan.

Demikianlah, secara singkat dan sangat kurang lengkap, keadaan kemasyarakatan dan kebudayaan yang terdapat secara umum di Maluku Tengah pada masa sebelum 1475.

KEJADIAN-KEJADIAN PENTING MASA 1475-1675

Masa 1475 sampai 1675 telah menyaksikan beberapa kejadian yang membawa pengaruh-pengaruh besar-besaran dari luar, pengaruh-pengaruh mana sangat menggoncangkan masyarakat-masyarakat kecil di Maluku Tengah serta menyebabkan perobahan-perobahan yang luas. Adapun dua dorongan atau motif utama yang membawa beberapa jenis pengaruh kepada masyarakat Maluku, yaitu rempah-rempah yang sangat digemari dan dibutuhkan oleh orang-orang luar (seperti dipaparkan secara jelas sekali dalam karangan R.Z. Leirissa di atas) dan kepercayaan-kepercayaan atau agama-agama yang didatangkan dari daerah Maluku dari luar. Dalam mengejar dorongan-dorongan utama ini banyak motif tambahan menampakkan diri pula, seperti kekuasaan politik, keunggulan militer, perkembangan pendidikan dan lain-lain.

1. Pengaruh Islam:

Pengaruh penting yang pertama itu adalah agama Islam yang datang ke Maluku Tengah sebagian besar dari Maluku Utara. Mulai kurang lebih tahun 1480 kekuasaan kesultanan-kesultanan Ternate dan Tidore meluas keselatan dengan membawa agama Islam ke negeri-negeri di pesisir utara pulau-pulau di Maluku Tengah. Proses pengislaman itu ber

langsung sampai pertengahan abad ke tujuhbelas, walaupun secara le bih pelan-pelan setelah kedatangan Portugis dan Belanda yang mem- bawa serta suatu saingan, yaitu agama Kristen. Dengan demikian pro ses pengislaman daerah Maluku Tengah tak dapat diselesaikan dan berhenti sebelum akhir masa yang kita soroti di sini.

Tidaklah gampang untuk memberikan dokumentasi yang lengkap me ngenai proses pengislaman ini serta akibat-akibatnya, namun rupa- nya ada beberapa pengaruh atau perubahan sosial-kulturil yang di - sebabkan oleh pemasukan agama Islam itu. Seperti disinggung di a- tas, ada kemungkinan bahwa persekutuan-persekutuan uli (ulisiwa dan ulilima - patasiwa dan patalima) telah berasal dari Maluku U- tara dan dibawa serta dalam ekspansi ke selatan pada akhir abad ke limabelas.

Dikatakan pula bahwa praktek pemotongan kepala guna memenuhi kewajiban-kewajiban adat pada waktu perkawinan dan pembangunan - pembangunan tertentu telah dilarang oleh pihak Islam dengan kon- sekwensi perobahan-perobahan yang nampak dalam bidang adat, mi - salnya tuntutan penyerahan harta kawin sebagai ganti penyerahan kepala manusia dari pihak pengantin laki-laki kepada orang tua pengantin perempuan.[2]

Di dalam bidang perkerabatan, ada bukti-bukti tertentu[3] bah- wa di Seram, dan mungkin di Ambon-Lease juga, sebelum kedatangan pengaruh-pengaruh dari luar, sistem perkerabatan di susun berda- sarkan keibuan (matrilineal). Kemudian pola kemasyarakatan yang pokok ini mengalami perobahan sehingga waktu sekarang hampir se- luruh daerah mengikuti garis kebapaan (patrilineal). Perobahan ini mungkin sekali adalah akibat dari pengaruh-pengaruh dari lu- ar, khususnya agama islam yang kemudian diperkuat oleh agama Kris- ten dan kebudayaan Eropa yang semuanya menganut secara tegas garis kebapaan dalam sistem perkerabatannya.

Tentu saja pengertian kepercayaan dari agama suku ke agama Islam telah membawa perobahan-perobahan lain pula, terutama da- lam lembaga-lembaga keagamaan tetapi juga di dalam lembaga lain seperti ekonomi rakyat, nilai-nilai dan sebagainya.

2. Pengaruh Portugis:

Namun sebelum proses pengislaman itu dapat diselesaikan, telah muncul kekuasaan Portugis di Maluku pada permulaan abad ke enam belas. Kekuasaan tersebut telah berlangsung dari 1512 sampai dengan 1605, lebih dari sembilan puluh tahun lamanya, dan me- nampakkan pengaruhnya terutama dalam bidang perdagangan rempah- rempah dan penyebaran agama Kristen, Misi Katolik kepada pendu- duk asli. Pusat operasi kaum Portugis semula di Maluku Utara, tetapi sesudah hubungannya dengan Sultan Ternate mulai memburuk, kurang lebih tahun 1570, maka dipindahkannya ke Maluku Tengah. Selanjutnya terjadilah peperangan antara pihak Maluku Utara (kesultanan Ternate khususnya) dan pihak Portugis di Maluku dan

pertentangan agama merupakan salah satu segi yang menyolok sehingga ribuan orang Kristen telah menjadi korban.[4] Hal ini disebabkan, antara lain, oleh karena guna mengembangkan dan melindungi usaha-usahanya dalam bidang perdagangan dan keagamaan, maka pihak Portugis tidak segan-segan menggunakan siasat serta kekuasaan politik militer.

Dalam karangan Paramita R. Abdoerachman yang mendahului ini soal peninggalan-peninggalan serta pengaruh-pengaruh Portugis di Ambon telah dibicarakan secara khusus. Di sini hanya perlu di simpulkan beberapa hal saja.

Pertama, akibat usaha-usaha misi Katolik, antaranya Pr. Fransiskus Xaverius pada tahun 1546, maka agama Kristen Katolik telah diterima oleh sebagian dari penduduk di Ambon-Lease,[5] yang berarti agama suku atau agama asli diganti dengan agama Kristen, dengan segala implikasi dan konsekwensi bukan hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga segi-segi lain dari kebudayaan asli itu, oleh karena agama Kristen itu tidak datang terlepas dari pengaruh-pengaruh kulturil lain dan pula karena dalam kebudayaan asli itu agama merupakan suatu unsur yang pokok yang tidak dapat dipisahkan dari adat, bahasa dan lain-lain segi dari kebudayaan.

Kedua, guna memudahkan pihak kolonial dalam hal perdagangan dan pengawasan, maka telah dimulai pada masa Portugis kebijaksanaan menurunkan penduduk di Ambon-Lease dari negeri-negeri lama dipegunungan ke tempat-tempat baru dekat pantai laut. Proses perpindahan ini, walaupun baru dimulai oleh pengusaha Portugis, toh merupakan suatu peristiwa yang membawa perobahan-perobahan yang sangat luas dan penting, terutama dalam susunan masyarakat. Tindakan tersebut yang kalau dilihat dari perspektif orang dan waktu hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang amat radikal, telah menggoncangkan manusia Maluku dan meninggalkan bekas-bekasnya dalam kejiwaan Maluku.

Begitu pula pergaulan sehari-hari antara orang-orang Portugis dan orang-orang Maluku dalam berbagai bidang telah membawa perobahan-perobahan selaku akibat dari pemasukkan unsur-unsur kebudayaan Portugis ke dalam kebudayaan Maluku, misalnya nama-nama dari beberapa mata-rumah, seperti De Fretes, De Costa, De Lima, Gomis, Gasperz dan sebagainya. Hal ini nampak pula dalam beberapa istilah dalam bahasa Melayu-Ambon sehari-hari seperti arloji, baju, bendera, jendela, garpu, kampong, kartu, kemeja, kereta, kertas, lampu, almari, gereja, lenso, nona, minggu, meja, prangko, roda, sabun, sekolah, tempo dan banyak lagi khususnya dalam bidang kata benda untuk perabot sehari-hari.[6]

Dapat dikatakan sebagai kesimpulan bahwa walaupun kehadiran Portugis di Maluku kurang dari seratus tahun lamanya, dan di ganti dengan kehadiran Belanda yang berlangsung jauh lebih lama, dan bahwa oleh karena kebijaksanaan serta tindakan-tindakan kaum Portugis sendiri telah timbul permusuhan dan perlawanan hebat terhadap mereka di Maluku, yang semula menerima pihak Portugis dengan baik, toh persentuhan kebudayaan Maluku dengan kebudayaan Portu -

gis mengakibatkan perobahan dan perkembangan yang cukup mendalam dan abadi sifatnya. Seperti dikatakan oleh Paramita R. Abdoerachman dalam karangannya diatas, akibat ini berhubungan erat dengan kenyataan bahwa tidak sedikit orang Portugis kawin dengan gadis Maluku dan dengan demikian muncullah suatu golongan Portugis-Mestizo yang menjadi pembawa kebudayaan Portugis di Maluku. Bidang-bidang dimana pengaruh kebudayaan Portugis paling nampak dapat dilihat dari kata-kata atau istilah-istilah Portugis yang diambinisasikan, yaitu dalam bidang keagamaan, pemerintahan, kemiliteran, dan yang paling nampak di bidang kebiasaan sehari-hari. Semua ini telah memberi corak yang khas kepada masyarakat-kebudayaan Maluku, khususnya bagian yang Kristen. sampai sekarang ini, 365 tahun sesudah kaum Portugis terpaksa angkat kaki meninggalkan Maluku.

3. Pengaruh Belanda

Sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang telah menjadi jelas sekali dalam karangan R.Z. Leirissa bahwa bagi pihak VOC bukan bidang keagamaan (Kristen) yang dipentingkan melainkan bidang perdagangan, maka dapat dimengerti sepenuhnya bahwa selain mengambil alih dari pihak Portugis (terutama untuk menjaga kepentingan strategis) orang-orang Kristen Katolik, maka "gereja" VOC tidak memberi perhatian khusus atau mengadakan usaha-usaha dalam bidang penyebaran agama di antara 1605 dan 1675, seperti di lakukan oleh misi Katolik sebelumnya.

VOC segera mulai meluas kekuasaannya atas dasar-dasar yang telah diletakkan oleh kaum Portugis dalam bidang-bidang perdagangan, politik dan militer. Di dalam waktu tujuhpuluh tahun (1605-1675) VOC berhasil mencapai dan mempertahankan suatu tujuan politik-ekonomi yang juga dikejar Portugis tanpa berhasil, yaitu menguasai secara mutlak perdagangan rempah-rempah.[7] Untuk mencapai tujuan pokok ini, guna memperoleh untung yang sebesar-besarnya dari daerah Maluku, maka VOC tidak segan-segan melakukan tindakan tindakan sebagai berikut

a. Pusat produksi rempah-rempah, terutama cengkeh, dipindahkannya dari Maluku Utara, dimana VOC menghadapi saingan dalam perdagangan dari pihak Inggris dan Spanyol serta perlawanan gigih dari penduduk asli dan pemimpin-pemimpin mereka, ke Maluku Tengah yang lebih gampang di kontrol dan dipertahankan secara geografis dan politik. Tindakan ini telah memasukkan kedalam masyarakat Maluku Tengah suatu unsur yang sama sekali baru dalam kehidupan ekonomis yaitu suatu pekerjaan untuk menghasilkan suatu "cash crop".

b. Dalam rangka kebijaksanaan politik-ekonomi yang sama, maka proses penurunan negeri-negeri dari gunung ke pantai diselesaikan, kecuali di beberapa negeri di jazirah Leitimor (pulau Ambon) yang tinggal dipegunungan-pegunungan sampai sekarang. Proses tersebut, yang dijalankan secara sistematis oleh VOC telah menyebabkan pe -

robahan-perobahan besar dalam pola-pola kemasyarakatan dan kebu - dayaan. Sebenarnya hal itu merupakan suatu pembentukan kembali daripada masyarakat-masyarakat negeri., dimana beberapa satuan kecil (aman) sering menggabungkan diri dalam negeri yang sekarang dengan soa-soanya. Adakala proses pemindahannya ini disertai dengan perobahan agama dari kepercayaan asli masuk agama Kristen. Tentunya juga perpindahan tempat, penggabungan kelompok-kelompok penduduk dan penggantian kepercayaan menyebabkan pula perobahan-perobahan yang tidak sedikit dalam bidang adat-istiadat asli yang selalu erat hubungannya dengan tempat dan kepercayaan. Kiranya tidak berlebihan kalau masa 1605-1675 itu digambarkan sebagai suatu periode dalam mana masyarakat-masyarakat negeri di Maluku Tengah mengalami kegoncangan-kegoncangan yang besar sekali. Dalam banyak bidang cara hidup berobah akibat penurunan dari gunung ke pantai itu.

c. Suatu tindakan lagi yang meningkatkan perobahan-perobahan sosial-kulturil yang luas dan mendalam ialah politik Belanda mengadakan hongitochten-nya guna mendirikan dan mempertahankan kuasanya yang mutlak atas perdagangan rempah-rempah. Hongitochten ini tidak lain daripada expedisi-expedisi perang atau operasi pembersihan (extirpasi) terhadap mereka yang tidak mentaati peraturan VOC yang mengharuskan supaya produksi rempah-rempah di jual kepada Compagnie saja. Tiap-tiap tahun menurut aturan yang berlaku masing-masing negeri harus menyediakan sekian banyak kora-kora (perahu perang) lengkap dengan tenaga pendayung untuk membentuk pasukan yang dipimpin oleh Gubernur di Ambon dan dipergunakan untuk memukul daerah-daerah dan negeri-negeri yang menjual rempah-rempah kepada orang Inggris dan pihak-pihak lain. Kebun-kebun cengkeh dan pala itu dirusak dan pelanggar diusir atau dibunuh. Pada tahun 1621, misalnya, dalam suatu operasi terhadap Banda, hampir seluruh penduduk pulau tersebut dibunuh atau kalau sempat, melarikan diri ke Seram dan lain-lain tempat. Kemudian oleh VOC di pindahkan ke sana orang-orang yang dianggap Belanda dapat dipercaya kesetiaannya. Di antara tahun 1625-1655 seluruh daerah Hoamoal (di sebut oleh Rumphius "Banda Besar" dan oleh Portugis "Veranula" - semenanjung Seram Barat di seberang Hitu), yang sebelumnya merupakan suatu daerah yang cukup padat penduduknya dan banyak kebun-kebun cengkehnya, dirusakkan dan dikosongkan sama sekali oleh hongitochten tersebut.

Yang menjadi perhatian kita di sini ialah pengaruh atau akibat daripada hongitochten terhadap kehidupan negeri-negeri di Maluku Tengah yang turut di dalamnya. Oleh karena orang Belanda mempergunakan orang Maluku ini untuk memukul orang Maluku lain, maka dapat di mengerti kalau hongitochten ini tidak begitu disenangi oleh mereka yang terpaksa turut. Anak-anak negeri yang pergi tidak semuanya kembali. Ada yang gugur, ada yang hilang, ada yang lari. Rupanya pihak Belanda pada suatu pihak harus mengguna-kan tekanan-tekanan yang cukup, dan pihak lain memberikan penghargaan atau jasa-jasa, kepada para pemerintah negeri supaya me-

reka berhasil baik memenuhi jatahnya tiap tahun dalam operasi hongi itu.

Tujuan VOC untuk mendirikan kekuasaannya yang mutlak di Maluku, supaya dapat menguasai seluruhnya perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan pada waktu itu, telah tercapai sebelum berakhirnya abad ke tujuhbelas. Politik yang dipergunakan untuk memperoleh hasil yang diharapkan itu ialah kebijaksanaan memerintah secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga adat yang sudah ada, yaitu asli. Maksudnya ialah supaya tidak banyak mengganggu atau merobah cara hidup daripada penduduk asli. Hal ini nampak jelas dalam perjanjian-perjanjian yang diangkat oleh wakil-wakil VOC dengan raja-raja di pulau Ambon pada permulaan abad ke tujuhbelas. Akan tetapi sebenarnya perobahan-perobahan yang luas dan mendalam sekali mulai terjadi sebagai akibat daripada kedatangan dan berdirinya kekuasaan asing atas masyarakat dan kebudayaan Maluku Tengah, walaupun itu bukan maksudnya.

PEROBAHAN-PEROBAHAN KEMASYARAKATAN-KEBUDAYAAN YANG TERJADI 1475-1675

Adalah berguna kiranya, kalau kita mencoba mengikhtiarkan perobahan-perobahan sosial-kulturil yang telah terjadi sebagai akibat dari pertemuan antara masyarakat dan kebudayaan asing dan masyarakat dan kebudayaan Maluku selama tahun-tahun 1475-1675. Perobahan-perobahan tersebut tidak bersifat pengambilan alih begitu saja dari unsur-unsur kebudayaan asing. Persentuhan sosial-kulturil itu telah menjurus kearah suatu synthese atau integrasi sosial-kulturil baru yang khas, yang terdiri dari unsur-unsur yang sebagian berasal dari luar dan sebagian dari dalam. Bagian dari dalam itu adalah jauh lebih besar, lebih menentukan dari bagian yang dari luar itu.

Perobahan pertama atau segi pertama dari situasi baru itu menyangkut kedudukan atau status. Orang-orang serta masyarakat Maluku telah kehilangan kemerdekaannya. Dalam banyak hal kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan dari pihak luar menggantikan atau diprioritaskan atas kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan pihak Maluku. Ini berarti antara lain bahwa lembaga-lembaga asli (seperti adat, misalnya) yang tidak dimaksud oleh pihak penjajah di ganggu, melainkan dipergunakan dalam melaksanakan politik pemerintahan yang tidak langsung itu, sebenarnya terpaksa menjalani fungsi-fungsi baru, fungsi-fungsi yang asing baginya (hongitochten), Alhasilnya yang tidak dapat dihindari ialah bahwa lembaga-lembaga yang asli itu telah mengalami perobahan-perobahan yang luas dan mendalam. Tetapi yang perlu di sadari di sini ialah bahwa kehilangan kemerdekaannya (mungkin sedikit-banyaknya secara sukarela bagi mereka yang mendiami sebagian besar dari jazirah Lei-

timor, Haruku, Saparua dan Nusa Laut) berarti kehilangan kausa pada orang-orang Maluku itu atas jurusan kehidupan mereka sendi - ri. Dengan perkataan lain, dengan diambilnya kekuasaan politik dan ekonomi dari tangan orang-orang Maluku, maka diambilnya pula dari penentuan dan kontrol - secara tidak langsung tetapi sama dalam kenyataan - banyak segi kemasyarakatan dan kebudayaan Maluku lainnya. Jadi dengan hilangnya kemerdekaan ini (yang di sadari atau tidak, dan sebagian besar orang Ambon-Lease tidak menyadarinya), maka kepribadian serta kejiwaan manusia Maluku ini mengalami pengaruh yang amat penting sekali dalam perkembangan selanjutnya.[8]

Kedua, lembaga-lembaga pemerintahan negeri telah mengalami pula pengaruh dan perobahan-perobahan yang besar artinya. Politik Belanda khususnya, menyebabkan masyarakat-masyarakat negeri berkembangan menjadi satuan-satuan (unit-unit) yang berdiri sendiri di bawah pemerintahan kolonial. Perkembangan ini meningkatkan perasaan autonomi, ke-khas-an, terlepasnya masing-masing negeri dari negeri lain, sehingga timbulnya sifat automatis masyarakat Maluku pada umumnya. Hal ini menguntungkan pemerintahan kolonial, tetapi pada waktu itu juga menghambat perkembangannya lembaga-lembaga pemerintahan dan politik yang lebih luas, yang dahulu mulai berkembang dalam sistem uli. Lingkungan negeri sajalah yang mendapat perhatian, dan seluruh minat dan kepenting an penduduk dipusatkan pada persekutuan negerinya sendiri, de - ngan akibat bahwa jiwa lokalisme telah menjadi tebal sekali dalam kesadaran orang Ambon-Lease itu.

Ketiga, lembaga-lembaga keagamaan telah mengalami perobahan-perobahan samasekali akibat agama suku digantikan oleh agama Islam atau agama Kristen. Dan seperti dikemukakan diatas, perobahan-perobahan ini tidak terbatas kepada bidang keagamaan saja, tetapi amat nampak pengaruhnya dalam bidang-bidang lain pula seperti adat, pemerintahan dan lain-lain. Agama Islam dan agama Kristen di Maluku sama-sama mempergunakan bahasa asing, bahasa arab bagi Islam dan bahasa Melayu bagi Kristen. Hal ini, antara lain, menyebabkan penerimaan agama-agama baru itu agak dangkal dan formalitas. Tambah pula kenyataan bahwa kedua agama ini datang masing-masing dalam suatu hubungan erat dengan kekuasaan politik dari luar (Islam dengan kesultanan Ternate dan Kristen dengan Portugis dan Belanda),[9] yang pada waktu-waktu tertentu (misalnya 1572-1605 dan 1619-1652) amat bertentangan, bahkan bermusuhan. Hal ini menyebabkan bahwa penganut-penganutnya masing-masing memandang kepercayaannya sebagai suatu yang sangat penting baginya. Dengan perkataan lain, dalam hal agama orang - orang Maluku mempunyai perasaan sebagai penganut Islam atau Kristen yang amat tinggi dan tebal. Mungkin mereka tidak banyak mengetahui tentang isi atau arti kepercayaan mereka, akan tetapi mereka tahu betul bahwa mereka Islam atau Kristen, dan janganlah hal itu diganggu atau dilanggar.

Keempat, lembaga bahasa telah mengalami suatu perobahan besar pula. Di negeri-negeri Islam bahasa Arab dipakai dalam sega-

la hal yang menyangkut agama dan di negeri-negeri Kristen bahasa Melayu lama kelamaan mengganti bahasa tanah dalam hampir semua bidang kehidupan. Tambah pula pengaruh yang besar dari bahasa - bahasa penjajah Portugis dan Belanda. Semua pengaruh serta perubahan ini dalam suatu bidang kebudayaan yang sebegitu azasi seperti bahasa, tentunya meninggalkan suatu bekas, serta memberi corak khas kepada kejiwaan Maluku yang bertumbuh dalam proses keterbentukkan pada waktu itu.

Kelima, adalah jelas dari semua yang dibentangkan di atas bahwa policy politik-ekonomis yang mencerminkan dorongan utama dari kegiatan pihak Portugis-Belanda di Maluku telah mempengaruhi semua bidang kehidupan masyarakat Maluku pada umumnya dan secara menyeluruh. Tetapi kita perlu melihat secara lebih terperinci pada tingkat negeri. Lembaga-lembaga ekonomi yang sangat sederhana sekali pada masyarakat kebudayaan Maluku yang asli itu telah mengalami perobahan dan perkembangan penting sebagai akibat dari perpindahan pusat penghasilan dan perdagangan cengkeh dari Maluku Utara ke Maluku Tengah. Hal ini berarti mulai di masukkannya kedalam kehidupan ekonomi masyarakat negeri dua unsur yang samasekali baru, yaitu ekonomi uang dan "cash crop". Unsur-unsur baru ini mendorong kegiatan produksi yang lama kelamaan menjadi dasar daripada suatu perkembangan daerah Maluku Tengah pada umumnya dan Ambon-Lease pada khususnya. Dalam proses pembangunan ini telah terjadi banyak perobahan lain. Misalnya, sistem pemerintahan negeri di dorong berkembang karena fungsi-fungsi baru yang harus dilaksanakannya dalam rangka pelaksanaan policy politik-ekonomi pihak penjajah dalam hal perdagangan rempah-rempah. Sebelum ada perangsang ekonomis ini maka negeri pada umumnya dimiliki bersama dan dikerjakan secara komunal. Dengan adanya "cash crop", maka ada dorongan untuk lebih mementingkan hak milik dan hak pakai atas tanah. Hal ini pula membawa keharusan mengatur hak-hak ini atas tanah dengan lebih baik, dan oleh karena itu adat berkembang dan berobah. Dan lagi, dengan dimasukannya unsur ekonomi dan "cash crop", maka mulai berkembang juga nilai-nilai baru, dorongan-dorongan baru, aspirasi-aspirasi baru, walaupun hanya sedikit saja, yang mulai mengerjakan suatu perobahan dalam kejiwaan atau mentalitas penduduk.

Akhirnya, perobahan-perobahan yang tersebut di atas mengakibatkan masuknya dan berkembangnya beberapa lembaga baru kedalam masyarakat negeri, yaitu gereja dan jemaat, mesjid dan tempat-tempat melakukan shalat, serta sekolah-sekolah. Semua lembaga ini dan hampir semua kegiatan yang dilakukan di dalamnya berdasarkan unsur-unsur kebudayaan yang sama sekali bukan asli, melainkan bersifat baru dan berasal dari luar. Jadi telah dimasukkan kedalam masyarakat-masyarakat negeri di Maluku Tengah kemungkinan akan berkembangnya suatu kecenderungan akan suatu dualisme atau penghadapan antara dua macam unsur: pertama, antara yang asli Maluku dan yang datang dari luar, yang dapat dirasakan baik di negeri-

negeri Kristen maupun di negeri-negeri Islam, dan kedua, suatu dualisme, pemisahan atau menghadapan antara golongan Islam dan golongan Kristen. Kedua dimensi ini yang timbul dari persentuhan kebudayaan antara Maluku dan dunia luar, juga merupakan suatu fak tor yang telah mempengaruhi keadaan kemasyarakatan dan kebudayaan yang menjadi suatu persemaian bagi pertumbuhan kejiwaan Maluku yang khas itu.

P E N U T U P

1. Demikianlah suatu usaha untuk menggambarkan sejarah sosial-kul turil dari daerah Maluku Tengah pada suatu masa dalam mana telah terjadi suatu rentetan peristiwa-peristiwa dan perkembangan-perkembangan yang mengakibatkan perobahan-perobahan azasi dalam masyarakat dan kebudayaan Maluku. Dua abad dari 1475 sampai 1675 betul-betul merupakan suatu masa Sturm und Drang, penuh dengan serangan-serangan, tekanan-tekanan, gangguan-gangguan dan pengalaman-pengalaman baru yang menentukan arah perkembangan selanjut nya. Persentuhan kebudayaan yang terjadi telah berlangsung tidak secara pelan-pelan, tenang-tenang saja dan dengan sukarela, melainkan melalui kegoncangan-kegoncangan, kekerasan, dan paksaan yang dirasakan laksana pukulan ombak-ombak laut pada musim timur (musim hujan di Maluku Tengah). Dan sama seperti penduduk di negeri-negeri yang langsung menghadapi ke timur dan mengalami kekuatan penuh dari bergeloranya laut Banda beberapa bulan dimusim timur setiap tahun, mencerminkan keadaan alam ini dalam logat bahasanya, maka begitu juga manusia Maluku Tengah sedikit-banyaknya mencerminkan dalam kejiwaannya angin ribut serta serangan hebat yang dialaminya pada saat-saat (1475-1675) mereka mulai masuk dunia modern.

2. Pada masa berikutnya (1675-1800) pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat dari pada kejadian-kejadian dan perobahan-perobahan yang telah dialami manusia Maluku itu selama dua abad sebelumnya, seperti digambarkan diatas, berkembang terus-menerus, tetapi dalam suasana yang lebih stabil, dibanding dengan keadaan sebelumnya. Abad ke delapanbelas, yang rada tenang di Maluku itu, memberi suatu kesempatan yang lumayan bagi masyarakat Ambon-Lease untuk mencernakan atau menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan baru yang telah membanjir masuk itu (dalam istilah ilmiah, "cultural integration"). Pola-pola kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang dari persentuhan dengan dunia luar, dan sifat-sifat kejiwaan yang bertumbuh bersama dengan proses tersebut dapat diperdalam akar-akarnya, diperkembangkan bentuk-bentuknya dan disesuaikan dengan fungsi-fungsi baru yang dihadapkan oleh penguasa asing yang memerintah, walaupun secara tidak langsung.

3. Masih ada banyak segi dalam bidang ini yang perlu digali secara lebih terperinci. Gambaran di atas, yang hanya bersifat garis besar saja, di sodorkan guna merangsang, dan seboleh-bolehnya juga menyarankan arah bagi usaha-usaha penyelidikan le - bih lanjut.

Catatan

1. Hikayat Tanah Hitu oleh Safara'rrijali meliputi jangka waktu 200 tahun. Karya tersebut di susun di Makasar disekitar 1650. Naskah itu di baca oleh Rumphius yang kemudian menulis D'Ambonsche Land Beschrijving pada tahun 1687. Tetapi baru kedua karangan ini dan dari beberapa kapata (nyanyian dalam bahasa tanah yang sedikit banyaknya bersifat legende dan menceritera-rakan kejadian penting dalam sejarah daerah atau tempat itu), seperti yang dibahas oleh Z.J. Manusama di atas dan atas dasar field-research yang disinggung tadi dapat saya mencoba dengan hati-hati sekali mengkonstruksikan keadaan sosial-kulturil yang berlaku sebelum 1475 itu.
2. Lihat F.L. Cooley. Ambonese Adat: A General Description. New Haven Yale University Southeast Asian Studies, Cultural Re - port Series No. 10, 1962, 37-39.
3. Lihat karangan penulis "Ambonese Kingroups" dalam Ethnology, Vol I No. 1 (1962), 111-112.
4. Müller-Krüger, Th., Sedjarah Gereja di Indonesia. (Jakarta, 1959), 24.
5. Ibid. hal 26 dimana disebut laporan dari Pater Marta yang memberi jumlah orang Kristen Ambon kurang lebih 47.000 pada puncak kekuasaan Portugis di Maluku. Bandingkanlah dengan catatan dari sumber yang sama dalam karangan Paramita R. Abdoerachman diatas.
6. Paramita R. Abdoerachman, Some Portuguese Loanwords in the Vocabulary of Speakers of Ambonese Malay in Christian Villages of Central Moluccas. LRKN-LIPI (Jakarta, 1972).
7. Lihat karangan R.Z. Leirissa di atas yang berjudul "Policy VOC untuk mendapatkan monopoli cengkeh di Maluku Tengah antara tahun-tahun 1615 dan 1652. Lihat pula C.P.F. Luhulima, Motif-motif Ekspansi Nederland dalam abad ke Enambelas. LRKN-LIPI (Jakarta, 1971).
8. Hipotesa ini memerlukan pembuktiannya secara lebih terperinci. Hal ini karena menyangkut seluruh masa penjajahan daerah Maluku oleh Belanda, sebaiknya di tunda sampai bagian-bagian berikut dari penelitian ini.
9. Dalam keadaan seperti ini, tidak mengherankan kalau ternyata bahwa unsur-unsur keagamaan bahkan golongan-golongan agama diperalat dan dengan demikian agama dirugikan demi kepentingan-kepentingan politik dan lain lain dari orang atau pihak luar. Hal ini masih tetap terjadi sampai sekarang.

BAB VI
LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I

Kapala Kanama Haita Sawatelu Kota nywele nyiwele sele Kompanyia kolosia Kapahaha Koloala Kapahaha nala nala siwa	Kapal-kapal telah berlabuh di teluk Sawatelu di sana terdapat kota nyiwel dengan pohon nyiur yang berderet-deret Kompania menunggu saat untuk menyerang Kapahaha Ditunggunya hingga sembilan tahun.
Hiti maaneha lowa sue lainuli Lihi julata syananiki lolosye Lisa e makana Tapane Lawaha Lise e makane Sawatelu Lawaha	Perintah mendaki gunung melalui jalan belakang Karena jalan terlalu curam sampai hampir gigit lutut Pertempuran berkobar di teluk Sawatelu
Lisa e makana Nandahuku Lawaha Kutu kaites jaou Tumbanbessy Hulu elyata elyata pory Yata pory eya rylu nasu meita	Pertempuran berkobar di teluk Mandahulu Penghargaan kepada kapitan Tumbanbessy Pesuruh negeri pori turun menimba air di laut di Mandahulu Ditangkap dan diberi beras sekarang pasukan-pasukan mengikuti dia melalui jalan belakang Mereka telah kepung benteng Kapahaha di tengah malam
Rulu nasu meita lia Mandahulu Jane sula eya, sula eya pela Lihi tikane tikanesi lawalowa Tikanesi Lawalowa lowa sue Lainuli	Mereka tembak dari Mandahulu dan pelurunya jatuh di samping benteng sampai terbit fajar Sebagian rakyat telah menyingkir ke negeri Lataela, Lataenu dan Ial Ulli Memanggil mereka di Kapahaha untuk pulang.
Latese sarele elya Kapahaha Elya Kapahaha rimulai molo molo Minat tara holo lia Mandahulu Nima nahureya luasanesa	Kesengsaraan dalam benteng, anak-anak yang belum dewasa menderita kedinginan mereka berteduh di bawah pohon beringin yang dipakai pengganti rumah

bertanya yang telah buruk
dipergunakan pengganti bantal
sedangkan buahnya di makan
sebagai makanan
penduduk memandang kejurusan
Kapahaha yang telah rusak bina-
sa
dan mereka tinggal di Kapa-
haha tidak dapat berbuat apa-
apa selain menangis.

Manu rihupasa tihupasa sama
nala puti hee hale pajare hee
lia
lumainasi waa elya Lataela
Lumainasi waa elya lataenu

Kompeni menduduki benteng
selama tujuh hari
mereka perintahkan mencari
di semua pantai karena Tum-
banbessy masih berkeliaran
di hutan-hutan
Kompeni membujuk Tumbanbessy
agar menyerah saja
Karena tidak berhasil mereka
memberi perintah: apabila
Tumbanbessy tidak menyerah
pengikut-pengikutnya semua
akan di bunuh

Lumanasi waa elya Ial ulli
Elya Ial Ulli makakika Lawawela
heha leusi mai heha leusi mai
hiti hinio utatapa ombola

Akhirnya karena sayang pada
rakyatnya, ia menyerahkan di-
ri di pantai Seilambi
Ia kemudian di bawa ke kota
Latania (Victoria)
Ia dijatuhi hukuman mati gan-
tung
Disamping itu digantung tiga
potong rantai pada lehernya
dan diperlakukan seperti
binatang
Dia meneteskan air mata, me-
ngenangkan negeri dan rakyatnya
Dikirimkan destarnya kepada
ibunya yang bernama Buka (ber-
asal dari negeri Luhu)
Ibunya mencucurkan air mata
mengingat Tumbanbessy di kota
Latania

Luasi kala lutusi kaya Nunu
Jambala
Nunu Jambala seli eka pale mahu
Hata Jambala seli eka karanulu
Huwa Jambala seli eka Lopoleli

Karena ia tidak mati, ia lalu
ditembak dengan meriam, tapi
ia tidak menderita apa-apa
Kemudian ia dimasukkan kesang-
kar besi lalu ditenggelamkan

di pantai Namalatu (labuhan Raja) selama tujuh hari
Ternyata ia juga tidak mati
Tumbanbessy muncul dipantai Latuhalat
Dan penggayu pulang ke Kaita Seilambi (Teluk Selambi) daerah antara Morella dengan Tanjung Setan).

Catatan: Kapata ini terdapat dalam skripsi A. Huliselan, mahasiswa IPIK-Ambon, September 1965. Terjemahan adalah terjemahan bebas dari penyusun skripsi sendiri.

Lampiran II

KAPATA TENTANG PENDARATAN SEROMBONGAN
MANUSIA DI PANTAI SIRILAU

Sopa upu Leemese	Terpujilah upulatu Leemese
Sosu haite Potamani	yang telah mendarat di pantai Potamoni
Saa hena Lesiela.	dan mendirikan hena Lesiela
Sopa latu Pikauli	Terpujilah Latu Pikauli
Upu lalu Hehanusa.	upulatu Hehanusa.
Sopa haite Sirilau	Terpujilah pantai Sirilau
Tupa si manoke sou	dimana telah diadakan musyawarah
Jalamanano si asanama	Ditetapkan (pembagian dalam dua bagian)
Asanama Inaluhu, Inahaha	Inaluhu dan Inahaha
Inaluhu upulatu Pikauli,	Inaluhu untuk upulatu Pikauli
leu tula Inaluhu	ia mendapat Inaluhu
Upulatu Hehanusa	Upulatu Hehanusa
leu tula Hehanusa	mendapat Inahaha.
Siuatete latua rua,	Dibagikan dua latu,
Patia rima,	lima patih
Upu pati Manusama	Upu pati Manusama
leu teun Sialana	dengan teun Sialana
Punahua Kakerissa	Mendirikan hena Kakerissa
Upulatu Hehanusa	Upulatu Hehanusa
leu teun Peetihu	dengan teunnya Peetihu
punahuna hena Lesinusa	mendirikan hena Lesinusa
Ni aharia,	Saudaranya,
Luhua Tanasale	Luhua Tanasale
Leu Teune Soohahu	dengan teunnya Soohahu
Punahua hena Siwa	mendirikan hena Siwa
Ni aharia	Saudaranya
Upu nunua Soselisa	Upu nunua Soselisa
Leu teun Koakutu	dengan teunnya Loakutu
Saka haite Sirilau	menjaga pantai Siralau
Upu latu Pikauli	Upulatu Pikauli
Leu teun Laurissa	dengan teunnya Laurissa
Punahua hena Samasuru	mendirikan hena Samasuru,
Upu wael Patinala	Upu wael Patinala (ael-air, laut)
Leu teun Sopamena	dengan teun Sopamena
Punahua hena Risapori	mendirikan hena Risapori,
Ni aharia	Saudaranya,
Sama Tahapari	Sama Tahapari
Leu teun Peetihu	dengan teunnya Peetihu
Punahua hena Tounusa	mendirikan hena Tounusa
Latua si bapinda	Para latu ini mendiami
Nusa halawane	Nusahulawane (=pulau emas)
Si-hetu pela maria lete	Dihitung bintang-bintang di atas (=menunjukkan kebesaran dan keperkasaan raja-raja itu)

Si-aru laine lau.	dan di bagi (sebenarnya diberi batas) pantai laut
Siwa sei amu leri,	Siapa di antara Siwa lebih besar dari kami
Rima sei emu leri,	Siapa di antara Rima lebih besar
Amu leri, Nusa-hulawane	dari kami
Lesi Siwa, lesi Rima	Lebih besar kami, Nusahulawane
Honimoa tetu mamamu lau	daripada Siwa dan Rima
Hunisela tetu	Batasnya Honimoa di seberang
Mamamu mai.	lautan (Tanjung) Hunisela batas
Nusa ruwaru	di sebelah sini
hetu pela maria lete	Nusa yang di bagi menjadi dua ba-
Salamate waowe sile.	gian ini
	menghitung bintang di atas (kenesar-
	an)
	Berbahagia mereka.

Kapata ini adalah salah sebuah dari dua buah kapata, yang terdapat di dalam "Twee zangen in de Ambonsche landstaal (bahasa tanah) vertaald en verklaard door G.W.W.G. Baron van Hoevell". Tijdschrift voor Indische Taal-, land-, en Volkenkunde. 27 (1882), 69-89.
Terjemahannya kedalam bahasa Indonesia adalah dari kami (penulis).

Lampiran III

KAPATA TENTANG PEPERANGAN ANTARA LATU LEEMESE
MELAWAN PARA PENDATANG

Upulatu Leemese	Upulatu Leemese
rua rima	menyatakan perang
Si-hiti rakapita,Maahaa	Mengangkat(seorang) hulubalang, Maahaa.
Turu risa	Ia turun dari gunung untuk berperang
Waise kala tema lau	Dan mereka berperang seperti arus di laut
Putu kasa rangelare	Hati mereka panas
Inu lala seri wael	Dan minum darah seperti air
Petua hitu, kinaa hitu	Mereka berperang tujuh hari, tujuh malam
Tampane ria nasa puti	Tempat perang ialah di pasir pantai laut
Turu risa	Mereka berperang
Waise kala tema lau,	berperang seperti arus di laut,
Merio laui	daun-daun sagu molat dihamburkan di atas
Si-loho latu ni-malesi	tanah (sebagai suatu siasat perang)
Latu Leemese	Dan malesi tergelincir (karena berjalan
Leu hena Puano	di atas daun-daun sagu itu)
Wara luhu waowe hena	Latu Leemese
Jama Puano	kembali ke henanya di Boano
Siokona, waowe uwa	membawa kabar ke negeri
Silawane	negeri Boano
Turu bumi malaone	Siokana, saudaraku
Jau-u malesi	Silawane
I-loa iwa	(yang telah tewas) dikebumikan
Jane ai hua jambalo	Malesiku
Jarambole ni-nyawa	ia mengembara di dalam hutan rimba
Siokona, waowe uwa	ia memakan buah-buah hutan
Usmahu	untuk menyelamatkan dirinya
Turu bumi malaone	Siokana, saudaraku
Wara luhu si-tabea	Usmahu
Luhu wairia	telah dikebumikan
Lesiela amane malene	Kabar dan hormat di bawa
Manu tau sarakake	ke Luhu
Salamate waowe nusa,	bahwa negeri Lesiela telah kosong
Nusa halawane	ayam jantan tidak berkokok lagi
Rihu meten, kai nusa,	selamatlah nusa,
Luhu mena, lesi muri	Nusa-hulawane
Salamate lesi ela	cuaca hitam lalu, pulau menjadi terang
Layamate hiti	penuh di depan, lebih bagi dibelakang
Latu putia yea	bahagia bertambah
Hurano hahiti	(ketika) dengan terbitnya matahari
Lesi latu putia yea	raja putih memerintah;
Latu puti a-manu	(ketika) bulan naik
Yau manu tula em.	lebih lagi kekuasaan latu putih
Latu putia a-lena	latu putih menyeberang lautan

Jay lena tula ema.	saya menyeberang dengan dia
Ile sele duniai,	latu putih berjalan menyusur pantai
Ni kawasa harori elam	saya berjalan dengan dia
	Ia memerintah dunia
	kuasanya meliputi seluruh alam.

Kapata ini adalah kapata yang kedua yang disebut dalam artikel dari van Hoevell yang di sebut dalam Lampiran II.

Catatan dari editor: Kedua kapata ini (lampiran I dan II) diterjemahkan oleh penulisnya dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa penulisnya tidak mampu mempergunakan teks aslinya (bahasa tanah). Kenyataan ini mendesak kita untuk memulai penelitian-penelitian ilmiah tentang bahasa-bahasa daerah ini, agar supaya warisan ini tidak hilang begitu saja.

Lampiran IV

KARANGAN TANASALE TENTANG SEJARAH PULAU NUSA LAUT

Lebih dulu tanah Nusalaut tinggal kosong tiada barang manusia disitu. Berikut dari itu waktu sudah datang dari sebelah Barat empat orang yaitu tiga laki-laki dan satu perempuan. Maka laki-laki itu bernama Leimese dan Huwaatol Latunama dan seo - rang punya saudara perempuan bernama Silawane serta dorang mempunyai satu kapitan bernama Natahaa.
Pada waktu dorang datang, sudah singgah di satu labuan antara Akoon dan Abubu, labuan itu bernama Mulaa. Berikut dari situ dorang sudah pindah tinggal di atas satu gunung bernama Lesiela. Pada kemudian sudah datang lagi orang-orang Seram, lagi dari Saparua dan Ambon, menambahkan itu tempat orang sampai jadi banyak manusia dan sebegitu dorang sudah angkat itu Leemese pada perintah di negeri Mulaa dan panggil namanya Latu Leemese. Itu orang-orang Mulaa, yang tersebut di atas, sudah tinggal juga di gunung Lesiela, maka pada suatu waktu sudah datang kembali orang-orang dari tanah Ambon, negeri Halong, dua soa, bernama Latumanu dan Tunianarota. Maka orang-orang tersebut sudah tinggal di Nusalaut sebelah Barat dari negeri Mulaa di atas satu gunung bernama Amauna. Maka pada saat waktu itu kapitan Latumanu turun menjala ikan, sedang ia buang jala di air masin sudah tiada dapat ikan, hanya dapat satu biji kelapa, jadi itu Latumanu sudah ambil itu kelapa bawa pulang ke negerinya, tetapi dia lupa kelapa di pantai, dan pada satu kali Latumanu turun di pantai kembali pada ambil air masin, dia lihat itu kelapa sudah jadi pohon dan sudah memberi buah muda, dan dia lihat di atas pohon kelapa, satu anak laki-laki kecil isap dari itu rambut kelapa.
Begitu juga dia sudah balik kembali di Ama-nua dia kumpul bala-bala lalu turun ke pantai ambil itu anak dari itu pohon kelapa bawa ke gunung dia orang punya negeri, tinggal begitu lama sampai itu anak jadi besar, maka dorang sudah mengangkat dia menjadi raja, dan panggil namanya Latu Mutihu dan raja Mutihu sudah pegang perintah. Berikut dorang berpindah ke Amahutai pada satu gunung, bernama Hena-una, dan buat negeri di situ, lalu terpanggil itu negeri punya nama Lesi-nusa, yang artinya "lebih kuasa dalam pulau ini". Pada tahun-tahun yang berikut sudah datang lagi orang-orang di Nusa Laut, yaitu orang-orang dari Banda, dari Ternate, dari Papua, lagi dari Buru, Manipa dan Howamohel dan tinggal keliling tanah tersebut, maka pada saat itu waktu sudah terhitung delapan negeri, yaitu negeri

Mulaa
Lesinusa (Titawaay)
Kakerissan (Abubu)
Henasiwa (Leinitu)
Hatalepa pawao (Sila)

Samasuru (Ameth)
Risapori henalatu (Nalahia), dan
Tounusa (Akoon)

Dan satu-satu negeri sudah ada dia punya pemerintah, sebegitu sudah terbagi di dalam 2 bagian, yaitu Inahaha dan Inaluhu. Itu Inahaha artinya ibu yang di atas dan Inaluhu artinya ibu yang di bawah. Maka Inahaha itu ada di bawah kuasa raja Mutihu (Lesinusa), dia pegang kuasa lagi atas negeri Kakerissa, Henasiwa dan Hatalepa pewae. Inaluhu di bawah kuasa raja Samasuru, ia pegang lagi atas negeri Risapori Henalatu dan Tounusa.
Dari sebab itu, raja Mulaa sudah pakai itu sakit hati dan sudah angkat peperangan dengan raja Lesinusa dan Samasuru. Maka raja dua itu sudah berkumpul orang-orang lalu berperang lawan negeri Mulaa. Pada waktu orang-orang dari Mutihu berperang dengan negeri Mulaa, banyak kali tiada boleh menang, sebab itu kapitan Mulaa yang bernama Matahaa, ada satu laki-laki yang gagah berani, dari sebab itu orang-orang dari raja Nutihu dan lain-lain sudah bikin akan pada cuci satu tempat yang baik hambur pasir putih dan di atas itu dorang atur daun sagu yang mentah, supaya kalau itu kapitan Matahaa cakalele sampai di situ ia punya kaki akan talicin lalu jatuh dan serta dia sudah jatuh, lalu datang orang Mutiha buhun dia. Kemudian orang-orang Mulaa sudah lari keluar dari itu negeri, setengah ada tinggal di tanah Nusa Laut, setengah sudah lari ke Seram, sebagaimana sampai sekarang itu orang-orang Mulaa ada juga di negeri Tamilau, Atiahu, Tobo dan Goram; dari itu sekarang cuma tinggal saja tujuh negeri di tanah Nusa Laut. Maka pada waktu orang-orang Nusa Laut semuanya sudah berkumpul berhadapan Raja Titawaay dan Ameth, sehingga dorang sudah bersuka-suka sebab negeri Mulaa sudah lari, dan dorang sudah berbagai itu tanah Mulaa, satu bagian kepada Titawaay dan satu bagian kepada Ameth, yang mana sampai sekarang ada terpakai itu selaku dusun negeri.

(di kutip dari G.W.W.G. Baron van Hoevell, "Vocabularium van vreemde woorden voorkomende in het Ambonsch-Maleisch, benevens korte op merkingen over dit locaal-Maleisch en verder eenige spreekwoorden, eigenaardige uitdrukkingen en gezegden te Ambon gebruikelijk" dalam Geschiedenis van Noesalaoet voor de komst der Portugezen van de hand van Tanasale, Regent van Leinitoe. (1876) Kutipan ini sesuai dengan aslinya, hanya ejaannya saja yang di ubah.

Lampiran V

NAMA-NAMA KELUARGA YANG TERDAPAT DI NEGERI-NEGERI AMBON-LEASE YANG BERASAL DARI NAMA KELUARGA PORTUGIS

Nama Keluarga di Ambon-Lease (a)	Negeri di mana Nama-nama itu terdapat	Nama keluarga Portugis (b)
Alfons	Hatalai	Alfonso
Bernardus	Ambon-kota (borgor)	Bernardim
da Costa	Amahusu	(da)Costa (c)
Delima; de Lima	Hatalai	(de) Lima (d)
Dias	Ema	Dias
de Fretes	Kilang,Naku, Hatalai	de Freytas (d)
Ferdinandus	Haruku, Amahusu, Rutong	Ferdinandus
Gaspers	Naku	Gasparis
Gomis	Hatalai	Gomes
Gonsalves	borgor?	Gonçalves
Joris	Galala (borgor)	Jorge
Kastanya	Hatalai, Naku	Gastanha (e)
Lopis, Loppies	Hatalai	Lopez
Mendosa	Latuhalat, Banda	Mendoça
de Mei	borgor	(de) Mayo (d)
Martin	borgor	Martim
Muskita	Hatalai, Naku	Mesquita
Paijs	Hatalai	Paes
Parera	Hatalai, Passo	Pereira
Piris	Nila, Naku	Pires
de Quelyu	Kilang	(de) Coelho (d)
Rodriges, Lodriges	Kilang	Rodrigues
da Silva	Soya (9)	(da) Silva (c)
Suisa, Soisa, de Soysa	Haria, Nusaniwe, Porto	(de) Souza (d)
Siloy, Silooi, de Silo	Amahusu, Soya	? (h)
Simons	Passo, borgor	Simões
de Sirath	Kusu-kusu Sereh	? (h)
Soares	?	Soares
Tessera	Tawiri, Mahia	Teixeira
Waas	Hatalai, Amahusu, Naku	Vas (z)
Warella	Saparua, Naku	Varella

(a) menurut abjad; nama-nama keluarga ini tergolong nama "Portugis", tetapi adalah dari pemegang dati, kecuali orang borgor.

(b) di banding dengan nama-nama keluarga Portugis yang terdapat dalam dokumen-dokumen Portugis abad ke enambelas dan ke tujuhbelas; terutama "Genealogia", Codice 2964, Perpustakaan Universitas Coimbra.

(c) "da" menunjukkan daerah asal keluarga ayah ("patronymic"), seperti da Costa, da Silva, da Mota.

(d) "de" berarti "berasal dari keluarga", "termasuk keluarga", seperti António de Abreu = António dari keluarga Abreu; Fernão de Magelhães = Fernão dari keluarga Magelhães. Kemudian oleh golongan bangsawan dan aristokrasi, "de" di satukan dengan nama keluarga, hingga menjadi de Castro, de Souza, de Freytas. Tidak ada nama daerah yang di dahului dengan "de".

(e) Dari nama keluarga "Castanheira"?; nama "castanha" tidak terdapat di Portugal.

(f) Nama keluarga da Silva sekarang sudah tidak ada di Soya.

(g) dari "Gil"?

(h) dari "Siraj"? (nama Arab). tetapi di anggap "Portugis".

Lampiran VI

KAPATA "TOMBOSITE"
(catatan pada bab "Pendahuluan" artikel Paramita
R. Abdoerachman, catatan nomer 5)

Tombosite, Tombosite iele
Maalae, Iyele Lee Siale
Lusi Latua urai, Compangie hale sawa
Rumah kana e, Huamoale rumah kana
Sia leie hatu, Hale siria Kambele
Luhua wele jadi kota Cuhua wele

Penjelasan:

Lagu ini menceriterakan kisah peperangan antara penduduk jazirah Hoamoal dengan bangsa Portugis. Dahulukala jazirah itu diperintah oleh seorang raja, yang mempunyai seekor burung Garuda. Burung Garuda itu senantiasa tinggal pada tanjung Sial di jazirah itu juga. Maksudnya untuk menjaga dan mengganggu siapa saja yang datang menyerang jazirah itu, terlebih bangsa Portugis. Dengan demikian maka jazirah itu sukar sekali di masuki oleh Portugis. Boleh dikatakan jazirah Hoamoal menjadi kuat oleh karena burung ini.
Untuk lebih kuat lagi, penduduk jazirah Hoamoal bergotong-royong mengatur batu untuk mendirikan sebuah benteng di kampung Luhu. Semua batu-batuan itu di ambil dengan berbaris dari sebuah kampung yang bernama Kambelu di jazirah itu juga.
Meskipun begitu, penduduk Hoamoal tak dapat bertahan terus, dan akhirnya jatuh ketangan Portugis.
Demikianlah penjelasan sedikit tentang isi nyanyian di atas.

Keterangan: Menurut Ny. Wanda Latumahima-Lopusila kapata ini di nyanyikan untuk menyertai tarian adat pada waktu kunjungan Gubernur dan istri ke negeri Taniwel, Ceram Utara, pada akhir tahun 1964. Untuk tarian adat, penari wanita mengenakan kain batik dan kebaya putih, sedangkan penari laki mengenakan ikat kepala yang serupa di Buru. Kapata ini dengan penjelasannya di berikan kepada Ny. Latumahima oleh Raja Taniwel, kemudian oleh Ny. Latumahima diberi kan kepada pengarang dalam bulan Februari 1965, di Ambon.

Keterangan pada catatan nomer 6 dari artikel Paramita R. Abdoerrachman; "Sawahtelu" = suatu daerah di pertuanan negeri Morella (Hitu, dulu soa dari negeri Mamala), sebelah timur negeri, antara pantai dan pegunungan, jurusan Tanjung Setan dan Kapahaha. Menurut Bapak Gani, kepala Soa yang tertua, diketahui masyarakat ada ceritera bahwa dahulukala daerah Sawahtelu itu adalah daerah di mana Portugis berladang waktu mereka mempunyai benteng (atau loji?)

dekat negeri itu. Karena tanah ini di pakai untuk berladang, maka diberi nama oleh rakyat "Sawahtelu", yang berarti tiga (banyak) sawah.

Daerah Sawahtelu memang tanahnya subur, dilingkari dua sungai dengan air yang jernih, dan terdapat banyak hutan kayu, dan dapat di pakai oleh perahu-perahu untuk berlabuh. Luasnya dikirakan 1 km persegi, dibatasi pantai yang lebar dan berpasir, tidak seperti pantai-pantai disekitarnya yang penuh dengan batu besar dan batu karang.

Pada bagian daratnya dibatasi bukit-bukit. Sampai kini dipakai untuk berladang dan bercocoktanam oleh penduduk soa (.....) dari Morella.

BIBLIOGRAFI

Arti singkatan-singkatan pada bibliografi:

B.K.I. Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde.

B.K.W. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

C.D.N.I. Corpus Diplomaticum Neerlando Indicum.

E.N.I. Enclyclopaedie van Nederlandsch Indie.

L.R.K.N. Lembaga Research Kebudayaan Nasional - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

L.U.B. Leidsche Universiteits Bibliotheek.

M.I.S.I. Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia.

T.A.G. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkkundig Genootschap.

T.B.G. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde, uitgegeven door het Koninklijke Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

T.N.I. Tijdschrift voor Nederlandsch Indie.

Abdoerachman, Paramita R., Some Portuguese Loanwords in the Vocabulary of Speakers of Ambonese Malay in Christian Villages of Central Moluccas, LRKN-LIPI, Jakarta, 1972.

Arsip Nasional, Daftar Memorie van Overgave (Naskah Serah Terima) Pejabat2 VOC dari Abad 18 Yang Terdapat Dalam Koleksi Arsip Nasional R.I. Djakarta. Jakarta, 1972.

Arsip Nasional, Laporan Politik Tahun 1837 (Staatkundig Overzicht van Nederlandsch Indie 1837). Jakarta, 1971.

Arsip Nasional, Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839 -1848. Jakarta, 1973.

Anuário de Nobreza de Portugal, Braga, 1950.

Aveling, H.G., "Seventeenth Century Bandanese Society" dlm. B.K.I. 123, 1967, 347-366.

Bachtiar, Harsja W., Sejarah Perbatasan Timur Irian Barat", M.I.S.I. 1, April 1963, 65-78.

Barloesius, Kriemhilde, Ethnografische Betrachtungen über die Süd-Molukken in der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts (Ein Teilbetrag zur Kolonialherrschaft in Ost-Indonesien), Berlin 1965.

De Barros, João de Diogo de Couto, Da Asia, Lisboa, 1777-1788.

Beversluis A.J. dan A.H.C. Gieben, Het Gouvernment der Molukken. Weltevreden, 1929.

Bleeker, P., Reis door de Minahasa en den Molukschen Arschipel, gedaan in de maanden September en October 1855 in het Gevolg van den Gouverneur Generaal Mr. A.J. Duymaer van Twist. Batavia , 1856.

Boxer, C.R., Race Relations in the Portuguese Colonial Empire, 1415-1825. Oxford, 1963.

Boxer, C.R., "Some aspects of Portuguese Historical Writing", dlm Soedjatmoko (ed), An Introduction to Indonesian Historiography, Cornell University Press, 1965.

Boxer, C.R., Four Centuries of Portuguese Expansion, 1415-1825, A Succinct Survey. Johannesburg, 1965.

Van den Brink, Chr. H. Bakhuyzen, "De Inlandsche burgers in de Molukken", B.K.I. (LXX), 1915, 595-649.

Van der Chijs, J.A., De Vestiging van het Nederlandsch Gezag over de Banda Enlanden, 1599-1605, Batavia, 1886.

Cidade, Hernani, História de Portugal. Lisboa, 1961.

De Clercq, F.S.A., Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate. Leiden, 1890.

Coelhos, Ramos, Alguns Documentos do Archivo Naçional de Torre-do Tombo-acercos das navegações e conquistas portuguesas. Lisboa, XCII.

Cooley, F.L., "Ambonese Kingroups", dalam Ethnology, Vol.1, no. 1, 1962, 111-112.

Cooley, F.L., Ambonese Adat, A General Description. New Haven, Yale University, 1962.

Coolhaas, W.P.H. "Kroniek van het Rijk Batjan", T.B.G. (63), 1923, 474-512.

Coolhaas, W.P.H., Generale Missiven van Gouverneur Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oost-indische Compagnie. 2 Vol. The Hague, 196(, 1964.

Cortesão, A (ed), The Suma Oriental of Tomé Pires. London 1944.

Cortesão, Jaime, Aperçu Historique. Lisboa, 1962.

Van der Crab, P.A., "Geschiedenis van Ternate in Ternataansche en Maleische Tekst door den Ternataan Naidah met vertaaling en aantekeningen door P.A. van der Crab", B.K.I., 1978, 383-493.

Crawfurd, J. History of the Indian Archipelago. Edinburgh/London, 1820.

Deinum-De Wit, Hk., "De Kruidnagel" dlm. G.J.J. van Hall-C van Koppel, De Landbouw in de Indische Archipel. II, B, a Gravenhage, 1949.

Drewes, G.W. "The Effect of Western Influence on the language of the East Indian Archipelago", dlm. B. Schrieke (ed.), The Effect of Western Influence on Native Civilizations in the Malay Archipelago. Batavia, 1929.

Encyclopaedie van Nederlandsch Indie. Den Haag-Leiden, 1899-1905, 1917-1921.

Gijsels, Aert, "Grondig Verhaal van Amboina", Kroniek van het Historis Genootschap te Utrecht, (III), 1885, 85-105.

Van der Graaf, H.J. dan G.J. Meylan, "De Moluksche Eilanden", T.N.I. (18), 1856.

Groeneveldt, W.P., Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chineso Sources. Jakarta, 1960.

Guerreiro, Amaro D., Panorama Económico das descobrimentos Henriquino.

De Haan, F., "Rumphius en Valentijn als geschiedschrijvers van Ambon", dlm. Rumphius Gedenkboek. Haarlem, 1907, 17-25.

De Haan, F., Priangan. De Preanger Regentschappen onder het Neder landsch Bestuur tot 1811. 4 vol. Batavia, 1910-1912.

Haga, A., Nederlandsch Nieuw-Guinea en de Papoesche Eilanden. 2 Vol. Batavia, 1884.

Hall, D.G.E., Historians of South East Asia. London, 1961.

Hall, D.G.E.,A History of South East Asia. London, 1960.

Heeres, J.E., "Ambon in 1647" B.K.I. (47), 1897, 510-595.

Heeres, J.E., Corpus Diplomaticum Neerlando Indicum. 7 Vol. Den Haag, 1907-1960.

Hirth, Fr. dan Rockhill, Chau-Ju-Kua: His work on the Chinese and Arab Trade in the twelfth and thirteenth centuries, entitled Chu fan-chi. St. Petersburg, 1911.

Van Hoevell, G.W.W. Baron, Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliasers, Geographisch, Ethnologisch, Politisch en Historisch Geschetst. Dordrecht, 1875.

Van Hoevell, G.W.W.C. Baron, Vocabularium van vreemde woorden voorkomende in het Ambonsch-Maleisch, benevens korte opmerkingen over het locaal-Maleische uidrukkingen en gezegden te Ambon gebruikelijk. Dordrect, 1876.

Van Hoevell, G.W.W.C. Baron, "Iets over de vijf voornaamate dialecten der Ambonsche landstaal (bahasa tanah)", B.K.I, 1877, 1-136.

Van Hoevell, G.W.W.C. Baron, "Twee zangen in de Ambonsche landstaal (bahasa tanah) verklaard door ...", T.B.G. (27) 1882, 69-89.

Huliselan, A., Kapata. Ambon 1965. Skripsi pada IKIP-Ambon, belum diterbitkan.

Insulíndia. Documentação para a História das Missões do Padroado Português do Oriente. Coligida e anotada por Arthur Basilio de Sá, Lisboa, 1958.

Jacobs, H.Th.Th., S.J., A Treatise on the Moluccas (c.1544). Probably the Preliminary Version of Antonio Galvão's Lost História das Moluccas. (1971).

Jansen, H.J., "Inlandsche Gemeentewezen" dalam Memorie van den Gouverneur der Molukken, L.N.W. van Sandick, 1926.

Jansen, H.J., "Uli's in de Molukken", dlm: Adatrechtbundels XXXVI: Borneo, Zuid-Celebes, Amboina, enz. 1933, Seri R: Ambon enz. no. 76.

Kalff, S., "Gerard Demmer", dlm: Indische Gids (28), 1, 952-968.

Kennedy, Raymond, Fieldnotes on Indonesia; Ambon-Ceram, 1949-1950. Edited by Harold C. Conklin.

Kern, H., "Pararaton"en"Nagarakertagama", Het Oud-Javaansch Lofdicht Nagarakertagama van Prapanca.s Gravenhage, 1919.

Keuning, J., "Ambonezen, Portugezen en Nederlanders", Indonesie (9), 1956, 135-168. Di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh C.P.F. Luhulima, Sejarah Ambon Sampai Akhir Abad ke tujuhbelas. Proyek Terjemahan LIPI, Jakarta, 1972.

Lapian, A.B., "Beberapa Tjatatan Djalan Dagang Maritim ke Maluku Sebelum Abad ke XVI", dlm: Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia, I, 3 (1965), 63-72.

Leupe, P.A. "Het Eiland Sarangoeni (Rosingein) der Bandagroep", B.K.I., 3/VIII (1873), 81-83.

Van Leur, J.C. Indonesian Trade and Society, Essays in Asian Social And Economic History. s'Gravenhage, 1955.

Van Leur, J.C. "Abad ke-18 Sebagai Katagori Dalam Penulisan Sejarah Indonesia?", terjemahan dari Proyek Terjemahan LIPI, kata pengantar oleh R.Z. Leirissa (1973).

Van Linschoten, Jan Huygen, Itinérario. Voyage ofte schipvaart van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592. 3 vol. Den Haag, 1955-1957.

Macgregor, I.A., "Some aspects of Portuguese Historical Writings of the Sixteenth and Seventeenth centuries on Souteast Asia", dlm: D.G.E. Hall (ed.), Historians of Southeast Asia. London, 1961, 172-199.

Marks, Harry. J., The First Contest For Singapore. V.B.G. 27, 1959.

Marta S.J., Antônio, "Informações das Molucas" Insulínda, IV,No.21.

Meilink-Roelofsz, M.A.P., Asian Trade and European Influence. The Indonesian Archipelago Between 1500 and about 1630. The Hague, 1962.

Müller-Krüger, Th., Sedjarah Geredja di Indonesia. Jakarta, 1959.

Neyens, M., "Een handschrift van Rumphius" Ambonsche Landbeschrijving" T.B.G. (61),(1922) 111-118.

Pigafetta, Antonio, Magellan's voyage around the world. The original text of the Ambrosian M.S., with translation notes, bibliography, and index by J.A. Robertson, Cleveland, 1906.

Rijali, Hikayat Tanah Hitu. mss. Cod. Ov. 8756 Universiteitsbibliotheek Leiden, Oostersche Handschriften, Legatum Wagnerianum, Transskripsi H.J. Jansen.

Van Ronkel, Ph. S., "Oud-Javaansche Aardrijkskundige namen verklaard" B.K.I. (75), 1919.

Rouffaer, G.P., "Oud-Javaansche eilandnamen in de Groote Ooost: Sergili, Seram (Ceram), Boeroe (Hutan Kadali), T.A.G. (32), 1915.

Rouffaer, G.P., Encyclopaedie Artikelen, T.B.G. (86) 1930, 191-215.

Le Roux, C.C.F.M., "De Elcano's tocht door den Timorarchipel met Magelhães schip "Victoria", Feestbundel B.K.W., 1929.

Ruinen, W. dan Tutein Nolthenius, Overzicht van de Literatuur betreffende de Molukken. 2 vol. Amsterdam 1928, 1933.

Rumphius, G.E. D'Ambonsche Land Beschrijving, mss (1687), Rijksarchief, s Gravenhage.

Schurhammer, G., Die Zeitgenössischen Quellen zur Geschichte Portugiesisch-Asiens und seiner Nachbarländer (1548-1552) zur zeit des Hl. Franz. Xaver. Leipzig, 1932.

Soedjatmoko (ed.), An Introduction to Indonesian Historiography. Ithaca, New York, 1965.

Soekanto, Sekitar Jogyakarta, 1775-1825. Jakarta, 1952.

Stapel, F.W. (ed.), Geschiedenis van Nederlandsch-Indie. 5 vol. Amsterdam, 1940.

Tiele, P.A., "De Europeers in de Maleischen Archipel", B.K.I., 1877-1878.

Tiele, P.A., Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Nederlanders in de Maleischen Archipel. 3 vol. Den Haag, 1886-1895.

Toussaint, August, History of the Indian Ocean. University of Chicago Press, 1966.

Valentijn, Fr., Oud en Nieuw Oost-indien. 2 vol. Dordrecht, 1724-1726.

Veth, F.J., "De onderhorigheden van Madjapahit", T.N.I., 1867.

Visser, M.S.C., B.J.J., Onder Portugeesch-Spaansche Vlag. De Katholieke Missie van Indonesie, 1511-1605. Amsterdam, 1925.

Wallace, Henry Russel, The Malay Archipelago, New York, 1962.

Wessels, S.J., C., De Geschiedenis der R.K. Missie in Amboina 1546-1605. Nijmegen-Utrecht, 1926.

PERPUSTAKAAN NASIONAL JAKARTA



992.4
Abd
b
ABDURRAHMAN, Paramita R.
Bunga rampai sejarah ...

TANGGAL PINDJAM	TANGGAL KEMBALI	NOMOR ANGGOTA	PARAP

992.4
Abd
b
ABDURRACHMAN, Paramita R.
Bunga rampai sejarah ...